

PRIORITAS DAN PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (PPAS) TA 2025



2025



Program prioritas dan patokan batas maksimal anggaran yang diberikan kepada Perangkat Daerah untuk setiap program sebagai acuan dalam penyusunan Rencana Kerja dan Perangkat Daerah (RKA-PD) setelah disepakati dengan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah

Pemerintah Kabupaten Bintan

<https://bintankab.go.id/>

DAFTAR ISI

BAB I PENDAHULUAN.....	- 1 -
1.1. Latar Belakang	- 1 -
1.2. Tujuan Penyusunan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara	- 2 -
1.3. Dasar Penyusunan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara	- 3 -
BAB II RENCANA PENERIMAAN DAERAH.....	- 7 -
2.1 Rencana Target Pendapatan Asli Daerah	- 8 -
2.2 Rencana Target Pendapatan Transfer	- 9 -
2.3 Rencana Target Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah	- 10 -
2.4 Rencana Target Penerimaan Pembiayaan	- 10 -
BAB III PRIORITAS BELANJA DAERA.....	- 13 -
BAB IV PLAFON ANGGARAN SEMENTARA BERDASARKAN URUSAN	- 63 -
4.1 Plafon Anggaran Sementara Berdasarkan Urusan Pemerintahan .-	- 63 -
4.2 Plafon Anggaran Sementara Berdasarkan Program Kegiatan.....	- 73 -
4.3 Plafon Anggaran Sementara untuk Belanja Hibah, Bantuan Sosial, Belanja Tidak Terduga dan Belanja Transfer	- 153 -
BAB V RENCANA PEMBIAYAAN DAERAH.....	- 161 -
BAB VI PENUTUP.....	- 163 -

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Tahun Anggaran 2025 merupakan tahapan lanjutan dari penyusunan Kebijakan Umum Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2025, sebagaimana tertuang dalam pasal 89 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah bahwa Kepala Daerah menyusun Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS) berdasarkan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) dengan mengacu pada pedoman penyusunan APBD. Penyusunan dokumen APBD berpedoman pada dokumen KUA dan PPAS yang disusun berdasarkan pada Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD). Hal tersebut sejalan dengan pasal 265 ayat (3) Undang undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah yang mengatur bahwa dalam penyusunan Rancangan KUA dan Rancangan PPAS PPAS, Kepala Daerah berpedoman pada RKPD.

Sesuai dengan ketentuan dalam pasal 89 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS) disusun dengan tahapan sebagai berikut :

1. Menentukan skala prioritas pembangunan daerah;
2. Menentukan prioritas Program dan Kegiatan untuk masing-masing urusan yang disinkronkan dengan prioritas dan program nasional yang tercantum dalam rencana kerja Pemerintah Pusat setiap tahun; dan
3. Menyusun capaian kinerja, sasaran dan plafon anggaran sementara untuk masing-masing program dan kegiatan.

Berdasarkan Kebijakan Umum APBD Tahun 2025 yang telah disepakati antara eksekutif dan legislatif, maka langkah berikutnya dilanjutkan pembahasan Rancangan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara APBD Tahun 2025. Rancangan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara APBD Tahun 2025 ini disusun dengan mencantumkan:

1. Sinergisitas program Pemerintah Kabupaten Bintan dengan prioritas pembangunan nasional;
2. Sinkronisasi kebijakan Pemerintah Kabupaten Bintan dengan prioritas pembangunan provinsi;
3. Prioritas Pemerintah Kabupaten Bintan sebagaimana yang tercantum dalam RKPD Kabupaten Bintan Tahun 2025.

Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara merupakan kumpulan program prioritas dan batas maksimal anggaran yang diberikan kepada Perangkat Daerah untuk setiap program dan kegiatan yang digunakan sebagai acuan dalam penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Perangkat Daerah. Sebagai bagian dari dokumen penganggaran tahun 2025, dokumen PPAS ini menjadi gambaran umum dari kebutuhan akan ketersediaan dana untuk belanja daerah yang diperoleh dari pendapatan daerah yang tidak terlepas dari prospek perekonomian Kabupaten Bintan ke depan. Ketersediaan dana yang dirumuskan dalam APBD, nantinya akan digunakan untuk mendukung jalannya fungsi pemerintahan dan pelayanan kepada masyarakat sebagaimana yang selama ini terselenggara serta proses perbaikan stabilitas ekonomi.

1.2. Tujuan Penyusunan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara

Penentuan prioritas penting oleh karena untuk tetap fokus kepada capaian program pembangunan, pengawasan penggunaan sumber daya agar efisien, efektif dan optimal serta membangun komunikasi mengenai program/kegiatan antar stakeholder yang menghubungkan antara kebijakan dan tujuan ekonomi sosial pemerintah.

Tujuan penyusunan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Tahun Anggaran 2025 adalah :

1. Sebagai pedoman dan gambaran tentang kemampuan keuangan Pemerintah Daerah baik dari sisi Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan yang dijabarkan dalam rencana Pendapatan, rencana Belanja program dan kegiatan yang dilaksanakan oleh Perangkat Daerah berdasarkan tugas pokok dan fungsi serta rencana Pembiayaan.
2. Sebagai dasar untuk sinkronisasi terhadap program, kegiatan dan sub kegiatan dalam pembangunan Kabupaten Bintan Tahun Anggaran 2025.
3. Sebagai acuan bagi seluruh Perangkat Daerah dalam menyusun Rencana Kerja dan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (RKA-SKPD) yang akan dituangkan kedalam Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2025.
4. Sebagai landasan penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) Tahun Anggaran 2025.

1.3. Dasar Penyusunan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara

Sebagai dasar dalam penyusunan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Kabupaten Bintan adalah sebagai berikut :

1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten Dalam Lingkup Daerah Kabupaten Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3896);
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor);
3. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1997 tentang tentang Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3688) ;

4. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
5. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
6. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
7. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundangan - undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4389);
8. Undang - Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
9. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4421);
10. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
11. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
12. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);

13. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pembinaan dan Pengawasan atas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4090);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2001 tentang Pajak Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4138);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 202, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4139);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota DPRD (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4416) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2005 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 94, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4540);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4502);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4503);
19. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2005 tentang Pinjaman Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4574);
20. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4575);
21. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2010 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran

- Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 110, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5155);
22. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan penerapan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4585);
 23. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
 24. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
 25. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Hibah Daerah;
 26. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2014 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa;
 27. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
 28. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
 29. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
 30. Peraturan Daerah Kabupaten Bintan Nomor 5 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Bintan Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Bintan Tahun 2015 Nomor 5);
 31. Peraturan Bupati Nomor 15 Tahun 2024 tentang RKPD APBD Tahun Anggaran 2025.

BAB II

RENCANA PENERIMAAN DAERAH

Dalam ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah di jelaskan bahwa Penerimaan Daerah adalah uang yang masuk ke kas Daerah. Penerimaan Daerah merupakan rencana yang terukur secara rasional yang dapat dicapai untuk setiap sumber Penerimaan Daerah dan berdasarkan pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pendapatan Daerah terdiri atas 3 (tiga) kelompok yaitu (a) Pendapatan Asli Daerah (PAD) (b) Pendapatan Transfer dan (c) Lain-Lain Pendapatan Daerah yang Sah. Pendapatan Asli Daerah merupakan cerminan kemampuan dan potensi daerah sehingga besarnya penerimaan PAD dapat mempengaruhi kualitas Otonomi Daerah. Semakin tinggi kualitas Otonomi Daerah, maka ketergantungan dengan pemerintah pusat semakin berkurang.

Pendapatan Asli Daerah (PAD) merupakan pendapatan yang diperoleh daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan meliputi Pajak Daerah, Retribusi Daerah, Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan dan Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah.

Pendapatan Transfer merupakan dana yang bersumber dari Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah Lainnya yang digunakan untuk mendukung pelaksanaan kewenangan Pemerintahan Daerah dalam mencapai tujuan otonomi daerah, utamanya peningkatan pelayanan dan kesejahteraan masyarakat.

Lain-Lain Pendapatan Daerah yang Sah merupakan pendapatan daerah selain Pendapatan Asli Daerah dan Pendapatan Transfer yang meliputi Pendapatan Hibah, Dana Darurat dan Lain-Lain Pendapatan Sesuai Dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan.

Penyusunan proyeksi pendapatan daerah Kabupaten Bintan tahun 2025 mempertimbangkan kondisi makro ekonomi secara

nasional, Provinsi Kepulauan Riau dan Kabupaten Bintan, terutama pada aspek sosial, ekonomi dan kesejahteraan masyarakat. Berikut adalah uraian tentang rincian Pendapatan dan Penerimaan Pembiayaan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Bintan Tahun Anggaran 2025.

Penerimaan Daerah terdiri atas Pendapatan Daerah dan Penerimaan Pembiayaan Daerah. Jumlah pendapatan dan penerimaan pembiayaan yang direncanakan merupakan jumlah perkiraan yang terukur secara rasional yang diharapkan dapat dicapai untuk setiap sumber pendapatan maupun penerimaan pembiayaan. Komposisi pendapatan daerah tahun 2025 dengan mempertimbangkan realisasi tahun 2023, target tahun 2024 dan realisasi pendapatan sampai dengan triwulan II tahun 2024. Rencana penerimaan daerah tahun anggaran 2025 diproyeksikan sebesar Rp.1.266.632.139.531 yang bersumber dari Pendapatan daerah sebesar Rp. 1.214.205.692.531,- dan Penerimaan Pembiayaan Daerah sebesar Rp.52.426.447.000,-, untuk rinciannya dijabarkan sebagai berikut.

2.1 Rencana Target Pendapatan Asli Daerah

Rencana Penerimaan dari Pendapatan Asli Daerah terdiri dari Pajak Daerah, Retribusi Daerah, Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan dan Lain-lain PAD yang Sah. Pada Tahun Anggaran 2025 diproyeksikan sebesar Rp.360.634.807.613,- apabila dibandingkan dengan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Tahun Anggaran 2024 sebesar Rp.325.170.516.319,- maka mengalami peningkatan sebesar 10,11 persen atau sebesar Rp. 35.464.291.294,-. Komponen Pendapatan Asli Daerah (PAD) pada Tahun Anggaran 2025 yang diproyeksikan mengalami peningkatan dibandingkan dengan Tahun Anggaran 2024 adalah bersumber dari Pajak Daerah, Retribusi Daerah sementara yang mengalami penurunan dibandingkan proyeksi pada Tahun Anggaran 2024, Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan dan Lain-lain PAD yang Sah. Rincian untuk masing-masing sumber Pendapatan Asli Daerah, sebagai berikut:

- 1) Estimasi Penerimaan Pajak Daerah pada APBD Tahun

Anggaran 2025 diproyeksikan sebesar Rp 299.619.346.301,- jika dibandingkan dengan penerimaan pada APBD Murni tahun 2024 yang sebesar Rp. 271.015.989.000,- mengalami peningkatan sebesar Rp. 28.603.357.301,- atau 10,55 persen. Peningkatan tersebut akibat munculnya objek pajak baru yaitu Opsen PKB dan Opsen BBNKB.

- 2) Estimasi Penerimaan Retribusi Daerah pada APBD Tahun Anggaran 2025 diproyeksikan sebesar Rp. 47.248.027.212,- jika dibandingkan dengan rencana penerimaan pada APBD Murni tahun 2024 sebesar Rp.10.682.412.000,- mengalami peningkatan sebesar Rp.36.565.615.212,- atau 342,30 persen. Hal ini disebabkan karena perpindahan pencatatan Pendapatan BLUD yang sebelumnya dicatat pada Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah berpindah ke Retribusi Daerah.
- 3) Estimasi Penerimaan Hasil Pengelolaan Kekayaan Milik Daerah yang dipisahkan penerimaan pada APBD Tahun Anggaran 2025 diproyeksikan sebesar Rp.9.200.000.000,- , jika dibandingkan dengan rencana penerimaan pada APBD Murni tahun 2024 sebesar Rp.10.477.231.219,- mengalami penurunan sebesar Rp.1.277.231.219,- atau 12,19 persen.
- 4) Sedangkan Estimasi penerimaan Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah pada APBD Tahun Anggaran 2025 diproyeksikan sebesar Rp.4,567,434,100.00,- jika dibandingkan dengan rencana penerimaan pada APBD Murni tahun 2024 sebesar Rp.32.994.884.100,- mengalami penurunan sebesar Rp.28.427.450.000,- atau 86,16 persen.

2.2 Rencana Target Pendapatan Transfer

Penerimaan dari Pendapatan transfer terdiri dari Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat dan Pendapatan Transfer Antar Daerah. Penerimaan ini merupakan kelompok sumber pembiayaan pelaksanaan desentralisasi yang alokasinya tidak dapat dipisahkan satu dengan yang lain, mengingat penerimaannya saling mengisi dan melengkapi.

Pendapatan transfer pada Tahun Anggaran 2025 diproyeksikan sebesar Rp.849.507.994.860,- apabila dibandingkan dengan Pendapatan transfer Tahun Anggaran 2024 sebesar Rp.853.582.739.295,- maka mengalami penurunan sebesar Rp.4.074.744.435,- atau 0,48 persen. Kelompok Penerimaan dari Pendapatan transfer yang mengalami peningkatan adalah DAU Tambahan Dukungan Pendanaan atas Kebijakan Penggajian Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja, diproyeksikan sesuai dengan formasi rencana penerimaan P3K. Sedangkan kelompok pendapatan yang mengalami penurunan yaitu Pendapatan Transfer Antar Daerah / Pendapatan bagi hasil pajak dari Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau akibat pemberlakuan Opsen PKB dan Opsen BBNKB hal ini sesuai dengan ketentuan pasal 191 Undang-Undang nomor 1 tahun 2022 disebutkan bahwa ketentuan mengenai PKB, BBNKB, Pajak MBLB, Opsen PKB, Opsen BBNKB, dan Opsen Pajak MBLB sebagaimana diatur dalam Undang-Undang ini mulai berlaku 3 (tiga) tahun terhitung sejak tanggal diundangkannya Undang-Undang ini, dimana Undang-Undang nomor 1 tahun 2022 tersebut diundangkan pada tanggal 5 Januari 2022.

2.3 Rencana Target Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah

Penerimaan Lain-lain Pendapatan Daerah yang sah terdiri dari : hibah, dana darurat, dan/atau, lain-lain pendapatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Proyeksi Lain-lain Pendapatan Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan yaitu Pendapatan dana kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional pada Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama (FKTP) milik Pemerintah Daerah tahun 2025 diproyeksikan Rp.4.062.890.058,-, mengalami peningkatan sebesar Rp.891.632.558,- apabila dibandingkan Tahun Anggaran 2024 sebesar Rp. 3.171.257.500,- atau 28,18 persen.

2.4 Rencana Target Penerimaan Pembiayaan

Penerimaan pembiayaan pada Tahun Anggaran 2025 diproyeksikan sebesar Rp.52.426.447.000,- yang bersumber dari Sisa

Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya (SiLPA). Target pendapatan dan penerimaan pembiayaan daerah pada APBD Tahun Anggaran 2025 sebagaimana tabel berikut :

Tabel 4.1
RENCANA PENERIMAAN DAERAH
Tahun Anggaran 2025

KODE	PENERIMAAN DAERAH	ALOKASI ANGGARAN	DASAR HUKUM
1	2	3	4
4	PENDAPATAN DAERAH	1.214.205.692.531	
4.1.	PENDAPATAN ASLI DAERAH	360.634.807.613	
4.1.01.	Pajak Daerah	299.619.346.301	Peraturan Daerah Kabupaten Bintan Nomor 1 Tahun 2024 Tentang Pajak dan Retribusi Daerah
4.1.02.	Retribusi Daerah	47.248.027.212	Peraturan Daerah Kabupaten Bintan Nomor 1 Tahun 2024 Tentang Pajak dan Retribusi Daerah, Proyeksi Pendapatan BLUD Tahun 2025
4.1.03.	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan	9.200.000.000	Hasil RUPS Deviden Bank Riau Kepri dan BPR Bintan
4.1.04.	Lain-Lain PAD Yang Sah	4.567.434.100	Proyeksi Giro, Deposito Tahun 2025
4.2.	PENDAPATAN TRANSFER	849.507.994.860	
4.2.01.	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat	812.258.134.390	Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 130 Tahun 2022
4.2.02.	Pendapatan Transfer Antar Daerah	37.249.860.470	Peraturan Gubernur Provinsi Kepri
4.3.	LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH	4.062.890.058	
4.3.01.	Pendapatan Hibah	-	
4.3.02.	Dana Darurat	-	

KODE	PENERIMAAN DAERAH	ALOKASI ANGGARAN	DASAR HUKUM
1	2	3	4
4.3.03.	Lain-Lain Pendapatan Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan	4.062.890.058	Proyeksi Kapitasi JKN Tahun 2025
JUMLAH PENDAPATAN DAERAH		1.214.205.692.531	
6	PEMBIAYAAN DAERAH		
6.1	PENERIMAAN PEMBIAYAAN	52.426.447.000	
6.1.01	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya	52.426.447.000	
JUMLAH PEMBIAYAAN DAERAH		52.426.447.000	
JUMLAH PENERIMAAN DAERAH		1.266.632.139.531	

BAB III

PRIORITAS BELANJA DAERAH

Prioritas pembangunan daerah merupakan sekumpulan program prioritas yang secara khusus berhubungan dengan capaian sasaran pembangunan daerah, tingkat kemendesakan dan daya ungkit bagi peningkatan kinerja pembangunan daerah. Prioritas pembangunan juga dapat dikategorikan sebagai operasional dari tujuan strategis daerah berdasarkan pada urgensi daya ungkit pada kesejahteraan dan cakupan pembangunan secara keseluruhan.

Tujuan dan sasaran pembangunan Kabupaten Bintan pada RKPD Tahun 2025 merupakan pelaksanaan tahun ke empat RPJMD Tahun 2021-2024. Evaluasi dan rekomendasi dari RKPD tahun sebelumnya dijadikan sebagai masukan untuk perumusan program pembangunan Kabupaten Bintan tahun 2025. Perencanaan arah pembangunan melibatkan permasalahan dan isu guna mewujudkan pembangunan yang tepat sasaran.

RPJMD Kabupaten Bintan Tahun 2021-2026 menjadi acuan perumusan program prioritas pembangunan dan arah kebijakan pada tahun 2025. Selain itu, perumusan prioritas pembangunan Kabupaten Bintan juga menggunakan kajian hasil evaluasi RKPD tahun sebelumnya, identifikasi permasalahan pada tingkatan daerah dan nasional, kerangka ekonomi makro dan pendanaan. Adapun pedoman dalam perumusan RKPD Kabupaten Bintan Tahun 2025 terdiri dari:

1. Prioritas pembangunan nasional tahun 2025 yang termuat dalam Rencana Kerja Pemerintah (RKP).
2. Prioritas pembangunan daerah Provinsi Kepulauan Riau tahun 2025 yang termuat pada RKPD.
3. Program pembangunan RPJMD Kabupaten Bintan Tahun 2021-2026 pada tahun pelaksanaan 2025.

4. Hasil perumusan permasalahan dan isu yang terjadi pada Kabupaten Bintan pada tahun sebelumnya.

RKPD Kabupaten Bintan Tahun 2025 merupakan bagian pelaksanaan RPJMD 2021- 2026 yang tentunya tujuan dan sasarannya selaras dengan isi RPJMD.

Tujuan pembangunan Kabupaten Bintan pada RPJMD memiliki visi yaitu:
“Bintan Rumah Kita Yang Berkeadilan, Berdaya Saing, Dan Inovatif Menuju Masyarakat Yang Sejahtera”

Pelaksanaan RKPD Tahun 2025 sudah semestinya mencerminkan visi tersebut guna mencapai keberhasilan targer pembangunan pada akhir tahun perencanaan. Visi RPJMD Kabupaten Bintan terdapat lima kunci yaitu Rumah Kita, Berkeadilan, Berdaya Saing, Inovatif dan, Sejahtera. Unsur visi tersebut memiliki makna sebagai berikut:

1. Rumah Kita

Yang dimaksud dengan rumah kita adalah Kabupaten Bintan yang memiliki SDM, potensi lokal dalam rangka mencapai tujuan pembangunan Kabupaten Bintan.

2. Berkeadilan

Berkeadilan memiliki kata dasar adil menurut kamus bahasa Indonesia adalah sama berat; tidak berat sebelah; tidak memihak. Hal ini dapat diartikan bahwa pembangunan di Kabupaten Bintan dilaksanakan dengan tidak berat sebelah, merata di seluruh wilayah. Pembangunan akan dilaksanakan disemua wilayah berdasarkan permasalahan dan potensi yang dimiliki oleh wilayah tersebut. Selain itu pembangunan di Kabupaten Bintan juga adil bagi semua penduduknya tidak membedakan laki perempuan, tua muda, anak-anak.

3. Berdaya Saing

Berdaya saing berdasarkan pengertian kamus bahasa Indonesia adalah kemampuan makhluk hidup untuk dapat tumbuh

(berkembang) secara normal di antara makhluk hidup lainnya sebagai pesaing dalam satu habitat (dalam satu bidang usaha dan sebagainya). Daya saing merupakan salah satu kriteria untuk menentukan keberhasilan dan pencapaian sebuah tujuan yang lebih baik oleh suatu daerah dalam peningkatan pendapatan dan pertumbuhan ekonomi. Daya saing diidentifikasi dengan masalah produktifitas, yakni dengan melihat tingkat output yang dihasilkan untuk setiap input yang digunakan. Meningkatnya produktifitas ini disebabkan oleh peningkatan jumlah input material dan SDM, peningkatan kualitas input yang digunakan dan peningkatan teknologi (Porter, 1990 dalam Abdullah, 2002). Berdaya saing ini meliputi kondisi perekonomian dan SDM. Pembangunan lima tahun kedepan dalam mewujudkan berdaya saing diharapkan mampu menjawab indek daya saing daerah.

4. Inovatif

Inovatif menurut kamus bahasa Indonesia adalah Bersifat memperkenalkan sesuatu yang baru dan Bersifat pembaruan (kreasi baru). Secara etimologi, pengertian inovatif adalah usaha seseorang dengan mendayagunakan pemikiran, kemampuan imajinasi, berbagai stimulan, dan individu yang mengelilinginya dalam menghasilkan sesuatu yang baru untuk dirinya sendiri atau orang lain. Setiap masyarakat di Kabupaten Bintan bisa menciptakan sesuatu yang baru untuk menyelesaikan permasalahan yang dihadapi. Pembangunan yang akan dilaksanakan dalam rangka menjawab tantangan kedepan diperlukan inovasi inovasi dalam mencapai tujuan yang ditetapkan.

5. Sejahtera

Sejahtera menurut kamus bahasa Indonesia adalah aman sentosa dan makmur; selamat (terlepas dari segala macam gangguan); Dalam istilah umum,sejahtera menunjuk keadaan yang baik, kondisi manusia di mana orang-orangnya dalam keadaan makmur, dalam keadaan sehat dan damai. Dalam ekonomi, sejahtera dihubungkan dengan keuntungan benda. Sejahtera memiliki arti khusus resmi

atau teknikal (lihat ekonomi kesejahteraan), seperti dalam istilah fungsi kesejahteraan sosial. Dalam kebijakan sosial, kesejahteraan sosial menunjuk ke jangkauan pelayanan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat.

Visi RPJMD Tahun 2021-2026 Kabupaten Bintan kemudian dijabarkan melalui lima misi pembangunan jangka menengah yang memiliki tujuan dan sasaran dalam masing-masing rumusan misi. Berikut merupakan penjelasan mengenai misi pembangunan Kabupaten Bintan Tahun 2021-2026.

1. Misi 1 “Memperkuat Pertumbuhan Ekonomi Berdasarkan Potensi Lokal Yang Berdaya Saing” yang bertujuan untuk meningkatkan kontribusi sektor ekonomi unggulan dalam memperkuat pertumbuhan ekonomi dengan sasaran:
 - a. Meningkatnya kontribusi pertanian dalam pertumbuhan ekonomi.
 - b. Meningkatnya kontribusi industri pengolahan dalam pertumbuhan ekonomi.
 - c. Meningkatnya sektor pariwisata dan ekonomi kreatif dalam memperkuat pertumbuhan ekonomi.
 - d. Meningkatnya kualitas dan kuantitas investasi.
2. Misi 2 “Meningkatkan Kualitas Sumberdaya Manusia Yang Berdaya Saing Serta Memperkuat Nilai-Nilai Religius Dan Budaya Melayu” dengan tujuan 1 yaitu untuk meningkatkan masyarakat yang cerdas, sehat, berdaya saing. Adapun sasarannya yaitu:
 - a. Meningkatnya masyarakat yang berpendidikan.
 - b. Meningkatnya derajat kesehatan masyarakat.
 - c. Meningkatnya kesetaraan dan keadilan genderTujuan 2 dari misi 2 adalah untuk meningkatkan nilai-nilai budaya melayu dalam pembangunan dengan sasaran:
 - a. Meningkatnya pemajuan dan pelestarian budaya.
 - b. Meningkatnya budaya literasi.
3. Misi 3 “Meningkatkan Kesejahteraan Sosial Dan Pemberdayaan Masyarakat” yang memiliki tujuan untuk meningkatkan kualitas

- penanganan kesejahteraan dan kemandirian masyarakat dengan sasaran:
- a. Meningkatnya kualitas penanganan kesejahteraan
 - b. Meningkatnya penanganan pengangguran.
 - c. Berkurangnya kesenjangan pendapatan penduduk.
 - d. Meningkatnya keamanan dan ketertiban masyarakat.
4. Misi 4 “Mempercepat Pertumbuhan Dan Pemerataan Pembangunan Infrastruktur Berbasis Lingkungan Dan Tata Ruang” yang bertujuan untuk meningkatkan kalitas infrastruktur disemua wilayah berbasis lingkungan hidup dan tata ruang dengan sasaran:
- a. Meningkatnya konektivitas antar wilayah.
 - b. Meningkatnya capaian infrastruktur dasar.
 - c. Meningkatnya kualitas lingkungan hidup.
 - d. Meningkatnya pemanfaatan tata ruang sesuai RTRW.
 - e. Meningkatnya pengurangan resiko bencana.
5. Misi 5 “Meningkatkan Reformasi Birokrasi Dan Pelayanan Publik” yang memiliki tujuan untuk meningkatkan tata kelola pemerintah yang baik dan bersih dengan sasaran:
- a. Meningkatnya Birokrasi yang bersih dan akuntabel.
 - b. Meningkatnya Birokrasi yang kapabel.
 - c. Meningkatnya pelayanan publik yang prima.
 - d. Meningkatnya kualitas inovasi daerah.

Prioritas dan sasaran pembangunan Kabupaten Bintan Tahun 2025 merupakan pelaksanaan tahun ke empat RPJMD Tahun 2021-2026 dengan arah kebijakan yaitu “Peningkatan Kualitas Tata Kelola Pemerintah Yang Bersih Dan Mempermudah Akses Pelayanan Publik Dalam Era Digitalisasi”, Arah kebijakan RKPD Tahun 2025 tersebut menitikberatkan pada tata kelola pemerintah, kemudahan pelayanan publik, dan penguatan digitalisasi sebagai sarana pelayanan publik. Namun, untuk sinkronisasi pada kebijakan yang berada diatasnya yaitu prioritas dan sasaran pembangunan nasional dan Provinsi Kepulauan Riau, dilakukan penyesuaian tema yang bertujuan untuk

mewujudkan keselarasan prioritas dan sasaran pembangunan pada Kabupaten Bintan.

**Tema prioritas dan sasaran pembangunan
Kabupaten Bintan pada tahun 2025 yaitu:
“Optimalisasi Potensi Sumber Daya Alam Secara Berkelanjutan
Dalam Akselerasi Peningkatan Ekonomi Kerakyatan Ditunjang
Oleh Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan”**

Tema pembangunan tersebut berfokus pada optimalisasi potensi sumber daya alam daerah, penguatan ekonomi kerakyatan, dan peningkatan kualitas tata kelola pemerintah yang bertujuan untuk meningkatkan perekonomian masyarakat yang berbasis potensi daerah, dan meningkatkan kemudahan pelayanan publik bagi masyarakat Kabupaten Bintan.

Berdasarkan tema prioritas dan sasaran pembangunan Provinsi Kepulauan Riau tahun 2025 dan tema prioritas dan sasaran pembangunan Kabupaten Bintan tahun 2025, serta dengan memahami dinamika permasalahan dan isu pembangunan yang terdapat pada Kabupaten Bintan maka disusun prioritas pembangunan 2025 yang terdiri:

1. Pemantapan Ekonomi Daerah yang Inklusif dan Berdaya Saing berbasis Potensi Wilayah;
2. Penguatan Daya Saing Sumber Daya Manusia dan Implementasi Nilai-nilai Budaya Dalam Kehidupan Bermasyarakat;
3. Pemerataan Infrastruktur Wilayah, Pengelolaan Lingkungan Hidup Berkelanjutan, dan Ketahanan Bencana;
4. Pemantapan Tata Kelola Reformasi Birokrasi yang Adaptif dan Kolaboratif.

Strategi untuk mencapai tujuan prioritas pembangunan Kabupaten Bintan tahun 2025 pada tiap program prioritas dan sasaran pembangunan dilakukan melalui fokus arah kebijakan pembangunan daerah sesuai RPJMD Tahun 2021-2025 sebagai berikut:

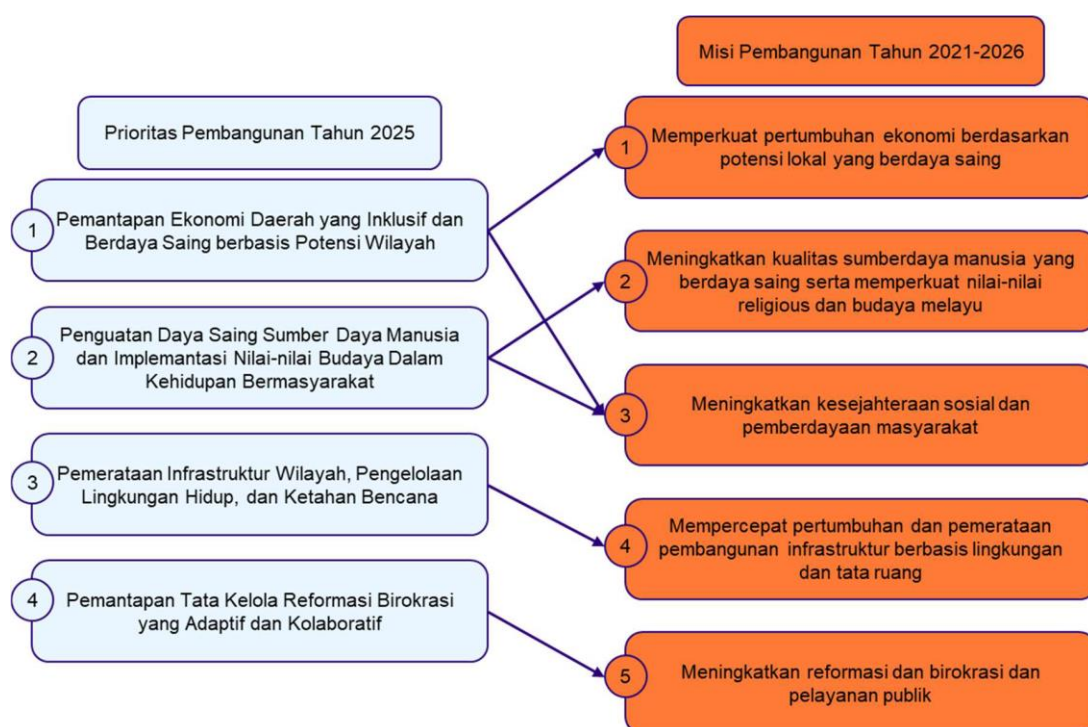
1. Program prioritas pembangunan 1, Pemantapan Ekonomi Daerah yang Inklusif dan Berdaya Saing berbasis Potensi Wilayah;
 - a. Peningkatan pembangunan pertanian difokuskan pada peningkatan kompetensi petani, peningkatan ketersediaan sarana dan prasarana pertanian.
 - b. Peningkatan ketahanan pangan difokuskan pada peningkatan ketersediaan pangan dan cadangan pangan.
 - c. Pembangunan perikanan dan kelautan difokuskan pada peningkatan sarana dan prasarana perikanan dan kelautan serta peningkatan kualitas produk hasil perikanan.
 - d. Fokus pembangunan industri adalah peningkatan kualitas pengelolaan kawasan industri dan pengembangan kawasan industri.
 - e. Pembangunan perdagangan di fokuskan pada peningkatan kualitas sarana perdagangan dan pendampingan pengembangan produk unggulan untuk ekspor.
 - f. Fokus pembangunan pariwisata adalah pengembangan desa wisata dan promosi wisata untuk wisatawan nusantara.
 - g. Fokus pengembangan ekonomi kreatif adalah penyusunan roadmap pengembangan sektor ekonomi kreatif.
 - h. Pembangunan koperasi dan UMKM difokuskan pada peningkatan kapasitas koperasi sebagai sumber permodalan dalam pengembangan Usaha mikro, dan pengembangan usaha mikro menjadi usaha kecil.
2. Program prioritas pembangunan 2, Penguatan Daya Saing Sumber Daya Manusia dan Implementasi Nilai-nilai Budaya Dalam Kehidupan Bermasyarakat;
 - a. Peningkatan kualitas pendidikan difokuskan pada pencapaian standar pelayanan minimal pendidikan, SNP dan SDGs.
 - b. Pembangunan kesehatan masyarakat difokuskan pada peningkatan promosi dan preventif serta pencapaian SPM bidang kesehatan.

- c. Pengendalian penduduk dan keluarga berencana difokuskan pada pengendalian usia perkawinan dan penggunaan alat kontrasepsi jangka panjang.
 - d. Fokus pembangunan pemuda dan olahraga adalah peningkatan prestasi pemuda dan olahraga.
 - e. Pembangunan kebudayaan difokuskan pada pelestarian cagar budaya dan kesenian tradisional melayu.
 - f. Peningkatan budaya literasi difokuskan pada peningkatan peran perpustakaan dalam pengembangan budaya literasi.
 - g. Pembangunan desa dan pemberdayaan masyarakat difokuskan pada pengembangan dan kemandirian desa serta peningkatan pembangunan kelurahan.
 - h. Pembangunan pemberdayaan perempuan dan perlindungan difokuskan pada peningkatan kesetaraan dan perlindungan perempuan dan anak.
 - i. Penurunan pengangguran difokuskan pada peningkatan kompetensi, sertifikasi, kapasitas tenaga kerja sesuai dengan pangsa pasar.
3. Program prioritas pembangunan 3, Pemerataan Infrastruktur Wilayah, Pengelolaan Lingkungan Hidup Berkelanjutan, dan Ketahanan Bencana;
- a. Peningkatan indek konektivitas difokuskan pada peningkatan kualitas jalan dan angkutan.
 - b. Peningkatan cakupan universal akses difokuskan pada pemenuhan akses air minum baik PDAM maupun PAMSIMAS serta akses sanitasi yang difokuskan pada penanganan limbah domestik.
 - c. Penanganan kumuh difokuskan pada penanganan kawasan kumuh sesuai dengan SK Bupati dengan membangun rumah layak huni, penguatan KOTAKU, penanganan perumahan sesuai dengan SPM.
 - d. Peningkatan kualitas lingkungan hidup difokuskan pada peningkatan kualitas udara, air tutupan lahan dan pengelolaan serta pengurangan sampah.

- e. Kesesuaian pemanfaatan tata ruang difokuskan pada peningkatan pemahaman masyarakat, pengusaha tentang pola ruang dan struktur ruang.
 - f. Peningkatan penanganan bencana difokuskan pada peningkatan kesiapsiagaan bencana mitigasi bencana dan sarana dan prasarana penanganan bencana dan kebakaran sesuai dengan standar pelayanan minimal.
4. Program prioritas pembangunan 4, Pemantapan Tata Kelola Reformasi Birokrasi yang Adaptif dan Kolaboratif.
- a. Peningkatan nilai investasi difokuskan pada peningkatan kualitas pelayanan perijinan yang mudah diakses oleh investor.
 - b. Peningkatan penanganan PPKS difokuskan pada penanganan anak terlantar, usia lanjut terlantar disabilitas terlantar, gelandangan dan penanganan bencana sebagaimana tertulis dalam Standar pelayanan minimal.
 - c. Pencegahan konflik sosial difokuskan pada peningkatan kerukuan antar umat beragama dan tolerasi beragama.
 - d. Peningkatan kenyamanan ketenteraman dan perlindungan masyarakat difokuskan pada penegakan perda sesuai Standar pelayanan minimal.
 - e. Peningkatan kualitas perencanaan difokuskan pada kesesuaian perencanaan dan penganggaran, peningkatan partisipasi masyarakat dalam perencanaan.
 - f. Peningkatan kualitas pelayanan sekretariat daerah difokuskan pada kualitas pelaporan dalam pelaksanaan reformasi birokrasi, peningkatan kualitas pengadaan barang dan jasa, penguatan BUMD dan BLUD, peningkatan kualitas produk hum, peningkatan bimbingan kesejahteraan masyarakat dan agama, penataan kelembagaan.
 - g. Peningkatan kualitas pengelolaan keuangan difokuskan pada peningkatan kapasitas fiskal daerah.
 - h. h. Peningkatan kualitas pengawasan difokuskan pada kapasitas APIP dan maturitas SPIP.

- i. Peningkatan pambangunan berbasis elektronik difokuskan pada implementasi SPBE di Perangkat daerah, peningkatan kualitas satu data, kualitas penanganan arsip berbasis elektronik dan kemandirian informasi pemerintah.
- j. j. Peningkatan kualitas ASN difokuskan pada pelaksanaan sistem merit.
- k. Peningkatan pelayanan publik difokuskan pada peningkatan kualitas sarana dan prasarana pelayanan publik dalam mencapai kemudahan akses pelayanan.
- l. Peningkatan Penelitian dan kelitbangan inovasi difokuskan pada pengembangan inovasi daerah dan teknologi.

Prioritas dan sasaran pembangunan Kabupaten Bintan tahun 2025 perlu ditinjau dengan kesesuaian misi pada RPJMD Tahun 2021-2026 guna memastikan bahwa prioritas pembangunan pada tahun 2025 sesuai dengan upaya pencapaian misi Kabupaten Bintan. Berikut merupakan keterkaitan kesesuaian prioritas pembangunan tahun 2025 dengan misi RPJMD Kabupaten Bintan Tahun 2021-2026.



Gambar IV.1 Keseuaian Program Prioritas Pembangunan Tahun 2025 dengan Misi Pembangunan RPJMD Kab. Bintan Tahun 2021-2026

Adapun sasaran dan target capaian visi misi pembangunan Kabupaten Bintan Tahun 2025 yang harus dicapai sebagai berikut:

Tabel III-1 Sasaran dan Target Pembangunan Kabupaten Bintan Tahun 2025

No	Misi/Tujuan	Sasaran	Indikator Tujuan/Sasaran	Satuan	Target 2025
Misi 1 Memperkuat Pertumbuhan Ekonomi Berdasarkan Potensi Lokal Yang Berdaya Saing					
1	Meningkatkan Kontribusi		Pertumbuhan Ekonomi	%	4±2
2	Sektor Ekonomi Unggulan Dalam Memperkuat Pertumbuhan Ekonomi	Meningkatnya Kontribusi Pertanian Dalam Pertumbuhan Ekonomi	Pertumbuhan Kontribusi Pertanian, Kehutanan Dan Perikanan Dalam PDRB	%	8,3
3			Persentase Pertumbuhan PDRB Sektor Perindustrian	%	39,6
4		Meningkatnya Sektor Pariwisata Dan	Pertumbuhan Pendapatan Pariwisata	%	3,5
5		Ekonomi Kreatif Dalam Memperkuat Pertumbuhan Ekonomi	Pertumbuhan Kontribusi Perdagangan Besar Dan Eceran Dalam PDRB	%	0,94
6		Meningkatnya Investasi	Pertumbuhan Realisasi Investasi	%	1,5
Misi 2 Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia Yang Berdaya Saing Serta Memperkuat Nilai-Nilai Religius Dan Budaya Melayu					
7	Meningkatkan Masyarakat		Indeks Pembangunan Manusia	Indeks	75,2
8	Yang Cerdas, Sehat Dan Berdaya Saing	Meningkatnya Masyarakat Yang Berpendidikan	Harapan Lama Sekolah	Tahun	13,7
9			Rata-Rata Lama Sekolah	Tahun	8,9

No	Misi/Tujuan	Sasaran	Indikator Tujuan/Sasaran	Satuan	Target 2025
10			Usia Harapan Hidup	Tahun	70,88
11	Meningkatnya Nilai Nilai Budaya Melayu	Meningkatnya Kesetaraan Dan Keadilan Gender	Indeks Pembangunan Gender (IPG)	Indeks	93,5
12	Dalam Pembangunan	Meningkatnya Pemajuan Dan	Obyek Pemajuan Budaya Asing Yang Dikembangkan	%	70
13		Pelestarian Budaya	Nilai-Nilai Budaya Melayu Yang Dilestarikan	%	14
14		Meningkatnya Budaya Listerasi	Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat	Indeks	30
Misi 3 Meningkatkan Kesejahteraan Sosial Dan Pemberdayaan Masyarakat					
15	Meningkatkan		Angka Kemiskinan	%	6,16
16	Kualitas Penanganan Kesejahteraan Dan Kemandirian Masyarakat	Meningkatnya Kualitas Penanganan Kesejahteraan	Penduduk Miskin Ekstrem Yang Ditangani	%	54,4
17		Meningkatnya Penanganan Pengangguran	Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT)	%	7,9
18		Berkurangnya Kesenjangan Pendapatan Penduduk	Indeks Gini Rasio	Nilai	0,321
19		Mengikatnya Keamanan Dan Ketertiban Masyarakat	Angka Kriminalitas	Angka	61
Misi 4 Mempercepat Pertumbuhan Dan Pemerataan Pembangunan Infrastruktur Berbasis Lingkungan Dan Tata Ruang					
20	Meningkatkan Kualitas Infrastruktur		Indeks Kepuasan Layanan Infrastruktur (IKLI)	Nilai	71,28

No	Misi/Tujuan	Sasaran	Indikator Tujuan/Sasaran	Satuan	Target 2025
21	Disemua Wilayah Berbasis	Meningkatnya Konektivitas Antar Wilayah	Indeks Konektivitas	Indeks	75
22	Lingkungan Hidup Dan Tata Ruang	Meningkatnya Capaian Infrastruktur Dasar	Cakupan Universal Akses	%	90
23		Meningkatnya Kualitas Lingkungan Hidup	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH)	Nilai	64,71
24		Meningkatnya Pemanfaatan Tata Ruang Sesuai RTRW	Kesesuaian Pemanfaatan Ruang	%	100
25		Meningkatnya Pengurangan Risiko Bencana	Indeks Risiko Bencana (IRBI)	Nilai	122
Misi 5 Meningkatkan Reformasi Birokrasi Dan Pelayanan Publik					
26	Meningkatkan Tata Kelola		Indeks Reformasi Birokrasi (IRB)	Indeks	69,05
27	Pemerintah Yang Baik Dan Bersih	Meningkatnya Birokrasi Yang Bersih Dan Akuntabel	Nilai SAKIP	Nilai	77
28			Indeks Pengelolaan Keuangan Daerah (IPKD)	Nilai	64,5
29		Meningkatnya Birokrasi Yang Kapabel	Indeks Sistem Pemerintah Berbasis Elektronik (SPBE)	Indeks	2,59
30			Indeks Kualitas Kebijakan	Point	74
31			Indeks Profesionalisme ASN (IPA)	Indeks	57

No	Misi/Tujuan	Sasaran	Indikator Tujuan/Sasaran	Satuan	Target 2025
32		Meningkatnya Pelayanan Publik Yang Prima	Rata-Rata Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	Nilai	82,8
33		Meningkatnya Kualitas Inovasi Daerah	Indeks Inovasi Daerah	Indeks	55

Sumber: RPJMD Kab. Bintan Tahun 2021-2026

Prioritas pembangunan Kabupaten Bintan tahun 2025 diharapkan dapat memberikan dampak positif terhadap pertumbuhan ekonomi dan pembangunan infrastruktur serta pembangunan kualitas sumber daya manusia. Adapun target ekonomi makro yang ingin dicapai pada tahun 2025 sesuai dengan RPJMD Kabupaten Bintan Tahun 2021-2026 sebagai berikut:

Tabel IV-2 Target Capaian Indikator Ekonomi Makro Kabupaten Bintan Tahun 2025

Indikator Ekonomi Makro	Kondisi Awal Tahun 2023	Target Tahun 2025
Pertumbuhan Ekonomi (%)	6,14	4±2
Tingkat Pengangguran Terbuka (%)	5,43	7,9
Persentase Penduduk Miskin (%)	5,90	6,16
IPM (%)	77,50	74,93
Inflasi (%)	2,14	-
Indeks Gini	NA	0,321

Sumber: RPJMD Kabupaten Bintan Tahun 2021-2026

Selain target indikator ekonomi makro, prioritas pembangunan pada Kabupaten Bintan memiliki tujuan, sasaran dan target pada tahun 2025 sesuai dengan target RPJMD Kabupaten Bintan sebagai berikut:

Tabel III-2 Prioritas Pembangunan, Tujuan, Fokus Pembangunan, Indikator Tujuan, dan Target Pembangunan Kabupaten Bintan Tahun 2025

Prioritas Pembangunan 2025	Tujuan	Fokus Pembangunan	Indikator Tujuan/Sasaran	Satuan	Kondisi Awal 2023	Target 2025
Pemantapan Ekonomi Daerah	1. Meningkatkan		Pertumbuhan Ekonomi	%	6,14	4±2

Prioritas Pembangunan 2025	Tujuan	Fokus Pembangunan	Indikator Tujuan/ Sasaran	Satuan	Kondisi Awal 2023	Target 2025
yang Inklusif dan Berdaya Saing berbasis Potensi Wilayah	kontribusi sektor ekonomi unggulan dalam memperkuat pertumbuhan ekonomi	Peningkatan pembangunan pertanian difokuskan pada peningkatan kompetensi petani, peningkatan ketersediaan sarana dan prasarana pertanian	Persentase Pertumbuhan Kontribusi Pertanian, Kehutanan Dan Perikanan Dalam PDRB	%	7,10	8,3
		Peningkatan ketahanan pangan difokuskan pada peningkatan ketersediaan pangan dan cadangan pangan				
		Pembangunan perikanan dan kelautan difokuskan pada peningkatan sarana dan prasarana perikanan dan kelautan serta peningkatan kualitas hasil perikanan				
		Fokus pembangunan industri adalah peningkatan kualitas pengelolaan kawasan industri dan pengembangan kawasan industri	Persentase Pertumbuhan PDRB Sektor Perindustrian	%	40,25	39,6
		Pembangunan perdagangan difokuskan pada peningkatan kualitas sarana perdagangan dan pengembangan produk unggulan untuk ekspor				

Prioritas Pembangunan 2025	Tujuan	Fokus Pembangunan	Indikator Tujuan/ Sasaran	Satuan	Kondisi Awal 2023	Target 2025
		Fokus pembangunan pariwisata adalah pengembangan pengembangan desa wisata dan promosi wisata untuk wisatawan nusantara	Persentase Pertumbuhan Pendapatan Pariwisata	%	88,99	3,5
		Fokus pengembangan ekonomi kreatif adalah penyusunan roadmap pengembangan sektor ekonomi kreatif				
		Pembangunan koperasi dan UMKM difokuskan pada peningkatan kapasitas koperasi sebagai sumber permodalan dalam pengelolaan usaha mikro, dan pengembangan usaha mikro menjadi usaha kecil	Persentase Pertumbuhan Kontribusi Perdagangan Besar Dan Eceran Dalam PDRB	%	9,96	0,94
Penguatan Daya Saing Sumber Daya Manusia dan Implementasi Nilai-nilai Budaya Dalam Kehidupan Bermasyarakat	2. Meningkatkan masyarakat yang cerdas, sehat dan berdaya saing		Indeks Pembangunan Manusia	Indeks	77,50	74,93
		Peningkatan kualitas pendidikan difokuskan pada pencapaian standar pelayanan minimal pendidikan, SNP dan sdgs	Harapan Lama Sekolah	Tahun	13,44	13,7
			Rata-Rata Lama Sekolah	Tahun	8,92	8,9
		Pembangunan kesehatan masyarakat difokuskan pada peningkatan promosi dan preventif serta pencapaian SPM bidang kesehatan	Usia Harapan Hidup	Tahun	74,82	70,88

Prioritas Pembangunan 2025	Tujuan	Fokus Pembangunan	Indikator Tujuan/ Sasaran	Satuan	Kondisi Awal 2023	Target 2025
		Pengendalian penduduk dan keluarga berencana difokuskan pada peningkatan pengendalian usia perkawinan dan penggunaan alat kontrasepsi jangka panjang	Indek Pembangunan Gender	Indeks	93,78	93
		Pembangunan pemberdayaan perempuan dan perlindungan difokuskan pada peningkatan kesetaraan dan perlindungan perempuan dan anak				
		Pembangunan desa dan pemberdayaan masyarakat difokuskan pada pengembangan dan kemandirian desa serta peningkatan pembangunan kelurahan				
	3. Meningkatkan nilai-nilai budaya melayu dalam pembangunan	Fokus pembangunan pemuda dan olahraga adalah peningkatan prestasi pemuda dan olahraga	Persentase Pemajuan Budaya Yang Dikembangkan	%	NA	70
		Pembangunan kebudayaan difokuskan pada pelestarian cagar budaya dan kesenian tradisional melayu	Persentase Nilai-Nilai Budaya Melayu Yang Dilestarikan	%	NA	14
		Peningkatan budaya literasi difokuskan pada peningkatan peran perpustakaan dalam	Indek Pembangunan Literasi	Indeks	NA	30

Prioritas Pembangunan 2025	Tujuan	Fokus Pembangunan	Indikator Tujuan/ Sasaran	Satuan	Kondisi Awal 2023	Target 2025
	4. Meningkatkan kualitas penanganan kesejahteraan dan kemandirian masyarakat	pengembangan budaya literasi				
			Angka Kemiskinan	%	5,90	6,16
		Penurunan pengangguran difokuskan pada peningkatan kompetensi, sertifikasi, kapasitas tenaga kerja sesuai dengan pangsa pasar	Persentase Penduduk Miskin Ekstrem Yang Ditangani	%	NA	54,4
			TPT (Tingkat Pengangguran Terbuka)	%	5,43	7,9
			Indek Gini Rasio	Indeks	0,27	0,321
Pemerataan Infrastruktur Wilayah, Pengelolaan Lingkungan Hidup Berkelanjutan, dan Ketahanan Bencana	5. Meningkatkan kualitas infrastruktur disemua wilayah berbasis lingkungan hidup dan tata ruang		IKLI (Indek Kepuasan Layanan Infrastruktur)	Nilai	NA	71,28
		Peningkatan indeks konektivitas difokuskan pada peningkatan kualitas jalan dan angkutan	Indek Konektivitas	Indeks	77,5	75
		Peningkatan cakupan universal akses difokuskan pada pemenuhan akses air minum baik PDAM maupun PAMSIMAS serta akses sanitasi yang difokuskan pada penanganan limbah domestik	Persentase Cakupan Universal Akses	Indeks	91,84	89,97
		Penanganan kumuh difokuskan pada penanganan kawasan kumuh sesuai SK Bupati dengan membangun rumah layak huni, penguatan KOTAKU, penanganan				

Prioritas Pembangunan 2025	Tujuan	Fokus Pembangunan	Indikator Tujuan/ Sasaran	Satuan	Kondisi Awal 2023	Target 2025
		perumahan sesuai dengan SPM				
		Peningkatan kualitas lingkungan hidup difokuskan pada peningkatan kualitas udara, air tutupan lahan dan pengelolaan serta pengurangan sampah	IKLH (Indek Kualitas Lingkungan Hidup)	Indeks	67,66	64,71
		Kesesuaian pemanfaatan ruang difokuskan pada peningkatan pemahaman masyarakat, pengusaha tentang pola ruang dan struktur ruang	Persentase Kesesuaian Pemanfaatan Tata Ruang	%	97,65	100
		Peningkatan penanganan mitigasi bencana difokuskan pada peningkatan kesiapsiagaan bencana mitigasi bencana dan sarana dan prasarana penanganan bencana dan kebakaran sesuai dengan standar pelayanan minimal	IRBI (Indek Risiko Bencana)	Nilai	122,22	122
Pemantapan Tata Kelola Reformasi Birokrasi yang Adaptif dan Kolaboratif	6. Meningkatkan tata kelola pemerintah yang baik dan bersih		IRB (Indek Reformasi Birokrasi)	Indeks	68,05	69,05
		Peningkatan nilai investasi difokuskan pada peningkatan kualitas pelayanan perijinan yang	Persentase Pertumbuhan Realisasi Investasi	%	NA	1,5

Prioritas Pembangunan 2025	Tujuan	Fokus Pembangunan	Indikator Tujuan/ Sasaran	Satuan	Kondisi Awal 2023	Target 2025
		mudah diakses oleh investor				
		Peningkatan kualitas pengelolaan keuangan difokuskan pada peningkatan kapasitas fiskal daerah	IPKD (Indek Pengelolaan Keuangan Daerah)	Nilai	NA	77
		Pencegahan konflik sosial difokuskan pada peningkatan kerukunan antar umat beragama dan toleransi beragama	Angka Kriminalitas	Angka	94	61
		Peningkatan kenyamanan ketenteraman dan perlindungan masyarakat difokuskan pada penegakan perda sesuai Standar pelayanan minimal				
		Peningkatan kualitas perencanaan difokuskan pada kesesuaian perencanaan dan penganggaran, peningkatan partisipasi masyarakat dalam perencanaan	Nilai SAKIP	Nilai	65,11	77
		Peningkatan penanganan PPKS difokuskan pada penanganan anak terlantar, usia lanjut terlantar disabilitas terlantar, gelandangan dan penanganan				

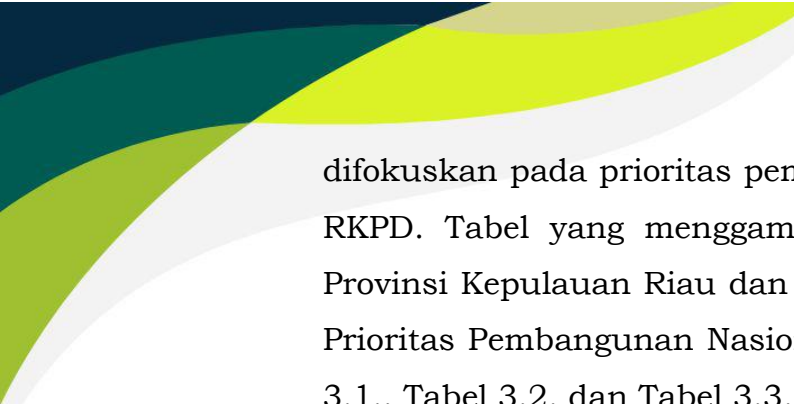
Prioritas Pembangunan 2025	Tujuan	Fokus Pembangunan	Indikator Tujuan/ Sasaran	Satuan	Kondisi Awal 2023	Target 2025
		bencana sebagaimana tertulis dalam Standar pelayanan minimal				
		Peningkatan kualitas pelayanan sekretariat daerah difokuskan pada kualitas pelaporan dalam pelaksanaan reformasi birokrasi, peningkatan kualitas pengadaan barang dan jasa, penguatan BUMD dan BLUD, peningkatan kualitas produk hum, peningkatan bimbingan kesejahteraan masyarakat dan agama, penataan kelembagaan				
		Peningkatan kualitas pengawasan difokuskan pada kapasitas APIP dan maturitas SPIP	Indek Kualitas Kebijakan	Point	NA	74
		Peningkatan pembangunan berbasis elektronik difokuskan pada implementasi SPBE di Perangkat daerah, peningkatan kualitas satu data, kualitas penanganan arsip berbasis elektronik dan	Indek Sistem Pemerintah Berbasis Elektronik (SPBE)	Indeks	3,39	2,59

Prioritas Pembangunan 2025	Tujuan	Fokus Pembangunan	Indikator Tujuan/ Sasaran	Satuan	Kondisi Awal 2023	Target 2025
		keamanan informasi pemerintah				
		Peningkatan kualitas ASN difokuskan pada pelaksanaan sistem merit	IPA (Indek Profesionalism e Asn)	Indeks	NA	57
		Peningkatan pelayanan publik difokuskan pada peningkatan kualitas sarana dan prasarana pelayanan publik dalam mencapai kemudahan akses pelayanan	Rata-rata Nilai Indek Kepuasan Masyarakat (IKM)	Nilai	NA	82,8
		Peningkatan Penelitian dan kelitbangan inovasi difokuskan pada pengembangan inovasi daerah dan teknologi	Indek Inovasi Daerah	Indeks	58,66	55

Sumber: LKPJ Bintan 2023 dan RPJMD Kab. Bintan 2021-2026

Target pembangunan pada tiap program prioritas pembangunan tahun 2025 Kabupaten Bintan menjadi tolak ukur keberhasilan dan capaian yang harus dipenuhi oleh setiap program. Target tersebut merupakan target yang tercantum pada dokumen RPJMD Kabupaten Bintan Tahun 2021-2026 yang artinya RKPD tahun 2025 adalah upaya mencapai tujuan pada akhir tahun perencanaan RPJMD Kabupaten Bintan.

Dalam kerangka sinergi dan penyelarasan, alokasi anggaran untuk setiap perangkat daerah ditentukan berdasarkan target kinerja pelayanan publik masing-masing urusan pemerintahan yang



difokuskan pada prioritas pembangunan yang telah ditetapkan dalam RKPD. Tabel yang menggambarkan Sinergitas Program Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau dan Pemerintah Kabupaten Bintan terhadap Prioritas Pembangunan Nasional, sebagaimana yang ada dalam Tabel 3.1., Tabel 3.2. dan Tabel 3.3.

Tabel III.1.
SINERGITAS PROGRAM PEMERINTAH KABUPATEN BINTAN
TERHADAP PRIORITAS PEMBANGUNAN NASIONAL

No	Prioritas Pembangunan Nasional	Program	Indikator Kinerja	SKPD Pelaksana	Jumlah (Rp)
1	2	3	4	5	6
1	Memperkokoh ideologi Pancasila, demokrasi, dan hak asasi manusia (HAM)	PROGRAM PENGUATAN IDEOLOGI PANCASILA DAN KARAKTER KEBANGSAAN	Indeks Demokrasi Indonesia	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	1,300,000,000
		PROGRAM PENINGKATAN PERAN PARTAI POLITIK DAN LEMBAGA PENDIDIKAN MELALUI PENDIDIKAN POLITIK DAN PENGEMBANGAN ETIKA SERTA BUDAYA POLITIK		Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	971,334,618
		PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM		Seluruh Kecamatan	258,164,200
2	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi syariah, ekonomi digital, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENGAWASAN ORGANISASI KEMASYARAKATAN	Asia Power Index (Military Capability)	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	50,000,000
		PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN KETAHANAN EKONOMI, SOSIAL, DAN BUDAYA	Asia Power Index (Diplomatic Influence)a)	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	60,000,000
		PROGRAM PENINGKATAN KEWASPADAAN NASIONAL DAN PENINGKATAN KUALITAS DAN FASILITASI PENANGANAN KONFLIK SOSIAL	Proporsi Penduduk yang Merasa Aman Berjalan Sendirian di Area Tempat Tinggalnya	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	1,610,000,000
		PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN/ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP	Prevalensi Ketidacukupan Konsumsi Pangan (PoU)	Dinas Lingkungan Hidup	490,000,000
		PROGRAM PENGELOLAAN KEANEKARAGAMAN HAYATI (KEHATI)	Indeks Ketahanan Energi	Dinas Lingkungan Hidup	3,556,000,000
		PROGRAM PENGENDALIAN BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (B3) DAN LIMBAH BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (LIMBAH B3)	Kapasitas tampungan air (m3/kapita)	Dinas Lingkungan Hidup	39,000,000
		PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN TERHADAP IZIN LINGKUNGAN DAN IZIN PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP (PPLH)	Akses rumah tangga perkotaan terhadap air siap minum perpipaan (%)	Dinas Lingkungan Hidup	162,808,310
		PROGRAM PENINGKATAN PENDIDIKAN, PELATIHAN DAN PENYULUHAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT	Rumah Tangga dengan Akses Sanitasi Aman (%)	Dinas Lingkungan Hidup	50,000,000
		PROGRAM PENGHARGAAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT	Indeks Daya Saing Digital di Tingkat Global	Dinas Lingkungan Hidup	50,000,000
		PROGRAM PENANGANAN PENGADUAN LINGKUNGAN HIDUP	Indeks Ekonomi Hijau	Dinas Lingkungan Hidup	15,000,000

No	Prioritas Pembangunan Nasional	Program	Indikator Kinerja	SKPD Pelaksana	Jumlah (Rp)
1	2	3	4	5	6
		PROGRAM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN	Porsi EBT dalam Bauran Energi Primer	Dinas Lingkungan Hidup	16,050,061,181
		PROGRAM PENINGKATAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Timbulan sampah terolah di fasilitas pengolahan sampah (%)	Satuan Polisi Pamong Praja	405,000,000
		PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA)	Indeks Pengelolaan Keanekaragaman Hayati	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Pertanahan	2,726,449,993
		PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Pertanahan	2,300,000,000
		PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM AIR LIMBAH	Persentase Penurunan Emisi GRK	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Pertanahan	1,213,003,400
3	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agro-maritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi	PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN TANGKAP	Proporsi jumlah usaha kecil dan menengah (%)	Dinas Perikanan	1,265,600,000
		PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN BUDIDAYA	Rasio Kewirausahaan (%)	Dinas Perikanan	730,000,000
		PROGRAM PENGOLAHAN DAN PEMASARAN HASIL PERIKANAN	Rasio Volume Usaha Koperasi terhadap PDB (%)	Dinas Perikanan	470,000,000
		PROGRAM PENGEMBANGAN IKLIM PENANAMAN MODAL	Rasio PDB Pariwisata (%)	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	250,000,000
		PROGRAM PROMOSI PENANAMAN MODAL	Devisa Pariwisata (miliar USD)	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	150,000,000
		PROGRAM PELAYANAN PENANAMAN MODAL	Proporsi PDB Ekonomi Kreatif (%)	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	100,000,000
		PROGRAM PENGENDALIAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL	Aset Perbankan/PDB (%)	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	626,853,000
		PROGRAM PENGELOLAAN DATA DAN SISTEM INFORMASI PENANAMAN MODAL	Aset Dana Pensiun/PDB (%)	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	50,000,000
		PROGRAM PENGAWASAN DAN PEMERIKSAAN KOPERASI	Aset Asuransi/PDB (%)	Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Perindustrian dan Perdagangan	50,000,000
		PROGRAM PENDIDIKAN DAN LATIHAN PERKOPERASIAN	Kapitalisasi Pasar Modal/PDB (%)	Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Perindustrian dan Perdagangan	430,942,000
		PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PERLINDUNGAN KOPERASI	Total Kredit/PDB (%)	Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Perindustrian dan Perdagangan	50,000,000
		PROGRAM PEMBERDAYAAN USAHA MENENGAH, USAHA KECIL, DAN USAHA MIKRO (UMKM)	Inklusi Keuangan (%)	Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Perindustrian dan Perdagangan	1,714,813,000
		PROGRAM PENGEMBANGAN UMKM		Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Perindustrian dan Perdagangan	400,000,000
		PROGRAM PENINGKATAN SARANA DISTRIBUSI PERDAGANGAN		Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Perindustrian dan Perdagangan	30,000,000
		PROGRAM STABILISASI HARGA BARANG KEBUTUHAN POKOK DAN BARANG PENTING		Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Perindustrian dan Perdagangan	230,000,000

No	Prioritas Pembangunan Nasional	Program	Indikator Kinerja	SKPD Pelaksana	Jumlah (Rp)
1	2	3	4	5	6
		PROGRAM STANDARDISASI DAN PERLINDUNGAN KONSUMEN		Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Perindustrian dan Perdagangan	160,000,000
		PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)		Dinas Perhubungan	2,687,472,600
		PROGRAM PENGELOLAAN PELAYARAN		Dinas Perhubungan	3,724,541,726
		PROGRAM PENINGKATAN DIVERSIFIKASI DAN KETAHANAN PANGAN MASYARAKAT		Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian	259,000,000
		PROGRAM PENANGANAN KERAWANAN PANGAN		Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian	50,000,000
		PROGRAM PENGAWASAN KEAMANAN PANGAN		Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian	20,000,000
		PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN		Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian	1,830,000,000
		PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN		Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian	730,000,000
		PROGRAM PENGENDALIAN KESEHATAN HEWAN DAN KESEHATAN MASYARAKAT VETERINER		Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian	612,000,000
		PROGRAM PENGENDALIAN DAN PENANGGULANGAN BENCANA PERTANIAN		Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian	20,000,000
		PROGRAM PENYULUHAN PERTANIAN		Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian	665,000,000
		PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM DRAINASE		Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Pertanahan	2,170,000,000
		PROGRAM PENATAAN BANGUNAN GEDUNG		Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Pertanahan	2,231,193,239
		PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN		Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Pertanahan	38,111,477,800
		PROGRAM PENGEMBANGAN JASA KONSTRUKSI		Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Pertanahan	605,000,000
		PROGRAM PENYELENGGARAAN PENATAAN RUANG		Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Pertanahan	1,144,000,000
		PROGRAM PENYELESAIAN SENGKETA TANAH GARAPAN		Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Pertanahan	100,000,000
		PROGRAM PENYELESAIAN GANTI KERUGIAN DAN SANTUNAN TANAH UNTUK PEMBANGUNAN		Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Pertanahan	560,000,000
4	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga,	PROGRAM PEMBINAAN PERPUSTAKAAN	Rata-rata nilai PISA	Dinas Perpustakaan dan Arsip Daerah	335,000,000
		PROGRAM PELESTARIAN KOLEKSI NASIONAL DAN NASKAH KUNO	Membaca	Dinas Perpustakaan dan Arsip Daerah	50,000,000

No	Prioritas Pembangunan Nasional	Program	Indikator Kinerja	SKPD Pelaksana	Jumlah (Rp)
1	2	3	4	5	6
	kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda, dan penyandang disabilitas	PROGRAM PENGELOLAAN ARSIP	Matematika	Dinas Perpustakaan dan Arsip Daerah	75,000,000
		PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEPEMUDAAN	Sains	Dinas Kepemudaan dan Olahraga	2,462,000,000
		PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEOLAHRAGAAN	Rata-rata lama sekolah penduduk usia 15 tahun ke atas (tahun)	Dinas Kepemudaan dan Olahraga	1,750,000,000
		PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS KEPRAMUKAAN	Harapan lama sekolah (tahun)	Dinas Kepemudaan dan Olahraga	300,000,000
		PROGRAM PENGARUSUTAMAAN GENDER DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN	Angka Partisipasi Kasar (APK) Pendidikan Tinggi (%)	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	220,000,000
		PROGRAM PERLINDUNGAN PEREMPUAN	Persentase pekerja lulusan pendidikan menengah dan tinggi yang bekerja di bidang keahlian menengah tinggi (%)	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	165,413,000
		PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS KELUARGA	Tingkat Penguasaan Iptek:	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	450,000,000
		PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM DATA GENDER DAN ANAK	a. Pengeluaran Iptek dan Inovasi (% PDB)	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	50,000,000
		PROGRAM PEMENUHAN HAK ANAK (PHA)	b. Peringkat Indeks Inovasi Global	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	80,000,000
		PROGRAM PERLINDUNGAN KHUSUS ANAK	Tingkat Pengangguran Terbuka (%)	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	474,587,000
		PROGRAM PENGENDALIAN PENDUDUK	Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja Perempuan (%)	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	396,800,000
		PROGRAM PEMBINAAN KELUARGA BERENCANA (KB)	Usia Harapan Hidup (tahun)	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	2,463,395,336

No	Prioritas Pembangunan Nasional	Program	Indikator Kinerja	SKPD Pelaksana	Jumlah (Rp)
1	2	3	4	5	6
		PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENINGKATAN KELUARGA SEJAHTERA (KS)	Angka Kematian Ibu (per 100.000 kelahiran hidup)	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	850,355,000
		PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Prevalensi Stunting (pendek dan sangat pendek) pada balita (%)	Dinas Kesehatan	59,947,907,965
		PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN	Insidensi Tuberkulosis (per 100.000 penduduk)	Dinas Kesehatan	1,123,744,100
		PROGRAM SEDIAAN FARMASI, ALAT KESEHATAN DAN MAKANAN MINUMAN	Cakupan Kepesertaan Jaminan Kesehatan Nasional (%)	Dinas Kesehatan	491,631,000
		PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN	Indeks Pembangunan Kualitas Keluarga (IPKK)	Dinas Kesehatan	6,786,103,000
		PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	Indeks Ketimpangan Gender (IKG)	Dinas Pendidikan	95,136,446,900
		PROGRAM PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN		Dinas Pendidikan	80,000,000
		PROGRAM PENGEMBANGAN KURIKULUM		Dinas Pendidikan	130,000,000
5	Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri	PROGRAM PENGEMBANGAN EKSPOR	Rasio PDB Industri Pengolahan (%)	Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Perindustrian dan Perdagangan	30,000,000
		PROGRAM PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN INDUSTRI	Pembentukan Modal Tetap Bruto (% PDB)	Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Perindustrian dan Perdagangan	11,682,184,000
		PROGRAM PENGENDALIAN IZIN USAHA INDUSTRI	Ekspor Barang dan Jasa (% PDB)	Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Perindustrian dan Perdagangan	50,000,000
		PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM INFORMASI INDUSTRI NASIONAL	Biaya Logistik (% PDB)	Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Perindustrian dan Perdagangan	50,000,000
6	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan	PROGRAM PENATAAN DESA	Terbangunnya sistem perlindungan sosial yang adaptif bagi seluruh penduduk (%)	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	30,000,000
		PROGRAM PENINGKATAN KERJA SAMA DESA	Cakupan kepesertaan jaminan sosial ketenagakerjaan (%)	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	30,000,000
		PROGRAM ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DESA	Persentase penyandang disabilitas yang bekerja di sektor formal (%)	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	1,199,451,600
		PROGRAM PEMBERDAYAAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN, LEMBAGA ADAT DAN MASYARAKAT HUKUM ADAT	Proporsi kontribusi PDRB Wilayah Metropolitan terhadap nasional (%)	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	1,100,000,000
		PROGRAM PERENCANAAN TENAGA KERJA	Persentase desa mandiri (%)	Dinas Tenaga Kerja	50,000,000
		PROGRAM PELATIHAN KERJA DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA	Rumah tangga dengan akses hunian layak, terjangkau, dan berkelanjutan (%)	Dinas Tenaga Kerja	1,063,358,534

No	Prioritas Pembangunan Nasional	Program	Indikator Kinerja	SKPD Pelaksana	Jumlah (Rp)
1	2	3	4	5	6
		PROGRAM PENEMPATAN TENAGA KERJA	Persentase desa mandiri (%)	Dinas Tenaga Kerja	165,000,000
		PROGRAM HUBUNGAN INDUSTRIAL		Dinas Tenaga Kerja	1,413,468,800
		PROGRAM PEMBERDAYAAN SOSIAL		Dinas Sosial	1,609,452,793
		PROGRAM PENANGANAN WARGA NEGARA MIGRAN KORBAN TINDAK KEKERASAN		Dinas Sosial	61,600,000
		PROGRAM REHABILITASI SOSIAL		Dinas Sosial	1,244,673,500
		PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL		Dinas Sosial	8,838,774,506
		PROGRAM PENANGANAN BENCANA		Dinas Sosial	508,479,810
		PROGRAM PENGELOLAAN TAMAN MAKAM PAHLAWAN		Dinas Sosial	61,919,637
		PROGRAM PENGEMBANGAN PERUMAHAN		Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	300,000,000
		PROGRAM KAWASAN PERMUKIMAN		Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	2,625,000,000
		PROGRAM PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN KUMUH		Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	2,537,500,000
		PROGRAM PENINGKATAN PRASARANA, SARANA DAN UTILITAS UMUM (PSU)		Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	16,401,374,774
		PROGRAM PENINGKATAN PELAYANAN SERTIFIKASI, KUALIFIKASI, KLASIFIKASI, DAN REGISTRASI BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN		Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	25,000,000
		PROGRAM PEMASARAN PARIWISATA		Dinas Kebudayaan dan Pariwisata	2,653,000,000
		PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN		Seluruh Kecamatan	10,441,908,810
		PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA		Seluruh Kecamatan	177,866,800
		PROGRAM PENGEMBANGAN EKONOMI KREATIF MELALUI PEMANFAATAN DAN PERLINDUNGAN HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL		Dinas Kebudayaan dan Pariwisata	213,000,000
		PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF		Dinas Kebudayaan dan Pariwisata	15,000,000
		PROGRAM PENINGKATAN DAYA TARIK DESTINASI PARIWISATA		Dinas Kebudayaan dan Pariwisata	4,867,391,000
7	Memperkuat reformasi politik, hukum, dan birokrasi, serta	PROGRAM PENYELENGGARAAN PENGAWASAN	Return on Asset (ROA) BUMN (%)	Inspektorat Daerah	1,173,000,000

No	Prioritas Pembangunan Nasional	Program	Indikator Kinerja	SKPD Pelaksana	Jumlah (Rp)
1	2	3	4	5	6
	memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi dan narkoba	PROGRAM PERUMUSAN KEBIJAKAN, PENDAMPINGAN DAN ASISTENSI	Indeks Integritas Nasional	Inspektorat Daerah	598,000,000
		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Indeks Materi Hukum	Seluruh Perangkat Daerah	714,025,167,498
		PROGRAM KEPEGAWAIAN DAERAH	Indeks Pelayanan Publik	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	1,385,000,000
		PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA	Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	150,000,000
		PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH	Indeks Persepsi Korupsi	Badan Keuangan dan Aset Daerah	133,761,317,222
		PROGRAM PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH	Indeks Pembangunan Hukum	Badan Keuangan dan Aset Daerah	1,899,000,000
		PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH	Tingkat Inflasi (%)	Badan Pendapatan Daerah	3,346,830,000
		PROGRAM PERENCANAAN, PENGENDALIAN DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH		Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah	3,248,275,000
		PROGRAM KOORDINASI DAN SINKRONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH		Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah	2,295,000,000
		PROGRAM PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH		Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah	1,300,000,000
		PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT		Sekretariat Daerah	28,905,881,498
		PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN		Sekretariat Daerah	1,236,656,684
		PROGRAM PENGELOLAAN PERBATASAN		Sekretariat Daerah	350,000,000
		PROGRAM DUKUNGAN PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI DPRD		Sekretariat DPRD	15,442,093,730
		PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK		Dinas Komunikasi dan Informatika	3,094,630,849
		PROGRAM PENGELOLAAN APLIKASI INFORMATIKA		Dinas Komunikasi dan Informatika	3,769,550,000
		PROGRAM PENYELENGGARAAN STATISTIK SEKTORAL		Dinas Komunikasi dan Informatika	100,000,000
		PROGRAM PENYELENGGARAAN PERSANDIAN UNTUK PENGAMANAN INFORMASI		Dinas Komunikasi dan Informatika	200,000,000
		PROGRAM PENDAFTARAN PENDUDUK		Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	107,650,000
		PROGRAM PENCATATAN SIPIL		Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	91,491,615

No	Prioritas Pembangunan Nasional	Program	Indikator Kinerja	SKPD Pelaksana	Jumlah (Rp)
1	2	3	4	5	6
		PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN		Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	515,421,000
		PROGRAM PENGELOLAAN PROFIL KEPENDUDUKAN		Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	32,547,000
		PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK		Seluruh Kecamatan	933,261,393
		PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM		Seluruh Kecamatan	90,223,110
8	Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan alam dan budaya, peningkatan toleransi antar umat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur	PROGRAM PENGEMBANGAN KEBUDAYAAN	Indeks Pembangunan Kebudayaan (IPK)	Dinas Kebudayaan dan Pariwisata	1,474,890,000
		PROGRAM PELESTARIAN DAN PENGELOLAAN CAGAR BUDAYA	Indeks Kerukunan Umat Beragama (IKUB)	Dinas Kebudayaan dan Pariwisata	50,000,000
		PROGRAM PENGELOLAAN PERMUSEUMAN	Proporsi Kerugian Ekonomi Langsung Akibat Bencana Relatif terhadap PDB (%)	Dinas Kebudayaan dan Pariwisata	50,000,000
		PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA		Badan Penanggulangan Bencana Daerah	803,750,000
		PROGRAM PENCEGAHAN, PENANGGULANGAN, PENYELAMATAN KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN NON KEBAKARAN		Badan Penanggulangan Bencana Daerah	404,000,000
TOTAL					1,257,632,139,531

Tabel III.2.
SINERGITAS PROGRAM PEMERINTAH KABUPATEN BINTAN
DENGAN PRIORITAS PEMBANGUNAN PROVINSI KEPULAUAN RIAU

No	Prioritas Pembangunan Provinsi	Program	Indikator Kinerja	SKPD Pelaksana	Jumlah (Rp)
1	2	3	4	5	6
1	Optimalisasi Potensi Perekonomian Daerah	PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH		Badan Pendapatan Daerah	3,346,830,000
		PROGRAM PENGENDALIAN DAN PENANGGULANGAN BENCANA PERTANIAN		Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian	20,000,000
		PROGRAM PENINGKATAN DIVERSIFIKASI DAN KETAHANAN PANGAN MASYARAKAT		Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian	259,000,000
		PROGRAM PENANGANAN KERAWANAN PANGAN		Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian	50,000,000
		PROGRAM PENGAWASAN KEAMANAN PANGAN		Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian	20,000,000
		PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN		Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian	1,830,000,000
		PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN		Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian	730,000,000
		PROGRAM PENGENDALIAN KESEHATAN HEWAN DAN KESEHATAN MASYARAKAT VETERINER		Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian	612,000,000
		PROGRAM PENYULUHAN PERTANIAN		Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian	665,000,000
		PROGRAM PENGAWASAN DAN PEMERIKSAAN KOPERASI		Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Perindustrian dan Perdagangan	50,000,000
		PROGRAM PENDIDIKAN DAN LATIHAN PERKOPERASIAN		Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Perindustrian dan Perdagangan	430,942,000
		PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PERLINDUNGAN KOPERASI		Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Perindustrian dan Perdagangan	50,000,000
		PROGRAM PEMBERDAYAAN USAHA MENENGAH, USAHA KECIL, DAN USAHA MIKRO (UMKM)		Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Perindustrian dan Perdagangan	1,714,813,000
		PROGRAM PENGEMBANGAN UMKM		Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Perindustrian dan Perdagangan	400,000,000
		PROGRAM STANDARDISASI DAN PERLINDUNGAN KONSUMEN		Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Perindustrian dan Perdagangan	160,000,000
		PROGRAM PENGEMBANGAN EKSPOR		Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Perindustrian dan Perdagangan	30,000,000

No	Prioritas Pembangunan Provinsi	Program	Indikator Kinerja	SKPD Pelaksana	Jumlah (Rp)
1	2	3	4	5	6
		PROGRAM PENINGKATAN SARANA DISTRIBUSI PERDAGANGAN		Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Perindustrian dan Perdagangan	30,000,000
		PROGRAM STABILISASI HARGA BARANG KEBUTUHAN POKOK DAN BARANG PENTING		Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Perindustrian dan Perdagangan	230,000,000
		PROGRAM PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN INDUSTRI		Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Perindustrian dan Perdagangan	11,682,184,000
		PROGRAM PENGENDALIAN IZIN USAHA INDUSTRI		Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Perindustrian dan Perdagangan	50,000,000
		PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM INFORMASI INDUSTRI NASIONAL		Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Perindustrian dan Perdagangan	50,000,000
		PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN/ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP		Dinas Lingkungan Hidup	490,000,000
		PROGRAM PENGELOLAAN KEANEKARAGAMAN HAYATI (KEHATI)		Dinas Lingkungan Hidup	3,556,000,000
		PROGRAM PENGENDALIAN BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (B3) DAN LIMBAH BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (LIMBAH B3)		Dinas Lingkungan Hidup	39,000,000
		PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN TERHADAP IZIN LINGKUNGAN DAN IZIN PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP (PPLH)		Dinas Lingkungan Hidup	162,808,310
		PROGRAM PENINGKATAN PENDIDIKAN, PELATIHAN DAN PENYULUHAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT		Dinas Lingkungan Hidup	50,000,000
		PROGRAM PENGHARGAAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT		Dinas Lingkungan Hidup	50,000,000
		PROGRAM PENANGANAN PENGADUAN LINGKUNGAN HIDUP		Dinas Lingkungan Hidup	15,000,000
		PROGRAM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN		Dinas Lingkungan Hidup	16,050,061,181
		PROGRAM PENGEMBANGAN IKLIM PENANAMAN MODAL		Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	250,000,000
		PROGRAM PROMOSI PENANAMAN MODAL		Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	150,000,000
		PROGRAM PELAYANAN PENANAMAN MODAL		Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	100,000,000
		PROGRAM PENGENDALIAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL		Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	626,853,000
		PROGRAM PENGELOLAAN DATA DAN SISTEM INFORMASI PENANAMAN MODAL		Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	50,000,000
		PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN TANGKAP		Dinas Perikanan	1,265,600,000

No	Prioritas Pembangunan Provinsi	Program	Indikator Kinerja	SKPD Pelaksana	Jumlah (Rp)
1	2	3	4	5	6
		PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN BUDIDAYA		Dinas Perikanan	730,000,000
		PROGRAM PENGOLAHAN DAN PEMASARAN HASIL PERIKANAN		Dinas Perikanan	470,000,000
		PROGRAM PEMASARAN PARIWISATA		Dinas Kebudayaan dan Pariwisata	2,653,000,000
		PROGRAM PENGEMBANGAN EKONOMI KREATIF MELALUI PEMANFAATAN DAN PERLINDUNGAN HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL		Dinas Kebudayaan dan Pariwisata	213,000,000
		PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF		Dinas Kebudayaan dan Pariwisata	15,000,000
		PROGRAM PENINGKATAN DAYA TARIK DESTINASI PARIWISATA		Dinas Kebudayaan dan Pariwisata	4,867,391,000
2	Pembangunan Infrastruktur Wilayah	PROGRAM PENGEMBANGAN JASA KONSTRUKSI		Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Pertanahan	605,000,000
		PROGRAM PENYELENGGARAAN PENATAAN RUANG		Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Pertanahan	1,144,000,000
		PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA)		Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Pertanahan	2,726,449,993
		PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM		Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Pertanahan	2,300,000,000
		PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM AIR LIMBAH		Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Pertanahan	1,213,003,400
		PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM DRAINASE		Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Pertanahan	2,170,000,000
		PROGRAM PENATAAN BANGUNAN GEDUNG		Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Pertanahan	2,231,193,239
		PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN		Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Pertanahan	38,111,477,800
		PROGRAM PENYELESAIAN SENGKETA TANAH GARAPAN		Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Pertanahan	100,000,000
		PROGRAM PENYELESAIAN GANTI KERUGIAN DAN SANTUNAN TANAH UNTUK PEMBANGUNAN		Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Pertanahan	560,000,000
		PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)		Dinas Perhubungan	2,687,472,600
		PROGRAM PENGELOLAAN PELAYARAN		Dinas Perhubungan	3,724,541,726
		PROGRAM PENGEMBANGAN PERUMAHAN		Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	300,000,000
		PROGRAM KAWASAN PERMUKIMAN		Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	2,625,000,000

No	Prioritas Pembangunan Provinsi	Program	Indikator Kinerja	SKPD Pelaksana	Jumlah (Rp)
1	2	3	4	5	6
		PROGRAM PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN KUMUH		Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	2,537,500,000
		PROGRAM PENINGKATAN PRASARANA, SARANA DAN UTILITAS UMUM (PSU)		Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	16,401,374,774
		PROGRAM PENINGKATAN PELAYANAN SERTIFIKASI, KUALIFIKASI, KLASIFIKASI, DAN REGISTRASI BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN		Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	25,000,000
3	Pembangunan Manusia yang Berkualitas dan Berbudaya	PROGRAM KEPEGAWAIAN DAERAH		Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	1,385,000,000
		PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA		Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	150,000,000
		PROGRAM PENGUATAN IDEOLOGI PANCASILA DAN KARAKTER KEBANGSAAN		Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	1,300,000,000
		PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN KETAHANAN EKONOMI, SOSIAL, DAN BUDAYA		Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	60,000,000
		PROGRAM PENINGKATAN PERAN PARTAI POLITIK DAN LEMBAGA PENDIDIKAN MELALUI PENDIDIKAN POLITIK DAN PENGEMBANGAN ETIKA SERTA BUDAYA POLITIK		Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	971,334,618
		PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENGAWASAN ORGANISASI KEMASYARAKATAN		Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	50,000,000
		PROGRAM PENINGKATAN KEWASPADAAN NASIONAL DAN PENINGKATAN KUALITAS DAN FASILITASI PENANGANAN KONFLIK SOSIAL		Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	1,610,000,000
		PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH		Badan Keuangan dan Aset Daerah	133,761,317,222
		PROGRAM PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH		Badan Keuangan dan Aset Daerah	1,899,000,000
		PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA		Badan Penanggulangan Bencana Daerah	803,750,000
		PROGRAM PENCEGAHAN, PENANGGULANGAN, PENYELAMATAN KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN NON KEBAKARAN		Badan Penanggulangan Bencana Daerah	404,000,000
		PROGRAM PERENCANAAN, PENGENDALIAN DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH		Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah	3,248,275,000
		PROGRAM KOORDINASI DAN SINKRONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH		Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah	2,295,000,000

No	Prioritas Pembangunan Provinsi	Program	Indikator Kinerja	SKPD Pelaksana	Jumlah (Rp)
1	2	3	4	5	6
		PROGRAM PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH		Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah	1,300,000,000
		PROGRAM PENGEMBANGAN KEBUDAYAAN		Dinas Kebudayaan dan Pariwisata	1,474,890,000
		PROGRAM PELESTARIAN DAN PENGELOLAAN CAGAR BUDAYA		Dinas Kebudayaan dan Pariwisata	50,000,000
		PROGRAM PENGELOLAAN PERMUSEUMAN		Dinas Kebudayaan dan Pariwisata	50,000,000
		PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEPEMUDAAN		Dinas Kepemudaan dan Olahraga	2,462,000,000
		PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS KEPRAMUKAAN		Dinas Kepemudaan dan Olahraga	300,000,000
		PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEOLAHRAGAAN		Dinas Kepemudaan dan Olahraga	1,750,000,000
		PROGRAM PENDAFTARAN PENDUDUK		Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	107,650,000
		PROGRAM PENCATATAN SIPIL		Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	91,491,615
		PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN		Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	515,421,000
		PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT		Dinas Kesehatan	59,947,907,965
		PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN		Dinas Kesehatan	1,123,744,100
		PROGRAM SEDIAAN FARMASI, ALAT KESEHATAN DAN MAKANAN MINUMAN		Dinas Kesehatan	491,631,000
		PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN		Dinas Kesehatan	6,786,103,000
		PROGRAM PENGELOLAAN APLIKASI INFORMATIKA		Dinas Komunikasi dan Informatika	3,769,550,000
		PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK		Dinas Komunikasi dan Informatika	3,094,630,849
		PROGRAM PENYELENGGARAAN STATISTIK SEKTORAL		Dinas Komunikasi dan Informatika	100,000,000
		PROGRAM PENYELENGGARAAN PERSANDIAN UNTUK PENGAMANAN INFORMASI		Dinas Komunikasi dan Informatika	200,000,000
		PROGRAM PENATAAN DESA		Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	30,000,000
		PROGRAM PENINGKATAN KERJA SAMA DESA		Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	30,000,000

No	Prioritas Pembangunan Provinsi	Program	Indikator Kinerja	SKPD Pelaksana	Jumlah (Rp)
1	2	3	4	5	6
		PROGRAM ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DESA		Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	1,199,451,600
		PROGRAM PEMBERDAYAAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN, LEMBAGA ADAT DAN MASYARAKAT HUKUM ADAT		Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	1,100,000,000
		PROGRAM PENGARUSUTAMAAN GENDER DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN		Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	220,000,000
		PROGRAM PERLINDUNGAN PEREMPUAN		Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	165,413,000
		PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS KELUARGA		Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	450,000,000
		PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM DATA GENDER DAN ANAK		Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	50,000,000
		PROGRAM PEMENUHAN HAK ANAK (PHA)		Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	80,000,000
		PROGRAM PERLINDUNGAN KHUSUS ANAK		Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	474,587,000
		PROGRAM PENGENDALIAN PENDUDUK		Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	396,800,000
		PROGRAM PEMBINAAN KELUARGA BERENCANA (KB)		Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	2,463,395,336
		PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENINGKATAN KELUARGA SEJAHTERA (KS)		Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	850,355,000
		PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN		Dinas Pendidikan	95,136,446,900

No	Prioritas Pembangunan Provinsi	Program	Indikator Kinerja	SKPD Pelaksana	Jumlah (Rp)
1	2	3	4	5	6
		PROGRAM PEMBINAAN PERPUSTAKAAN		Dinas Perpustakaan dan Arsip Daerah	335,000,000
		PROGRAM PENGELOLAAN ARSIP		Dinas Perpustakaan dan Arsip Daerah	75,000,000
		PROGRAM PEMBERDAYAAN SOSIAL		Dinas Sosial	1,609,452,793
		PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL		Dinas Sosial	8,838,774,506
		PROGRAM REHABILITASI SOSIAL		Dinas Sosial	1,244,673,500
		PROGRAM PENANGANAN WARGA NEGARA MIGRAN KORBAN TINDAK KEKERASAN		Dinas Sosial	61,600,000
		PROGRAM PENGELOLAAN TAMAN MAKAM PAHLAWAN		Dinas Sosial	61,919,637
		PROGRAM PENANGANAN BENCANA		Dinas Sosial	508,479,810
		PROGRAM HUBUNGAN INDUSTRIAL		Dinas Tenaga Kerja	1,413,468,800
		PROGRAM PERENCANAAN TENAGA KERJA		Dinas Tenaga Kerja	50,000,000
		PROGRAM PELATIHAN KERJA DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA		Dinas Tenaga Kerja	1,063,358,534
		PROGRAM PENEMPATAN TENAGA KERJA		Dinas Tenaga Kerja	165,000,000
		PROGRAM PENYELENGGARAAN PENGAWASAN		Inspektorat Daerah	1,173,000,000
		PROGRAM PERUMUSAN KEBIJAKAN, PENDAMPINGAN DAN ASISTENSI		Inspektorat Daerah	598,000,000
		PROGRAM PENINGKATAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM		Satuan Polisi Pamong Praja	405,000,000
		PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT		Sekretariat Daerah	28,905,881,498
		PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN		Sekretariat Daerah	1,236,656,684
		PROGRAM PENGELOLAAN PERBATASAN		Sekretariat Daerah	350,000,000
		PROGRAM DUKUNGAN PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI DPRD		Sekretariat DPRD	15,442,093,730
		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA		Seluruh Perangkat Daerah	714,025,167,498
		PROGRAM PELESTARIAN KOLEKSI NASIONAL DAN NASKAH KUNO		Dinas Perpustakaan dan Arsip Daerah	50,000,000
		PROGRAM PENGELOLAAN PROFIL KEPENDUDUKAN		Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	32,547,000
		PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM		Seluruh Kecamatan	258,164,200

No	Prioritas Pembangunan Provinsi	Program	Indikator Kinerja	SKPD Pelaksana	Jumlah (Rp)
1	2	3	4	5	6
		PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN		Seluruh Kecamatan	10,441,908,810
		PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA		Seluruh Kecamatan	177,866,800
		PROGRAM PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN		Dinas Pendidikan	80,000,000
		PROGRAM PENGEMBANGAN KURIKULUM		Dinas Pendidikan	130,000,000
		PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK		Seluruh Kecamatan	933,261,393
		PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM		Seluruh Kecamatan	90,223,110
		Total			

Tabel III.3.
PRIORITAS PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN DAN INDIKATOR KINERJA

No	Prioritas Pembangunan Kabupaten	Sasaran Prioritas	Program	Indikator Kinerja	SKPD Pelaksana	Jumlah (Rp)
1	2	3	4	5	6	7
	Pemantapan Ekonomi Daerah yang Inklusif dan Berdaya Saing berbasis Potensi Wilayah	Meningkatnya kontribusi pertanian dalam pertumbuhan ekonomi	PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN TANGKAP	Proporsi tangkapan ikan yang berada dalam batasan biologis yang aman (%)	Dinas Perikanan	1,265,600,000
		Meningkatnya kontribusi pertanian dalam pertumbuhan ekonomi	PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN BUDIDAYA	Cakupan bina kelompok pembudidaya ikan (%)	Dinas Perikanan	730,000,000
		Meningkatnya kontribusi pertanian dalam pertumbuhan ekonomi	PROGRAM PENGOLAHAN DAN PEMASARAN HASIL PERIKANAN	Persentase Peningkatan Angka Konsumsi Ikan (%)	Dinas Perikanan	470,000,000
		Meningkatnya investasi	PROGRAM PENGEMBANGAN IKLIM PENANAMAN MODAL	Jumlah Penambahan investor baru (jumlah)	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	250,000,000
		Meningkatnya investasi	PROGRAM PROMOSI PENANAMAN MODAL	Persentase promosi penanaman modal yang diimplementasikan (%)	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	150,000,000
		Meningkatnya investasi	PROGRAM PELAYANAN PENANAMAN MODAL	Persentase pengaduan masyarakat yang ditindaklanjuti (%)	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	100,000,000
		Meningkatnya investasi	PROGRAM PENGENDALIAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL	Persentase pelaku usaha yang memberikan pelaporan LKPM (%)	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	626,853,000
		Meningkatnya investasi	PROGRAM PENGELOLAAN DATA DAN SISTEM INFORMASI PENANAMAN MODAL	Persentase data penanaman modal yang dikelola (%)	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	50,000,000
		Meningkatnya sektor pariwisata dan ekonomi kreatif dalam memperkuat pertumbuhan ekonomi	PROGRAM PENGAWASAN DAN PEMERIKSAAN KOPERASI	Persentase Koperasi Sehat (%)	Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Perindustrian dan Perdagangan	50,000,000
		Meningkatnya sektor pariwisata dan ekonomi kreatif dalam memperkuat pertumbuhan ekonomi	PROGRAM PENDIDIKAN DAN LATIHAN PERKOPERASIAN	Persentase Koperasi yang mengikuti pendidikan dan latihan perkoperasian	Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Perindustrian dan Perdagangan	430,942,000
		Meningkatnya sektor pariwisata dan ekonomi kreatif dalam memperkuat pertumbuhan ekonomi	PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PERLINDUNGAN KOPERASI	Persentase Koperasi yang mengikuti kegiatan pemberdayaan dan perlindungan	Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Perindustrian dan Perdagangan	50,000,000
		Meningkatnya sektor pariwisata dan ekonomi kreatif dalam memperkuat pertumbuhan ekonomi	PROGRAM PEMBERDAYAAN USAHA MENENGAH, USAHA KECIL, DAN USAHA MIKRO (UMKM)	Prosentase usaha mikro yang dibina	Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Perindustrian dan Perdagangan	1,714,813,000
		Meningkatnya sektor pariwisata dan ekonomi kreatif dalam	PROGRAM PENGEMBANGAN UMKM	Persentase usaha mikro yang berijin	Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Perindustrian dan Perdagangan	400,000,000

No	Prioritas Pembangunan Kabupaten	Sasaran Prioritas	Program	Indikator Kinerja	SKPD Pelaksana	Jumlah (Rp)
1	2	3	4	5	6	7
		memperkuat pertumbuhan ekonomi				
		Meningkatnya sektor pariwisata dan ekonomi kreatif dalam memperkuat pertumbuhan ekonomi	PROGRAM PENINGKATAN SARANA DISTRIBUSI PERDAGANGAN	Persentase Pasar Sehat (%)	Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Perindustrian dan Perdagangan	30,000,000
		Meningkatnya sektor pariwisata dan ekonomi kreatif dalam memperkuat pertumbuhan ekonomi	PROGRAM STABILISASI HARGA BARANG KEBUTUHAN POKOK DAN BARANG PENTING	Persentase stabilitas ketersediaan bahan pokok dan penting lainnya (%)	Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Perindustrian dan Perdagangan	230,000,000
		Meningkatnya sektor pariwisata dan ekonomi kreatif dalam memperkuat pertumbuhan ekonomi	PROGRAM STANDARDISASI DAN PERLINDUNGAN KONSUMEN	Persentase alat-alat ukur takar timbang dan perlengkapannya (UTTP) bertanda tera sah yang berlaku (%)	Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Perindustrian dan Perdagangan	160,000,000
		Meningkatnya konektivitas antar wilayah	PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)	Persentase Penurunan Kecelakaan Lalulintas (%)	Dinas Perhubungan	2,687,472,600
		Meningkatnya konektivitas antar wilayah	PROGRAM PENGELOLAAN PELAYARAN	Persentase pelabuhan pengumpan sesuai standar (%)	Dinas Perhubungan	3,724,541,726
		Meningkatnya kontribusi pertanian dalam pertumbuhan ekonomi	PROGRAM PENINGKATAN DIVERSIFIKASI DAN KETAHANAN PANGAN MASYARAKAT	Ketersediaan Cadangan Pangan	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian	259,000,000
		Meningkatnya kontribusi pertanian dalam pertumbuhan ekonomi	PROGRAM PENANGANAN KERAWANAN PANGAN	Persentase desa/kelurahan rawan pangan (%)	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian	50,000,000
		Meningkatnya kontribusi pertanian dalam pertumbuhan ekonomi	PROGRAM PENGAWASAN KEAMANAN PANGAN	persentase pengawasan keamanan pangan segar (%)	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian	20,000,000
		Meningkatnya kontribusi pertanian dalam pertumbuhan ekonomi	PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN	Persentase pemanfaatan sarana pertanian yang memenuhi ketentuan (%)	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian	1,830,000,000
		Meningkatnya kontribusi pertanian dalam pertumbuhan ekonomi	PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN	Persentase prasarana pertanian sesuai kebutuhan (%)	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian	730,000,000
		Meningkatnya kontribusi pertanian dalam pertumbuhan ekonomi	PROGRAM PENGENDALIAN KESEHATAN HEWAN DAN KESEHATAN MASYARAKAT VETERINER	Persentase kasus penyakit hewan (%)	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian	612,000,000
		Meningkatnya kontribusi pertanian dalam pertumbuhan ekonomi	PROGRAM PENGENDALIAN DAN PENANGGULANGAN BENCANA PERTANIAN	Persentase bencana pertanian yang tertangani (%)	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian	20,000,000
		Meningkatnya kontribusi pertanian dalam pertumbuhan ekonomi	PROGRAM PENYULUHAN PERTANIAN	Persentase kelompok tani yang dibina (%)	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian	665,000,000
		Meningkatnya konektivitas antar wilayah	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM DRAINASE	Persentase panjang drainase dalam kondisi baik (%)	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Pertanahan	2,170,000,000
		Meningkatnya pemanfaatan tata ruang sesuai RTRW	PROGRAM PENATAAN BANGUNAN GEDUNG	Persentase bangunan gedung pemerintah dalam kondisi baik (%)	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Pertanahan	2,231,193,239

No	Prioritas Pembangunan Kabupaten	Sasaran Prioritas	Program	Indikator Kinerja	SKPD Pelaksana	Jumlah (Rp)
1	2	3	4	5	6	7
		Meningkatnya konektivitas antar wilayah	PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN	Persentase panjang jalan dalam kondisi baik (%)	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Pertanahan	38,111,477,800
		Meningkatnya pemanfaatan tata ruang sesuai RTRW	PROGRAM PENGEMBANGAN JASA KONSTRUKSI	Persentase jasa konstruksi yang terdaftar di Sistem informasi jasa konstruksi (%)	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Pertanahan	605,000,000
		Meningkatnya pemanfaatan tata ruang sesuai RTRW	PROGRAM PENYELENGGARAAN PENATAAN RUANG	Persentase ketaatan terhadap tata ruang (%)	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Pertanahan	1,144,000,000
		Meningkatnya pemanfaatan tata ruang sesuai RTRW	PROGRAM PENYELESAIAN SENGKETA TANAH GARAPAN	Persentase penanganan sengketa tanah garapan yang dilakukan melalui mediasi (%)	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Pertanahan	100,000,000
		Meningkatnya pemanfaatan tata ruang sesuai RTRW	PROGRAM PENYELESAIAN GANTI KERUGIAN DAN SANTUNAN TANAH UNTUK PEMBANGUNAN	Persentase penyelesaian ganti rugi dan santunan tanah (%)	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Pertanahan	560,000,000
		Meningkatnya sektor pariwisata dan ekonomi kreatif dalam memperkuat pertumbuhan ekonomi	PROGRAM PENGEMBANGAN EKSPOR	Nilai Ekspor Non Migas (US\$ juta)	Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Perindustrian dan Perdagangan	30,000,000
		Meningkatnya kontribusi industri pengolahan dalam pertumbuhan ekonomi	PROGRAM PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN INDUSTRI	Persentase terselesaikannya dokumen RPIK (%)	Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Perindustrian dan Perdagangan	11,682,184,000
		-	PROGRAM PENGENDALIAN IZIN USAHA INDUSTRI	-	Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Perindustrian dan Perdagangan	50,000,000
		-	PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM INFORMASI INDUSTRI NASIONAL	-	Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Perindustrian dan Perdagangan	50,000,000
		Meningkatnya sektor pariwisata dan ekonomi kreatif dalam memperkuat pertumbuhan ekonomi	PROGRAM PEMASARAN PARIWISATA	Persentase promosi Tourism, Trade and Investment (TTI) terintegrasi (%)	Dinas Kebudayaan dan Pariwisata	2,653,000,000
		Meningkatnya sektor pariwisata dan ekonomi kreatif dalam memperkuat pertumbuhan ekonomi	PROGRAM PENGEMBANGAN EKONOMI KREATIF MELALUI PEMANFAATAN DAN PERLINDUNGAN HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL	Persentase sub sektor ekonomi kreatif yang dibina (%)	Dinas Kebudayaan dan Pariwisata	213,000,000
		Meningkatnya sektor pariwisata dan ekonomi kreatif dalam memperkuat pertumbuhan ekonomi	PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF	Persentase pelaku usaha kreatif yang dibina (%)	Dinas Kebudayaan dan Pariwisata	15,000,000
		Meningkatnya sektor pariwisata dan ekonomi kreatif dalam memperkuat pertumbuhan ekonomi	PROGRAM PENINGKATAN DAYA TARIK DESTINASI PARIWISATA	Persentase destinasi wisata yang dikembangkan (%)	Dinas Kebudayaan dan Pariwisata	4,867,391,000

No	Prioritas Pembangunan Kabupaten	Sasaran Prioritas	Program	Indikator Kinerja	SKPD Pelaksana	Jumlah (Rp)
1	2	3	4	5	6	7
2	Penguatan Daya Saing Sumber Daya Manusia dan Implementasi Nilai-nilai Budaya Dalam Kehidupan Bermasyarakat	Meningkatnya keamanan dan ketertiban masyarakat	PROGRAM PENGUATAN IDEOLOGI PANCASILA DAN KARAKTER KEBANGSAAN	Persentase Desa/Kelurahan memiliki kader bela negara (%)	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	1,300,000,000
		Meningkatnya keamanan dan ketertiban masyarakat	PROGRAM PENINGKATAN PERAN PARTAI POLITIK DAN LEMBAGA PENDIDIKAN MELALUI PENDIDIKAN POLITIK DAN PENGEMBANGAN ETIKA SERTA BUDAYA POLITIK	Persentase Penduduk yang menggunakan hak pilih dalam Pemilu (%)	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	971,334,618
		Meningkatnya budaya literasi	PROGRAM PEMBINAAN PERPUSTAKAAN	Persentase Perpustakaan Yang Dibina (%)	Dinas Perpustakaan dan Arsip Daerah	335,000,000
		-	PROGRAM PELESTARIAN KOLEKSI NASIONAL DAN NASKAH KUNO	-	Dinas Perpustakaan dan Arsip Daerah	50,000,000
		Meningkatnya birokrasi yang kapabel	PROGRAM PENGELOLAAN ARSIP	Persentase PD yang menerapkan pengelolaan arsip secara baku (%)	Dinas Perpustakaan dan Arsip Daerah	75,000,000
		Meningkatnya derajat kesehatan masyarakat	PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEPEMUDAAN	Jumlah Pemuda (16 -30 Tahun) yang menjadi anggota aktif pada organisasi kepemudaan dan organisasi sosial kemasyarakatan/ Jumlah Pemuda di kabupaten Bintan	Dinas Kepemudaan dan Olahraga	2,462,000,000
		Meningkatnya derajat kesehatan masyarakat	PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEOLAHRAGAAN	Persentase kemenangan tingkat prov/nasional	Dinas Kepemudaan dan Olahraga	1,750,000,000
		Meningkatnya derajat kesehatan masyarakat	PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS KEPRAMUKAAN	Persentase Efektifitas pembinaan dan pengembangan organisasi kepramukaan (%)	Dinas Kepemudaan dan Olahraga	300,000,000
		Meningkatnya kesetaraan dan keadilan gender	PROGRAM PENGARUSUTAMAAN GENDER DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN	Persentase PD yang memiliki data pilah gender (%)	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	220,000,000
		Meningkatnya kesetaraan dan keadilan gender	PROGRAM PERLINDUNGAN PEREMPUAN	Rasio kekerasan terhadap perempuan, termasuk TPPO (per 100.000 penduduk perempuan) (%)	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	165,413,000
		Meningkatnya kesetaraan dan keadilan gender	PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS KELUARGA	Persentase kelembagaaan pemberdayaan perempuan yang dibina (%)	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	450,000,000

No	Prioritas Pembangunan Kabupaten	Sasaran Prioritas	Program	Indikator Kinerja	SKPD Pelaksana	Jumlah (Rp)
1	2	3	4	5	6	7
		Meningkatnya kesetaraan dan keadilan gender	PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM DATA GENDER DAN ANAK	Persentase PD yang memiliki data pilah gender dan anak (%)	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	50,000,000
		Meningkatnya kesetaraan dan keadilan gender	PROGRAM PEMENUHAN HAK ANAK (PHA)	Persentase forum anak desa/kel yang terbentuk (%)	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	80,000,000
		Meningkatnya kesetaraan dan keadilan gender	PROGRAM PERLINDUNGAN KHUSUS ANAK	Persentase anak korban kekerasan yang ditangani instansi terkait kabupaten (%)	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	474,587,000
		Meningkatnya derajat kesehatan masyarakat	PROGRAM PENGENDALIAN PENDUDUK	Angka Kelahiran Remaja Umur 15-19 Tahun (ASFR 15-19)	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	396,800,000
		Meningkatnya derajat kesehatan masyarakat	PROGRAM PEMBINAAN KELUARGA BERENCANA (KB)	m-CPR (%)	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	2,463,395,336
		Meningkatnya derajat kesehatan masyarakat	PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENINGKATAN KELUARGA SEJAHTERA (KS)	Persentase Poktan (BKB, BKR, BKL, UPPKS, PIK-R) aktif (%)	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	850,355,000
		Meningkatnya derajat kesehatan masyarakat	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Persentase Penduduk yang memiliki Jaminan Kesehatan (%)	Dinas Kesehatan	59,947,907,965
		Meningkatnya derajat kesehatan masyarakat	PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN	Persentase Peningkatan pemanfaatan tempat tidur perawatan /BOR (%)	Dinas Kesehatan	1,123,744,100
		Meningkatnya derajat kesehatan masyarakat	PROGRAM SEDIAAN FARMASI, ALAT KESEHATAN DAN MAKANAN MINUMAN	Persentase sediaan Farmasi dan Alkes serta PKRT dan IRTTP yang direkomendasikan (%)	Dinas Kesehatan	491,631,000
		Meningkatnya derajat kesehatan masyarakat	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN	Persentase rumah tangga berperilaku hidup bersih dan sehat (PHBS) (%)	Dinas Kesehatan	6,786,103,000
		Meningkatnya masyarakat yang berpendidikan	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	Tingkat partisipasi warga negara usia 7-12 tahun dalam pendidikan dasar (SD/Mi) (%)	Dinas Pendidikan	95,136,446,900

No	Prioritas Pembangunan Kabupaten	Sasaran Prioritas	Program	Indikator Kinerja	SKPD Pelaksana	Jumlah (Rp)
1	2	3	4	5	6	7
		Berkurangnya kesenjangan pendapatan penduduk	PROGRAM PENATAAN DESA	Persentase Desa yang ditata (%)	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	30,000,000
		Berkurangnya kesenjangan pendapatan penduduk	PROGRAM PENINGKATAN KERJA SAMA DESA	Persentase Desa Tertib administrasi (%)	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	30,000,000
		Berkurangnya kesenjangan pendapatan penduduk	PROGRAM ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DESA	Persentase Lembaga kemasyarakatan dan lembaga adat yang difasilitasi (%)	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	1,199,451,600
		Berkurangnya kesenjangan pendapatan penduduk	PROGRAM PEMBERDAYAAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN, LEMBAGA ADAT DAN MASYARAKAT HUKUM ADAT	Persentase Desa yang melakukan Kerja sama (%)	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	1,100,000,000
		Meningkatnya penanganan pengangguran	PROGRAM PERENCANAAN TENAGA KERJA	Persentase Dokumen Perencanaan Tenaga Kerja Yang Tersusun (%)	Dinas Tenaga Kerja	50,000,000
		Meningkatnya penanganan pengangguran	PROGRAM PELATIHAN KERJA DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA	Persentase Tenaga kerja yang memiliki kompetensi dan sertifikasi (%)	Dinas Tenaga Kerja	1,063,358,534
		Meningkatnya penanganan pengangguran	PROGRAM PENEMPATAN TENAGA KERJA	Persentase Pencari Kerja Terdaftar yang Ditempatkan (%)	Dinas Tenaga Kerja	165,000,000
		Meningkatnya penanganan pengangguran	PROGRAM HUBUNGAN INDUSTRIAL	Persentase Perusahaan yang menerapkan tata kelola kerja yang layak (PP/PKB, LKS Bipartit, Struktur Skala Upah, dan terdaftar peserta BPJS Ketenagakerjaan) (%)	Dinas Tenaga Kerja	1,413,468,800
		Meningkatnya kualitas penanganan kesejahteraan	PROGRAM PEMBERDAYAAN SOSIAL	Persentase PSKS yang dibina (%)	Dinas Sosial	1,609,452,793
		Meningkatnya kualitas penanganan kesejahteraan	PROGRAM PENANGANAN WARGA NEGARA MIGRAN KORBAN TINDAK KEKERASAN	Persentase pekerja migran korban kekerasan yang mendapatkan penanganan (%)	Dinas Sosial	61,600,000
		Meningkatnya kualitas penanganan kesejahteraan	PROGRAM REHABILITASI SOSIAL	-	Dinas Sosial	1,244,673,500
		Meningkatnya kualitas penanganan kesejahteraan	PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL	Persentase penduduk miskin yang mendapatkan bantuan jaminan sosial (%)	Dinas Sosial	8,838,774,506
		Meningkatnya kualitas penanganan kesejahteraan	PROGRAM PENANGANAN BENCANA	Persentase korban bencana alam dan sosial yang terpenuhi kebutuhan dasarnya pada saat dan setelah tanggap darurat bencana (%)	Dinas Sosial	508,479,810
		Meningkatnya kualitas penanganan kesejahteraan	PROGRAM PENGELOLAAN TAMAN MAKAM PAHLAWAN	Persentase pemenuhan standar sarana dan prasarana Taman Makam Pahlawan (%)	Dinas Sosial	61,919,637

No	Prioritas Pembangunan Kabupaten	Sasaran Prioritas	Program	Indikator Kinerja	SKPD Pelaksana	Jumlah (Rp)
1	2	3	4	5	6	7
		Meningkatnya capaian infrastruktur dasar	PROGRAM PENGEMBANGAN PERUMAHAN	Persentase rumah layak huni bagi korban bencana kabupaten/ kota (%)	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	300,000,000
		Meningkatnya capaian infrastruktur dasar	PROGRAM KAWASAN PERMUKIMAN	Persentase kawasan permukiman yang tertata (%)	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	2,625,000,000
		Meningkatnya capaian infrastruktur dasar	PROGRAM PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN KUMUH	Jumlah Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni untuk pencegahan terhadap Tumbuh dan Berkembangnya Permukiman Kumuh di luar Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di bawah 10 (sepuluh) Ha (unit)	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	2,537,500,000
		Meningkatnya capaian infrastruktur dasar	PROGRAM PENINGKATAN PRASARANA, SARANA DAN UTILITAS UMUM (PSU)	Jumlah lampu jalan yang telah terpasang (titik)	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	16,401,374,774
		Meningkatnya capaian infrastruktur dasar	PROGRAM PENINGKATAN PELAYANAN SERTIFIKASI, KUALIFIKASI, KLASIFIKASI, DAN REGISTRASI BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN	Persentase pengembang yang memiliki kualifikasi (%)	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	25,000,000
		Meningkatnya pemajuan dan pelestarian budaya	PROGRAM PENGEMBANGAN KEBUDAYAAN	Persentase budaya yang dibina (%)	Dinas Kebudayaan dan Pariwisata	1,474,890,000
		Meningkatnya pemajuan dan pelestarian budaya	PROGRAM PELESTARIAN DAN PENGELOLAAN CAGAR BUDAYA	Persentase Cagar Budaya yang dilestarikan (%)	Dinas Kebudayaan dan Pariwisata	50,000,000
		Meningkatnya pemajuan dan pelestarian budaya	PROGRAM PENGELOLAAN PERMUSEUMAN	Persentase museum yang dikelola dengan baik (%)	Dinas Kebudayaan dan Pariwisata	50,000,000
		Meningkatnya pengurangan resiko bencana	PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA	Persentase warga negara yang memperoleh layanan informasi rawan bencana (%)	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	803,750,000
		Meningkatnya pengurangan resiko bencana	PROGRAM PENCEGAHAN, PENANGGULANGAN, PENYELAMATAN KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN NON KEBAKARAN	Persentase cakupan pelayanan bencana kebakaran dan non kebakaran (%)	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	404,000,000
		Berkurangnya kesenjangan pendapatan penduduk	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase kelembagaan aktif di Tingkat Desa (%)	Seluruh Kecamatan	10,441,908,810
		Berkurangnya kesenjangan pendapatan penduduk	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Persentase Desa yang dilakukan pembinaan dan pengawasan (%)	Seluruh Kecamatan	177,866,800
		Meningkatnya masyarakat yang berpendidikan	PROGRAM PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN	Persentase guru yang memenuhi kualifikasi (%)	Dinas Pendidikan	80,000,000
		Meningkatnya masyarakat yang berpendidikan	PROGRAM PENGEMBANGAN KURIKULUM	Persentase Ketersediaan Kurikulum Muatan Lokal (%)	Dinas Pendidikan	130,000,000

No	Prioritas Pembangunan Kabupaten	Sasaran Prioritas	Program	Indikator Kinerja	SKPD Pelaksana	Jumlah (Rp)
1	2	3	4	5	6	7
3	Pemerataan Infrastruktur Wilayah, Pengelolaan Lingkungan Hidup Berkelanjutan, dan Ketahanan Bencana	Meningkatnya keamanan dan ketertiban masyarakat	PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENGAWASAN ORGANISASI KEMASYARAKATAN	Persentase Ormas/LSM/LNL yang aktif (%)	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	50,000,000
		Meningkatnya keamanan dan ketertiban masyarakat	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN KETAHANAN EKONOMI, SOSIAL, DAN BUDAYA	Persentase Pembinaan Organisasi Keagamaan dan Organisasi Kemasyarakatan (%)	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	60,000,000
		Meningkatnya keamanan dan ketertiban masyarakat	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Persentase gangguan keamanan yang dilaporkan di Kecamatan (%)	Seluruh Kecamatan	258,164,200
		Meningkatnya keamanan dan ketertiban masyarakat	PROGRAM PENINGKATAN KEWASPADAAN NASIONAL DAN PENINGKATAN KUALITAS DAN FASILITASI PENANGANAN KONFLIK SOSIAL	Persentase kasus konflik yang ditangani (%)	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	1,610,000,000
		Meningkatnya kualitas lingkungan hidup	PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN/ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP	Persentase cakupan pemeriksaan kualitas udara dan air yang memiliki kualitas baku mutu (%)	Dinas Lingkungan Hidup	490,000,000
		Meningkatnya kualitas lingkungan hidup	PROGRAM PENGELOLAAN KEANEKARAGAMAN HAYATI (KEHATI)	Persentase RTH yang terkelola (%)	Dinas Lingkungan Hidup	3,556,000,000
		Meningkatnya kualitas lingkungan hidup	PROGRAM PENGENDALIAN BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (B3) DAN LIMBAH BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (LIMBAH B3)	Persentase fasilitasi pemenuhan komitmen izin pengelolaan limbah B3 (%)	Dinas Lingkungan Hidup	39,000,000
		Meningkatnya kualitas lingkungan hidup	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN TERHADAP IZIN LINGKUNGAN DAN IZIN PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP (PPLH)	Persentase rekomendasi izin lingkungan yang diterbitkan (%)	Dinas Lingkungan Hidup	162,808,310
		Meningkatnya kualitas lingkungan hidup	PROGRAM PENINGKATAN PENDIDIKAN, PELATIHAN DAN PENYULUHAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT	Persentase masyarakat memperoleh pendidikan, pelatihan dan penyuluhan lingkungan hidup (%)	Dinas Lingkungan Hidup	50,000,000
		Meningkatnya kualitas lingkungan hidup	PROGRAM PENGHARGAAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT	Persentase Jumlah tokoh/lembaga masyarakat/sekolah/dunia usaha yang mendapat penghargaan lingkungan tingkat Kabupaten (%)	Dinas Lingkungan Hidup	50,000,000
		Meningkatnya kualitas lingkungan hidup	PROGRAM PENANGANAN PENGADUAN LINGKUNGAN HIDUP	Pengaduan Masyarakat Terkait Izin Lingkungan dan Izin PPLH di Lokasi Dunia Usaha dan Dampaknya di Daerah (%)	Dinas Lingkungan Hidup	15,000,000

No	Prioritas Pembangunan Kabupaten	Sasaran Prioritas	Program	Indikator Kinerja	SKPD Pelaksana	Jumlah (Rp)
1	2	3	4	5	6	7
		Meningkatnya kualitas lingkungan hidup	PROGRAM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN	Persentase Sampah Yang Terkurangi Melalui 3 R (Reduce, Reuse, Recycle) dan Bank Sampah (%)	Dinas Lingkungan Hidup	16,050,061,181
		Meningkatnya keamanan dan ketertiban masyarakat	PROGRAM PENINGKATAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Persentase gangguan trantibum yang dapat diselesaikan (%)	Satuan Polisi Pamong Praja	405,000,000
		Meningkatnya capaian infrastruktur dasar	PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA)	Persentase panjang pengaman pantai yang terbangun sesuai kebutuhan (%)	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Pertanahan	2,726,449,993
		Meningkatnya capaian infrastruktur dasar	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM	Persentase rumah tangga yang tersambung dengan air minum (%)	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Pertanahan	2,300,000,000
		Meningkatnya capaian infrastruktur dasar	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM AIR LIMBAH	Persentase rumah tangga yang terakses pengelolaan limbah domestik sesuai standar (%)	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Pertanahan	1,213,003,400
4	Pemantapan Tata Kelola Reformasi Birokrasi yang Adaptif dan Kolaboratif	Meningkatnya birokrasi yang bersih dan akuntabel	PROGRAM PENYELENGGARAAN PENGAWASAN	Persentase Obrik yang telah dilakukan Pengawasan (%)	Inspektorat Daerah	1,173,000,000
		Meningkatnya birokrasi yang bersih dan akuntabel	PROGRAM PERUMUSAN KEBIJAKAN, PENDAMPINGAN DAN ASISTENSI	Persentase Pegawai Bersertifikasi Fungsional dan Teknis (%)	Inspektorat Daerah	598,000,000
		Meningkatnya pelayanan publik yang prima	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase kebutuhan penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah yang terpenuhi (%)	Seluruh Perangkat Daerah	714,025,167,498
		Meningkatnya birokrasi yang kapabel	PROGRAM KEPEGAWAIAN DAERAH	Persentase Pemenuhan ASN Sesuai Kebutuhan (%)	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	1,385,000,000
		Meningkatnya birokrasi yang kapabel	PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA	Persentase ASN yang memiliki Kompetensi Kepemimpinan dan Fungsional (%)	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	150,000,000
		Meningkatnya birokrasi yang bersih dan akuntabel	PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH	Laporan Keuangan yang mendapat opini wajar	Badan Keuangan dan Aset Daerah	133,761,317,222
		Meningkatnya birokrasi yang bersih dan akuntabel	PROGRAM PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH	Persentase Aset Daerah yang dikelola dengan baik (%)	Badan Keuangan dan Aset Daerah	1,899,000,000
		Meningkatnya birokrasi yang bersih dan akuntabel	PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH	Persentase realisasi Pajak dan Retribusi Daerah terhadap PAD (%)	Badan Pendapatan Daerah	3,346,830,000
		Meningkatnya birokrasi yang bersih dan akuntabel	PROGRAM PERENCANAAN, PENGENDALIAN DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH	Persentase capaian kinerja perencanaan OPD rumpun bidang PPM	Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah	3,248,275,000

No	Prioritas Pembangunan Kabupaten	Sasaran Prioritas	Program	Indikator Kinerja	SKPD Pelaksana	Jumlah (Rp)
1	2	3	4	5	6	7
		Meningkatnya birokrasi yang bersih dan akuntabel	PROGRAM KOORDINASI DAN SINKRONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	Persentase Kesesuaian Dokumen Perencanaan Sesuai Ketentuan (RPJMD, RPJPD, RKPD, P-RKPD)	Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah	2,295,000,000
		Meningkatnya kualitas inovasi daerah	PROGRAM PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH	Persentase kegiatan kelitbangan utama yang diimplementasikan (%)	Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah	1,300,000,000
		Meningkatnya birokrasi yang kapabel	PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT	Persentase Kebijakan daerah bidang pemerintahan dan kesejahteraan rakyat yang tersedia (%)	Sekretariat Daerah	28,905,881,498
		Meningkatnya birokrasi yang kapabel	PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN	Persentase Kebijakan daerah bidang perkonomian dan pembangunan yang tersedia (%)	Sekretariat Daerah	1,236,656,684
		Perencanaan dan kerjasama di perbatasan	PROGRAM PENGELOLAAN PERBATASAN	Persentase daerah pulau terluar yang dikelola	Sekretariat Daerah	350,000,000
		Meningkatnya pelayanan publik yang prima	PROGRAM DUKUNGAN PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI DPRD	Persentase terwujudnya dukungan pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD	Sekretariat DPRD	15,442,093,730
		Meningkatnya birokrasi yang kapabel	PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK	Persentase masyarakat yang menjadi sasaran penyebaran informasi publik, mengetahui kebijakan dan program prioritas pemerintah dan pemerintah daerah kabupaten /kota	Dinas Komunikasi dan Informatika	3,094,630,849
		Meningkatnya birokrasi yang kapabel	PROGRAM PENGELOLAAN APLIKASI INFORMATIKA	Persentase Layanan Publik yang diselenggarakan secara online dan terintegrasi	Dinas Komunikasi dan Informatika	3,769,550,000
		Meningkatnya birokrasi yang kapabel	PROGRAM PENYELENGGARAAN STATISTIK SEKTORAL	Persentase PD yang menggunakan data statistik dalam menyusun perencanaan pembangunan daerah (%)	Dinas Komunikasi dan Informatika	100,000,000
		Meningkatnya birokrasi yang kapabel	PROGRAM PENYELENGGARAAN PERSANDIAN UNTUK PENGAMANAN INFORMASI	Persentase perangkat daerah yang mengimplementasikan keamanan informasi (%)	Dinas Komunikasi dan Informatika	200,000,000
		Meningkatnya pelayanan publik yang prima	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Persentase kegiatan pemerintahan dan pelayanan publik yang diselenggarakan (%)	Seluruh Kecamatan	933,261,393
		Meningkatnya keamanan dan ketertiban masyarakat	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Persentase urusan Pemerintahan Umum yang diselenggarakan (%)	Seluruh Kecamatan	90,223,110
		Meningkatnya pelayanan publik yang prima	PROGRAM PENDAFTARAN PENDUDUK	Perekaman KTP elektronik (%)	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	107,650,000

No	Prioritas Pembangunan Kabupaten	Sasaran Prioritas	Program	Indikator Kinerja	SKPD Pelaksana	Jumlah (Rp)
1	2	3	4	5	6	7
		Meningkatnya pelayanan publik yang prima	PROGRAM PENCATATAN SIPIL	Kepemilikan akta kelahiran (%)	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	91,491,615
		Meningkatnya pelayanan publik yang prima	PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN	Persentase ketersediaan data bidang kependudukan dalam perencanaan pembangunan daerah sesuai standar kebutuhan layanan data (%)	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	515,421,000
		Meningkatnya pelayanan publik yang prima	PROGRAM PENGELOLAAN PROFIL KEPENDUDUKAN	Persentase tersedianya profil kependudukan sesuai peraturan	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	32,547,000
Total						1.257.632.139.531

BAB IV

PLAFON ANGGARAN SEMENTARA BEDASARKAN URUSAN PEMERINTAHAN DAN PROGRAM/KEGIATAN

4.1 Plafon Anggaran Sementara Berdasarkan Urusan Pemerintahan

Berdasarkan ketentuan Pasal 24 ayat (5) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah bahwa Pengeluaran Daerah yang dianggarkan dalam APBD merupakan rencana Pengeluaran Daerah sesuai dengan kepastian tersedianya dana atas Penerimaan Daerah dalam jumlah yang cukup serta setiap Pengeluaran Daerah harus memiliki dasar hukum yang melandasinya. Sebagaimana disebutkan pula pada ketentuan pasal 49 ayat (1) Peraturan Pemerintah tersebut bahwa belanja daerah dipergunakan dalam rangka pelaksanaan urusan Pemerintahan Daerah yang menjadi kewenangan Pemerintah Kabupaten.

Berdasarkan ketentuan Pasal 49 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah disebutkan bahwa Belanja Daerah digunakan untuk mendanai pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah. Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah terdiri atas Urusan Pemerintahan Wajib dan Urusan Pemerintahan Pilihan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Urusan Pemerintahan Wajib terdiri atas Urusan Pemerintahan Wajib yang terkait Pelayanan Dasar dan Urusan Pemerintahan Wajib yang tidak terkait Pelayanan Dasar. Urusan Pemerintahan Pilihan sesuai dengan potensi yang dimiliki Daerah.

Sesuai peraturan perundangan bahwa belanja penyelenggaraan urusan wajib diprioritaskan untuk melindungi dan meningkatkan kualitas kehidupan masyarakat dalam upaya memenuhi kewajiban daerah yang diwujudkan dalam bentuk peningkatan pelayanan dasar, pendidikan, kesehatan, fasilitas sosial dan fasilitas umum yang layak serta mengembangkan sistem jaminan sosial. Peningkatan kualitas kehidupan masyarakat diwujudkan melalui prestasi kerja dalam pencapaian standar pelayanan minimal sesuai dengan peraturan perundangan-undangan. Belanja Daerah untuk pendanaan

Urusan Pemerintahan Pilihan dialokasikan sesuai dengan prioritas daerah dan potensi yang dimiliki Daerah.

Pemerintah Daerah wajib mengalokasikan belanja untuk mendanai Urusan Pemerintahan daerah yang besarnya telah ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Dalam hal Daerah tidak memenuhi alokasi belanja sebagaimana dimaksud diatas menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang keuangan melakukan penundaan dan/atau pemotongan penyaluran Dana Transfer Umum, setelah berkoordinasi dengan Menteri dan menteri teknis terkait.

Berdasarkan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir perubahan dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, bahwa urusan pemerintahan terdiri dari Urusan pemerintahan wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar meliputi : (a) pendidikan, (b) kesehatan, (c) pekerjaan umum dan penataan ruang, (d) perumahan rakyat dan kawasan permukiman, (e) ketentraman, ketertiban umum, dan perlindungan masyarakat, dan (f) sosial. Urusan Pemerintahan Wajib yang tidak berkaitan dengan pelayanan dasar meliputi : (a) tenaga kerja, (b) pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak, (c) pangan, (d) pertanahan, (e) lingkungan hidup, (f) administrasi kependudukan dan pencatatan sipil, (g) pemberdayaan masyarakat dan desa, (h) pengendalian penduduk dan keluarga berencana, (i) perhubungan, (j) komunikasi dan informatika, (k) koperasi, usaha kecil, dan menengah, (l) penanaman modal, (m) kepemudaan dan olahraga, (n) statistik, (o) persandian, (p) kebudayaan, (q) perpustakaan, dan (r) kearsipan.

Urusan Pemerintahan Pilihan terdiri dari : (a) kelautan dan perikanan, (b) pariwisata, (c) pertanian, (d) energi dan sumber daya mineral, (e) perdagangan, (f) perindustrian, dan (g) transmigrasi. Pada tiap-tiap urusan tersebut, terdapat program dan kegiatan prioritas sebagaimana diamanatkan oleh RPJMD dengan fokus pada isu yang berkembang serta dengan memperhatikan prioritas program Pemerintah dan Provinsi Jawa Barat.

Selain Urusan Pemerintahan sebagaimana disebutkan pada alinea diatas, terdapat penunjang Urusan Pemerintahan. Penunjang Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah meliputi :

1. perencanaan;
2. keuangan;
3. kepegawaian serta pendidikan dan pelatihan;
4. penelitian dan pengembangan; dan
5. fungsi lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Perangkat Daerah diwajibkan untuk menyusun dan mengajukan rencana program, kegiatan dan anggaran masing-masing selama satu tahun anggaran sesuai dengan program dan kegiatan utama yang telah ditetapkan (RKPD dan KU-APBD) sesuai prioritas program dan plafon anggaran yang menunjukkan skala atau peringkat program atau kegiatan utama. Tujuan ditetapkannya plafon anggaran adalah agar perangkat daerah dapat menyusun anggaran belanjanya secara terkendali dan terkoordinasi. Untuk itu diharapkan jumlah anggaran belanja yang diusulkannya tidak melebihi plafon anggaran yang telah ditetapkan. Dengan demikian alokasi sumber daya secara strategis perlu dibatasi dengan pagu yang realistis agar tekanan pengeluaran/pembelanjaan tidak mengganggu pencapaian tujuan pembangunan daerah.

Belanja Daerah disusun berpedoman pada standar harga satuan regional, analisis standar belanja, dan/atau standar teknis sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, berpedoman pada standar harga satuan regional, analisis standar belanja, dan/atau standar teknis sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pengeluaran Daerah atau Rencana Belanja Daerah pada tahun anggaran 2025 didasarkan pada kemampuan keuangan Pemerintah Kabupaten Bintan adalah sebesar Rp.1.266.632.139.531,- yang terdiri dari Belanja Operasi, Belanja Modal, Belanja Tidak terduga dan Belanja transfer. Untuk lebih jelasnya plafon anggaran sementara masing-masing urusan pemerintahan dan per OPD dapat dilihat sebagaimana tabel dibawah ini :

Tabel IV.1.
PLAFON ANGGARAN SEMENTARA BERDASARKAN URUSAN PEMERINTAHAN
DAN PERANGKAT DAERAH

Kode	Nama Perangkat Daerah / Unit Kerja	Plafon Anggaran Sementara	Ket
1	2	3	4
1.	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	648,481,266,350.00	
1.01.	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN	286,997,039,451.00	
1.01.0.00.0.00.01.0000.	Dinas Pendidikan	286,997,039,451.00	
1.01.0.00.0.00.01.0000.	Dinas Pendidikan	286,997,039,451.00	
1.02.	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN	216,878,989,549.00	
1.02.0.00.0.00.01.0000.	Dinas Kesehatan	216,878,989,549.00	
1.02.0.00.0.00.01.0000.	Dinas Kesehatan	146,193,892,214.00	
1.02.0.00.0.00.01.0001.	Puskesmas Berakit	928,590,807.00	
1.02.0.00.0.00.01.0002.	Puskesmas Toapaya	1,834,535,202.00	
1.02.0.00.0.00.01.0003.	PPK BLUD PUSKESMAS TELUK SASAH	1,474,963,611.00	
1.02.0.00.0.00.01.0004.	PPK BLUD PUSKESMAS KIJANG	2,393,660,948.00	
1.02.0.00.0.00.01.0005.	PPK BLUD PUSKESMAS TANJUNG UBAN	2,586,580,597.00	
1.02.0.00.0.00.01.0006.	PUSKESMAS SEI LEKOP	1,895,398,538.00	
1.02.0.00.0.00.01.0007.	PUSKESMAS NUMBING	969,613,432.00	
1.02.0.00.0.00.01.0008.	PUSKESMAS KELONG	1,383,657,173.00	
1.02.0.00.0.00.01.0009.	PPK BLUD PUSKESMAS KAWAL	2,230,961,860.00	
1.02.0.00.0.00.01.0010.	PUSKESMAS TELUK BINTAN	1,264,161,798.00	
1.02.0.00.0.00.01.0011.	PUSKESMAS SRI BINTAN	1,482,916,567.00	
1.02.0.00.0.00.01.0012.	PUSKESMAS TAMBELAN	2,075,606,603.00	
1.02.0.00.0.00.01.0013.	PUSKESMAS KUALA SEMPANG	1,431,134,072.00	
1.02.0.00.0.00.01.0014.	PUSKESMAS MANTANG	1,671,709,560.00	
1.02.0.00.0.00.01.0015.	PPK BLUD TELUK SEBONG	2,390,075,067.00	
1.02.0.00.0.00.01.0016.	RUMAH SAKIT UMUM DAERAH	43,933,775,000.00	
1.02.0.00.0.00.01.0017.	UPT BALAI PENGELOLAAN FARMASI DAN ALKES	737,756,500.00	
1.03.	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	62,882,418,633.00	
1.03.2.10.0.00.01.0000.	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Pertanahan	62,882,418,633.00	
1.03.2.10.0.00.01.0000.	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Pertanahan	62,882,418,633.00	
1.04.	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN	37,763,401,158.00	
1.04.0.00.0.00.01.0000.	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	37,763,401,158.00	
1.04.0.00.0.00.01.0000.	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	37,763,401,158.00	
1.05.	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT	26,950,610,380.00	
1.05.0.00.0.00.01.0000.	Satuan Polisi Pamong Praja	16,387,522,503.00	
1.05.0.00.0.00.01.0000.	Satuan Polisi Pamong Praja	16,387,522,503.00	
1.05.0.00.0.00.02.0000.	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	10,563,087,877.00	
1.05.0.00.0.00.02.0000.	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	10,563,087,877.00	
1.06.	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL	17,008,807,179.00	
1.06.0.00.0.00.01.0000.	Dinas Sosial	17,008,807,179.00	
1.06.0.00.0.00.01.0000.	Dinas Sosial	17,008,807,179.00	
2.	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	135,175,376,230.00	
2.07.	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TENAGA KERJA	5,950,216,229.00	

Kode	Nama Perangkat Daerah / Unit Kerja	Plafon Anggaran Sementara	Ket
1	2	3	4
2.07.0.00.0.00.01.0000.	Dinas Tenaga Kerja	5,950,216,229.00	
2.07.0.00.0.00.01.0000.	Dinas Tenaga Kerja	5,950,216,229.00	
2.08.	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK	6,228,538,959.00	
2.08.2.14.0.00.01.0000.	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	6,228,538,959.00	
2.08.2.14.0.00.01.0000.	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	6,228,538,959.00	
2.09.	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PANGAN	12,197,313,155.00	
2.09.3.27.0.00.01.0000.	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian	12,197,313,155.00	
2.09.3.27.0.00.01.0000.	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian	12,197,313,155.00	
2.10.	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANAHAN	660,000,000.00	
1.03.2.10.0.00.01.0000.	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Pertanahan	660,000,000.00	
1.03.2.10.0.00.01.0000.	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Pertanahan	660,000,000.00	
2.11.	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP	25,294,756,622.00	
2.11.0.00.0.00.01.0000.	Dinas Lingkungan Hidup	25,294,756,622.00	
2.11.0.00.0.00.01.0000.	Dinas Lingkungan Hidup	25,294,756,622.00	
2.12.	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL	6,810,450,987.00	
2.12.0.00.0.00.01.0000.	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	6,810,450,987.00	
2.12.0.00.0.00.01.0000.	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	6,810,450,987.00	
2.13.	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA	6,643,818,311.00	
2.13.0.00.0.00.01.0000.	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	6,643,818,311.00	
2.13.0.00.0.00.01.0000.	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	6,643,818,311.00	
2.14.	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA	3,710,550,336.00	
2.08.2.14.0.00.01.0000.	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	3,710,550,336.00	
2.08.2.14.0.00.01.0000.	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	3,710,550,336.00	
2.15.	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN	14,582,577,601.00	
2.15.0.00.0.00.01.0000.	Dinas Perhubungan	14,582,577,601.00	
2.15.0.00.0.00.01.0000.	Dinas Perhubungan	14,582,577,601.00	
2.16.	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	13,628,227,245.00	
2.16.2.20.2.21.01.0000.	Dinas Komunikasi dan Informatika	13,628,227,245.00	
2.16.2.20.2.21.01.0000.	Dinas Komunikasi dan Informatika	13,628,227,245.00	
2.17.	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOPERASI, USAHA KECIL, DAN MENENGAH	9,960,561,302.00	
2.17.3.31.3.30.01.0000.	Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Perindustrian dan Perdagangan	9,960,561,302.00	
2.17.3.31.3.30.01.0000.	Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Perindustrian dan Perdagangan	9,960,561,302.00	
2.18.	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENANAMAN MODAL	7,446,947,296.00	
2.18.0.00.0.00.01.0000.	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	7,446,947,296.00	
2.18.0.00.0.00.01.0000.	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	7,446,947,296.00	
2.19.	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA	9,179,469,338.00	
2.19.0.00.0.00.01.0000.	Dinas Kepemudaan dan Olahraga	9,179,469,338.00	
2.19.0.00.0.00.01.0000.	Dinas Kepemudaan dan Olahraga	9,179,469,338.00	
2.20.	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG STATISTIK	100,000,000.00	
2.16.2.20.2.21.01.0000.	Dinas Komunikasi dan Informatika	100,000,000.00	
2.16.2.20.2.21.01.0000.	Dinas Komunikasi dan Informatika	100,000,000.00	

Kode	Nama Perangkat Daerah / Unit Kerja	Plafon Anggaran Sementara	Ket
1	2	3	4
2.21.	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERSANDIAN	200,000,000.00	
2.16.2.20.2.21.01.0000.	Dinas Komunikasi dan Informatika	200,000,000.00	
2.16.2.20.2.21.01.0000.	Dinas Komunikasi dan Informatika	200,000,000.00	
2.22.	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEBUDAYAAN	7,616,039,706.00	
2.22.3.26.0.00.01.0000.	Dinas Kebudayaan dan Pariwisata	7,616,039,706.00	
2.22.3.26.0.00.01.0000.	Dinas Kebudayaan dan Pariwisata	7,616,039,706.00	
2.23.	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERPUSTAKAAN	4,890,909,143.00	
2.23.2.24.0.00.01.0000.	Dinas Perpustakaan dan Arsip Daerah	4,890,909,143.00	
2.23.2.24.0.00.01.0000.	Dinas Perpustakaan dan Arsip Daerah	4,890,909,143.00	
2.24.	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEARSIPAN	75,000,000.00	
2.23.2.24.0.00.01.0000.	Dinas Perpustakaan dan Arsip Daerah	75,000,000.00	
2.23.2.24.0.00.01.0000.	Dinas Perpustakaan dan Arsip Daerah	75,000,000.00	
3.	URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN	42,510,870,466.00	
3.25.	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN	17,109,120,746.00	
3.25.0.00.0.00.01.0000.	Dinas Perikanan	17,109,120,746.00	
3.25.0.00.0.00.01.0000.	Dinas Perikanan	17,109,120,746.00	
3.26.	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PARIWISATA	7,748,391,000.00	
2.22.3.26.0.00.01.0000.	Dinas Kebudayaan dan Pariwisata	7,748,391,000.00	
2.22.3.26.0.00.01.0000.	Dinas Kebudayaan dan Pariwisata	7,748,391,000.00	
3.27.	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN	4,791,174,720.00	
2.09.3.27.0.00.01.0000.	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian	4,791,174,720.00	
2.09.3.27.0.00.01.0000.	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian	4,791,174,720.00	
3.30.	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERDAGANGAN	500,000,000.00	
2.17.3.31.3.30.01.0000.	Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Perindustrian dan Perdagangan	500,000,000.00	
2.17.3.31.3.30.01.0000.	Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Perindustrian dan Perdagangan	500,000,000.00	
3.31.	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERINDUSTRIAN	12,362,184,000.00	
2.17.3.31.3.30.01.0000.	Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Perindustrian dan Perdagangan	12,362,184,000.00	
2.17.3.31.3.30.01.0000.	Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Perindustrian dan Perdagangan	12,362,184,000.00	
4.	UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN	111,339,375,103.00	
4.01.	SEKRETARIAT DAERAH	72,417,800,527.00	
4.01.0.00.5.06.01.0000.	Sekretariat Daerah	72,417,800,527.00	
4.01.0.00.5.06.01.0000.	Sekretariat Daerah	72,417,800,527.00	
4.02.	SEKRETARIAT DPRD	38,921,574,576.00	
4.02.0.00.0.00.01.0000.	Sekretariat DPRD	38,921,574,576.00	
4.02.0.00.0.00.01.0000.	Sekretariat DPRD	38,921,574,576.00	
5.	UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN	251,338,196,288.00	
5.01.	PERENCANAAN	14,686,720,752.00	
5.01.5.05.0.00.01.0000.	Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah	14,686,720,752.00	
5.01.5.05.0.00.01.0000.	Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah	14,686,720,752.00	
5.02.	KEUANGAN	177,400,262,595.00	
5.02.0.00.0.00.01.0000.	Badan Keuangan dan Aset Daerah	155,223,486,347.00	
5.02.0.00.0.00.01.0000.	Badan Keuangan dan Aset Daerah	155,223,486,347.00	
5.02.0.00.0.00.02.0000.	Badan Pendapatan Daerah	22,176,776,248.00	
5.02.0.00.0.00.02.0000.	Badan Pendapatan Daerah	22,176,776,248.00	
5.03.	KEPEGAWAIAN	57,465,702,941.00	

Kode	Nama Perangkat Daerah / Unit Kerja	Plafon Anggaran Sementara	Ket
1	2	3	4
5.03.5.04.0.00.01.0000.	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	57,465,702,941.00	
5.03.5.04.0.00.01.0000.	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	57,465,702,941.00	
5.04.	PENDIDIKAN DAN PELATIHAN	150,000,000.00	
5.03.5.04.0.00.01.0000.	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	150,000,000.00	
5.03.5.04.0.00.01.0000.	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	150,000,000.00	
5.05.	PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN	1,300,000,000.00	
5.01.5.05.0.00.01.0000.	Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah	1,300,000,000.00	
5.01.5.05.0.00.01.0000.	Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah	1,300,000,000.00	
5.06.	PENGELOLAAN PERBATASAN	335,510,000.00	
4.01.0.00.5.06.01.0000.	Sekretariat Daerah	335,510,000.00	
4.01.0.00.5.06.01.0000.	Sekretariat Daerah	335,510,000.00	
6.	UNSUR PENGAWASAN URUSAN PEMERINTAHAN	10,043,467,459.00	
6.01.	INSPEKTORAT DAERAH	10,043,467,459.00	
6.01.0.00.0.00.01.0000.	Inspektorat Daerah	10,043,467,459.00	
6.01.0.00.0.00.01.0000.	Inspektorat Daerah	10,043,467,459.00	
7.	UNSUR KEWILAYAHAN	59,001,555,484.00	
7.01.	KECAMATAN	59,001,555,484.00	
7.01.0.00.0.00.01.0000.	Kecamatan Bintan Utara	9,392,317,426.00	
7.01.0.00.0.00.01.0000.	Kecamatan Bintan Utara	7,588,650,526.00	
7.01.0.00.0.00.01.0001.	KELURAHAN TANJUNG UBAN UTARA	529,827,000.00	
7.01.0.00.0.00.01.0002.	KELURAHAN TANJUNG UBAN TIMUR	278,699,500.00	
7.01.0.00.0.00.01.0003.	KELURAHAN TANJUNG UBAN KOTA	616,684,500.00	
7.01.0.00.0.00.01.0004.	KELURAHAN TANJUNG UBAN SELATAN	378,455,900.00	
7.01.0.00.0.00.02.0000.	Kecamatan Bintan Pesisir	3,582,033,088.00	
7.01.0.00.0.00.02.0000.	Kecamatan Bintan Pesisir	3,582,033,088.00	
7.01.0.00.0.00.03.0000.	Kecamatan Tambelan	4,637,534,357.00	
7.01.0.00.0.00.03.0000.	Kecamatan Tambelan	4,335,254,357.00	
7.01.0.00.0.00.03.0001.	KELURAHAN TELUK SEKUNI	302,280,000.00	
7.01.0.00.0.00.04.0000.	Kecamatan Mantang	3,521,624,738.00	
7.01.0.00.0.00.04.0000.	Kecamatan Mantang	3,521,624,738.00	
7.01.0.00.0.00.05.0000.	Kecamatan Toapaya	4,988,974,013.00	
7.01.0.00.0.00.05.0000.	Kecamatan Toapaya	4,536,079,013.00	
7.01.0.00.0.00.05.0001.	KELURAHAN TOAPAYA ASRI	452,895,000.00	
7.01.0.00.0.00.06.0000.	Kecamatan Teluk Sebong	4,555,860,171.00	
7.01.0.00.0.00.06.0000.	Kecamatan Teluk Sebong	4,205,217,571.00	
7.01.0.00.0.00.06.0001.	KELURAHAN KOTA BARU	350,642,600.00	
7.01.0.00.0.00.07.0000.	Kecamatan Teluk Bintan	4,640,509,757.00	
7.01.0.00.0.00.07.0000.	Kecamatan Teluk Bintan	4,220,509,757.00	
7.01.0.00.0.00.07.0001.	KELURAHAN TEMBELING TANJUNG	420,000,000.00	
7.01.0.00.0.00.08.0000.	Kecamatan Gunung Kijang	5,638,483,577.00	
7.01.0.00.0.00.08.0000.	Kecamatan Gunung Kijang	5,218,483,577.00	
7.01.0.00.0.00.08.0001.	KELURAHAN KAWAL	420,000,000.00	
7.01.0.00.0.00.09.0000.	Kecamatan Bintan Timur	11,539,879,452.00	
7.01.0.00.0.00.09.0000.	Kecamatan Bintan Timur	8,872,599,452.00	
7.01.0.00.0.00.09.0001.	KELURAHAN SUNGAI ENAM	384,642,500.00	
7.01.0.00.0.00.09.0002.	KELURAHAN SUNGAI LEKOP	605,927,500.00	

Kode	Nama Perangkat Daerah / Unit Kerja	Plafon Anggaran Sementara	Ket
1	2	3	4
7.01.0.00.0.00.09.0003.	KELURAHAN KIJANG KOTA	1,238,212,500.00	
7.01.0.00.0.00.09.0004.	KELURAHAN GUNUNG LENGKUAS	438,497,500.00	
7.01.0.00.0.00.10.0000.	Kecamatan Seri Kuala Lobam	6,504,338,905.00	
7.01.0.00.0.00.10.0000.	Kecamatan Seri Kuala Lobam	5,686,226,905.00	
7.01.0.00.0.00.10.0001.	KELURAHAN TANJUNG PERMAI	421,827,000.00	
7.01.0.00.0.00.10.0002.	KELURAHAN TELUK LOBAM	396,285,000.00	
8.	UNSUR PEMERINTAHAN UMUM	8,742,032,151.00	
8.01.	KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	8,742,032,151.00	
8.01.1.05.0.00.01.0000.	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	8,742,032,151.00	
8.01.1.05.0.00.01.0000.	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	8,742,032,151.00	
Total		1,266,632,139,531.00	

Tabel IV.2.
PLAFON ANGGARAN SEMENTARA BERDASARKAN PERANGKAT DAERAH

Kode	Nama Perangkat Daerah / Unit Kerja	Plafon Anggaran Sementara	Ket
1	2	3	4
1.01.0.00.0.00.01.0000.	Dinas Pendidikan	286,997,039,451.00	
1.01.0.00.0.00.01.0000.	Dinas Pendidikan	286,997,039,451.00	
1.02.0.00.0.00.01.0000.	Dinas Kesehatan	216,878,989,549.00	
1.02.0.00.0.00.01.0000.	Dinas Kesehatan	146,193,892,214.00	
1.02.0.00.0.00.01.0001.	Puskesmas Berakit	928,590,807.00	
1.02.0.00.0.00.01.0002.	Puskesmas Toapaya	1,834,535,202.00	
1.02.0.00.0.00.01.0003.	PPK BLUD PUSKESMAS TELUK SASAH	1,474,963,611.00	
1.02.0.00.0.00.01.0004.	PPK BLUD PUSKESMAS KIJANG	2,393,660,948.00	
1.02.0.00.0.00.01.0005.	PPK BLUD PUSKESMAS TANJUNG UBAN	2,586,580,597.00	
1.02.0.00.0.00.01.0006.	PUSKESMAS SEI LEKOP	1,895,398,538.00	
1.02.0.00.0.00.01.0007.	PUSKESMAS NUMBING	969,613,432.00	
1.02.0.00.0.00.01.0008.	PUSKESMAS KELONG	1,383,657,173.00	
1.02.0.00.0.00.01.0009.	PPK BLUD PUSKESMAS KAWAL	2,230,961,860.00	
1.02.0.00.0.00.01.0010.	PUSKESMAS TELUK BINTAN	1,264,161,798.00	
1.02.0.00.0.00.01.0011.	PUSKESMAS SRI BINTAN	1,482,916,567.00	
1.02.0.00.0.00.01.0012.	PUSKESMAS TAMBELAN	2,075,606,603.00	
1.02.0.00.0.00.01.0013.	PUSKESMAS KUALA SEMPANG	1,431,134,072.00	
1.02.0.00.0.00.01.0014.	PUSKESMAS MANTANG	1,671,709,560.00	
1.02.0.00.0.00.01.0015.	PPK BLUD TELUK SEBONG	2,390,075,067.00	
1.02.0.00.0.00.01.0016.	RUMAH SAKIT UMUM DAERAH	43,933,775,000.00	
1.02.0.00.0.00.01.0017.	UPT BALAI PENGELOLAAN FARMASI DAN ALKES	737,756,500.00	
1.03.2.10.0.00.01.0000.	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Pertanahan	63,542,418,633.00	
1.03.2.10.0.00.01.0000.	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Pertanahan	63,542,418,633.00	
1.04.0.00.0.00.01.0000.	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	37,763,401,158.00	
1.04.0.00.0.00.01.0000.	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	37,763,401,158.00	
1.05.0.00.0.00.01.0000.	Satuan Polisi Pamong Praja	16,387,522,503.00	
1.05.0.00.0.00.01.0000.	Satuan Polisi Pamong Praja	16,387,522,503.00	

Kode	Nama Perangkat Daerah / Unit Kerja	Plafon Anggaran Sementara	Ket
1	2	3	4
1.05.0.00.0.00.02.0000.	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	10,563,087,877.00	
1.05.0.00.0.00.02.0000.	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	10,563,087,877.00	
1.06.0.00.0.00.01.0000.	Dinas Sosial	17,008,807,179.00	
1.06.0.00.0.00.01.0000.	Dinas Sosial	17,008,807,179.00	
2.07.0.00.0.00.01.0000.	Dinas Tenaga Kerja	5,950,216,229.00	
2.07.0.00.0.00.01.0000.	Dinas Tenaga Kerja	5,950,216,229.00	
2.08.2.14.0.00.01.0000.	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	9,939,089,295.00	
2.08.2.14.0.00.01.0000.	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	9,939,089,295.00	
2.09.3.27.0.00.01.0000.	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian	16,988,487,875.00	
2.09.3.27.0.00.01.0000.	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian	16,988,487,875.00	
2.11.0.00.0.00.01.0000.	Dinas Lingkungan Hidup	25,294,756,622.00	
2.11.0.00.0.00.01.0000.	Dinas Lingkungan Hidup	25,294,756,622.00	
2.12.0.00.0.00.01.0000.	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	6,810,450,987.00	
2.12.0.00.0.00.01.0000.	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	6,810,450,987.00	
2.13.0.00.0.00.01.0000.	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	6,643,818,311.00	
2.13.0.00.0.00.01.0000.	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	6,643,818,311.00	
2.15.0.00.0.00.01.0000.	Dinas Perhubungan	14,582,577,601.00	
2.15.0.00.0.00.01.0000.	Dinas Perhubungan	14,582,577,601.00	
2.16.2.20.2.21.01.0000.	Dinas Komunikasi dan Informatika	13,928,227,245.00	
2.16.2.20.2.21.01.0000.	Dinas Komunikasi dan Informatika	13,928,227,245.00	
2.17.3.31.3.30.01.0000.	Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Perindustrian dan Perdagangan	22,822,745,302.00	
2.17.3.31.3.30.01.0000.	Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Perindustrian dan Perdagangan	22,822,745,302.00	
2.18.0.00.0.00.01.0000.	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	7,446,947,296.00	
2.18.0.00.0.00.01.0000.	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	7,446,947,296.00	
2.19.0.00.0.00.01.0000.	Dinas Kepemudaan dan Olahraga	9,179,469,338.00	
2.19.0.00.0.00.01.0000.	Dinas Kepemudaan dan Olahraga	9,179,469,338.00	
2.22.3.26.0.00.01.0000.	Dinas Kebudayaan dan Pariwisata	15,364,430,706.00	
2.22.3.26.0.00.01.0000.	Dinas Kebudayaan dan Pariwisata	15,364,430,706.00	
2.23.2.24.0.00.01.0000.	Dinas Perpustakaan dan Arsip Daerah	4,965,909,143.00	
2.23.2.24.0.00.01.0000.	Dinas Perpustakaan dan Arsip Daerah	4,965,909,143.00	
3.25.0.00.0.00.01.0000.	Dinas Perikanan	17,109,120,746.00	
3.25.0.00.0.00.01.0000.	Dinas Perikanan	17,109,120,746.00	
4.01.0.00.5.06.01.0000.	Sekretariat Daerah	72,753,310,527.00	
4.01.0.00.5.06.01.0000.	Sekretariat Daerah	72,753,310,527.00	
4.02.0.00.0.00.01.0000.	Sekretariat DPRD	38,921,574,576.00	
4.02.0.00.0.00.01.0000.	Sekretariat DPRD	38,921,574,576.00	
5.01.5.05.0.00.01.0000.	Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah	15,986,720,752.00	
5.01.5.05.0.00.01.0000.	Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah	15,986,720,752.00	
5.02.0.00.0.00.01.0000.	Badan Keuangan dan Aset Daerah	155,223,486,347.00	
5.02.0.00.0.00.01.0000.	Badan Keuangan dan Aset Daerah	155,223,486,347.00	
5.02.0.00.0.00.02.0000.	Badan Pendapatan Daerah	22,176,776,248.00	
5.02.0.00.0.00.02.0000.	Badan Pendapatan Daerah	22,176,776,248.00	
5.03.5.04.0.00.01.0000.	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	57,615,702,941.00	

Kode	Nama Perangkat Daerah / Unit Kerja	Plafon Anggaran Sementara	Ket
1	2	3	4
5.03.5.04.0.00.01.0000.	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	57,615,702,941.00	
6.01.0.00.0.00.01.0000.	Inspektorat Daerah	10,043,467,459.00	
6.01.0.00.0.00.01.0000.	Inspektorat Daerah	10,043,467,459.00	
7.01.0.00.0.00.01.0000.	Kecamatan Bintan Utara	9,392,317,426.00	
7.01.0.00.0.00.01.0000.	Kecamatan Bintan Utara	7,588,650,526.00	
7.01.0.00.0.00.01.0001.	KELURAHAN TANJUNG UBAN UTARA	529,827,000.00	
7.01.0.00.0.00.01.0002.	KELURAHAN TANJUNG UBAN TIMUR	278,699,500.00	
7.01.0.00.0.00.01.0003.	KELURAHAN TANJUNG UBAN KOTA	616,684,500.00	
7.01.0.00.0.00.01.0004.	KELURAHAN TANJUNG UBAN SELATAN	378,455,900.00	
7.01.0.00.0.00.02.0000.	Kecamatan Bintan Pesisir	3,582,033,088.00	
7.01.0.00.0.00.02.0000.	Kecamatan Bintan Pesisir	3,582,033,088.00	
7.01.0.00.0.00.03.0000.	Kecamatan Tambelan	4,637,534,357.00	
7.01.0.00.0.00.03.0000.	Kecamatan Tambelan	4,335,254,357.00	
7.01.0.00.0.00.03.0001.	KELURAHAN TELUK SEKUNI	302,280,000.00	
7.01.0.00.0.00.04.0000.	Kecamatan Mantang	3,521,624,738.00	
7.01.0.00.0.00.04.0000.	Kecamatan Mantang	3,521,624,738.00	
7.01.0.00.0.00.05.0000.	Kecamatan Toapaya	4,988,974,013.00	
7.01.0.00.0.00.05.0000.	Kecamatan Toapaya	4,536,079,013.00	
7.01.0.00.0.00.05.0001.	KELURAHAN TOAPAYA ASRI	452,895,000.00	
7.01.0.00.0.00.06.0000.	Kecamatan Teluk Sebong	4,555,860,171.00	
7.01.0.00.0.00.06.0000.	Kecamatan Teluk Sebong	4,205,217,571.00	
7.01.0.00.0.00.06.0001.	KELURAHAN KOTA BARU	350,642,600.00	
7.01.0.00.0.00.07.0000.	Kecamatan Teluk Bintan	4,640,509,757.00	
7.01.0.00.0.00.07.0000.	Kecamatan Teluk Bintan	4,220,509,757.00	
7.01.0.00.0.00.07.0001.	KELURAHAN TEMBELING TANJUNG	420,000,000.00	
7.01.0.00.0.00.08.0000.	Kecamatan Gunung Kijang	5,638,483,577.00	
7.01.0.00.0.00.08.0000.	Kecamatan Gunung Kijang	5,218,483,577.00	
7.01.0.00.0.00.08.0001.	KELURAHAN KAWAL	420,000,000.00	
7.01.0.00.0.00.09.0000.	Kecamatan Bintan Timur	11,539,879,452.00	
7.01.0.00.0.00.09.0000.	Kecamatan Bintan Timur	8,872,599,452.00	
7.01.0.00.0.00.09.0001.	KELURAHAN SUNGAI ENAM	384,642,500.00	
7.01.0.00.0.00.09.0002.	KELURAHAN SUNGAI LEKOP	605,927,500.00	
7.01.0.00.0.00.09.0003.	KELURAHAN KIJANG KOTA	1,238,212,500.00	
7.01.0.00.0.00.09.0004.	KELURAHAN GUNUNG LENGKUAS	438,497,500.00	
7.01.0.00.0.00.10.0000.	Kecamatan Seri Kuala Lobam	6,504,338,905.00	
7.01.0.00.0.00.10.0000.	Kecamatan Seri Kuala Lobam	5,686,226,905.00	
7.01.0.00.0.00.10.0001.	KELURAHAN TANJUNG PERMAI	421,827,000.00	
7.01.0.00.0.00.10.0002.	KELURAHAN TELUK LOBAM	396,285,000.00	
8.01.1.05.0.00.01.0000.	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	8,742,032,151.00	
8.01.1.05.0.00.01.0000.	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	8,742,032,151.00	
Total		1,266,632,139,531.00	

4.2 Plafon Anggaran Sementara Berdasarkan Program Kegiatan

Pengalokasian anggaran, dengan mempertimbangkan potensi kemampuan keuangan daerah, untuk pelaksanaan pembangunan pada tahun 2025, secara Urusan, program, dan kegiatan adalah sebagaimana tabel dibawah ini.

Tabel IV.3.
PLAFON ANGGARAN SEMENTARA BEDASARKAN PROGRAM DAN KEGIATAN
TAHUN ANGGARAN 2025

Kode	Urusan Pemerintahan Daerah, Perangkat Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara	Ket.
1	2	3	4
1.01.0.00.0.00.01.0000.	Dinas Pendidikan	286,997,039,451.00	
1.01.0.00.0.00.01.0000.	Dinas Pendidikan	286,997,039,451.00	
1.	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	286,997,039,451.00	
1.01.	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN	286,997,039,451.00	
1.01.01.	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	190,785,592,551.00	
1.01.01.2.01.	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	270,000,000.00	
1.01.01.2.01.0001.	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	110,000,000.00	
1.01.01.2.01.0007.	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	150,000,000.00	
1.01.01.2.01.0009.	Pelaksanaan Pengumpulan Data Statistik Sektorial Daerah	10,000,000.00	
1.01.01.2.02.	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	187,779,187,551.00	
1.01.01.2.02.0001.	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	187,594,187,551.00	
1.01.01.2.02.0003.	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	155,000,000.00	
1.01.01.2.02.0005.	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	30,000,000.00	
1.01.01.2.03.	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	110,000,000.00	
1.01.01.2.03.0002.	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	30,000,000.00	
1.01.01.2.03.0004.	Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD	50,000,000.00	
1.01.01.2.03.0006.	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	30,000,000.00	
1.01.01.2.05.	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	90,000,000.00	
1.01.01.2.05.0009.	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	90,000,000.00	
1.01.01.2.06.	Administrasi Umum Perangkat Daerah	952,500,000.00	
1.01.01.2.06.0001.	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	10,000,000.00	
1.01.01.2.06.0002.	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	165,000,000.00	
1.01.01.2.06.0003.	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	40,000,000.00	
1.01.01.2.06.0004.	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	336,412,500.00	
1.01.01.2.06.0005.	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	115,000,000.00	
1.01.01.2.06.0009.	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	286,087,500.00	
1.01.01.2.07.	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	60,625,000.00	
1.01.01.2.07.0005.	Pengadaan Mebel	25,000,000.00	
1.01.01.2.07.0006.	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	35,625,000.00	
1.01.01.2.08.	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	1,333,280,000.00	
1.01.01.2.08.0001.	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	3,000,000.00	

Kode	Urusan Pemerintahan Daerah, Perangkat Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara	Ket.
1	2	3	4
1.01.01.2.08.0002.	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	210,000,000.00	
1.01.01.2.08.0004.	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	1,120,280,000.00	
1.01.01.2.09.	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	190,000,000.00	
1.01.01.2.09.0001.	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	40,000,000.00	
1.01.01.2.09.0002.	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	80,000,000.00	
1.01.01.2.09.0006.	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	70,000,000.00	
1.01.02.	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	96,001,446,900.00	
1.01.02.2.01.	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	41,022,881,300.00	
1.01.02.2.01.0003.	Pembangunan Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU	3,011,008,000.00	
1.01.02.2.01.0004.	Pembangunan Ruang Unit Kesehatan Sekolah	1,129,128,000.00	
1.01.02.2.01.0005.	Pembangunan Perpustakaan Sekolah	408,636,800.00	
1.01.02.2.01.0006.	Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	805,000,000.00	
1.01.02.2.01.0007.	Pembangunan Rumah Dinas Kepala Sekolah/Guru/Penjaga Sekolah	280,000,000.00	
1.01.02.2.01.0013.	Rehabilitasi Sedang/Berat Rumah Dinas Kepala Sekolah/Guru/Penjaga Sekolah	1,082,000,000.00	
1.01.02.2.01.0014.	Pengadaan Mebel Sekolah	287,212,500.00	
1.01.02.2.01.0025.	Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa	362,500,000.00	
1.01.02.2.01.0026.	Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Sekolah Dasar	3,366,400,000.00	
1.01.02.2.01.0027.	Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Sekolah Dasar	950,000,000.00	
1.01.02.2.01.0028.	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah	150,000,000.00	
1.01.02.2.01.0029.	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	20,057,100,000.00	
1.01.02.2.01.0031.	Pembangunan Laboratorium Sekolah Dasar	3,008,145,200.00	
1.01.02.2.01.0034.	Peningkatan profesi pelaku perbukuan daerah pada Satuan Pendidikan Dasar	30,000,000.00	
1.01.02.2.01.0035.	Pembinaan Penggunaan Teknologi, Informasi dan Komunikasi (TIK) untuk Pendidikan	230,000,000.00	
1.01.02.2.01.0036.	Pengembangan konten digital untuk pendidikan	30,000,000.00	
1.01.02.2.01.0037.	Pelatihan Penggunaan Aplikasi Bidang Pendidikan	30,000,000.00	
1.01.02.2.01.0038.	Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan	40,000,000.00	
1.01.02.2.01.0041.	Fasilitasi Komunitas Belajar Pendidik dan Tenaga Kependidikan	50,000,000.00	
1.01.02.2.01.0042.	Penyediaan infrastruktur TIK	60,000,000.00	
1.01.02.2.01.0043.	Pemberian layanan pendampingan bagi satuan pendidikan untuk pencegahan perundungan, kekerasan, dan intoleransi	10,000,000.00	
1.01.02.2.01.0046.	Pengadaan Perlengkapan Peserta Didik	4,129,012,800.00	
1.01.02.2.01.0047.	Pembangunan Ruang Kelas Baru	235,000,000.00	
1.01.02.2.01.0048.	Rehabilitasi Sedang/Berat Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	50,000,000.00	
1.01.02.2.01.0050.	Penyelenggaraan Proses Belajar Bagi Peserta Didik	191,738,000.00	
1.01.02.2.01.0051.	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas Sekolah	940,000,000.00	
1.01.02.2.01.0054.	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Dasar	100,000,000.00	
1.01.02.2.02.	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	40,268,612,600.00	
1.01.02.2.02.0003.	Pembangunan Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU	315,224,000.00	
1.01.02.2.02.0004.	Pembangunan Ruang Unit Kesehatan Sekolah	686,947,000.00	
1.01.02.2.02.0006.	Pembangunan Laboratorium	2,581,422,000.00	
1.01.02.2.02.0012.	Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	911,795,800.00	
1.01.02.2.02.0014.	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas Sekolah	300,000,000.00	
1.01.02.2.02.0017.	Rehabilitasi Sedang/Berat Perpustakaan Sekolah	324,305,000.00	

Kode	Urusan Pemerintahan Daerah, Perangkat Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara	Ket.
1	2	3	4
1.01.02.2.02.0018.	Rehabilitasi Sedang/Berat Laboratorium	310,985,000.00	
1.01.02.2.02.0021.	Rehabilitasi Sedang/Berat Rumah Dinas Kepala Sekolah/Guru/Penjaga Sekolah	210,721,000.00	
1.01.02.2.02.0024.	Rehabilitasi Sedang/Berat Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	394,994,000.00	
1.01.02.2.02.0025.	Pengadaan Mebel Sekolah	1,175,122,000.00	
1.01.02.2.02.0032.	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Menengah Pertama	147,000,000.00	
1.01.02.2.02.0038.	Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa	300,000,000.00	
1.01.02.2.02.0039.	Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	1,620,480,000.00	
1.01.02.2.02.0040.	Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	250,000,000.00	
1.01.02.2.02.0041.	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah	107,275,000.00	
1.01.02.2.02.0042.	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama	11,467,380,000.00	
1.01.02.2.02.0043.	Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama	50,000,000.00	
1.01.02.2.02.0047.	Peningkatan profesi pelaku perbukuan daerah pada Satuan Pendidikan Menengah Pertama	30,000,000.00	
1.01.02.2.02.0048.	Pembinaan Penggunaan Teknologi, Informasi dan Komunikasi (TIK) untuk Pendidikan	30,000,000.00	
1.01.02.2.02.0049.	Pengembangan konten digital untuk pendidikan	30,000,000.00	
1.01.02.2.02.0050.	Pelatihan Penggunaan Aplikasi Bidang Pendidikan	30,000,000.00	
1.01.02.2.02.0051.	Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan	30,000,000.00	
1.01.02.2.02.0054.	Fasilitasi Komunitas Belajar Pendidik dan Tenaga Kependidikan	50,000,000.00	
1.01.02.2.02.0055.	Pemberian layanan pendampingan bagi satuan pendidikan untuk pencegahan perundungan, kekerasan, dan intoleransi	10,000,000.00	
1.01.02.2.02.0058.	Penyelenggaraan Proses Belajar bagi Peserta Didik	11,635,646,300.00	
1.01.02.2.02.0059.	Pembangunan Ruang Kelas Baru	3,023,507,000.00	
1.01.02.2.02.0062.	Pengadaan Perlengkapan Peserta Didik	4,245,808,500.00	
1.01.02.2.03.	Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)	13,499,253,000.00	
1.01.02.2.03.0002.	Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas PAUD	670,000,000.00	
1.01.02.2.03.0011.	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik PAUD	40,000,000.00	
1.01.02.2.03.0015.	Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan PAUD	3,906,080,000.00	
1.01.02.2.03.0016.	Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan PAUD	200,000,000.00	
1.01.02.2.03.0017.	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen PAUD	250,000,000.00	
1.01.02.2.03.0018.	Pengelolaan Dana BOP PAUD	3,334,050,000.00	
1.01.02.2.03.0028.	Pembangunan Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU	250,000,000.00	
1.01.02.2.03.0030.	Pembangunan Ruang Kelas Baru	2,766,683,000.00	
1.01.02.2.03.0034.	Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Peserta Didik	200,000,000.00	
1.01.02.2.03.0041.	Pengadaan Perlengkapan Peserta Didik	1,297,440,000.00	
1.01.02.2.03.0051.	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas Sekolah	585,000,000.00	
1.01.02.2.04.	Pengelolaan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	1,210,700,000.00	
1.01.02.2.04.0010.	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Nonformal/Kesetaraan	40,000,000.00	
1.01.02.2.04.0014.	Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	32,000,000.00	
1.01.02.2.04.0017.	Pengelolaan Dana BOP Sekolah Nonformal/Kesetaraan	1,063,700,000.00	
1.01.02.2.04.0037.	Perlengkapan Dasar Buku Teks dan Non Teks Peserta Didik	75,000,000.00	
1.01.03.	PROGRAM PENGEMBANGAN KURIKULUM	130,000,000.00	
1.01.03.2.01.	Penetapan Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Dasar	100,000,000.00	
1.01.03.2.01.0003.	Penyediaan Buku Teks Pelajaran Muatan Lokal Pendidikan Dasar	20,000,000.00	
1.01.03.2.01.0004.	Pelatihan Penyusunan Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Dasar	70,000,000.00	

Kode	Urusan Pemerintahan Daerah, Perangkat Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara	Ket.
1	2	3	4
1.01.03.2.01.0005.	Pelaksanaan penilaian/penelaahan buku teks muatan lokal Pendidikan Dasar	10,000,000.00	
1.01.03.2.02.	Penetapan Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Nonformal	30,000,000.00	
1.01.03.2.02.0003.	Penyediaan Buku Teks Pelajaran Muatan Lokal Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Nonformal	30,000,000.00	
1.01.04.	PROGRAM PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN	80,000,000.00	
1.01.04.2.01.	Pemerataan Kuantitas dan Kualitas Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	80,000,000.00	
1.01.04.2.01.0001.	Perhitungan dan Pemetaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	40,000,000.00	
1.01.04.2.01.0002.	Penataan Pendistribusian Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	40,000,000.00	
1.02.0.00.0.00.01.0000.	Dinas Kesehatan	216,878,989,549.00	
1.02.0.00.0.00.01.0000.	Dinas Kesehatan	146,193,892,214.00	
1.	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	146,193,892,214.00	
1.02.	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN	146,193,892,214.00	
1.02.01.	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	106,078,318,272.00	
1.02.01.2.01.	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	200,000,000.00	
1.02.01.2.01.0001.	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	120,000,000.00	
1.02.01.2.01.0007.	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	80,000,000.00	
1.02.01.2.02.	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	101,027,663,356.00	
1.02.01.2.02.0001.	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	100,977,663,356.00	
1.02.01.2.02.0003.	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	50,000,000.00	
1.02.01.2.03.	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	30,000,000.00	
1.02.01.2.03.0006.	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	30,000,000.00	
1.02.01.2.06.	Administrasi Umum Perangkat Daerah	850,460,547.00	
1.02.01.2.06.0001.	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	45,000,000.00	
1.02.01.2.06.0002.	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	205,000,000.00	
1.02.01.2.06.0003.	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	100,000,000.00	
1.02.01.2.06.0004.	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	250,460,547.00	
1.02.01.2.06.0005.	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	40,000,000.00	
1.02.01.2.06.0009.	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	210,000,000.00	
1.02.01.2.07.	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	63,000,000.00	
1.02.01.2.07.0005.	Pengadaan Mebel	13,000,000.00	
1.02.01.2.07.0006.	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	50,000,000.00	
1.02.01.2.08.	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	3,782,694,369.00	
1.02.01.2.08.0001.	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	5,000,000.00	
1.02.01.2.08.0002.	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	310,400,000.00	
1.02.01.2.08.0004.	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	3,467,294,369.00	
1.02.01.2.09.	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	124,500,000.00	
1.02.01.2.09.0001.	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	29,700,000.00	
1.02.01.2.09.0002.	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	47,800,000.00	
1.02.01.2.09.0006.	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	47,000,000.00	

Kode	Urusan Pemerintahan Daerah, Perangkat Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara	Ket.
1	2	3	4
1.02.02.	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	32,075,057,842.00	
1.02.02.2.01.	Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	10,219,474,950.00	
1.02.02.2.01.0007.	Pengembangan Fasilitas Kesehatan Lainnya	200,000,000.00	
1.02.02.2.01.0010.	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Fasilitas Kesehatan Lainnya	290,000,000.00	
1.02.02.2.01.0014.	Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan	4,524,204,080.00	
1.02.02.2.01.0020.	Pemeliharaan Rutin dan Berkala Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan	157,376,000.00	
1.02.02.2.01.0023.	Pengadaan Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai,, Vaksin, Makanan dan Minuman di Fasilitas Kesehatan	5,007,894,870.00	
1.02.02.2.01.0024.	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Dasar Melalui Pendekatan Keluarga	40,000,000.00	
1.02.02.2.02.	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	21,496,582,892.00	
1.02.02.2.02.0001.	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	25,000,000.00	
1.02.02.2.02.0002.	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin	25,000,000.00	
1.02.02.2.02.0003.	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir	659,777,633.00	
1.02.02.2.02.0004.	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita	130,500,000.00	
1.02.02.2.02.0005.	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	45,000,000.00	
1.02.02.2.02.0006.	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif	15,000,000.00	
1.02.02.2.02.0007.	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut	15,000,000.00	
1.02.02.2.02.0008.	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi	30,000,000.00	
1.02.02.2.02.0009.	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus	377,364,640.00	
1.02.02.2.02.0010.	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat	20,000,000.00	
1.02.02.2.02.0011.	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	1,460,869,350.00	
1.02.02.2.02.0012.	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV	20,000,000.00	
1.02.02.2.02.0014.	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk Terdampak Krisis Kesehatan Akibat Bencana dan/atau Berpotensi Bencana	40,000,000.00	
1.02.02.2.02.0015.	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	82,240,000.00	
1.02.02.2.02.0016.	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	20,000,000.00	
1.02.02.2.02.0017.	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	523,975,000.00	
1.02.02.2.02.0018.	Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan	378,791,390.00	
1.02.02.2.02.0019.	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Tradisional, Akupunktur, Asuhan Mandiri, dan Tradisional Lainnya	50,000,000.00	
1.02.02.2.02.0020.	Pengelolaan Surveilans Kesehatan	263,240,000.00	
1.02.02.2.02.0022.	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Jiwa dan NAPZA	85,564,000.00	
1.02.02.2.02.0024.	Pengelolaan Upaya Pengurangan Risiko Krisis Kesehatan dan Pasca Krisis Kesehatan	115,892,800.00	
1.02.02.2.02.0025.	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	1,085,184,537.00	
1.02.02.2.02.0026.	Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat	14,854,889,642.00	
1.02.02.2.02.0028.	Pengambilan dan Pengiriman Spesimen Penyakit Potensial KLB ke Laboratorium Rujukan/Nasional	92,250,000.00	
1.02.02.2.02.0029.	Penyelenggaraan Kabupaten/Kota Sehat	200,000,000.00	
1.02.02.2.02.0034.	Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya	343,680,000.00	
1.02.02.2.02.0035.	Pelaksanaan Akreditasi Fasilitas Kesehatan di Kabupaten/Kota	203,386,000.00	
1.02.02.2.02.0036.	Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)	9,807,000.00	
1.02.02.2.02.0040.	Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan Tuberkulosis	30,000,000.00	
1.02.02.2.02.0041.	Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan HIV (ODHIV)	18,150,000.00	
1.02.02.2.02.0042.	Pengelolaan pelayanan kesehatan Malaria	146,590,900.00	
1.02.02.2.02.0046.	Pengelolaan upaya kesehatan Ibu dan Anak	99,430,000.00	

Kode	Urusan Pemerintahan Daerah, Perangkat Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara	Ket.
1	2	3	4
1.02.02.2.02.0048.	Pengelolaan Layanan Imunisasi	30,000,000.00	
1.02.02.2.03.	Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan Secara Terintegrasi	339,000,000.00	
1.02.02.2.03.0002.	Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan	339,000,000.00	
1.02.02.2.04.	Penerbitan Izin Rumah Sakit Kelas C, D dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	20,000,000.00	
1.02.02.2.04.0004.	Penyiapan Perumusan dan Pelaksanaan Pelayanan Kesehatan Rujukan	20,000,000.00	
1.02.03.	PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN	1,048,744,100.00	
1.02.03.2.02.	Perencanaan Kebutuhan dan Pendayagunaan Sumber Daya Manusia Kesehatan untuk UKP dan UKM di Wilayah Kabupaten/Kota	187,032,600.00	
1.02.03.2.02.0002.	Pemenuhan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan Sesuai Standar	40,000,000.00	
1.02.03.2.02.0003.	Pembinaan dan Pengawasan Sumber Daya Manusia Kesehatan	147,032,600.00	
1.02.03.2.03.	Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	861,711,500.00	
1.02.03.2.03.0001.	Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	861,711,500.00	
1.02.04.	PROGRAM SEDIAAN FARMASI, ALAT KESEHATAN DAN MAKANAN MINUMAN	491,631,000.00	
1.02.04.2.01.	Pemberian Izin Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT)	93,730,000.00	
1.02.04.2.01.0001.	Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Perizinan Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan, dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT)	93,730,000.00	
1.02.04.2.03.	Penerbitan Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga dan Nomor P-IRT sebagai Izin Produksi, untuk Produk Makanan Minuman Tertentu yang Dapat Diproduksi oleh Industri Rumah Tangga	377,901,000.00	
1.02.04.2.03.0001.	Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga dan Nomor P-IRT sebagai Izin Produksi, untuk Produk Makanan Minuman Tertentu yang Dapat Diproduksi oleh Industri Rumah Tangga	377,901,000.00	
1.02.04.2.04.	Penerbitan Sertifikat Laik Higiene Sanitasi Tempat Pengelolaan Makanan (TPM) antara lain Jasa Boga, Rumah Makan/Restoran dan Depot Air Minum (DAM)	20,000,000.00	
1.02.04.2.04.0001.	Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Penerbitan Sertifikat Laik Higiene Sanitasi Tempat Pengelolaan Makanan (TPM) antara lain Jasa Boga, Rumah Makan/Restoran dan Depot Air Minum (DAM)	20,000,000.00	
1.02.05.	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN	6,500,141,000.00	
1.02.05.2.02.	Pelaksanaan Sehat dalam rangka Promotif Preventif Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	20,000,000.00	
1.02.05.2.02.0001.	Penyelenggaraan Promosi Kesehatan dan Gerakan Hidup Bersih dan Sehat	20,000,000.00	
1.02.05.2.03.	Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	6,480,141,000.00	
1.02.05.2.03.0001.	Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	6,480,141,000.00	
1.02.0.00.0.00.01.0001.	Puskesmas Berakit	928,590,807.00	
1.	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	928,590,807.00	
1.02.	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN	928,590,807.00	
1.02.01.	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	92,000,000.00	
1.02.01.2.08.	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	92,000,000.00	
1.02.01.2.08.0004.	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	92,000,000.00	
1.02.02.	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	836,590,807.00	
1.02.02.2.02.	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	728,867,000.00	
1.02.02.2.02.0001.	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	3,600,000.00	
1.02.02.2.02.0002.	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin	10,182,000.00	

Kode	Urusan Pemerintahan Daerah, Perangkat Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara	Ket.
1	2	3	4
1.02.02.2.02.0005.	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	16,875,000.00	
1.02.02.2.02.0011.	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	4,200,000.00	
1.02.02.2.02.0012.	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV	4,500,000.00	
1.02.02.2.02.0015.	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	51,096,000.00	
1.02.02.2.02.0017.	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	10,650,000.00	
1.02.02.2.02.0020.	Pengelolaan Surveilans Kesehatan	36,008,000.00	
1.02.02.2.02.0025.	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	90,975,000.00	
1.02.02.2.02.0026.	Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat	152,562,000.00	
1.02.02.2.02.0033.	Operasional Pelayanan Puskesmas	267,794,000.00	
1.02.02.2.02.0036.	Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)	3,600,000.00	
1.02.02.2.02.0040.	Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan Tuberkulosis	3,600,000.00	
1.02.02.2.02.0041.	Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan HIV (ODHIV)	3,600,000.00	
1.02.02.2.02.0044.	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Reproduksi	3,000,000.00	
1.02.02.2.02.0046.	Pengelolaan upaya kesehatan Ibu dan Anak	66,625,000.00	
1.02.02.2.03.	Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan Secara Terintegrasi	107,723,807.00	
1.02.02.2.03.0002.	Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan	107,723,807.00	
1.02.0.00.0.00.01.0002.	Puskesmas Toapaya	1,834,535,202.00	
1.	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	1,834,535,202.00	
1.02.	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN	1,834,535,202.00	
1.02.01.	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	60,480,000.00	
1.02.01.2.08.	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	60,480,000.00	
1.02.01.2.08.0004.	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	60,480,000.00	
1.02.02.	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	1,766,300,202.00	
1.02.02.2.02.	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	1,568,540,000.00	
1.02.02.2.02.0001.	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	8,400,000.00	
1.02.02.2.02.0002.	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin	28,200,000.00	
1.02.02.2.02.0005.	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	76,500,000.00	
1.02.02.2.02.0011.	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	5,550,000.00	
1.02.02.2.02.0012.	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV	14,400,000.00	
1.02.02.2.02.0015.	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	111,308,000.00	
1.02.02.2.02.0017.	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	17,975,000.00	
1.02.02.2.02.0020.	Pengelolaan Surveilans Kesehatan	27,660,000.00	
1.02.02.2.02.0025.	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	124,471,000.00	
1.02.02.2.02.0026.	Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat	664,150,000.00	
1.02.02.2.02.0033.	Operasional Pelayanan Puskesmas	401,876,000.00	
1.02.02.2.02.0036.	Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)	300,000.00	
1.02.02.2.02.0040.	Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan Tuberkulosis	900,000.00	
1.02.02.2.02.0041.	Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan HIV (ODHIV)	600,000.00	
1.02.02.2.02.0044.	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Reproduksi	2,250,000.00	
1.02.02.2.02.0046.	Pengelolaan upaya kesehatan Ibu dan Anak	84,000,000.00	
1.02.02.2.03.	Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan Secara Terintegrasi	197,760,202.00	
1.02.02.2.03.0002.	Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan	197,760,202.00	
1.02.05.	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN	7,755,000.00	

Kode	Urusan Pemerintahan Daerah, Perangkat Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara	Ket.
1	2	3	4
1.02.05.2.03.	Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	7,755,000.00	
1.02.05.2.03.0001.	Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	7,755,000.00	
1.02.0.00.0.00.01.0003.	PPK BLUD PUSKESMAS TELUK SASAH	1,474,963,611.00	
1.	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	1,474,963,611.00	
1.02.	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN	1,474,963,611.00	
1.02.01.	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	635,600,000.00	
1.02.01.2.08.	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	55,200,000.00	
1.02.01.2.08.0004.	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	55,200,000.00	
1.02.01.2.10.	Peningkatan Pelayanan BLUD	580,400,000.00	
1.02.01.2.10.0001.	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	580,400,000.00	
1.02.02.	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	832,313,611.00	
1.02.02.2.02.	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	831,669,000.00	
1.02.02.2.02.0001.	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	64,350,000.00	
1.02.02.2.02.0005.	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	6,900,000.00	
1.02.02.2.02.0011.	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	9,000,000.00	
1.02.02.2.02.0012.	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV	3,600,000.00	
1.02.02.2.02.0015.	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	178,419,000.00	
1.02.02.2.02.0017.	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	17,400,000.00	
1.02.02.2.02.0020.	Pengelolaan Surveilans Kesehatan	31,800,000.00	
1.02.02.2.02.0025.	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	112,950,000.00	
1.02.02.2.02.0033.	Operasional Pelayanan Puskesmas	311,100,000.00	
1.02.02.2.02.0036.	Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)	1,800,000.00	
1.02.02.2.02.0040.	Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan Tuberkulosis	9,000,000.00	
1.02.02.2.02.0041.	Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan HIV (ODHIV)	2,250,000.00	
1.02.02.2.02.0044.	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Reproduksi	3,600,000.00	
1.02.02.2.02.0046.	Pengelolaan upaya kesehatan Ibu dan Anak	79,500,000.00	
1.02.02.2.03.	Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan Secara Terintegrasi	644,611.00	
1.02.02.2.03.0002.	Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan	644,611.00	
1.02.05.	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN	7,050,000.00	
1.02.05.2.03.	Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	7,050,000.00	
1.02.05.2.03.0001.	Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	7,050,000.00	
1.02.0.00.0.00.01.0004.	PPK BLUD PUSKESMAS KIJANG	2,393,660,948.00	
1.	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	2,393,660,948.00	
1.02.	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN	2,393,660,948.00	
1.02.01.	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	1,241,450,000.00	
1.02.01.2.08.	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	70,400,000.00	
1.02.01.2.08.0004.	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	70,400,000.00	
1.02.01.2.10.	Peningkatan Pelayanan BLUD	1,171,050,000.00	
1.02.01.2.10.0001.	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	1,171,050,000.00	
1.02.02.	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	1,132,410,948.00	

Kode	Urusan Pemerintahan Daerah, Perangkat Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara	Ket.
1	2	3	4
1.02.02.2.02.	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	857,992,000.00	
1.02.02.2.02.0001.	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	19,200,000.00	
1.02.02.2.02.0002.	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin	18,300,000.00	
1.02.02.2.02.0005.	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	22,800,000.00	
1.02.02.2.02.0011.	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	2,400,000.00	
1.02.02.2.02.0012.	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV	600,000.00	
1.02.02.2.02.0015.	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	117,216,000.00	
1.02.02.2.02.0017.	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	22,950,000.00	
1.02.02.2.02.0020.	Pengelolaan Surveilans Kesehatan	21,870,000.00	
1.02.02.2.02.0025.	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	183,600,000.00	
1.02.02.2.02.0033.	Operasional Pelayanan Puskesmas	366,700,000.00	
1.02.02.2.02.0034.	Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya	7,056,000.00	
1.02.02.2.02.0036.	Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)	450,000.00	
1.02.02.2.02.0040.	Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan Tuberkulosis	4,050,000.00	
1.02.02.2.02.0044.	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Reproduksi	4,200,000.00	
1.02.02.2.02.0046.	Pengelolaan upaya kesehatan Ibu dan Anak	66,600,000.00	
1.02.02.2.03.	Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan Secara Terintegrasi	274,418,948.00	
1.02.02.2.03.0002.	Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan	274,418,948.00	
1.02.05.	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN	19,800,000.00	
1.02.05.2.03.	Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	19,800,000.00	
1.02.05.2.03.0001.	Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	19,800,000.00	
1.02.0.00.0.00.01.0005.	PPK BLUD PUSKESMAS TANJUNG UBAN	2,586,580,597.00	
1.	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	2,586,580,597.00	
1.02.	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN	2,586,580,597.00	
1.02.01.	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	1,312,695,212.00	
1.02.01.2.08.	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	267,850,000.00	
1.02.01.2.08.0004.	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	267,850,000.00	
1.02.01.2.10.	Peningkatan Pelayanan BLUD	1,044,845,212.00	
1.02.01.2.10.0001.	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	1,044,845,212.00	
1.02.02.	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	1,260,490,385.00	
1.02.02.2.02.	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	1,216,803,000.00	
1.02.02.2.02.0001.	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	26,250,000.00	
1.02.02.2.02.0002.	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin	16,920,000.00	
1.02.02.2.02.0005.	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	36,750,000.00	
1.02.02.2.02.0011.	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	9,900,000.00	
1.02.02.2.02.0012.	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV	6,000,000.00	
1.02.02.2.02.0015.	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	250,770,000.00	
1.02.02.2.02.0017.	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	22,050,000.00	
1.02.02.2.02.0020.	Pengelolaan Surveilans Kesehatan	26,655,000.00	
1.02.02.2.02.0025.	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	132,375,000.00	
1.02.02.2.02.0033.	Operasional Pelayanan Puskesmas	528,631,000.00	
1.02.02.2.02.0034.	Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya	7,902,000.00	

Kode	Urusan Pemerintahan Daerah, Perangkat Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara	Ket.
1	2	3	4
1.02.02.2.02.0036.	Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)	1,500,000.00	
1.02.02.2.02.0040.	Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan Tuberkulosis	27,000,000.00	
1.02.02.2.02.0041.	Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan HIV (ODHIV)	750,000.00	
1.02.02.2.02.0044.	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Reproduksi	11,700,000.00	
1.02.02.2.02.0046.	Pengelolaan upaya kesehatan Ibu dan Anak	111,650,000.00	
1.02.02.2.03.	Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan Secara Terintegrasi	43,687,385.00	
1.02.02.2.03.0002.	Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan	43,687,385.00	
1.02.05.	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN	13,395,000.00	
1.02.05.2.03.	Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	13,395,000.00	
1.02.05.2.03.0001.	Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	13,395,000.00	
1.02.0.00.0.00.01.0006.	PUSKESMAS SEI LEKOP	1,895,398,538.00	
1.	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	1,895,398,538.00	
1.02.	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN	1,895,398,538.00	
1.02.01.	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	116,400,000.00	
1.02.01.2.08.	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	116,400,000.00	
1.02.01.2.08.0004.	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	116,400,000.00	
1.02.02.	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	1,750,798,538.00	
1.02.02.2.02.	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	1,657,993,893.00	
1.02.02.2.02.0001.	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	16,625,000.00	
1.02.02.2.02.0002.	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin	26,880,000.00	
1.02.02.2.02.0005.	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	52,200,000.00	
1.02.02.2.02.0011.	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	1,500,000.00	
1.02.02.2.02.0012.	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV	375,000.00	
1.02.02.2.02.0015.	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	168,240,000.00	
1.02.02.2.02.0017.	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	22,500,000.00	
1.02.02.2.02.0020.	Pengelolaan Surveilans Kesehatan	45,162,000.00	
1.02.02.2.02.0025.	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	151,200,000.00	
1.02.02.2.02.0026.	Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat	740,368,893.00	
1.02.02.2.02.0033.	Operasional Pelayanan Puskesmas	337,483,000.00	
1.02.02.2.02.0036.	Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)	1,200,000.00	
1.02.02.2.02.0040.	Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan Tuberkulosis	3,000,000.00	
1.02.02.2.02.0041.	Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan HIV (ODHIV)	1,500,000.00	
1.02.02.2.02.0044.	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Reproduksi	9,960,000.00	
1.02.02.2.02.0046.	Pengelolaan upaya kesehatan Ibu dan Anak	79,800,000.00	
1.02.02.2.03.	Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan Secara Terintegrasi	92,804,645.00	
1.02.02.2.03.0002.	Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan	92,804,645.00	
1.02.05.	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN	28,200,000.00	
1.02.05.2.03.	Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	28,200,000.00	
1.02.05.2.03.0001.	Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	28,200,000.00	
1.02.0.00.0.00.01.0007.	PUSKESMAS NUMBING	969,613,432.00	
1.	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	969,613,432.00	

Kode	Urusan Pemerintahan Daerah, Perangkat Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara	Ket.
1	2	3	4
1.02.	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN	969,613,432.00	
1.02.01.	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	175,200,000.00	
1.02.01.2.08.	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	175,200,000.00	
1.02.01.2.08.0004.	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	175,200,000.00	
1.02.02.	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	792,238,432.00	
1.02.02.2.02.	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	757,911,565.00	
1.02.02.2.02.0001.	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	7,310,000.00	
1.02.02.2.02.0002.	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin	5,140,000.00	
1.02.02.2.02.0005.	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	34,650,000.00	
1.02.02.2.02.0011.	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	3,960,000.00	
1.02.02.2.02.0012.	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV	300,000.00	
1.02.02.2.02.0015.	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	89,754,000.00	
1.02.02.2.02.0017.	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	8,205,000.00	
1.02.02.2.02.0020.	Pengelolaan Surveilans Kesehatan	18,255,000.00	
1.02.02.2.02.0025.	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	88,075,000.00	
1.02.02.2.02.0033.	Operasional Pelayanan Puskesmas	428,882,565.00	
1.02.02.2.02.0036.	Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)	3,360,000.00	
1.02.02.2.02.0040.	Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan Tuberkulosis	3,210,000.00	
1.02.02.2.02.0044.	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Reproduksi	21,780,000.00	
1.02.02.2.02.0046.	Pengelolaan upaya kesehatan Ibu dan Anak	45,030,000.00	
1.02.02.2.03.	Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan Secara Terintegrasi	34,326,867.00	
1.02.02.2.03.0002.	Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan	34,326,867.00	
1.02.05.	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN	2,175,000.00	
1.02.05.2.03.	Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	2,175,000.00	
1.02.05.2.03.0001.	Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	2,175,000.00	
1.02.0.00.0.00.01.0008.	PUSKESMAS KELONG	1,383,657,173.00	
1.	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	1,383,657,173.00	
1.02.	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN	1,383,657,173.00	
1.02.01.	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	92,800,000.00	
1.02.01.2.08.	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	92,800,000.00	
1.02.01.2.08.0004.	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	92,800,000.00	
1.02.02.	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	1,236,677,173.00	
1.02.02.2.02.	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	1,104,305,060.00	
1.02.02.2.02.0001.	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	14,250,000.00	
1.02.02.2.02.0002.	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin	8,100,000.00	
1.02.02.2.02.0005.	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	42,000,000.00	
1.02.02.2.02.0011.	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	1,800,000.00	
1.02.02.2.02.0015.	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	43,898,000.00	
1.02.02.2.02.0017.	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	6,300,000.00	
1.02.02.2.02.0020.	Pengelolaan Surveilans Kesehatan	31,635,000.00	
1.02.02.2.02.0025.	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	66,848,400.00	

Kode	Urusan Pemerintahan Daerah, Perangkat Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara	Ket.
1	2	3	4
1.02.02.2.02.0026.	Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat	419,858,660.00	
1.02.02.2.02.0033.	Operasional Pelayanan Puskesmas	428,665,000.00	
1.02.02.2.02.0036.	Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)	900,000.00	
1.02.02.2.02.0040.	Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan Tuberkulosis	1,200,000.00	
1.02.02.2.02.0044.	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Reproduksi	16,200,000.00	
1.02.02.2.02.0046.	Pengelolaan upaya kesehatan Ibu dan Anak	22,650,000.00	
1.02.02.2.03.	Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan Secara Terintegrasi	132,372,113.00	
1.02.02.2.03.0002.	Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan	132,372,113.00	
1.02.05.	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN	54,180,000.00	
1.02.05.2.03.	Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	54,180,000.00	
1.02.05.2.03.0001.	Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	54,180,000.00	
1.02.0.00.0.00.01.0009.	PPK BLUD PUSKESMAS KAWAL	2,230,961,860.00	
1.	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	2,230,961,860.00	
1.02.	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN	2,230,961,860.00	
1.02.01.	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	1,198,940,000.00	
1.02.01.2.08.	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	279,440,000.00	
1.02.01.2.08.0004.	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	279,440,000.00	
1.02.01.2.10.	Peningkatan Pelayanan BLUD	919,500,000.00	
1.02.01.2.10.0001.	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	919,500,000.00	
1.02.02.	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	1,025,091,860.00	
1.02.02.2.02.	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	873,357,000.00	
1.02.02.2.02.0001.	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	28,350,000.00	
1.02.02.2.02.0002.	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin	33,990,000.00	
1.02.02.2.02.0005.	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	21,600,000.00	
1.02.02.2.02.0011.	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	4,050,000.00	
1.02.02.2.02.0012.	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV	375,000.00	
1.02.02.2.02.0015.	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	145,563,000.00	
1.02.02.2.02.0017.	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	12,300,000.00	
1.02.02.2.02.0020.	Pengelolaan Surveilans Kesehatan	32,175,000.00	
1.02.02.2.02.0025.	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	153,825,000.00	
1.02.02.2.02.0033.	Operasional Pelayanan Puskesmas	348,129,000.00	
1.02.02.2.02.0036.	Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)	450,000.00	
1.02.02.2.02.0040.	Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan Tuberkulosis	9,000,000.00	
1.02.02.2.02.0041.	Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan HIV (ODHIV)	600,000.00	
1.02.02.2.02.0044.	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Reproduksi	13,200,000.00	
1.02.02.2.02.0046.	Pengelolaan upaya kesehatan Ibu dan Anak	69,750,000.00	
1.02.02.2.03.	Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan Secara Terintegrasi	151,734,860.00	
1.02.02.2.03.0002.	Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan	151,734,860.00	
1.02.05.	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN	6,930,000.00	
1.02.05.2.03.	Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	6,930,000.00	
1.02.05.2.03.0001.	Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	6,930,000.00	

Kode	Urusan Pemerintahan Daerah, Perangkat Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara	Ket.
1	2	3	4
1.02.0.00.0.00.01.0010.	PUSKESMAS TELUK BINTAN	1,264,161,798.00	
1.	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	1,264,161,798.00	
1.02.	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN	1,264,161,798.00	
1.02.01.	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	68,240,000.00	
1.02.01.2.08.	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	68,240,000.00	
1.02.01.2.08.0004.	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	68,240,000.00	
1.02.02.	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	1,171,801,798.00	
1.02.02.2.02.	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	1,071,546,000.00	
1.02.02.2.02.0001.	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	19,000,000.00	
1.02.02.2.02.0002.	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin	14,760,000.00	
1.02.02.2.02.0005.	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	22,200,000.00	
1.02.02.2.02.0011.	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	4,800,000.00	
1.02.02.2.02.0012.	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV	9,000,000.00	
1.02.02.2.02.0015.	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	76,740,000.00	
1.02.02.2.02.0017.	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	21,600,000.00	
1.02.02.2.02.0020.	Pengelolaan Surveilans Kesehatan	25,590,000.00	
1.02.02.2.02.0025.	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	61,725,000.00	
1.02.02.2.02.0026.	Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat	427,025,000.00	
1.02.02.2.02.0033.	Operasional Pelayanan Puskesmas	317,486,000.00	
1.02.02.2.02.0036.	Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)	3,000,000.00	
1.02.02.2.02.0040.	Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan Tuberkulosis	15,600,000.00	
1.02.02.2.02.0041.	Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan HIV (ODHIV)	2,700,000.00	
1.02.02.2.02.0044.	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Reproduksi	13,320,000.00	
1.02.02.2.02.0046.	Pengelolaan upaya kesehatan Ibu dan Anak	37,000,000.00	
1.02.02.2.03.	Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan Secara Terintegrasi	100,255,798.00	
1.02.02.2.03.0002.	Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan	100,255,798.00	
1.02.05.	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN	24,120,000.00	
1.02.05.2.03.	Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	24,120,000.00	
1.02.05.2.03.0001.	Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	24,120,000.00	
1.02.0.00.0.00.01.0011.	PUSKESMAS SRI BINTAN	1,482,916,567.00	
1.	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	1,482,916,567.00	
1.02.	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN	1,482,916,567.00	
1.02.01.	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	100,800,000.00	
1.02.01.2.08.	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100,800,000.00	
1.02.01.2.08.0004.	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	100,800,000.00	
1.02.02.	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	1,340,941,567.00	
1.02.02.2.02.	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	1,238,864,480.00	
1.02.02.2.02.0001.	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	7,200,000.00	
1.02.02.2.02.0002.	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin	36,852,000.00	
1.02.02.2.02.0005.	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	53,599,980.00	
1.02.02.2.02.0011.	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	3,640,620.00	

Kode	Urusan Pemerintahan Daerah, Perangkat Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara	Ket.
1	2	3	4
1.02.02.2.02.0015.	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	85,309,980.00	
1.02.02.2.02.0017.	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	7,875,000.00	
1.02.02.2.02.0020.	Pengelolaan Surveilans Kesehatan	22,662,000.00	
1.02.02.2.02.0025.	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	122,741,400.00	
1.02.02.2.02.0026.	Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat	447,750,000.00	
1.02.02.2.02.0033.	Operasional Pelayanan Puskesmas	371,433,500.00	
1.02.02.2.02.0036.	Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)	750,000.00	
1.02.02.2.02.0040.	Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan Tuberkulosis	1,800,000.00	
1.02.02.2.02.0041.	Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan HIV (ODHIV)	1,200,000.00	
1.02.02.2.02.0044.	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Reproduksi	4,500,000.00	
1.02.02.2.02.0046.	Pengelolaan upaya kesehatan Ibu dan Anak	71,550,000.00	
1.02.02.2.03.	Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan Secara Terintegrasi	102,077,087.00	
1.02.02.2.03.0002.	Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan	102,077,087.00	
1.02.05.	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN	41,175,000.00	
1.02.05.2.03.	Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	41,175,000.00	
1.02.05.2.03.0001.	Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	41,175,000.00	
1.02.0.00.0.00.01.0012.	PUSKESMAS TAMBELAN	2,075,606,603.00	
1.	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	2,075,606,603.00	
1.02.	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN	2,075,606,603.00	
1.02.01.	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	425,040,000.00	
1.02.01.2.08.	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	425,040,000.00	
1.02.01.2.08.0004.	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	425,040,000.00	
1.02.02.	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	1,583,534,603.00	
1.02.02.2.02.	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	1,430,174,669.00	
1.02.02.2.02.0001.	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	28,500,000.00	
1.02.02.2.02.0002.	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin	17,625,000.00	
1.02.02.2.02.0005.	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	20,250,000.00	
1.02.02.2.02.0011.	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	4,200,000.00	
1.02.02.2.02.0012.	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV	4,200,000.00	
1.02.02.2.02.0015.	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	107,550,000.00	
1.02.02.2.02.0017.	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	6,150,000.00	
1.02.02.2.02.0020.	Pengelolaan Surveilans Kesehatan	53,130,000.00	
1.02.02.2.02.0025.	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	103,874,800.00	
1.02.02.2.02.0026.	Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat	454,435,869.00	
1.02.02.2.02.0033.	Operasional Pelayanan Puskesmas	537,834,000.00	
1.02.02.2.02.0036.	Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)	1,800,000.00	
1.02.02.2.02.0040.	Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan Tuberkulosis	8,100,000.00	
1.02.02.2.02.0044.	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Reproduksi	525,000.00	
1.02.02.2.02.0046.	Pengelolaan upaya kesehatan Ibu dan Anak	82,000,000.00	
1.02.02.2.03.	Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan Secara Terintegrasi	153,359,934.00	
1.02.02.2.03.0002.	Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan	153,359,934.00	
1.02.05.	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN	67,032,000.00	

Kode	Urusan Pemerintahan Daerah, Perangkat Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara	Ket.
1	2	3	4
1.02.05.2.03.	Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	67,032,000.00	
1.02.05.2.03.0001.	Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	67,032,000.00	
1.02.0.00.0.00.01.0013.	PUSKESMAS KUALA SEMPANG	1,431,134,072.00	
1.	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	1,431,134,072.00	
1.02.	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN	1,431,134,072.00	
1.02.01.	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	103,200,000.00	
1.02.01.2.08.	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	103,200,000.00	
1.02.01.2.08.0004.	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	103,200,000.00	
1.02.02.	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	1,322,934,072.00	
1.02.02.2.02.	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	1,235,896,000.00	
1.02.02.2.02.0001.	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	9,744,000.00	
1.02.02.2.02.0002.	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin	7,100,000.00	
1.02.02.2.02.0005.	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	56,250,000.00	
1.02.02.2.02.0011.	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	5,025,000.00	
1.02.02.2.02.0012.	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV	2,400,000.00	
1.02.02.2.02.0015.	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	117,120,000.00	
1.02.02.2.02.0017.	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	11,325,000.00	
1.02.02.2.02.0020.	Pengelolaan Surveilans Kesehatan	13,245,000.00	
1.02.02.2.02.0025.	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	146,775,000.00	
1.02.02.2.02.0026.	Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat	448,200,000.00	
1.02.02.2.02.0033.	Operasional Pelayanan Puskesmas	309,362,000.00	
1.02.02.2.02.0036.	Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)	1,050,000.00	
1.02.02.2.02.0040.	Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan Tuberkulosis	4,500,000.00	
1.02.02.2.02.0041.	Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan HIV (ODHIV)	4,500,000.00	
1.02.02.2.02.0044.	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Reproduksi	6,000,000.00	
1.02.02.2.02.0046.	Pengelolaan upaya kesehatan Ibu dan Anak	93,300,000.00	
1.02.02.2.03.	Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan Secara Terintegrasi	87,038,072.00	
1.02.02.2.03.0002.	Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan	87,038,072.00	
1.02.05.	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN	5,000,000.00	
1.02.05.2.03.	Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	5,000,000.00	
1.02.05.2.03.0001.	Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	5,000,000.00	
1.02.0.00.0.00.01.0014.	PUSKESMAS MANTANG	1,671,709,560.00	
1.	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	1,671,709,560.00	
1.02.	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN	1,671,709,560.00	
1.02.01.	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	335,400,000.00	
1.02.01.2.08.	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	335,400,000.00	
1.02.01.2.08.0004.	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	335,400,000.00	
1.02.02.	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	1,336,309,560.00	
1.02.02.2.02.	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	1,274,964,636.00	
1.02.02.2.02.0001.	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	7,800,000.00	

Kode	Urusan Pemerintahan Daerah, Perangkat Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara	Ket.
1	2	3	4
1.02.02.2.02.0002.	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin	6,765,000.00	
1.02.02.2.02.0005.	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	47,400,000.00	
1.02.02.2.02.0011.	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	17,750,000.00	
1.02.02.2.02.0012.	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV	7,800,000.00	
1.02.02.2.02.0015.	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	162,362,000.00	
1.02.02.2.02.0017.	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	17,400,000.00	
1.02.02.2.02.0020.	Pengelolaan Surveilans Kesehatan	31,610,000.00	
1.02.02.2.02.0025.	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	110,050,000.00	
1.02.02.2.02.0026.	Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat	308,541,636.00	
1.02.02.2.02.0033.	Operasional Pelayanan Puskesmas	432,586,000.00	
1.02.02.2.02.0036.	Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)	5,500,000.00	
1.02.02.2.02.0040.	Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan Tuberkulosis	15,500,000.00	
1.02.02.2.02.0044.	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Reproduksi	40,150,000.00	
1.02.02.2.02.0046.	Pengelolaan upaya kesehatan Ibu dan Anak	63,750,000.00	
1.02.02.2.03.	Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan Secara Terintegrasi	61,344,924.00	
1.02.02.2.03.0002.	Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan	61,344,924.00	
1.02.0.00.0.00.01.0015.	PPK BLUD TELUK SEBONG	2,390,075,067.00	
1.	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	2,390,075,067.00	
1.02.	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN	2,390,075,067.00	
1.02.01.	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	1,415,440,000.00	
1.02.01.2.08.	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	315,440,000.00	
1.02.01.2.08.0004.	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	315,440,000.00	
1.02.01.2.10.	Peningkatan Pelayanan BLUD	1,100,000,000.00	
1.02.01.2.10.0001.	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	1,100,000,000.00	
1.02.02.	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	965,485,067.00	
1.02.02.2.02.	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	946,200,500.00	
1.02.02.2.02.0001.	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	16,500,000.00	
1.02.02.2.02.0002.	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin	900,000.00	
1.02.02.2.02.0005.	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	36,000,000.00	
1.02.02.2.02.0011.	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	12,000,000.00	
1.02.02.2.02.0012.	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV	1,500,000.00	
1.02.02.2.02.0015.	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	212,491,000.00	
1.02.02.2.02.0017.	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	19,050,000.00	
1.02.02.2.02.0020.	Pengelolaan Surveilans Kesehatan	16,530,000.00	
1.02.02.2.02.0025.	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	132,600,000.00	
1.02.02.2.02.0033.	Operasional Pelayanan Puskesmas	391,754,500.00	
1.02.02.2.02.0036.	Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)	3,600,000.00	
1.02.02.2.02.0040.	Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan Tuberkulosis	5,625,000.00	
1.02.02.2.02.0041.	Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan HIV (ODHIV)	450,000.00	
1.02.02.2.02.0044.	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Reproduksi	18,000,000.00	
1.02.02.2.02.0046.	Pengelolaan upaya kesehatan Ibu dan Anak	79,200,000.00	
1.02.02.2.03.	Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan Secara Terintegrasi	19,284,567.00	
1.02.02.2.03.0002.	Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan	19,284,567.00	

Kode	Urusan Pemerintahan Daerah, Perangkat Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara	Ket.
1	2	3	4
1.02.05.	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN	9,150,000.00	
1.02.05.2.03.	Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	9,150,000.00	
1.02.05.2.03.0001.	Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	9,150,000.00	
1.02.0.00.0.00.01.0016.	RUMAH SAKIT UMUM DAERAH	43,933,775,000.00	
1.	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	43,933,775,000.00	
1.02.	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN	43,933,775,000.00	
1.02.01.	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	34,953,600,000.00	
1.02.01.2.01.	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	10,000,000.00	
1.02.01.2.01.0001.	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	10,000,000.00	
1.02.01.2.03.	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	15,000,000.00	
1.02.01.2.03.0006.	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	15,000,000.00	
1.02.01.2.05.	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	60,000,000.00	
1.02.01.2.05.0009.	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	60,000,000.00	
1.02.01.2.06.	Administrasi Umum Perangkat Daerah	250,000,000.00	
1.02.01.2.06.0004.	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	250,000,000.00	
1.02.01.2.07.	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	55,000,000.00	
1.02.01.2.07.0005.	Pengadaan Mebel	25,000,000.00	
1.02.01.2.07.0006.	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	30,000,000.00	
1.02.01.2.08.	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	4,233,600,000.00	
1.02.01.2.08.0004.	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	4,233,600,000.00	
1.02.01.2.09.	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	330,000,000.00	
1.02.01.2.09.0001.	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	50,000,000.00	
1.02.01.2.09.0002.	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	60,000,000.00	
1.02.01.2.09.0006.	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	100,000,000.00	
1.02.01.2.09.0009.	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	70,000,000.00	
1.02.01.2.09.0010.	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	50,000,000.00	
1.02.01.2.10.	Peningkatan Pelayanan BLUD	30,000,000,000.00	
1.02.01.2.10.0001.	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	30,000,000,000.00	
1.02.02.	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	8,905,175,000.00	
1.02.02.2.01.	Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	4,099,089,000.00	
1.02.02.2.01.0008.	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Rumah Sakit	100,000,000.00	
1.02.02.2.01.0014.	Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan	2,149,089,000.00	
1.02.02.2.01.0020.	Pemeliharaan Rutin dan Berkala Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan	200,000,000.00	
1.02.02.2.01.0023.	Pengadaan Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai,, Vaksin, Makanan dan Minuman di Fasilitas Kesehatan	1,650,000,000.00	
1.02.02.2.02.	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	4,616,086,000.00	
1.02.02.2.02.0014.	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk Terdampak Krisis Kesehatan Akibat Bencana dan/atau Berpotensi Bencana	50,000,000.00	
1.02.02.2.02.0024.	Pengelolaan Upaya Pengurangan Risiko Krisis Kesehatan dan Pasca Krisis Kesehatan	50,000,000.00	
1.02.02.2.02.0032.	Operasional Pelayanan Rumah Sakit	4,486,086,000.00	
1.02.02.2.02.0035.	Pelaksanaan Akreditasi Fasilitas Kesehatan di Kabupaten/Kota	30,000,000.00	

Kode	Urusan Pemerintahan Daerah, Perangkat Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara	Ket.
1	2	3	4
1.02.02.2.03.	Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan Secara Terintegrasi	100,000,000.00	
1.02.02.2.03.0002.	Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan	100,000,000.00	
1.02.02.2.04.	Penerbitan Izin Rumah Sakit Kelas C, D dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	90,000,000.00	
1.02.02.2.04.0003.	Peningkatan Mutu Pelayanan Fasilitas Kesehatan	40,000,000.00	
1.02.02.2.04.0004.	Penyiapan Perumusan dan Pelaksanaan Pelayanan Kesehatan Rujukan	50,000,000.00	
1.02.03.	PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN	75,000,000.00	
1.02.03.2.03.	Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	75,000,000.00	
1.02.03.2.03.0001.	Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	75,000,000.00	
1.02.0.00.0.00.01.0017.	UPT BALAI PENGELOLAAN FARMASI DAN ALKES	737,756,500.00	
1.	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	737,756,500.00	
1.02.	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN	737,756,500.00	
1.02.01.	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	24,000,000.00	
1.02.01.2.08.	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	24,000,000.00	
1.02.01.2.08.0004.	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	24,000,000.00	
1.02.02.	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	713,756,500.00	
1.02.02.2.01.	Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	393,756,500.00	
1.02.02.2.01.0014.	Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan	222,000,000.00	
1.02.02.2.01.0026.	Distribusi Alat Kesehatan, Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai, Vaksin, Makanan dan Minuman ke Fasilitas Kesehatan	171,756,500.00	
1.02.02.2.02.	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	320,000,000.00	
1.02.02.2.02.0034.	Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya	320,000,000.00	
1.03.2.10.0.00.01.0000.	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Pertanahan	63,542,418,633.00	
1.03.2.10.0.00.01.0000.	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Pertanahan	63,542,418,633.00	
1.	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	62,882,418,633.00	
1.03.	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	62,882,418,633.00	
1.03.01.	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	11,746,294,201.00	
1.03.01.2.01.	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	367,258,000.00	
1.03.01.2.01.0001.	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	261,942,250.00	
1.03.01.2.01.0007.	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	105,315,750.00	
1.03.01.2.02.	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	7,920,215,681.00	
1.03.01.2.02.0001.	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	7,837,661,681.00	
1.03.01.2.02.0003.	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	82,554,000.00	
1.03.01.2.03.	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	30,000,000.00	
1.03.01.2.03.0006.	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	30,000,000.00	
1.03.01.2.05.	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	312,527,000.00	
1.03.01.2.05.0002.	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	112,527,000.00	
1.03.01.2.05.0009.	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	200,000,000.00	
1.03.01.2.06.	Administrasi Umum Perangkat Daerah	1,287,500,000.00	
1.03.01.2.06.0001.	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	127,500,000.00	

Kode	Urusan Pemerintahan Daerah, Perangkat Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara	Ket.
1	2	3	4
1.03.01.2.06.0002.	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	200,000,000.00	
1.03.01.2.06.0003.	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	100,000,000.00	
1.03.01.2.06.0004.	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	360,000,000.00	
1.03.01.2.06.0005.	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	150,000,000.00	
1.03.01.2.06.0009.	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	350,000,000.00	
1.03.01.2.07.	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	366,996,500.00	
1.03.01.2.07.0005.	Pengadaan Mebel	104,556,800.00	
1.03.01.2.07.0006.	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	262,439,700.00	
1.03.01.2.08.	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	779,986,720.00	
1.03.01.2.08.0001.	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	8,408,000.00	
1.03.01.2.08.0002.	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	250,000,000.00	
1.03.01.2.08.0004.	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	521,578,720.00	
1.03.01.2.09.	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	681,810,300.00	
1.03.01.2.09.0001.	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	175,000,000.00	
1.03.01.2.09.0002.	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	170,000,000.00	
1.03.01.2.09.0006.	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	136,810,300.00	
1.03.01.2.09.0009.	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	200,000,000.00	
1.03.02.	PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA)	2,726,449,993.00	
1.03.02.2.01.	Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman Pantai pada Wilayah Sungai (WS) dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	2,726,449,993.00	
1.03.02.2.01.0071.	Operasi dan Pemeliharaan Unit Air Baku	388,197,000.00	
1.03.02.2.01.0073.	Operasi dan Pemeliharaan Sungai	405,000,000.00	
1.03.02.2.01.0093.	Normalisasi/Restorasi Sungai	800,000,000.00	
1.03.02.2.01.0109.	Pembangunan Bangunan Perkuatan Tebing	688,252,993.00	
1.03.02.2.01.0127.	Penyusunan Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Air Tanah dan Air Baku	445,000,000.00	
1.03.03.	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM	2,420,000,000.00	
1.03.03.2.01.	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) di Daerah Kabupaten/Kota	2,420,000,000.00	
1.03.03.2.01.0025.	Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM)	450,000,000.00	
1.03.03.2.01.0026.	Peningkatan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan	970,000,000.00	
1.03.03.2.01.0029.	Operasi dan Pemeliharaan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM)	1,000,000,000.00	
1.03.05.	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM AIR LIMBAH	1,213,003,400.00	
1.03.05.2.01.	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik dalam Daerah Kabupaten/Kota	1,213,003,400.00	
1.03.05.2.01.0038.	Operasi dan Pemeliharaan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD)	600,003,400.00	
1.03.05.2.01.0039.	Penyediaan Sub Sistem Pengolahan Air Limbah Domestik (SPALD) Setempat	493,000,000.00	
1.03.05.2.01.0041.	Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD)	120,000,000.00	
1.03.06.	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM DRAINASE	2,170,000,000.00	
1.03.06.2.01.	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase yang Terhubung Langsung dengan Sungai dalam Daerah Kabupaten/Kota	2,170,000,000.00	
1.03.06.2.01.0024.	Peningkatan Sistem Drainase Perkotaan	990,000,000.00	
1.03.06.2.01.0029.	Pembangunan Sistem Drainase Perkotaan	300,000,000.00	
1.03.06.2.01.0031.	Operasi dan Pemeliharaan Sistem Drainase Perkotaan	880,000,000.00	
1.03.08.	PROGRAM PENATAAN BANGUNAN GEDUNG	2,231,193,239.00	

Kode	Urusan Pemerintahan Daerah, Perangkat Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara	Ket.
1	2	3	4
1.03.08.2.01.	Penyelenggaraan Bangunan Gedung di Wilayah Daerah Kabupaten/Kota, Pemberian Izin Mendirikan Bangunan (IMB) dan Sertifikat Laik Fungsi Bangunan Gedung	2,231,193,239.00	
1.03.08.2.01.0018.	Pemeliharaan, Perawatan, dan Pemeriksaan Berkala Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Kabupaten/Kota	1,951,193,239.00	
1.03.08.2.01.0020.	Bantuan Teknis Pembangunan Bangunan Gedung Negara untuk Kepentingan Strategis Kabupaten/Kota	30,000,000.00	
1.03.08.2.01.0023.	Penyelenggaraan Penerbitan Persetujuan Bangunan Gedung (PBG), Sertifikat Laik Fungsi (SLF), Surat Bukti Kepemilikan Bangunan Gedung (SBKBG), Rencana Teknis Pembongkaran Bangunan Gedung (RTB), Tim Profesi Ahli (TPA), Tim Penilai Teknis (TPT), Penilik, dan Pendataan Bangunan Gedung melalui SIMBG	250,000,000.00	
1.03.10.	PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN	38,626,477,800.00	
1.03.10.2.01.	Penyelenggaraan Jalan Kabupaten/Kota	38,626,477,800.00	
1.03.10.2.01.0032.	Pembangunan Jalan	580,000,000.00	
1.03.10.2.01.0033.	Rekonstruksi Jalan	16,980,060,900.00	
1.03.10.2.01.0034.	Pemeliharaan Berkala Jalan	5,957,397,500.00	
1.03.10.2.01.0040.	Pembangunan Jembatan	10,014,386,500.00	
1.03.10.2.01.0043.	Survey Kondisi Jalan/Jembatan	1,000,000,000.00	
1.03.10.2.01.0044.	Rehabilitasi Jalan	3,380,000,000.00	
1.03.10.2.01.0046.	Pemeliharaan Rutin Jalan	714,632,900.00	
1.03.11.	PROGRAM PENGEMBANGAN JASA KONSTRUKSI	605,000,000.00	
1.03.11.2.01.	Penyelenggaraan Pelatihan Tenaga Terampil Konstruksi	90,000,000.00	
1.03.11.2.01.0010.	Fasilitasi Sertifikasi Tenaga Kerja Konstruksi Kualifikasi Jabatan Operator dan Teknisi atau Analis	90,000,000.00	
1.03.11.2.02.	Penyelenggaraan Sistem Informasi Jasa Konstruksi Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	430,000,000.00	
1.03.11.2.02.0015.	Operasionalisasi Layanan Informasi Jasa Konstruksi	430,000,000.00	
1.03.11.2.04.	Pengawasan Tertib Usaha, Tertib Penyelenggaraan dan Tertib Pemanfaatan Jasa Konstruksi	85,000,000.00	
1.03.11.2.04.0004.	Pengawasan dan Evaluasi Tertib Penyelenggaraan Jasa Konstruksi Kabupaten/Kota	40,000,000.00	
1.03.11.2.04.0007.	Pengawasan dan Evaluasi Tertib Usaha Jasa Konstruksi Kabupaten/Kota	45,000,000.00	
1.03.12.	PROGRAM PENYELENGGARAAN PENATAAN RUANG	1,144,000,000.00	
1.03.12.2.02.	Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Tata Ruang Daerah Kabupaten/Kota	614,000,000.00	
1.03.12.2.02.0007.	Penyusunan RTRW Kabupaten/Kota	614,000,000.00	
1.03.12.2.03.	Koordinasi dan Sinkronisasi Pemanfaatan Ruang Daerah Kabupaten/Kota	150,000,000.00	
1.03.12.2.03.0005.	Pelaksanaan Sinkronisasi Program Pemanfaatan Ruang	150,000,000.00	
1.03.12.2.04.	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Pemanfaatan Ruang Daerah Kabupaten/Kota	380,000,000.00	
1.03.12.2.04.0004.	Koordinasi Pelaksanaan Penataan Ruang	220,000,000.00	
1.03.12.2.04.0008.	Penilaian Pelaksanaan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang dan/atau pernyataan mandiri pelaku UMK	160,000,000.00	
2.	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	660,000,000.00	
2.10.	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANAHAN	660,000,000.00	
2.10.04.	PROGRAM PENYELESAIAN SENGKETA TANAH GARAPAN	100,000,000.00	
2.10.04.2.01.	Penyelesaian Sengketa Tanah Garapan dalam Daerah Kabupaten/Kota	100,000,000.00	
2.10.04.2.01.0004.	Mediasi Penyelesaian Kasus Pertanahan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	100,000,000.00	
2.10.05.	PROGRAM PENYELESAIAN GANTI KERUGIAN DAN SANTUNAN TANAH UNTUK PEMBANGUNAN	560,000,000.00	
2.10.05.2.01.	Penyelesaian Masalah Ganti Kerugian dan Santunan Tanah untuk Pembangunan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	560,000,000.00	

Kode	Urusan Pemerintahan Daerah, Perangkat Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara	Ket.
1	2	3	4
2.10.05.2.01.0002.	Koordinasi dan Sinkronisasi Penyelesaian Masalah Ganti Kerugian dan Santunan Tanah untuk Pembangunan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	560,000,000.00	
1.04.0.00.0.00.01.0000.	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	37,763,401,158.00	
1.04.0.00.0.00.01.0000.	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	37,763,401,158.00	
1.	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	37,763,401,158.00	
1.04.	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN	37,763,401,158.00	
1.04.01.	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	14,867,526,384.00	
1.04.01.2.01.	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	105,000,000.00	
1.04.01.2.01.0001.	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	85,000,000.00	
1.04.01.2.01.0007.	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	20,000,000.00	
1.04.01.2.02.	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	4,250,691,051.00	
1.04.01.2.02.0001.	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	4,243,191,051.00	
1.04.01.2.02.0003.	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	7,500,000.00	
1.04.01.2.03.	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	7,500,000.00	
1.04.01.2.03.0006.	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	7,500,000.00	
1.04.01.2.05.	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	156,000,000.00	
1.04.01.2.05.0002.	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	84,200,000.00	
1.04.01.2.05.0009.	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	71,800,000.00	
1.04.01.2.06.	Administrasi Umum Perangkat Daerah	906,463,827.00	
1.04.01.2.06.0001.	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	25,000,000.00	
1.04.01.2.06.0002.	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	110,000,000.00	
1.04.01.2.06.0003.	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	85,463,827.00	
1.04.01.2.06.0004.	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	470,000,000.00	
1.04.01.2.06.0005.	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	50,000,000.00	
1.04.01.2.06.0009.	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	166,000,000.00	
1.04.01.2.07.	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	350,000,001.00	
1.04.01.2.07.0005.	Pengadaan Mebel	48,125,538.00	
1.04.01.2.07.0006.	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	101,874,463.00	
1.04.01.2.07.0011.	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	200,000,000.00	
1.04.01.2.08.	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	8,616,871,505.00	
1.04.01.2.08.0001.	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	10,000,000.00	
1.04.01.2.08.0002.	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	8,048,055,333.00	
1.04.01.2.08.0004.	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	558,816,172.00	
1.04.01.2.09.	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	475,000,000.00	
1.04.01.2.09.0001.	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	200,000,000.00	
1.04.01.2.09.0006.	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	75,000,000.00	
1.04.01.2.09.0009.	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	200,000,000.00	
1.04.02.	PROGRAM PENGEMBANGAN PERUMAHAN	300,000,000.00	
1.04.02.2.01.	Pendataan Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota	150,000,000.00	
1.04.02.2.01.0004.	Pendataan Tingkat Kerusakan Rumah Akibat Bencana	50,000,000.00	
1.04.02.2.01.0006.	Pendataan Rumah Sewa Milik Masyarakat, Rumah Susun dan Rumah Khusus	50,000,000.00	

Kode	Urusan Pemerintahan Daerah, Perangkat Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara	Ket.
1	2	3	4
1.04.02.2.01.0009.	Identifikasi Perumahan di Lokasi Rawan Bencana Kabupaten/Kota	50,000,000.00	
1.04.02.2.03.	Pembangunan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota	100,000,000.00	
1.04.02.2.03.0001.	Rehabilitasi Rumah bagi Korban Bencana	50,000,000.00	
1.04.02.2.03.0004.	Pembangunan Rumah bagi Korban Bencana	50,000,000.00	
1.04.02.2.06.	Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengembangan Perumahan	50,000,000.00	
1.04.02.2.06.0003.	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Pembangunan dan Pengembangan Perumahan	50,000,000.00	
1.04.03.	PROGRAM KAWASAN PERMUKIMAN	2,625,000,000.00	
1.04.03.2.02.	Penataan dan Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha	300,000,000.00	
1.04.03.2.02.0008.	Penyusunan/Review/Legalisasi Kebijakan Bidang PKP	300,000,000.00	
1.04.03.2.03.	Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha	2,325,000,000.00	
1.04.03.2.03.0002.	Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni	1,250,000,000.00	
1.04.03.2.03.0012.	Pembangunan Rumah Baru Layak Huni untuk Peningkatan Kualitas Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha	1,075,000,000.00	
1.04.04.	PROGRAM PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN KUMUH	2,754,500,000.00	
1.04.04.2.01.	Pencegahan Perumahan dan Kawasan Permukiman Kumuh pada Daerah Kabupaten/Kota	2,754,500,000.00	
1.04.04.2.01.0001.	Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni untuk Pencegahan Terhadap Tumbuh dan Berkembangnya Permukiman Kumuh di Luar Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha	1,945,125,000.00	
1.04.04.2.01.0004.	Pembangunan Rumah Baru Layak Huni dalam Rangka pencegahan terhadap Kumuh dan berkembangnya Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh Baru	809,375,000.00	
1.04.05.	PROGRAM PENINGKATAN PRASARANA, SARANA DAN UTILITAS UMUM (PSU)	17,191,374,774.00	
1.04.05.2.01.	Urusan Penyelenggaraan PSU Perumahan	17,191,374,774.00	
1.04.05.2.01.0002.	Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di Perumahan untuk Menunjang Fungsi Hunian	17,091,374,774.00	
1.04.05.2.01.0003.	Koordinasi dan Sinkronisasi dalam rangka Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum Perumahan	100,000,000.00	
1.04.06.	PROGRAM PENINGKATAN PELAYANAN SERTIFIKASI, KUALIFIKASI, KLASIFIKASI, DAN REGISTRASI BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN	25,000,000.00	
1.04.06.2.01.	Sertifikasi dan Registrasi bagi Orang atau Badan Hukum yang Melaksanakan Perancangan dan Perencanaan Rumah serta Perencanaan Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum PSU Tingkat Kemampuan Kecil	25,000,000.00	
1.04.06.2.01.0001.	Koordinasi dan Sinkronisasi Penerbitan Sertifikasi dan Registrasi Pengembang Perumahan dengan Kualifikasi Kecil	25,000,000.00	
1.05.0.00.0.00.01.0000.	Satuan Polisi Pamong Praja	16,387,522,503.00	
1.05.0.00.0.00.01.0000.	Satuan Polisi Pamong Praja	16,387,522,503.00	
1.	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	16,387,522,503.00	
1.05.	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT	16,387,522,503.00	
1.05.01.	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	15,982,522,503.00	
1.05.01.2.01.	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	50,000,000.00	
1.05.01.2.01.0001.	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	30,000,000.00	
1.05.01.2.01.0007.	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	20,000,000.00	
1.05.01.2.02.	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	13,979,742,503.00	
1.05.01.2.02.0001.	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	13,959,742,503.00	
1.05.01.2.02.0003.	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	20,000,000.00	
1.05.01.2.03.	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	10,000,000.00	

Kode	Urusan Pemerintahan Daerah, Perangkat Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara	Ket.
1	2	3	4
1.05.01.2.03.0006.	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	10,000,000.00	
1.05.01.2.05.	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	50,000,000.00	
1.05.01.2.05.0009.	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	50,000,000.00	
1.05.01.2.06.	Administrasi Umum Perangkat Daerah	416,500,000.00	
1.05.01.2.06.0001.	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	6,500,000.00	
1.05.01.2.06.0002.	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	50,000,000.00	
1.05.01.2.06.0003.	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	15,000,000.00	
1.05.01.2.06.0004.	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	210,000,000.00	
1.05.01.2.06.0005.	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	35,000,000.00	
1.05.01.2.06.0009.	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	100,000,000.00	
1.05.01.2.08.	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	1,336,280,000.00	
1.05.01.2.08.0001.	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1,000,000.00	
1.05.01.2.08.0002.	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	90,000,000.00	
1.05.01.2.08.0004.	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	1,245,280,000.00	
1.05.01.2.09.	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	140,000,000.00	
1.05.01.2.09.0001.	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	47,758,550.00	
1.05.01.2.09.0002.	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	47,241,450.00	
1.05.01.2.09.0006.	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	25,000,000.00	
1.05.01.2.09.0010.	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	20,000,000.00	
1.05.02.	PROGRAM PENINGKATAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	405,000,000.00	
1.05.02.2.01.	Penanganan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	305,000,000.00	
1.05.02.2.01.0003.	Koordinasi Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat Tingkat Kabupaten/Kota	60,000,000.00	
1.05.02.2.01.0004.	Pemberdayaan Perlindungan Masyarakat dalam rangka Ketenteraman dan Ketertiban Umum	20,000,000.00	
1.05.02.2.01.0005.	Peningkatan Kapasitas SDM Satuan Polisi Pamongpraja dan Satuan Perlindungan Masyarakat Termasuk dalam Pelaksanaan Tugas yang Bernuansa Hak Asasi Manusia	86,600,000.00	
1.05.02.2.01.0006.	Kerja Sama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Teknik Pencegahan dan Penanganan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	10,000,000.00	
1.05.02.2.01.0008.	Penyusunan SOP Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat	30,000,000.00	
1.05.02.2.01.0010.	Peningkatan Kapasitas SDM Satuan Polisi Pamong Praja melalui Pendidikan dan Pelatihan Dasar Pol PPngsional Pol PP dan Uji Kompetensi bagi Pejabat Fungsional	18,400,000.00	
1.05.02.2.01.0015.	Pencegahan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Melalui Deteksi Dini dan Cegah Dini, Pembinaan dan Penyuluhan, Pelaksanaan Patroli, Pengamanan, dan Pengawasan	70,000,000.00	
1.05.02.2.01.0017.	Penyediaan Layanan dasar dalam rangka Dampak Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan kepala daerah	10,000,000.00	
1.05.02.2.02.	Penegakan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota dan Peraturan Bupati/Wali Kota	100,000,000.00	
1.05.02.2.02.0005.	Penyusunan SOP Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	20,000,000.00	
1.05.02.2.02.0011.	Penanganan Atas Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala daerah	20,000,000.00	
1.05.02.2.02.0012.	Pengawasan Atas Kepatuhan Terhadap Pelaksanaan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	60,000,000.00	
1.05.0.00.0.00.02.0000.	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	10,563,087,877.00	
1.05.0.00.0.00.02.0000.	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	10,563,087,877.00	
1.	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	10,563,087,877.00	

Kode	Urusan Pemerintahan Daerah, Perangkat Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara	Ket.
1	2	3	4
1.05.	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT	10,563,087,877.00	
1.05.01.	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	9,355,337,877.00	
1.05.01.2.01.	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	70,400,000.00	
1.05.01.2.01.0001.	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	35,400,000.00	
1.05.01.2.01.0007.	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	35,000,000.00	
1.05.01.2.02.	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	8,485,971,877.00	
1.05.01.2.02.0001.	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	8,465,971,877.00	
1.05.01.2.02.0003.	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	20,000,000.00	
1.05.01.2.03.	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	4,030,000.00	
1.05.01.2.03.0006.	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	4,030,000.00	
1.05.01.2.06.	Administrasi Umum Perangkat Daerah	333,550,000.00	
1.05.01.2.06.0001.	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	1,300,000.00	
1.05.01.2.06.0002.	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	40,000,000.00	
1.05.01.2.06.0003.	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	3,250,000.00	
1.05.01.2.06.0004.	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	200,000,000.00	
1.05.01.2.06.0005.	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	9,000,000.00	
1.05.01.2.06.0009.	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	80,000,000.00	
1.05.01.2.07.	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	24,205,000.00	
1.05.01.2.07.0006.	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	24,205,000.00	
1.05.01.2.08.	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	296,181,000.00	
1.05.01.2.08.0001.	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	500,000.00	
1.05.01.2.08.0002.	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	64,681,000.00	
1.05.01.2.08.0004.	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	231,000,000.00	
1.05.01.2.09.	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	141,000,000.00	
1.05.01.2.09.0001.	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	21,000,000.00	
1.05.01.2.09.0002.	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	110,000,000.00	
1.05.01.2.09.0006.	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	10,000,000.00	
1.05.03.	PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA	803,750,000.00	
1.05.03.2.01.	Pelayanan Informasi Rawan Bencana Kabupaten/Kota	45,000,000.00	
1.05.03.2.01.0007.	Sosialisasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Rawan Bencana Kabupaten/Kota (Per Jenis Ancaman Bencana)	45,000,000.00	
1.05.03.2.02.	Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana	185,000,000.00	
1.05.03.2.02.0018.	Gladi Kesiapsiagaan Terhadap Bencana kabupaten/kota	35,000,000.00	
1.05.03.2.02.0020.	Penguatan Kapasitas Kawasan untuk Pencegahan dan Kesiapsiagaan Bencana	20,000,000.00	
1.05.03.2.02.0021.	Pengembangan Kapasitas Tim Reaksi Cepat (TRC) Bencana Kabupaten/Kota	80,000,000.00	
1.05.03.2.02.0026.	Pengendalian Operasi dan Penyediaan Sarana Prasarana Kesiapsiagaan Terhadap Bencana Kabupaten/Kota	50,000,000.00	
1.05.03.2.03.	Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana	468,750,000.00	
1.05.03.2.03.0002.	Respon Cepat Darurat Bencana Kabupaten/Kota	308,750,000.00	
1.05.03.2.03.0003.	Pencarian, Pertolongan dan Evakuasi Korban Bencana Kabupaten/Kota	20,000,000.00	
1.05.03.2.03.0009.	Penyediaan Logistik Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana Kabupaten/Kota	130,000,000.00	
1.05.03.2.03.0012.	Aktivasi Sistem Komando Penanganan Darurat Bencana	10,000,000.00	

Kode	Urusan Pemerintahan Daerah, Perangkat Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara	Ket.
1	2	3	4
1.05.03.2.04.	Penataan Sistem Dasar Penanggulangan Bencana	105,000,000.00	
1.05.03.2.04.0003.	Kerja Sama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Penanggulangan Bencana Kabupaten/Kota	20,000,000.00	
1.05.03.2.04.0004.	Pengelolaan dan Pemanfaatan Sistem Informasi Kebencanaan	10,000,000.00	
1.05.03.2.04.0010.	Koordinasi penanganan Pascabencana Kabupaten/Kota	75,000,000.00	
1.05.04.	PROGRAM PENCEGAHAN, PENANGGULANGAN, PENYELAMATAN KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN NON KEBAKARAN	404,000,000.00	
1.05.04.2.01.	Pencegahan, Pengendalian, Pemadaman, Penyelamatan, dan Penanganan Bahan Berbahaya dan Beracun Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota	394,000,000.00	
1.05.04.2.01.0002.	Pemadaman dan Pengendalian Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota	240,000,000.00	
1.05.04.2.01.0003.	Penyelamatan dan Evakuasi Korban Kebakaran dan Non Kebakaran	4,000,000.00	
1.05.04.2.01.0017.	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pencegahan, Penanggulangan Kebakaran dan Alat Pelindung Diri	150,000,000.00	
1.05.04.2.02.	Inspeksi Peralatan Proteksi Kebakaran	10,000,000.00	
1.05.04.2.02.0001.	Pendataan Sarana Prasarana Proteksi Kebakaran	10,000,000.00	
1.06.0.00.0.00.01.0000.	Dinas Sosial	17,008,807,179.00	
1.06.0.00.0.00.01.0000.	Dinas Sosial	17,008,807,179.00	
1.	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	17,008,807,179.00	
1.06.	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL	17,008,807,179.00	
1.06.01.	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	4,523,306,933.00	
1.06.01.2.01.	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	90,000,000.00	
1.06.01.2.01.0001.	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	50,000,000.00	
1.06.01.2.01.0007.	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	40,000,000.00	
1.06.01.2.02.	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	3,152,785,286.00	
1.06.01.2.02.0001.	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	3,142,785,286.00	
1.06.01.2.02.0003.	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	10,000,000.00	
1.06.01.2.03.	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	5,000,000.00	
1.06.01.2.03.0006.	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	5,000,000.00	
1.06.01.2.05.	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	61,500,000.00	
1.06.01.2.05.0002.	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	31,500,000.00	
1.06.01.2.05.0009.	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	30,000,000.00	
1.06.01.2.06.	Administrasi Umum Perangkat Daerah	371,092,897.00	
1.06.01.2.06.0001.	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	19,049,139.00	
1.06.01.2.06.0002.	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	45,000,000.00	
1.06.01.2.06.0003.	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	33,705,527.00	
1.06.01.2.06.0004.	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	127,981,231.00	
1.06.01.2.06.0005.	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	19,000,000.00	
1.06.01.2.06.0009.	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	126,357,000.00	
1.06.01.2.07.	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	220,000,000.00	
1.06.01.2.07.0005.	Pengadaan Mebel	55,028,300.00	
1.06.01.2.07.0006.	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	14,971,700.00	
1.06.01.2.07.0011.	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	150,000,000.00	
1.06.01.2.08.	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	462,082,000.00	
1.06.01.2.08.0001.	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	5,082,000.00	
1.06.01.2.08.0002.	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	265,600,000.00	

Kode	Urusan Pemerintahan Daerah, Perangkat Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara	Ket.
1	2	3	4
1.06.01.2.08.0004.	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	191,400,000.00	
1.06.01.2.09.	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	160,846,750.00	
1.06.01.2.09.0001.	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	60,750,000.00	
1.06.01.2.09.0002.	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	71,000,000.00	
1.06.01.2.09.0005.	Pemeliharaan Mebel	10,000,000.00	
1.06.01.2.09.0006.	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	19,096,750.00	
1.06.02.	PROGRAM PEMBERDAYAAN SOSIAL	1,609,452,793.00	
1.06.02.2.03.	Pengembangan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Daerah Kabupaten/Kota	1,609,452,793.00	
1.06.02.2.03.0001.	Peningkatan Kemampuan Potensi Pekerja Sosial Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota	128,199,840.00	
1.06.02.2.03.0002.	Peningkatan Kemampuan Potensi Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan Kewenangan Kabupaten/Kota	55,500,340.00	
1.06.02.2.03.0004.	Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Kelembagaan Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota	1,391,353,943.00	
1.06.02.2.03.0005.	Peningkatan Kemampuan Sumber Daya Manusia dan Penguatan Lembaga Konsultasi Kesejahteraan Keluarga (LK3)	34,398,670.00	
1.06.03.	PROGRAM PENANGANAN WARGA NEGARA MIGRAN KORBAN TINDAK KEKERASAN	47,200,000.00	
1.06.03.2.01.	Pemulangan Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan dari Titik Debarkasi di Daerah Kabupaten/Kota untuk Dipulangkan ke Desa/Kelurahan Asal	47,200,000.00	
1.06.03.2.01.0001.	Fasilitasi Pemulangan Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan dari Titik Debarkasi di Daerah Kabupaten/Kota untuk dipulangkan ke Desa/Kelurahan Asal	47,200,000.00	
1.06.04.	PROGRAM REHABILITASI SOSIAL	1,279,673,500.00	
1.06.04.2.01.	Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial	1,159,857,500.00	
1.06.04.2.01.0001.	Penyediaan Permakanan	288,000,000.00	
1.06.04.2.01.0003.	Penyediaan Alat Bantu	20,000,000.00	
1.06.04.2.01.0005.	Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual, dan Sosial	526,760,000.00	
1.06.04.2.01.0008.	Pemberian Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar	50,597,500.00	
1.06.04.2.01.0010.	Pemberian Layanan Kedaruratan	264,500,000.00	
1.06.04.2.01.0012.	Pemberian Layanan Rujukan	10,000,000.00	
1.06.04.2.02.	Rehabilitasi Sosial Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA di Luar Panti Sosial	119,816,000.00	
1.06.04.2.02.0006.	Penyediaan Perbekalan Kesehatan di Luar Panti	10,000,000.00	
1.06.04.2.02.0007.	Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual, dan Sosial	75,416,000.00	
1.06.04.2.02.0013.	Pemberian Layanan Rujukan	34,400,000.00	
1.06.05.	PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL	9,048,774,506.00	
1.06.05.2.02.	Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	9,048,774,506.00	
1.06.05.2.02.0001.	Pendataan Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	513,400,000.00	
1.06.05.2.02.0003.	Fasilitasi Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga	7,778,278,575.00	
1.06.05.2.02.0004.	Fasilitasi Bantuan Pengembangan Ekonomi Masyarakat	757,095,931.00	
1.06.06.	PROGRAM PENANGANAN BENCANA	438,479,810.00	
1.06.06.2.01.	Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial Kabupaten/Kota	98,447,940.00	
1.06.06.2.01.0001.	Penyediaan Makanan	63,802,040.00	
1.06.06.2.01.0002.	Penyediaan Sandang	34,645,900.00	
1.06.06.2.02.	Penyelenggaraan Pemberdayaan Masyarakat Terhadap Kesiapsiagaan Bencana Kabupaten/Kota	340,031,870.00	
1.06.06.2.02.0002.	Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Taruna Siaga Bencana	340,031,870.00	
1.06.07.	PROGRAM PENGELOLAAN TAMAN MAKAM PAHLAWAN	61,919,637.00	

Kode	Urusan Pemerintahan Daerah, Perangkat Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara	Ket.
1	2	3	4
1.06.07.2.01.	Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota	61,919,637.00	
1.06.07.2.01.0002.	Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota	61,919,637.00	
2.07.0.00.0.00.01.0000.	Dinas Tenaga Kerja	5,950,216,229.00	
2.07.0.00.0.00.01.0000.	Dinas Tenaga Kerja	5,950,216,229.00	
2.	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	5,950,216,229.00	
2.07.	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TENAGA KERJA	5,950,216,229.00	
2.07.01.	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	3,258,388,895.00	
2.07.01.2.01.	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	50,270,000.00	
2.07.01.2.01.0001.	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	30,270,000.00	
2.07.01.2.01.0007.	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	20,000,000.00	
2.07.01.2.02.	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	2,624,378,895.00	
2.07.01.2.02.0001.	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	2,599,378,895.00	
2.07.01.2.02.0003.	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	25,000,000.00	
2.07.01.2.05.	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	35,000,000.00	
2.07.01.2.05.0009.	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	35,000,000.00	
2.07.01.2.06.	Administrasi Umum Perangkat Daerah	284,900,000.00	
2.07.01.2.06.0001.	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	15,000,000.00	
2.07.01.2.06.0002.	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	45,000,000.00	
2.07.01.2.06.0003.	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	13,900,000.00	
2.07.01.2.06.0004.	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	120,000,000.00	
2.07.01.2.06.0005.	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	11,000,000.00	
2.07.01.2.06.0009.	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	80,000,000.00	
2.07.01.2.07.	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	33,000,000.00	
2.07.01.2.07.0005.	Pengadaan Mebel	13,000,000.00	
2.07.01.2.07.0006.	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	20,000,000.00	
2.07.01.2.08.	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	174,840,000.00	
2.07.01.2.08.0001.	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1,000,000.00	
2.07.01.2.08.0002.	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	60,000,000.00	
2.07.01.2.08.0004.	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	113,840,000.00	
2.07.01.2.09.	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	56,000,000.00	
2.07.01.2.09.0001.	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	40,000,000.00	
2.07.01.2.09.0006.	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	16,000,000.00	
2.07.02.	PROGRAM PERENCANAAN TENAGA KERJA	50,000,000.00	
2.07.02.2.01.	Penyusunan Rencana Tenaga Kerja (RTK)	50,000,000.00	
2.07.02.2.01.0003.	Fasilitasi Penyusunan Rencana Tenaga Kerja Mikro	50,000,000.00	
2.07.03.	PROGRAM PELATIHAN KERJA DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA	1,063,358,534.00	
2.07.03.2.01.	Pelaksanaan Pelatihan berdasarkan Unit Kompetensi	1,008,358,534.00	
2.07.03.2.01.0001.	Proses Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan Keterampilan bagi Pencari Kerja berdasarkan Klaster Kompetensi	1,008,358,534.00	
2.07.03.2.02.	Pembinaan Lembaga Pelatihan Kerja Swasta	20,000,000.00	
2.07.03.2.02.0001.	Pembinaan Lembaga Pelatihan Kerja Swasta	20,000,000.00	
2.07.03.2.04.	Konsultansi Produktivitas pada Perusahaan Kecil	35,000,000.00	

Kode	Urusan Pemerintahan Daerah, Perangkat Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara	Ket.
1	2	3	4
2.07.03.2.04.0001.	Pelaksanaan Konsultasi Produktivitas kepada Perusahaan Kecil	35,000,000.00	
2.07.04.	PROGRAM PENEMPATAN TENAGA KERJA	165,000,000.00	
2.07.04.2.01.	Pelayanan antar Kerja di Daerah Kabupaten/Kota	85,000,000.00	
2.07.04.2.01.0003.	Penyuluhan dan Bimbingan Jabatan bagi Pencari Kerja	50,000,000.00	
2.07.04.2.01.0004.	Penyelenggaraan Unit Layanan Disabilitas Ketenagakerjaan	35,000,000.00	
2.07.04.2.03.	Pengelolaan Informasi Pasar Kerja	80,000,000.00	
2.07.04.2.03.0002.	Pelayanan dan Penyediaan Informasi Pasar Kerja Online	40,000,000.00	
2.07.04.2.03.0003.	Job Fair/Bursa Kerja	40,000,000.00	
2.07.05.	PROGRAM HUBUNGAN INDUSTRIAL	1,413,468,800.00	
2.07.05.2.01.	Pengesahan Peraturan Perusahaan dan Pendaftaran Perjanjian Kerja Bersama untuk Perusahaan yang Hanya Beroperasi dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	80,000,000.00	
2.07.05.2.01.0001.	Pengesahan Peraturan Perusahaan bagi Perusahaan	30,000,000.00	
2.07.05.2.01.0003.	Penyelenggaraan Pendataan dan Informasi Sarana Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja serta Pengupahan	50,000,000.00	
2.07.05.2.02.	Pencegahan dan Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja dan Penutupan Perusahaan di Daerah Kabupaten/Kota	1,333,468,800.00	
2.07.05.2.02.0002.	Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja, dan Penutupan Perusahaan yang Berakibat/Berdampak pada Kepentingan di 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	35,000,000.00	
2.07.05.2.02.0003.	Penyelenggaraan Verifikasi dan Rekapitulasi Keanggotaan pada Organisasi Pengusaha, Federasi dan Konfederasi Serikat Pekerja/Serikat Buruh serta Non Afiliasi	25,000,000.00	
2.07.05.2.02.0004.	Pelaksanaan Operasional Lembaga Kerja Sama Tripartit Daerah Kabupaten/Kota	110,000,000.00	
2.07.05.2.02.0005.	Pengembangan Pelaksanaan Jaminan Sosial Tenaga Kerja dan Fasilitas Kesejahteraan Pekerja	1,163,468,800.00	
2.08.2.14.0.00.01.0000.	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	9,939,089,295.00	
2.08.2.14.0.00.01.0000.	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	9,939,089,295.00	
2.	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	9,939,089,295.00	
2.08.	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK	6,228,538,959.00	
2.08.01.	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	4,788,538,959.00	
2.08.01.2.01.	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	60,000,000.00	
2.08.01.2.01.0001.	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	40,000,000.00	
2.08.01.2.01.0007.	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	20,000,000.00	
2.08.01.2.02.	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	4,064,499,959.00	
2.08.01.2.02.0001.	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	4,039,499,959.00	
2.08.01.2.02.0003.	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	25,000,000.00	
2.08.01.2.03.	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	5,000,000.00	
2.08.01.2.03.0006.	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	5,000,000.00	
2.08.01.2.05.	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	30,000,000.00	
2.08.01.2.05.0009.	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	30,000,000.00	
2.08.01.2.06.	Administrasi Umum Perangkat Daerah	245,000,000.00	
2.08.01.2.06.0001.	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	5,000,000.00	
2.08.01.2.06.0002.	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	55,000,000.00	
2.08.01.2.06.0003.	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	5,000,000.00	

Kode	Urusan Pemerintahan Daerah, Perangkat Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara	Ket.
1	2	3	4
2.08.01.2.06.0004.	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	75,000,000.00	
2.08.01.2.06.0005.	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	5,000,000.00	
2.08.01.2.06.0009.	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	100,000,000.00	
2.08.01.2.07.	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	70,000,000.00	
2.08.01.2.07.0005.	Pengadaan Mebel	30,000,000.00	
2.08.01.2.07.0006.	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	40,000,000.00	
2.08.01.2.08.	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	221,039,000.00	
2.08.01.2.08.0001.	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1,500,000.00	
2.08.01.2.08.0002.	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	90,000,000.00	
2.08.01.2.08.0004.	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	129,539,000.00	
2.08.01.2.09.	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	93,000,000.00	
2.08.01.2.09.0001.	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	20,000,000.00	
2.08.01.2.09.0002.	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	40,000,000.00	
2.08.01.2.09.0006.	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	18,000,000.00	
2.08.01.2.09.0009.	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	15,000,000.00	
2.08.02.	PROGRAM PENGARUSUTAMAAN GENDER DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN	220,000,000.00	
2.08.02.2.01.	Pelembagaan Pengarusutamaan Gender (PUG) pada Lembaga Pemerintah Kewenangan Kabupaten/Kota	90,000,000.00	
2.08.02.2.01.0001.	Koordinasi dan Sinkronisasi Perumusan Kebijakan Pelaksanaan PUG	40,000,000.00	
2.08.02.2.01.0002.	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Kebijakan PUG Kewenangan Kabupaten/Kota	50,000,000.00	
2.08.02.2.02.	Pemberdayaan Perempuan Bidang Politik, Hukum, Sosial, dan Ekonomi pada Organisasi Kemasyarakatan Kewenangan Kabupaten/Kota	100,000,000.00	
2.08.02.2.02.0002.	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Peningkatan Partisipasi Perempuan dan Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi	100,000,000.00	
2.08.02.2.03.	Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota	30,000,000.00	
2.08.02.2.03.0002.	Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota	30,000,000.00	
2.08.03.	PROGRAM PERLINDUNGAN PEREMPUAN	165,413,000.00	
2.08.03.2.01.	Pencegahan Kekerasan Terhadap Perempuan Lingkup Daerah Kabupaten/Kota	62,900,000.00	
2.08.03.2.01.0001.	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Kebijakan, Program dan Kegiatan Pencegahan Kekerasan Terhadap Perempuan Lingkup Daerah Kabupaten/Kota	62,900,000.00	
2.08.03.2.02.	Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan yang Memerlukan Koordinasi Kewenangan Kabupaten/Kota	102,513,000.00	
2.08.03.2.02.0001.	Penyediaan Layanan Pengaduan Masyarakat bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota	20,000,000.00	
2.08.03.2.02.0002.	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota	82,513,000.00	
2.08.04.	PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS KELUARGA	450,000,000.00	
2.08.04.2.01.	Peningkatan Kualitas Keluarga dalam Mewujudkan Kestaraan Gender (KG) dan Hak Anak Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	300,000,000.00	
2.08.04.2.01.0003.	Pengembangan Kegiatan Masyarakat untuk Peningkatan Kualitas Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	300,000,000.00	
2.08.04.2.02.	Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga dalam Mewujudkan KG dan Hak Anak yang Wilayah Kerjanya dalam Daerah Kabupaten/Kota	150,000,000.00	
2.08.04.2.02.0003.	Penguatan Jejaring antar Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	150,000,000.00	
2.08.05.	PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM DATA GENDER DAN ANAK	50,000,000.00	
2.08.05.2.01.	Pengumpulan, Pengolahan Analisis dan Penyajian Data Gender dan Anak Dalam Kelembagaan Data di Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	50,000,000.00	
2.08.05.2.01.0001.	Penyediaan Data Gender dan Anak di Kewenangan Kabupaten/Kota	50,000,000.00	

Kode	Urusan Pemerintahan Daerah, Perangkat Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara	Ket.
1	2	3	4
2.08.06.	PROGRAM PEMENUHAN HAK ANAK (PHA)	80,000,000.00	
2.08.06.2.02.	Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	80,000,000.00	
2.08.06.2.02.0002.	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Pendampingan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	50,000,000.00	
2.08.06.2.02.0004.	Penguatan Jejaring antar Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	30,000,000.00	
2.08.07.	PROGRAM PERLINDUNGAN KHUSUS ANAK	474,587,000.00	
2.08.07.2.01.	Pencegahan Kekerasan Terhadap Anak yang Melibatkan para Pihak Lingkup Daerah Kabupaten/Kota	167,100,000.00	
2.08.07.2.01.0003.	Penguatan kerja sama lintas perangkat daerah untuk mewujudkan kabupaten/kota layak Anak, kecamatan layak Anak, desa/kelurahan layak Anak, dan DRPPA	50,000,000.00	
2.08.07.2.01.0004.	Advokasi dan pendampingan Perangkat Daerah dalam pelaksanaan kebijakan /program/ kegiatan pencegahan KTA	117,100,000.00	
2.08.07.2.02.	Penyediaan Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus yang Memerlukan Koordinasi Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	219,087,000.00	
2.08.07.2.02.0007.	Koordinasi Pelaksanaan Layanan AMPK	219,087,000.00	
2.08.07.2.03.	Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	88,400,000.00	
2.08.07.2.03.0006.	Peningkatan kapasitas SDM lembaga penyedia layanan perlindungan dan penanganan bagi AMPK tingkat daerah kabupaten/	88,400,000.00	
2.14.	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA	3,710,550,336.00	
2.14.02.	PROGRAM PENGENDALIAN PENDUDUK	396,800,000.00	
2.14.02.2.01.	Pemaduan dan Sinkronisasi Kebijakan Pemerintah Daerah Provinsi dengan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dalam rangka Pengendalian Kuantitas Penduduk	263,000,000.00	
2.14.02.2.01.0023.	Pelaksanaan Rapat Pengendalian Program Bangsa Kencana	263,000,000.00	
2.14.02.2.02.	Pemetaan Perkiraan Pengendalian Penduduk Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	133,800,000.00	
2.14.02.2.02.0012.	Pencatatan dan Pengumpulan Data Keluarga	49,800,000.00	
2.14.02.2.02.0013.	Pengolahan dan Pelaporan Data Pengendalian Lapangan dan Pelayanan KB	84,000,000.00	
2.14.03.	PROGRAM PEMBINAAN KELUARGA BERENCANA (KB)	2,463,395,336.00	
2.14.03.2.01.	Pelaksanaan Advokasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Pengendalian Penduduk dan KB Sesuai Kearifan Budaya Lokal	1,113,042,336.00	
2.14.03.2.01.0008.	Pengendalian Program KKBPK	140,000,000.00	
2.14.03.2.01.0010.	Pengelolaan Operasional dan Sarana di Balai Penyuluhan Bangsa Kencana	423,042,336.00	
2.14.03.2.01.0011.	Pelaksanaan Mekanisme Operasional Program Bangsa Kencana melalui Rapat Koordinasi Kecamatan (Rakorcam), Rapat Koordinasi Desa (Rakordes), dan Mini Lokakarya (Minilok)	150,000,000.00	
2.14.03.2.01.0012.	Promosi dan KIE Program Bangsa Kencana Melalui Media Massa Cetak dan Elektronik serta Media Luar Ruang	150,000,000.00	
2.14.03.2.01.0014.	Advokasi Program Bangsa kencana oleh pokja advokasi kepada Stakeholders dan Mitra Kerja	250,000,000.00	
2.14.03.2.02.	Pendayagunaan Tenaga Penyuluh KB/Petugas Lapangan KB (PKB/PLKB)	534,451,000.00	
2.14.03.2.02.0004.	Penggerakan Kader Institusi Masyarakat Pedesaan (IMP)	153,000,000.00	
2.14.03.2.02.0006.	Fasilitasi Pelaksanaan Penyuluhan, Penggerakan, Pelayanan dan Pengembangan Program Bangsa Kencana untuk Petugas Keluarga Berencana/ Penyuluh Lapangan Keluarga Berencana (PKB/PLKB)	381,451,000.00	
2.14.03.2.03.	Pengendalian dan Pendistribusian Kebutuhan Alat dan Obat Kontrasepsi serta Pelaksanaan Pelayanan KB di Daerah Kabupaten/Kota	560,706,000.00	
2.14.03.2.03.0001.	Pengendalian Pendistribusian Alat dan Obat Kontrasepsi dan Sarana Penunjang Pelayanan KB ke Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringnya	14,400,000.00	
2.14.03.2.03.0003.	Peningkatan Kesertaan Penggunaan Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP)	530,106,000.00	
2.14.03.2.03.0008.	Pembinaan Pelayanan Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi di Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringnya	16,200,000.00	

Kode	Urusan Pemerintahan Daerah, Perangkat Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara	Ket.
1	2	3	4
2.14.03.2.04.	Pemberdayaan dan Peningkatan Peran Serta Organisasi Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota dalam Pelaksanaan Pelayanan dan Pembinaan Kesertaan Ber-KB	255,196,000.00	
2.14.03.2.04.0002.	Integrasi Pembangunan Lintas Sektor di Kampung KB	3,750,000.00	
2.14.03.2.04.0006.	Pelaksanaan dan Pengelolaan Program Bangga Kencana di Kampung Keluarga Berkualitas	251,446,000.00	
2.14.04.	PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENINGKATAN KELUARGA SEJAHTERA (KS)	850,355,000.00	
2.14.04.2.01.	Pelaksanaan Pembangunan Keluarga Melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga	248,000,000.00	
2.14.04.2.01.0017.	Promosi dan Sosialisasi Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK-R dan Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA))	200,000,000.00	
2.14.04.2.01.0018.	Pengadaan Sarana Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK-R dan Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA))	48,000,000.00	
2.14.04.2.02.	Pelaksanaan dan Peningkatan Peran Serta Organisasi Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota dalam Pembangunan Keluarga Melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga	602,355,000.00	
2.14.04.2.02.0005.	Pemantauan Data dan Informasi Keluarga Berisiko Stunting (Termasuk remaja Calon Pengantin/Calon PUS, Ibu Hamil, Pasca salin/kelahiran, Baduta/Balita)	270,000,000.00	
2.14.04.2.02.0006.	Pendampingan Keluarga Berisiko Stunting (Termasuk remaja Calon Pengantin/Calon PUS, Ibu Hamil, Pasca salin/kelahiran, Baduta/Balita)	332,355,000.00	
2.09.3.27.0.00.01.0000.	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian	16,988,487,875.00	
2.09.3.27.0.00.01.0000.	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian	16,988,487,875.00	
2.	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	12,197,313,155.00	
2.09.	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PANGAN	12,197,313,155.00	
2.09.01.	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	11,776,643,155.00	
2.09.01.2.01.	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	82,000,000.00	
2.09.01.2.01.0001.	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	61,000,000.00	
2.09.01.2.01.0007.	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	21,000,000.00	
2.09.01.2.02.	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	9,914,028,678.00	
2.09.01.2.02.0001.	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	9,889,028,678.00	
2.09.01.2.02.0003.	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	25,000,000.00	
2.09.01.2.03.	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	6,564,000.00	
2.09.01.2.03.0006.	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	6,564,000.00	
2.09.01.2.05.	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	65,000,000.00	
2.09.01.2.05.0009.	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	65,000,000.00	
2.09.01.2.06.	Administrasi Umum Perangkat Daerah	414,680,000.00	
2.09.01.2.06.0001.	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	40,500,000.00	
2.09.01.2.06.0002.	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	100,000,000.00	
2.09.01.2.06.0003.	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	20,000,000.00	
2.09.01.2.06.0004.	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	130,000,000.00	
2.09.01.2.06.0005.	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	34,180,000.00	
2.09.01.2.06.0009.	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	90,000,000.00	
2.09.01.2.07.	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	289,155,280.00	
2.09.01.2.07.0005.	Pengadaan Mebel	14,000,000.00	
2.09.01.2.07.0006.	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	75,155,280.00	
2.09.01.2.07.0010.	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	200,000,000.00	

Kode	Urusan Pemerintahan Daerah, Perangkat Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara	Ket.
1	2	3	4
2.09.01.2.08.	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	650,320,000.00	
2.09.01.2.08.0001.	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	5,000,000.00	
2.09.01.2.08.0002.	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	160,000,000.00	
2.09.01.2.08.0004.	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	485,320,000.00	
2.09.01.2.09.	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	354,895,197.00	
2.09.01.2.09.0001.	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	50,000,000.00	
2.09.01.2.09.0002.	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	50,000,000.00	
2.09.01.2.09.0006.	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	30,895,197.00	
2.09.01.2.09.0009.	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	224,000,000.00	
2.09.03.	PROGRAM PENINGKATAN DIVERSIFIKASI DAN KETAHANAN PANGAN MASYARAKAT	350,670,000.00	
2.09.03.2.01.	Penyediaan dan Penyaluran Pangan Pokok atau Pangan Lainnya sesuai dengan Kebutuhan Daerah Kabupaten/Kota dalam rangka Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan	125,000,000.00	
2.09.03.2.01.0002.	Penyediaan Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal	50,000,000.00	
2.09.03.2.01.0015.	Pemantauan Harga dan Pasokan Pangan	75,000,000.00	
2.09.03.2.02.	Pengelolaan dan Keseimbangan Cadangan Pangan Kabupaten/Kota	44,000,000.00	
2.09.03.2.02.0003.	Pengadaan Cadangan Pangan Pemerintah Kabupaten/Kota	44,000,000.00	
2.09.03.2.04.	Pelaksanaan Pencapaian Target Konsumsi Pangan Perkapita/Tahun sesuai dengan Angka Kecukupan Gizi	181,670,000.00	
2.09.03.2.04.0002.	Pemberdayaan Masyarakat dalam Penganekaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal	181,670,000.00	
2.09.04.	PROGRAM PENANGANAN KERAWANAN PANGAN	50,000,000.00	
2.09.04.2.01.	Penyusunan Peta Kerentanan dan Ketahanan Pangan Kecamatan	50,000,000.00	
2.09.04.2.01.0001.	Penyusunan, Pemutakhiran dan Analisis Peta Ketahanan dan Kerentanan Pangan	50,000,000.00	
2.09.05.	PROGRAM PENGAWASAN KEAMANAN PANGAN	20,000,000.00	
2.09.05.2.01.	Pelaksanaan Pengawasan Keamanan Pangan Segar Daerah Kabupaten/Kota	20,000,000.00	
2.09.05.2.01.0009.	Penguatan kelembagaan pengawas keamanan dan mutu pangan segar asal tumbuhan	20,000,000.00	
3.	URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN	4,791,174,720.00	
3.27.	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN	4,791,174,720.00	
3.27.02.	PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN	2,720,000,000.00	
3.27.02.2.01.	Pengawasan Penggunaan Sarana Pertanian	1,740,000,000.00	
3.27.02.2.01.0001.	Pengawasan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian Sesuai dengan Komoditas, Teknologi dan Spesifik Lokasi	1,010,000,000.00	
3.27.02.2.01.0002.	Pendampingan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian	730,000,000.00	
3.27.02.2.02.	Pengelolaan Sumber Daya Genetik (SDG) Hewan, Tumbuhan, dan Mikro Organisme Kewenangan Kabupaten/Kota	465,000,000.00	
3.27.02.2.02.0002.	Peningkatan Kualitas SDG Hewan/Tanaman	245,000,000.00	
3.27.02.2.02.0003.	Pemanfaatan SDG Hewan/Tanaman	220,000,000.00	
3.27.02.2.06.	Penyediaan Benih/Bibit Ternak dan Hijauan Pakan Ternak yang Sumbernya dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota Lain	515,000,000.00	
3.27.02.2.06.0003.	Pengadaan Bibit Ternak yang Sumbernya dari Daerah Kabupaten/Kota Lain	515,000,000.00	
3.27.03.	PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN	874,174,720.00	
3.27.03.2.01.	Pengembangan Prasarana Pertanian	480,000,000.00	
3.27.03.2.01.0003.	Koordinasi dan Sinkronisasi Prasarana Pendukung Pertanian Lainnya	50,000,000.00	
3.27.03.2.01.0005.	Pengendalian dan Pemanfaatan Kawasan Pertanian	350,000,000.00	

Kode	Urusan Pemerintahan Daerah, Perangkat Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara	Ket.
1	2	3	4
3.27.03.2.01.0015.	Pengelolaan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan/LP2B, Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan/KP2B dan Lahan Cadangan Pertanian Pangan Berkelanjutan/LCP2B di Kabupaten/Kota	80,000,000.00	
3.27.03.2.02.	Pembangunan Prasarana Pertanian	394,174,720.00	
3.27.03.2.02.0003.	Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Jalan Usaha Tani	200,000,000.00	
3.27.03.2.02.0010.	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi Usaha Tani	194,174,720.00	
3.27.04.	PROGRAM PENGENDALIAN KESEHATAN HEWAN DAN KESEHATAN MASYARAKAT VETERINER	512,000,000.00	
3.27.04.2.01.	Penjaminan Kesehatan Hewan, Penutupan dan Pembukaan Daerah Wabah Penyakit Hewan Menular Dalam daerah Kabupaten/Kota	40,000,000.00	
3.27.04.2.01.0008.	Pemberantasan Penyakit Hewan Menular dan Zoonosis dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	40,000,000.00	
3.27.04.2.03.	Pengelolaan Pelayanan Jasa Laboratorium dan Jasa Medik Veteriner dalam Daerah Kabupaten/Kota	357,000,000.00	
3.27.04.2.03.0002.	Penyediaan Pelayanan Jasa Medik Veteriner	357,000,000.00	
3.27.04.2.04.	Penerapan dan Pengawasan Persyaratan Teknis Kesehatan Masyarakat Veteriner	115,000,000.00	
3.27.04.2.04.0002.	Pengawasan Peredaran Hewan dan Produk Hewan	15,000,000.00	
3.27.04.2.04.0004.	Pengujian Laboratorium Kesehatan Masyarakat Veteriner	25,000,000.00	
3.27.04.2.04.0008.	Peningkatan kesadaran masyarakat terhadap Kesmavet dan Kesejahteraan Hewan	75,000,000.00	
3.27.05.	PROGRAM PENGENDALIAN DAN PENANGGULANGAN BENCANA PERTANIAN	20,000,000.00	
3.27.05.2.01.	Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian Kabupaten/Kota	20,000,000.00	
3.27.05.2.01.0001.	Pengendalian Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT) Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan	20,000,000.00	
3.27.07.	PROGRAM PENYULUHAN PERTANIAN	665,000,000.00	
3.27.07.2.01.	Pelaksanaan Penyuluhan Pertanian	665,000,000.00	
3.27.07.2.01.0001.	Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Penyuluhan Pertanian di Kecamatan dan Desa	375,000,000.00	
3.27.07.2.01.0002.	Pengembangan Kapasitas Kelembagaan Petani di Kecamatan dan Desa	90,000,000.00	
3.27.07.2.01.0009.	Diseminasi Informasi Teknis, Sosial, Ekonomi dan Inovasi Pertanian	200,000,000.00	
2.11.0.00.0.00.01.0000.	Dinas Lingkungan Hidup	25,294,756,622.00	
2.11.0.00.0.00.01.0000.	Dinas Lingkungan Hidup	25,294,756,622.00	
2.	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	25,294,756,622.00	
2.11.	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP	25,294,756,622.00	
2.11.01.	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	6,761,893,131.00	
2.11.01.2.01.	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	90,000,000.00	
2.11.01.2.01.0001.	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	62,000,000.00	
2.11.01.2.01.0007.	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	28,000,000.00	
2.11.01.2.02.	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	5,480,054,839.00	
2.11.01.2.02.0001.	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	5,466,054,839.00	
2.11.01.2.02.0003.	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	14,000,000.00	
2.11.01.2.03.	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	5,000,000.00	
2.11.01.2.03.0006.	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	5,000,000.00	
2.11.01.2.05.	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	140,133,000.00	
2.11.01.2.05.0002.	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	64,133,000.00	
2.11.01.2.05.0009.	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	76,000,000.00	
2.11.01.2.06.	Administrasi Umum Perangkat Daerah	536,294,921.00	

Kode	Urusan Pemerintahan Daerah, Perangkat Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara	Ket.
1	2	3	4
2.11.01.2.06.0001.	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	35,000,000.00	
2.11.01.2.06.0002.	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	100,000,000.00	
2.11.01.2.06.0003.	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	45,523,821.00	
2.11.01.2.06.0004.	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	139,700,000.00	
2.11.01.2.06.0005.	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	35,531,100.00	
2.11.01.2.06.0009.	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	180,540,000.00	
2.11.01.2.07.	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	111,765,375.00	
2.11.01.2.07.0005.	Pengadaan Mebel	46,000,000.00	
2.11.01.2.07.0006.	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	65,765,375.00	
2.11.01.2.08.	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	229,300,000.00	
2.11.01.2.08.0001.	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	4,000,000.00	
2.11.01.2.08.0002.	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	100,000,000.00	
2.11.01.2.08.0004.	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	125,300,000.00	
2.11.01.2.09.	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	169,344,996.00	
2.11.01.2.09.0001.	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	60,000,000.00	
2.11.01.2.09.0006.	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	50,000,000.00	
2.11.01.2.09.0009.	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	59,344,996.00	
2.11.03.	PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN/ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP	490,000,000.00	
2.11.03.2.01.	Pencegahan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota	345,000,000.00	
2.11.03.2.01.0005.	Pelaksanaan inventarisasi GRK dan penyusunan profil emisi GRK	45,000,000.00	
2.11.03.2.01.0007.	Pelaksanaan pemantauan kualitas Lingkungan Hidup terhadap Media Tanah, Air, Udara, dan Laut	230,000,000.00	
2.11.03.2.01.0011.	Penyusunan dokumen status lingkungan hidup daerah	70,000,000.00	
2.11.03.2.02.	Penanggulangan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota	25,000,000.00	
2.11.03.2.02.0001.	Pemberian Informasi Peringatan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup pada Masyarakat	25,000,000.00	
2.11.03.2.03.	Pemulihan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota	120,000,000.00	
2.11.03.2.03.0001.	Koordinasi dan Sinkronisasi Penghentian Sumber Pencemaran	50,000,000.00	
2.11.03.2.03.0009.	Pelaksanaan rehabilitasi	70,000,000.00	
2.11.04.	PROGRAM PENGELOLAAN KEANEKARAGAMAN HAYATI (KEHATI)	3,383,950,000.00	
2.11.04.2.01.	Pengelolaan Keanekaragaman Hayati Kabupaten/Kota	3,383,950,000.00	
2.11.04.2.01.0004.	Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH)	3,283,950,000.00	
2.11.04.2.01.0006.	Pengembangan Kapasitas Kelembagaan dan SDM dalam Pengelolaan Keanekaragaman Hayati	100,000,000.00	
2.11.05.	PROGRAM PENGENDALIAN BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (B3) DAN LIMBAH BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (LIMBAH B3)	39,000,000.00	
2.11.05.2.01.	Penyimpanan sementara Limbah B3	8,000,000.00	
2.11.05.2.01.0002.	Verifikasi Lapangan untuk Memastikan Pemenuhan Persyaratan Administrasi dan Teknis Penyimpanan sementara Limbah B3	8,000,000.00	
2.11.05.2.02.	Pengumpulan Limbah B3 dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	31,000,000.00	
2.11.05.2.02.0002.	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengelolaan Limbah B3 dengan Pemerintah Provinsi dalam rangka Pengangkutan, Pemanfaatan, Pengolahan, dan/atau Penimbunan	31,000,000.00	
2.11.06.	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN TERHADAP IZIN LINGKUNGAN DAN IZIN PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP (PPLH)	162,808,310.00	

Kode	Urusan Pemerintahan Daerah, Perangkat Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara	Ket.
1	2	3	4
2.11.06.2.01.	Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Usaha dan/atau Kegiatan yang Izin Lingkungan dan Izin PPLH Diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	162,808,310.00	
2.11.06.2.01.0001.	Fasilitasi Pemenuhan Ketentuan dan Kewajiban Izin Lingkungan dan/atau Izin PPLH	102,808,310.00	
2.11.06.2.01.0009.	Pengawasan Perizinan Berusaha atau Persetujuan Pemerintah terkait Persetujuan Lingkungan yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dan Peraturan Perundang-undangan di bidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup	60,000,000.00	
2.11.08.	PROGRAM PENINGKATAN PENDIDIKAN, PELATIHAN DAN PENYULUHAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT	50,000,000.00	
2.11.08.2.01.	Penyelenggaraan Pendidikan, Pelatihan, dan Penyuluhan Lingkungan Hidup untuk Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	50,000,000.00	
2.11.08.2.01.0005.	Peningkatan Kapasitas dan Kompetensi Sumber Daya Manusia Bidang lingkungan hidup untuk Lembaga pendidikan formal/lembaga masyarakat/komunitas/kelompok masyarakat	50,000,000.00	
2.11.09.	PROGRAM PENGHARGAAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT	50,000,000.00	
2.11.09.2.01.	Pemberian Penghargaan Lingkungan Hidup Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	50,000,000.00	
2.11.09.2.01.0001.	Penilaian Kinerja Masyarakat/Lembaga Masyarakat/Dunia Usaha/Dunia Pendidikan/Filantropi dalam Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup	50,000,000.00	
2.11.10.	PROGRAM PENANGANAN PENGADUAN LINGKUNGAN HIDUP	15,000,000.00	
2.11.10.2.01.	Penyelesaian Pengaduan Masyarakat di Bidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH) Kabupaten/Kota	15,000,000.00	
2.11.10.2.01.0004.	Pengelolaan Pengaduan permasalahan Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup tingkat Kabupaten/Kota	15,000,000.00	
2.11.11.	PROGRAM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN	14,342,105,181.00	
2.11.11.2.01.	Pengelolaan Sampah	14,342,105,181.00	
2.11.11.2.01.0004.	Peningkatan Peran Serta Masyarakat dalam Pengelolaan Persampahan	200,000,000.00	
2.11.11.2.01.0005.	Koordinasi dan Sinkronisasi Penyediaan Prasarana dan Sarana Pengelolaan Persampahan	30,000,000.00	
2.11.11.2.01.0007.	Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Persampahan di TPA/TPST/SPA Kabupaten/Kota	13,179,963,000.00	
2.11.11.2.01.0008.	Penyusunan Rencana, Kebijakan dan Strategi Daerah Pengelolaan Sampah kabupaten/kota	30,000,000.00	
2.11.11.2.01.0011.	Pelaksanaan pemantauan, pembinaan, verifikasi dan pengawasan atas penerapan Rencana, Kebijakan dan Teknis pengelolaan Sampah kabupaten/kota	58,061,181.00	
2.11.11.2.01.0013.	Pengurangan sampah melalui pemanfaatan kembali sampah	30,000,000.00	
2.11.11.2.01.0020.	Penanganan sampah melalui pemrosesan akhir sampah di TPA/TPST kabupaten/kota atau TPA/TPST Regional	814,081,000.00	
2.12.0.00.0.00.01.0000.	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	6,810,450,987.00	
2.12.0.00.0.00.01.0000.	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	6,810,450,987.00	
2.	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	6,810,450,987.00	
2.12.	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL	6,810,450,987.00	
2.12.01.	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	6,063,341,372.00	
2.12.01.2.01.	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	82,146,000.00	
2.12.01.2.01.0001.	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	41,976,000.00	
2.12.01.2.01.0007.	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	40,170,000.00	
2.12.01.2.02.	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	4,803,009,220.00	
2.12.01.2.02.0001.	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	4,793,009,220.00	
2.12.01.2.02.0003.	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	10,000,000.00	
2.12.01.2.05.	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	20,000,000.00	
2.12.01.2.05.0009.	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	20,000,000.00	

Kode	Urusan Pemerintahan Daerah, Perangkat Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara	Ket.
1	2	3	4
2.12.01.2.06.	Administrasi Umum Perangkat Daerah	514,597,152.00	
2.12.01.2.06.0001.	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	11,018,191.00	
2.12.01.2.06.0002.	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	224,464,700.00	
2.12.01.2.06.0003.	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	8,368,333.00	
2.12.01.2.06.0004.	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	166,959,313.00	
2.12.01.2.06.0005.	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	13,786,615.00	
2.12.01.2.06.0009.	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	90,000,000.00	
2.12.01.2.08.	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	532,911,000.00	
2.12.01.2.08.0001.	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	3,550,000.00	
2.12.01.2.08.0002.	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	139,361,000.00	
2.12.01.2.08.0004.	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	390,000,000.00	
2.12.01.2.09.	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	110,678,000.00	
2.12.01.2.09.0001.	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	75,000,000.00	
2.12.01.2.09.0006.	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	20,550,000.00	
2.12.01.2.09.0009.	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	15,128,000.00	
2.12.02.	PROGRAM PENDAFTARAN PENDUDUK	107,650,000.00	
2.12.02.2.01.	Pelayanan Pendaftaran Penduduk	107,650,000.00	
2.12.02.2.01.0004.	Peningkatan Pelayanan Pendaftaran Penduduk	107,650,000.00	
2.12.03.	PROGRAM PENCATATAN SIPIL	91,491,615.00	
2.12.03.2.01.	Pelayanan Pencatatan Sipil	91,491,615.00	
2.12.03.2.01.0002.	Peningkatan dalam Pelayanan Pencatatan Sipil	91,491,615.00	
2.12.04.	PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN	515,421,000.00	
2.12.04.2.03.	Penyelenggaraan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	515,421,000.00	
2.12.04.2.03.0003.	Fasilitasi Terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	467,708,000.00	
2.12.04.2.03.0007.	Komunikasi, Informasi, dan Edukasi kepada Pemangku Kepentingan dan Masyarakat	47,713,000.00	
2.12.05.	PROGRAM PENGELOLAAN PROFIL KEPENDUDUKAN	32,547,000.00	
2.12.05.2.01.	Penyusunan Profil Kependudukan	32,547,000.00	
2.12.05.2.01.0001.	Penyediaan Data Kependudukan Kabupaten/Kota	32,547,000.00	
2.13.0.00.0.00.01.0000.	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	6,643,818,311.00	
2.13.0.00.0.00.01.0000.	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	6,643,818,311.00	
2.	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	6,643,818,311.00	
2.13.	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA	6,643,818,311.00	
2.13.01.	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	4,184,366,711.00	
2.13.01.2.01.	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	70,000,000.00	
2.13.01.2.01.0001.	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	40,000,000.00	
2.13.01.2.01.0007.	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	30,000,000.00	
2.13.01.2.02.	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	3,371,629,219.00	
2.13.01.2.02.0001.	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	3,356,173,219.00	
2.13.01.2.02.0003.	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	15,456,000.00	
2.13.01.2.03.	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	4,020,000.00	
2.13.01.2.03.0006.	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	4,020,000.00	

Kode	Urusan Pemerintahan Daerah, Perangkat Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara	Ket.
1	2	3	4
2.13.01.2.05.	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	30,000,000.00	
2.13.01.2.05.0009.	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	30,000,000.00	
2.13.01.2.06.	Administrasi Umum Perangkat Daerah	357,917,492.00	
2.13.01.2.06.0001.	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	15,000,000.00	
2.13.01.2.06.0002.	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	50,000,000.00	
2.13.01.2.06.0003.	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	25,000,000.00	
2.13.01.2.06.0004.	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	120,000,000.00	
2.13.01.2.06.0005.	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	32,917,492.00	
2.13.01.2.06.0009.	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	115,000,000.00	
2.13.01.2.07.	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	50,000,000.00	
2.13.01.2.07.0006.	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	50,000,000.00	
2.13.01.2.08.	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	195,800,000.00	
2.13.01.2.08.0001.	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	3,000,000.00	
2.13.01.2.08.0002.	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	20,000,000.00	
2.13.01.2.08.0004.	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	172,800,000.00	
2.13.01.2.09.	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	105,000,000.00	
2.13.01.2.09.0001.	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	50,000,000.00	
2.13.01.2.09.0006.	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	25,000,000.00	
2.13.01.2.09.0009.	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	30,000,000.00	
2.13.02.	PROGRAM PENATAAN DESA	30,000,000.00	
2.13.02.2.01.	Penyelenggaraan Penataan Desa	30,000,000.00	
2.13.02.2.01.0002.	Fasilitasi Tata Wilayah Desa	30,000,000.00	
2.13.03.	PROGRAM PENINGKATAN KERJA SAMA DESA	30,000,000.00	
2.13.03.2.01.	Fasilitasi Kerja Sama antar Desa	30,000,000.00	
2.13.03.2.01.0002.	Fasilitasi Kerja Sama Antar Desa dengan Pihak Ketiga dalam Kabupaten/Kota	30,000,000.00	
2.13.04.	PROGRAM ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DESA	1,299,451,600.00	
2.13.04.2.01.	Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa	1,299,451,600.00	
2.13.04.2.01.0003.	Fasilitasi Penyusunan Perencanaan Pembangunan Desa	40,000,000.00	
2.13.04.2.01.0004.	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa	100,000,000.00	
2.13.04.2.01.0005.	Pembinaan Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintah Desa	654,451,600.00	
2.13.04.2.01.0008.	Pembinaan dan Pemberdayaan BUM Desa dan Lembaga Kerja Sama antar Desa	40,000,000.00	
2.13.04.2.01.0009.	Penyelenggaraan Pemilihan, Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa	150,000,000.00	
2.13.04.2.01.0011.	Fasilitasi Penyusunan Profil Desa	70,000,000.00	
2.13.04.2.01.0013.	Fasilitasi Pengelolaan Aset Desa	30,000,000.00	
2.13.04.2.01.0015.	Fasilitasi Penetapan dan Penegasan Batas Desa	25,000,000.00	
2.13.04.2.01.0018.	Fasilitasi Evaluasi Perkembangan Desa serta Lomba Desa dan Kelurahan	190,000,000.00	
2.13.05.	PROGRAM PEMBERDAYAAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN, LEMBAGA ADAT DAN MASYARAKAT HUKUM ADAT	1,100,000,000.00	
2.13.05.2.01.	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan yang Bergerak di Bidang Pemberdayaan Desa dan Lembaga Adat Tingkat Daerah Kabupaten/Kota serta Pemberdayaan Masyarakat Hukum Adat yang Masyarakat Pelakunya Hukum Adat yang Sama dalam Daerah Kabupaten/Kota	1,100,000,000.00	

Kode	Urusan Pemerintahan Daerah, Perangkat Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara	Ket.
1	2	3	4
2.13.05.2.01.0002.	Fasilitasi Penataan, Pemberdayaan dan Pendayagunaan Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat	50,000,000.00	
2.13.05.2.01.0005.	Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat dan Pemerintah Desa dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Desa	50,000,000.00	
2.13.05.2.01.0006.	Fasilitasi Pemerintah Desa dalam Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna	50,000,000.00	
2.13.05.2.01.0007.	Fasilitasi Bulan Bhakti Gotong Royong Masyarakat	300,000,000.00	
2.13.05.2.01.0008.	Fasilitasi Penyelenggaraan Ketentraman, Ketertiban dan Perlindungan Masyarakat Desa	200,000,000.00	
2.13.05.2.01.0009.	Fasilitasi Tim Penggerak PKK dalam Penyelenggaraan Gerakan Pemberdayaan Masyarakat dan Kesejahteraan Keluarga	450,000,000.00	
2.15.0.00.0.00.01.0000.	Dinas Perhubungan	14,582,577,601.00	
2.15.0.00.0.00.01.0000.	Dinas Perhubungan	14,582,577,601.00	
2.	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	14,582,577,601.00	
2.15.	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN	14,582,577,601.00	
2.15.01.	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	7,970,563,275.00	
2.15.01.2.01.	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	140,000,000.00	
2.15.01.2.01.0001.	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	70,000,000.00	
2.15.01.2.01.0007.	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	70,000,000.00	
2.15.01.2.02.	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	6,859,260,075.00	
2.15.01.2.02.0001.	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	6,829,260,075.00	
2.15.01.2.02.0003.	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	30,000,000.00	
2.15.01.2.03.	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	5,000,000.00	
2.15.01.2.03.0006.	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	5,000,000.00	
2.15.01.2.06.	Administrasi Umum Perangkat Daerah	431,000,000.00	
2.15.01.2.06.0001.	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	7,000,000.00	
2.15.01.2.06.0002.	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	60,000,000.00	
2.15.01.2.06.0003.	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	10,000,000.00	
2.15.01.2.06.0004.	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	164,000,000.00	
2.15.01.2.06.0005.	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	35,000,000.00	
2.15.01.2.06.0009.	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	155,000,000.00	
2.15.01.2.08.	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	379,843,200.00	
2.15.01.2.08.0001.	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	6,000,000.00	
2.15.01.2.08.0002.	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	106,000,000.00	
2.15.01.2.08.0004.	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	267,843,200.00	
2.15.01.2.09.	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	155,460,000.00	
2.15.01.2.09.0001.	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	43,690,800.00	
2.15.01.2.09.0002.	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	53,049,070.00	
2.15.01.2.09.0006.	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	38,720,130.00	
2.15.01.2.09.0009.	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	20,000,000.00	
2.15.02.	PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)	2,887,472,600.00	
2.15.02.2.02.	Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota	1,699,000,000.00	
2.15.02.2.02.0002.	Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota	867,000,000.00	

Kode	Urusan Pemerintahan Daerah, Perangkat Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara	Ket.
1	2	3	4
2.15.02.2.02.0004.	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Perlengkapan Jalan	832,000,000.00	
2.15.02.2.03.	Pengelolaan Terminal Penumpang Tipe C	20,000,000.00	
2.15.02.2.03.0011.	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Terminal Tipe C (Fasilitas Utama dan Penunjang)	20,000,000.00	
2.15.02.2.04.	Penerbitan Izin Penyelenggaraan dan Pembangunan Fasilitas Parkir	300,000,000.00	
2.15.02.2.04.0002.	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Penyelenggaraan dan Pembangunan Fasilitas Parkir Kewenangan Kabupaten/Kota	300,000,000.00	
2.15.02.2.05.	Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	353,472,600.00	
2.15.02.2.05.0001.	Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	75,000,000.00	
2.15.02.2.05.0004.	Penyediaan Bukti Lulus Uji Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	175,472,600.00	
2.15.02.2.05.0007.	Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	78,020,000.00	
2.15.02.2.05.0008.	Koordinasi Penyelenggaraan Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	24,980,000.00	
2.15.02.2.06.	Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota	464,000,000.00	
2.15.02.2.06.0015.	Forum Lalu Lintas dan Angkutan Jalan untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota	28,000,000.00	
2.15.02.2.06.0017.	Penataan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota	436,000,000.00	
2.15.02.2.08.	Audit dan Inspeksi Keselamatan LLAJ di Jalan	20,000,000.00	
2.15.02.2.08.0007.	Pelaksanaan Inspeksi, Audit dan Pemantauan Sistem Manajemen Keselamatan Perusahaan Angkutan Umum	20,000,000.00	
2.15.02.2.09.	Penyediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	31,000,000.00	
2.15.02.2.09.0002.	Pengendalian dan Pengawasan Ketersediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota	31,000,000.00	
2.15.03.	PROGRAM PENGELOLAAN PELAYARAN	3,724,541,726.00	
2.15.03.2.02.	Penerbitan Izin Usaha Angkutan Laut Pelayaran Rakyat bagi Orang Perorangan atau Badan Usaha yang Berdomisili dan yang Beroperasi pada Lintas Pelabuhan dalam Daerah Kabupaten/Kota	26,000,000.00	
2.15.03.2.02.0002.	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Usaha Angkutan Laut Pelayaran Rakyat Kewenangan Kabupaten/Kota	26,000,000.00	
2.15.03.2.12.	Pembangunan, Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengoperasian Pelabuhan Pengumpan Lokal	3,698,541,726.00	
2.15.03.2.12.0003.	Pengoperasian dan Pemeliharaan Pelabuhan Pengumpan Lokal	3,698,541,726.00	
2.16.2.20.2.21.01.0000.	Dinas Komunikasi dan Informatika	13,928,227,245.00	
2.16.2.20.2.21.01.0000.	Dinas Komunikasi dan Informatika	13,928,227,245.00	
2.	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	13,928,227,245.00	
2.16.	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	13,628,227,245.00	
2.16.01.	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	6,764,046,396.00	
2.16.01.2.01.	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	84,999,000.00	
2.16.01.2.01.0001.	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	45,014,000.00	
2.16.01.2.01.0007.	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	39,985,000.00	
2.16.01.2.02.	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	5,402,431,396.00	
2.16.01.2.02.0001.	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	5,342,431,396.00	
2.16.01.2.02.0003.	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	60,000,000.00	
2.16.01.2.03.	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	30,000,000.00	
2.16.01.2.03.0006.	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	30,000,000.00	
2.16.01.2.05.	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	138,689,000.00	
2.16.01.2.05.0002.	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	66,000,000.00	
2.16.01.2.05.0009.	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	72,689,000.00	

Kode	Urusan Pemerintahan Daerah, Perangkat Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara	Ket.
1	2	3	4
2.16.01.2.06.	Administrasi Umum Perangkat Daerah	459,916,000.00	
2.16.01.2.06.0001.	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	15,000,000.00	
2.16.01.2.06.0002.	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	70,000,000.00	
2.16.01.2.06.0003.	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	20,000,000.00	
2.16.01.2.06.0004.	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	164,040,000.00	
2.16.01.2.06.0005.	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	37,876,000.00	
2.16.01.2.06.0009.	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	153,000,000.00	
2.16.01.2.07.	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	89,975,000.00	
2.16.01.2.07.0006.	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	89,975,000.00	
2.16.01.2.08.	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	362,340,000.00	
2.16.01.2.08.0001.	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	6,000,000.00	
2.16.01.2.08.0002.	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	53,940,000.00	
2.16.01.2.08.0004.	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	302,400,000.00	
2.16.01.2.09.	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	195,696,000.00	
2.16.01.2.09.0001.	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	93,846,000.00	
2.16.01.2.09.0006.	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	101,850,000.00	
2.16.02.	PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK	3,094,630,849.00	
2.16.02.2.01.	Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	3,094,630,849.00	
2.16.02.2.01.0014.	Relasi Media	2,005,860,000.00	
2.16.02.2.01.0017.	Pelayanan Informasi Publik	29,865,000.00	
2.16.02.2.01.0019.	Monitoring Informasi Kebijakan, Opini, dan Aspirasi Publik	113,370,000.00	
2.16.02.2.01.0021.	Pengelolaan Media Komunikasi Publik	200,000,000.00	
2.16.02.2.01.0023.	Penyusunan Konten	595,535,849.00	
2.16.02.2.01.0024.	Penguatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Komunikasi Publik	150,000,000.00	
2.16.03.	PROGRAM PENGELOLAAN APLIKASI INFORMATIKA	3,769,550,000.00	
2.16.03.2.01.	Pengelolaan Nama Domain yang Telah Ditetapkan oleh Pemerintah Pusat dan Sub Domain di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	100,000,000.00	
2.16.03.2.01.0004.	Pengelolaan Nama Domain dan Sub Domain Penyelenggaraan Pemerintah Daerah dan Pengelolaan Nama Domain Pemerintah Desa	100,000,000.00	
2.16.03.2.02.	Pengelolaan E-government di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	3,669,550,000.00	
2.16.03.2.02.0018.	Koordinasi penyusunan dan/atau reviu arsitektur dan peta rencana SPBE Pemerintah Daerah	175,000,000.00	
2.16.03.2.02.0020.	Pembangunan dan/atau Pengembangan Aplikasi Khusus yang sesuai dengan arsitektur dan peta rencana SPBE pemerintah daerah	650,000,000.00	
2.16.03.2.02.0028.	Koordinasi dan Fasilitasi Promosi Literasi SPBEDan/atau kolaborasi penyelenggaraan SPBE	75,000,000.00	
2.16.03.2.02.0030.	Penyediaan Akses Internet untuk Perangkat Daerah dalam rangka penyelenggaraan SPBE	2,769,550,000.00	
2.20.	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG STATISTIK	100,000,000.00	
2.20.02.	PROGRAM PENYELENGGARAAN STATISTIK SEKTORAL	100,000,000.00	
2.20.02.2.01.	Penyelenggaraan Statistik Sektoral di Lingkup Daerah Kabupaten/Kota	100,000,000.00	
2.20.02.2.01.0009.	Peningkatan Kualitas Data Statistik Sektoral	25,000,000.00	
2.20.02.2.01.0010.	Penyelenggaraan Statistik Sektoral yang sesuai dengan Prinsip Satu Data Indonesia	75,000,000.00	
2.21.	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERSANDIAN	200,000,000.00	
2.21.02.	PROGRAM PENYELENGGARAAN PERSANDIAN UNTUK PENGAMANAN INFORMASI	200,000,000.00	
2.21.02.2.01.	Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	150,000,000.00	

Kode	Urusan Pemerintahan Daerah, Perangkat Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara	Ket.
1	2	3	4
2.21.02.2.01.0002.	Pelaksanaan Analisis Kebutuhan dan Pengelolaan Sumber Daya Keamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	50,000,000.00	
2.21.02.2.01.0003.	Pelaksanaan Keamanan Informasi Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota Berbasis Elektronik dan Non Elektronik	100,000,000.00	
2.21.02.2.02.	Penetapan Pola Hubungan Komunikasi Sandi Antar Perangkat Daerah Kabupaten/Kota	50,000,000.00	
2.21.02.2.02.0001.	Operasionalisasi Jaring Komunikasi Sandi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	50,000,000.00	
2.17.3.31.3.30.01.0000.	Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Perindustrian dan Perdagangan	22,822,745,302.00	
2.17.3.31.3.30.01.0000.	Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Perindustrian dan Perdagangan	22,822,745,302.00	
2.	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	9,960,561,302.00	
2.17.	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOPERASI, USAHA KECIL, DAN MENENGAH	9,960,561,302.00	
2.17.01.	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	6,185,806,302.00	
2.17.01.2.01.	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	100,000,000.00	
2.17.01.2.01.0001.	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	50,000,000.00	
2.17.01.2.01.0007.	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	50,000,000.00	
2.17.01.2.02.	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	4,857,803,104.00	
2.17.01.2.02.0001.	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	4,837,803,104.00	
2.17.01.2.02.0003.	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	20,000,000.00	
2.17.01.2.03.	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	10,000,000.00	
2.17.01.2.03.0006.	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	10,000,000.00	
2.17.01.2.06.	Administrasi Umum Perangkat Daerah	419,499,000.00	
2.17.01.2.06.0001.	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	18,000,000.00	
2.17.01.2.06.0002.	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	83,121,000.00	
2.17.01.2.06.0003.	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	18,000,000.00	
2.17.01.2.06.0004.	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	114,750,000.00	
2.17.01.2.06.0005.	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	20,192,000.00	
2.17.01.2.06.0009.	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	165,436,000.00	
2.17.01.2.07.	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	150,000,000.00	
2.17.01.2.07.0005.	Pengadaan Mebel	70,000,000.00	
2.17.01.2.07.0006.	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	80,000,000.00	
2.17.01.2.08.	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	578,504,198.00	
2.17.01.2.08.0001.	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	4,200,000.00	
2.17.01.2.08.0002.	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	199,504,198.00	
2.17.01.2.08.0004.	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	374,800,000.00	
2.17.01.2.09.	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	70,000,000.00	
2.17.01.2.09.0001.	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	20,000,000.00	
2.17.01.2.09.0006.	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	20,000,000.00	
2.17.01.2.09.0009.	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	30,000,000.00	
2.17.03.	PROGRAM PENGAWASAN DAN PEMERIKSAAN KOPERASI	50,000,000.00	
2.17.03.2.01.	Pemeriksaan dan Pengawasan Koperasi, Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya dalam Daerah Kabupaten/ Kota	50,000,000.00	
2.17.03.2.01.0004.	Pelaksanaan Proses Pemeriksaan dan Pengawasan Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya Daerah Kabupaten/Kota	50,000,000.00	
2.17.05.	PROGRAM PENDIDIKAN DAN LATIHAN PERKOPERASIAN	430,942,000.00	

Kode	Urusan Pemerintahan Daerah, Perangkat Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara	Ket.
1	2	3	4
2.17.05.2.01.	Pendidikan dan Latihan Perkoperasian Bagi Koperasi yang Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/Kota	430,942,000.00	
2.17.05.2.01.0001.	Peningkatan Pemahaman dan Pengetahuan Perkoperasian serta Kapasitas dan Kompetensi SDM Koperasi	430,942,000.00	
2.17.06.	PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PERLINDUNGAN KOPERASI	50,000,000.00	
2.17.06.2.01.	Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi yang Keanggotaannya dalam Daerah Kabupaten/Kota	50,000,000.00	
2.17.06.2.01.0005.	Peningkatan Produktivitas, Nilai Tambah, Akses Pasar, Akses Pembiayaan, Penguatan Kelembagaan, Penataan Manajemen, Standarisasi, dan Restrukturisasi Usaha	50,000,000.00	
2.17.07.	PROGRAM PEMBERDAYAAN USAHA MENENGAH, USAHA KECIL, DAN USAHA MIKRO (UMKM)	1,626,190,800.00	
2.17.07.2.01.	Pemberdayaan Usaha Mikro yang Dilakukan Melalui Pendataan, Kemitraan, Kemudahan Perizinan, Penguatan Kelembagaan dan Koordinasi dengan Para Pemangku Kepentingan	1,626,190,800.00	
2.17.07.2.01.0002.	Pemberdayaan Melalui Kemitraan Usaha Mikro	1,212,000,000.00	
2.17.07.2.01.0015.	Peningkatan Pemahaman dan Pengetahuan UMKM serta Kapasitas dan Kompetensi SDM UMKM dan Kewirausahaan melalui Pendidikan dan Pelatihan	414,190,800.00	
2.17.08.	PROGRAM PENGEMBANGAN UMKM	1,617,622,200.00	
2.17.08.2.01.	Pengembangan Usaha Mikro dengan Orientasi Peningkatan Skala Usaha Menjadi Usaha Kecil	1,617,622,200.00	
2.17.08.2.01.0002.	Pengembangan Usaha Mikro	1,617,622,200.00	
3.	URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN	12,862,184,000.00	
3.30.	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERDAGANGAN	500,000,000.00	
3.30.03.	PROGRAM PENINGKATAN SARANA DISTRIBUSI PERDAGANGAN	40,000,000.00	
3.30.03.2.02.	Pembinaan Terhadap Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan Masyarakat di Wilayah Kerjanya	40,000,000.00	
3.30.03.2.02.0001.	Pembinaan dan Pengendalian Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan	40,000,000.00	
3.30.04.	PROGRAM STABILISASI HARGA BARANG KEBUTUHAN POKOK DAN BARANG PENTING	260,000,000.00	
3.30.04.2.02.	Pengendalian Harga, dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Pasar Kabupaten/Kota	260,000,000.00	
3.30.04.2.02.0001.	Pemantauan Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting pada Pelaku Usaha Distribusi Barang dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota	60,000,000.00	
3.30.04.2.02.0003.	Pelaksanaan Operasi Pasar Reguler dan Pasar Khusus yang Berdampak dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota	200,000,000.00	
3.30.05.	PROGRAM PENGEMBANGAN EKSPOR	40,000,000.00	
3.30.05.2.01.	Penyelenggaraan Promosi Dagang Melalui Pameran Dagang dan Misi Dagang bagi Produk Ekspor Unggulan yang Terdapat pada 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	40,000,000.00	
3.30.05.2.01.0004.	Misi Dagang bagi Produk Ekspor Unggulan	40,000,000.00	
3.30.06.	PROGRAM STANDARDISASI DAN PERLINDUNGAN KONSUMEN	160,000,000.00	
3.30.06.2.01.	Pelaksanaan Metrologi Legal, Berupa Tera, Tera Ulang, dan Pengawasan	160,000,000.00	
3.30.06.2.01.0001.	Pelaksanaan Metrologi Legal, Berupa Tera, Tera Ulang	105,000,000.00	
3.30.06.2.01.0002.	Pengawasan/Penyuluhan Metrologi Legal	55,000,000.00	
3.31.	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERINDUSTRIAN	12,362,184,000.00	
3.31.02.	PROGRAM PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN INDUSTRI	12,262,184,000.00	
3.31.02.2.01.	Penyusunan dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota	12,262,184,000.00	
3.31.02.2.01.0005.	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat	12,262,184,000.00	
3.31.03.	PROGRAM PENGENDALIAN IZIN USAHA INDUSTRI	50,000,000.00	
3.31.03.2.01.	Penerbitan Izin Usaha Industri (IUI), Izin Perluasan Usaha Industri (IPUI), Izin Usaha Kawasan Industri (IUKI) dan Izin Perluasan Kawasan Industri (IPKI) Kewenangan Kabupaten/Kota	50,000,000.00	
3.31.03.2.01.0003.	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan terhadap Perizinan Berusaha sektor perindustrian yang menjadi kewenangan Kabupaten/Kota	50,000,000.00	

Kode	Urusan Pemerintahan Daerah, Perangkat Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara	Ket.
1	2	3	4
3.31.04.	PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM INFORMASI INDUSTRI NASIONAL	50,000,000.00	
3.31.04.2.01.	Penyediaan Informasi Industri untuk Informasi Industri untuk IUI, IPUI, IUKI dan IPKI Kewenangan Kabupaten/Kota	50,000,000.00	
3.31.04.2.01.0002.	Diseminasi, Publikasi Data Informasi dan Analisa Industri Kabupaten/Kota Melalui SIINas	50,000,000.00	
2.18.0.00.0.00.01.0000.	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	7,446,947,296.00	
2.18.0.00.0.00.01.0000.	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	7,446,947,296.00	
2.	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	7,446,947,296.00	
2.18.	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENANAMAN MODAL	7,446,947,296.00	
2.18.01.	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	6,270,094,296.00	
2.18.01.2.01.	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	80,000,000.00	
2.18.01.2.01.0001.	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	45,000,000.00	
2.18.01.2.01.0007.	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	35,000,000.00	
2.18.01.2.02.	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	3,979,160,248.00	
2.18.01.2.02.0001.	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	3,962,160,248.00	
2.18.01.2.02.0003.	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	17,000,000.00	
2.18.01.2.05.	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	52,300,000.00	
2.18.01.2.05.0002.	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	27,300,000.00	
2.18.01.2.05.0009.	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	25,000,000.00	
2.18.01.2.06.	Administrasi Umum Perangkat Daerah	562,034,048.00	
2.18.01.2.06.0001.	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	25,000,000.00	
2.18.01.2.06.0002.	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	60,000,000.00	
2.18.01.2.06.0004.	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	207,034,048.00	
2.18.01.2.06.0005.	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	20,000,000.00	
2.18.01.2.06.0009.	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	250,000,000.00	
2.18.01.2.07.	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	80,000,000.00	
2.18.01.2.07.0005.	Pengadaan Mebel	50,000,000.00	
2.18.01.2.07.0006.	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	30,000,000.00	
2.18.01.2.08.	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	1,226,600,000.00	
2.18.01.2.08.0001.	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	5,000,000.00	
2.18.01.2.08.0002.	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	210,000,000.00	
2.18.01.2.08.0004.	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	1,011,600,000.00	
2.18.01.2.09.	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	290,000,000.00	
2.18.01.2.09.0001.	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	80,000,000.00	
2.18.01.2.09.0002.	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	30,000,000.00	
2.18.01.2.09.0006.	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	30,000,000.00	
2.18.01.2.09.0010.	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	150,000,000.00	
2.18.02.	PROGRAM PENGEMBANGAN IKLIM PENANAMAN MODAL	250,000,000.00	
2.18.02.2.01.	Penetapan Pemberian Fasilitas/Insentif Dibidang Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	50,000,000.00	
2.18.02.2.01.0003.	Fasilitasi Kemitraan yang dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten/Kota	50,000,000.00	
2.18.02.2.02.	Pembuatan Peta Potensi Investasi Kabupaten/Kota	200,000,000.00	
2.18.02.2.02.0004.	Penyusunan Peta Potensi Investasi Kabupaten/Kota	200,000,000.00	

Kode	Urusan Pemerintahan Daerah, Perangkat Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara	Ket.
1	2	3	4
2.18.03.	PROGRAM PROMOSI PENANAMAN MODAL	150,000,000.00	
2.18.03.2.01.	Penyelenggaraan Promosi Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	150,000,000.00	
2.18.03.2.01.0002.	Pelaksanaan Kegiatan Promosi Penanaman Modal Daerah Kabupaten/Kota	150,000,000.00	
2.18.04.	PROGRAM PELAYANAN PENANAMAN MODAL	100,000,000.00	
2.18.04.2.01.	Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Secara Terpadu Satu Pintu dibidang Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/ Kota	100,000,000.00	
2.18.04.2.01.0006.	Penyediaan Pelayanan Perizinan Berusaha melalui Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi secara Elektronik	70,000,000.00	
2.18.04.2.01.0008.	Pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan di bidang perizinan berusaha berbasis risiko	30,000,000.00	
2.18.05.	PROGRAM PENGENDALIAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL	626,853,000.00	
2.18.05.2.01.	Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	626,853,000.00	
2.18.05.2.01.0004.	Penyelesaian Permasalahan dan Hambatan yang dihadapi Pelaku Usaha dalam merealisasikan Kegiatan Usahanya	94,027,000.00	
2.18.05.2.01.0005.	Bimbingan Teknis kepada Pelaku Usaha	344,770,000.00	
2.18.05.2.01.0006.	Pengawasan Penanaman Modal	188,056,000.00	
2.18.06.	PROGRAM PENGELOLAAN DATA DAN SISTEM INFORMASI PENANAMAN MODAL	50,000,000.00	
2.18.06.2.01.	Pengelolaan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan yang Terintegrasi pada Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	50,000,000.00	
2.18.06.2.01.0002.	Pengolahan, Penyajian dan Pemanfaatan Data dan Informasi Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik	50,000,000.00	
2.19.0.00.0.00.01.0000.	Dinas Kepemudaan dan Olahraga	9,179,469,338.00	
2.19.0.00.0.00.01.0000.	Dinas Kepemudaan dan Olahraga	9,179,469,338.00	
2.	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	9,179,469,338.00	
2.19.	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA	9,179,469,338.00	
2.19.01.	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	4,647,469,338.00	
2.19.01.2.01.	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	100,000,000.00	
2.19.01.2.01.0001.	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	60,000,000.00	
2.19.01.2.01.0007.	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	40,000,000.00	
2.19.01.2.02.	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	3,120,366,716.00	
2.19.01.2.02.0001.	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	3,108,774,716.00	
2.19.01.2.02.0003.	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	11,592,000.00	
2.19.01.2.05.	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	70,000,000.00	
2.19.01.2.05.0009.	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	70,000,000.00	
2.19.01.2.06.	Administrasi Umum Perangkat Daerah	565,442,622.00	
2.19.01.2.06.0001.	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	30,000,000.00	
2.19.01.2.06.0002.	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	90,000,000.00	
2.19.01.2.06.0003.	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	65,000,000.00	
2.19.01.2.06.0004.	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	160,000,000.00	
2.19.01.2.06.0005.	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	40,442,622.00	
2.19.01.2.06.0009.	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	180,000,000.00	
2.19.01.2.07.	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	200,000,000.00	
2.19.01.2.07.0006.	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	200,000,000.00	
2.19.01.2.08.	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	271,660,000.00	

Kode	Urusan Pemerintahan Daerah, Perangkat Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara	Ket.
1	2	3	4
2.19.01.2.08.0001.	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	4,000,000.00	
2.19.01.2.08.0004.	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	267,660,000.00	
2.19.01.2.09.	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	320,000,000.00	
2.19.01.2.09.0001.	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	70,000,000.00	
2.19.01.2.09.0006.	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	50,000,000.00	
2.19.01.2.09.0010.	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	200,000,000.00	
2.19.02.	PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEPEMUDAAN	2,482,000,000.00	
2.19.02.2.01.	Penyadaran, Pemberdayaan, dan Pengembangan Pemuda dan Kepemudaan Terhadap Pemuda Pelopor Kabupaten/Kota, Wirausaha Muda Pemula, dan Pemuda Kader Kabupaten/Kota	2,482,000,000.00	
2.19.02.2.01.0011.	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Penyelenggaraan Pengembangan Kewirausahaan Pemuda Bagi Wirausaha pemuda Tingkat Kabupaten/kota	200,000,000.00	
2.19.02.2.01.0015.	Koordinasi, Sinkronisasi dan Penyelenggaraan Pengembangan Kepeloporan Pemuda bagi Pemuda Pelopor Tingkat Kabupaten/kota	925,000,000.00	
2.19.02.2.01.0016.	Penyediaan dan Pengelolaan Prasarana dan Sarana Kepemudaan tingkat kabupaten/kota	1,357,000,000.00	
2.19.03.	PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEOLAHRAGAAN	1,750,000,000.00	
2.19.03.2.02.	Penyelenggaraan Kejuaraan Olahraga Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	900,000,000.00	
2.19.03.2.02.0004.	Penyelenggaraan Kejuaraan Olahraga Multi Event dan Single Event Tingkat Kabupaten/Kota	900,000,000.00	
2.19.03.2.03.	Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Prestasi Tingkat Daerah Provinsi	50,000,000.00	
2.19.03.2.03.0009.	Pembinaan dan Pengembangan Olahragawan Berprestasi kabupaten/kota	50,000,000.00	
2.19.03.2.04.	Pembinaan dan Pengembangan Organisasi Olahraga	800,000,000.00	
2.19.03.2.04.0005.	Pelaksanaan Standar nasional pengelolaan Organisasi Keolahragaan di kabupaten/kota	800,000,000.00	
2.19.04.	PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS KEPRAMUKAAN	300,000,000.00	
2.19.04.2.01.	Pembinaan dan Pengembangan Organisasi Kepramukaan	300,000,000.00	
2.19.04.2.01.0002.	Peningkatan Kapasitas Organisasi Kepramukaan Tingkat Daerah	300,000,000.00	
2.22.3.26.0.00.01.0000.	Dinas Kebudayaan dan Pariwisata	15,364,430,706.00	
2.22.3.26.0.00.01.0000.	Dinas Kebudayaan dan Pariwisata	15,364,430,706.00	
2.	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	7,616,039,706.00	
2.22.	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEBUDAYAAN	7,616,039,706.00	
2.22.01.	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	6,169,949,706.00	
2.22.01.2.01.	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	75,000,000.00	
2.22.01.2.01.0001.	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	60,000,000.00	
2.22.01.2.01.0007.	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	15,000,000.00	
2.22.01.2.02.	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	4,033,496,735.00	
2.22.01.2.02.0001.	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	3,991,496,735.00	
2.22.01.2.02.0003.	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	42,000,000.00	
2.22.01.2.03.	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	10,000,000.00	
2.22.01.2.03.0006.	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	10,000,000.00	
2.22.01.2.05.	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	17,000,000.00	
2.22.01.2.05.0009.	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	17,000,000.00	
2.22.01.2.06.	Administrasi Umum Perangkat Daerah	724,474,809.00	
2.22.01.2.06.0001.	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	30,000,000.00	

Kode	Urusan Pemerintahan Daerah, Perangkat Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara	Ket.
1	2	3	4
2.22.01.2.06.0002.	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	70,000,000.00	
2.22.01.2.06.0003.	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	45,000,000.00	
2.22.01.2.06.0004.	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	269,116,809.00	
2.22.01.2.06.0005.	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	40,000,000.00	
2.22.01.2.06.0009.	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	270,358,000.00	
2.22.01.2.07.	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	250,363,000.00	
2.22.01.2.07.0005.	Pengadaan Mebel	97,884,075.00	
2.22.01.2.07.0006.	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	152,478,925.00	
2.22.01.2.08.	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	843,136,100.00	
2.22.01.2.08.0001.	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	15,000,000.00	
2.22.01.2.08.0002.	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	312,792,000.00	
2.22.01.2.08.0004.	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	515,344,100.00	
2.22.01.2.09.	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	216,479,062.00	
2.22.01.2.09.0001.	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	60,000,000.00	
2.22.01.2.09.0002.	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	50,000,000.00	
2.22.01.2.09.0006.	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	50,000,000.00	
2.22.01.2.09.0009.	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	56,479,062.00	
2.22.02.	PROGRAM PENGEMBANGAN KEBUDAYAAN	1,247,954,000.00	
2.22.02.2.01.	Pengelolaan Kebudayaan yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota	529,954,000.00	
2.22.02.2.01.0001.	Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan Objek Pemajuan Kebudayaan	70,000,000.00	
2.22.02.2.01.0002.	Pembinaan Sumber Daya Manusia, Lembaga, dan Pranata Kebudayaan	459,954,000.00	
2.22.02.2.02.	Pelestarian Kesenian Tradisional yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota	468,000,000.00	
2.22.02.2.02.0001.	Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan Objek Pemajuan Tradisi Budaya	48,000,000.00	
2.22.02.2.02.0002.	Pembinaan Sumber Daya Manusia, Lembaga, dan Pranata Tradisional	420,000,000.00	
2.22.02.2.03.	Pembinaan Lembaga Adat yang Penganutnya dalam Daerah Kabupaten/Kota	250,000,000.00	
2.22.02.2.03.0001.	Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan Objek Pemajuan Lembaga Adat	250,000,000.00	
2.22.05.	PROGRAM PELESTARIAN DAN PENGELOLAAN CAGAR BUDAYA	58,136,000.00	
2.22.05.2.02.	Pengelolaan Cagar Budaya Peringkat Kabupaten/Kota	58,136,000.00	
2.22.05.2.02.0002.	Pengembangan Cagar Budaya	58,136,000.00	
2.22.06.	PROGRAM PENGELOLAAN PERMUSEUMAN	140,000,000.00	
2.22.06.2.01.	Pengelolaan Museum Kabupaten/Kota	140,000,000.00	
2.22.06.2.01.0001.	Pelindungan, Pengembangan, dan Pemanfaatan Koleksi Secara Terpadu	140,000,000.00	
3.	URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN	7,748,391,000.00	
3.26.	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PARIWISATA	7,748,391,000.00	
3.26.02.	PROGRAM PENINGKATAN DAYA TARIK DESTINASI PARIWISATA	4,867,391,000.00	
3.26.02.2.01.	Pengelolaan Daya Tarik Wisata Kabupaten/Kota	4,087,391,000.00	
3.26.02.2.01.0006.	Penetapan Daya Tarik Wisata Unggulan Kabupaten/Kota	2,874,391,000.00	
3.26.02.2.01.0007.	Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Daya Tarik Wisata Kabupaten/Kota	90,000,000.00	
3.26.02.2.01.0008.	Peningkatan Kapasitas SDM Pengelola Daya Tarik Wisata Unggulan Kabupaten/Kota	1,123,000,000.00	
3.26.02.2.03.	Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota	780,000,000.00	
3.26.02.2.03.0004.	Pengadaan/Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana dalam Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota	180,000,000.00	
3.26.02.2.03.0008.	Penyusunan Rencana Induk Pembangunan Kepariwisata Daerah Kabupaten/Kota	600,000,000.00	

Kode	Urusan Pemerintahan Daerah, Perangkat Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara	Ket.
1	2	3	4
3.26.03.	PROGRAM PEMASARAN PARIWISATA	2,653,000,000.00	
3.26.03.2.01.	Pemasaran Pariwisata Dalam dan Luar Negeri Daya Tarik, Destinasi dan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota	2,653,000,000.00	
3.26.03.2.01.0003.	Penyediaan Data dan Penyebaran Informasi Pariwisata Kabupaten/Kota, Baik Dalam dan Luar Negeri	160,000,000.00	
3.26.03.2.01.0006.	Fasilitasi Kegiatan Pemasaran Pariwisata Baik Dalam dan Luar Negeri Pariwisata Kabupaten/Kota	2,110,000,000.00	
3.26.03.2.01.0007.	Penguatan Promosi Melalui Media Cetak, Elektronik, dan Media Lainnya Baik Dalam dan Luar Negeri	383,000,000.00	
3.26.04.	PROGRAM PENGEMBANGAN EKONOMI KREATIF MELALUI PEMANFAATAN DAN PERLINDUNGAN HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL	213,000,000.00	
3.26.04.2.02.	Pengembangan Ekosistem Ekonomi Kreatif	213,000,000.00	
3.26.04.2.02.0005.	Pengembangan Sistem Pemasaran	163,000,000.00	
3.26.04.2.02.0022.	Fasilitasi Pendaftaran Kekayaan Intelektual	50,000,000.00	
3.26.05.	PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF	15,000,000.00	
3.26.05.2.01.	Pelaksanaan Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Tingkat Dasar	15,000,000.00	
3.26.05.2.01.0011.	Monitoring dan Evaluasi Pengembangan Sumber Daya Pariwisata dan Ekonomi Kreatif	15,000,000.00	
2.23.2.24.0.00.01.0000.	Dinas Perpustakaan dan Arsip Daerah	4,965,909,143.00	
2.23.2.24.0.00.01.0000.	Dinas Perpustakaan dan Arsip Daerah	4,965,909,143.00	
2.	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	4,965,909,143.00	
2.23.	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERPUSTAKAAN	4,890,909,143.00	
2.23.01.	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	4,505,909,143.00	
2.23.01.2.01.	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	70,000,000.00	
2.23.01.2.01.0001.	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	35,000,000.00	
2.23.01.2.01.0007.	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	35,000,000.00	
2.23.01.2.02.	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	3,485,698,529.00	
2.23.01.2.02.0001.	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	3,477,970,529.00	
2.23.01.2.02.0003.	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	7,728,000.00	
2.23.01.2.05.	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	78,000,000.00	
2.23.01.2.05.0002.	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	40,000,000.00	
2.23.01.2.05.0011.	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	38,000,000.00	
2.23.01.2.06.	Administrasi Umum Perangkat Daerah	374,800,000.00	
2.23.01.2.06.0001.	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	25,000,000.00	
2.23.01.2.06.0002.	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	35,000,000.00	
2.23.01.2.06.0003.	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	25,800,000.00	
2.23.01.2.06.0004.	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	174,000,000.00	
2.23.01.2.06.0005.	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	15,000,000.00	
2.23.01.2.06.0009.	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	100,000,000.00	
2.23.01.2.08.	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	351,300,000.00	
2.23.01.2.08.0001.	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	5,000,000.00	
2.23.01.2.08.0002.	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	133,900,000.00	
2.23.01.2.08.0004.	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	212,400,000.00	
2.23.01.2.09.	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	146,110,614.00	

Kode	Urusan Pemerintahan Daerah, Perangkat Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara	Ket.
1	2	3	4
2.23.01.2.09.0001.	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	111,110,614.00	
2.23.01.2.09.0006.	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	35,000,000.00	
2.23.02.	PROGRAM PEMBINAAN PERPUSTAKAAN	335,000,000.00	
2.23.02.2.01.	Pengelolaan Perpustakaan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	245,000,000.00	
2.23.02.2.01.0004.	Pembinaan Perpustakaan pada Satuan Pendidikan Dasar di Seluruh Wilayah Kabupaten/Kota Sesuai dengan Standar Nasional Perpustakaan	50,000,000.00	
2.23.02.2.01.0012.	Pengembangan Layanan Perpustakaan Rujukan Tingkat Kabupaten/Kota	50,000,000.00	
2.23.02.2.01.0016.	Peningkatan Kapasitas Tenaga Perpustakaan dan Pustakawan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	30,000,000.00	
2.23.02.2.01.0017.	Penyusunan Data dan Informasi Perpustakaan	15,000,000.00	
2.23.02.2.01.0018.	Pengelolaan dan Pengembangan Bahan Perpustakaan	50,000,000.00	
2.23.02.2.01.0020.	Pengembangan dan Pemeliharaan Layanan Perpustakaan Elektronik	50,000,000.00	
2.23.02.2.02.	Pembudayaan Gemar Membaca Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	90,000,000.00	
2.23.02.2.02.0007.	Pengembangan Literasi Berbasis Inklusi Sosial	60,000,000.00	
2.23.02.2.02.0010.	Sosialisasi Budaya Baca dan Literasi pada Satuan Pendidikan Dasar dan Masyarakat	30,000,000.00	
2.23.03.	PROGRAM PELESTARIAN KOLEKSI NASIONAL DAN NASKAH KUNO	50,000,000.00	
2.23.03.2.01.	Pelestarian Naskah Kuno Milik Daerah Kabupaten/Kota	50,000,000.00	
2.23.03.2.01.0003.	Peningkatan Peran Serta Masyarakat dalam Penyimpanan, Perawatan, Pelestarian, dan Pendaftaran Naskah Kuno	50,000,000.00	
2.24.	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEARSIPAN	75,000,000.00	
2.24.02.	PROGRAM PENGELOLAAN ARSIP	75,000,000.00	
2.24.02.2.01.	Pengelolaan Arsip Dinamis Daerah Kabupaten/Kota	40,000,000.00	
2.24.02.2.01.0003.	Pengawasan Arsip Dinamis Kewenangan Kabupaten/Kota	40,000,000.00	
2.24.02.2.02.	Pengelolaan Arsip Statis Daerah Kabupaten/Kota	35,000,000.00	
2.24.02.2.02.0004.	Akuisisi, Pengolahan, Preservasi, dan Akses Arsip Statis	35,000,000.00	
3.25.0.00.0.00.01.0000.	Dinas Perikanan	17,109,120,746.00	
3.25.0.00.0.00.01.0000.	Dinas Perikanan	17,109,120,746.00	
3.	URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN	17,109,120,746.00	
3.25.	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN	17,109,120,746.00	
3.25.01.	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	9,503,520,746.00	
3.25.01.2.01.	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	100,000,000.00	
3.25.01.2.01.0001.	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	70,000,000.00	
3.25.01.2.01.0007.	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	30,000,000.00	
3.25.01.2.02.	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	7,520,703,692.00	
3.25.01.2.02.0001.	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	7,505,703,692.00	
3.25.01.2.02.0003.	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	15,000,000.00	
3.25.01.2.03.	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	10,000,000.00	
3.25.01.2.03.0006.	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	10,000,000.00	
3.25.01.2.05.	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	125,230,000.00	
3.25.01.2.05.0002.	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	80,000,000.00	
3.25.01.2.05.0009.	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	45,230,000.00	
3.25.01.2.06.	Administrasi Umum Perangkat Daerah	428,000,000.00	
3.25.01.2.06.0001.	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	30,000,000.00	
3.25.01.2.06.0002.	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	81,454,544.00	

Kode	Urusan Pemerintahan Daerah, Perangkat Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara	Ket.
1	2	3	4
3.25.01.2.06.0003.	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	10,000,000.00	
3.25.01.2.06.0004.	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	90,000,000.00	
3.25.01.2.06.0005.	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	66,545,456.00	
3.25.01.2.06.0009.	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	150,000,000.00	
3.25.01.2.07.	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	390,000,000.00	
3.25.01.2.07.0005.	Pengadaan Mebel	87,544,788.00	
3.25.01.2.07.0006.	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	190,000,000.00	
3.25.01.2.07.0010.	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	112,455,212.00	
3.25.01.2.08.	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	621,090,000.00	
3.25.01.2.08.0001.	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	3,000,000.00	
3.25.01.2.08.0002.	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	192,000,000.00	
3.25.01.2.08.0004.	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	426,090,000.00	
3.25.01.2.09.	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	308,497,054.00	
3.25.01.2.09.0001.	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	30,000,000.00	
3.25.01.2.09.0002.	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	50,000,000.00	
3.25.01.2.09.0006.	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	25,000,000.00	
3.25.01.2.09.0009.	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	107,392,500.00	
3.25.01.2.09.0010.	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	96,104,554.00	
3.25.03.	PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN TANGKAP	3,645,600,000.00	
3.25.03.2.01.	Pengelolaan Penangkapan Ikan di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang Dapat Diusahakan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/ Kota	80,000,000.00	
3.25.03.2.01.0001.	Penyediaan Data dan Informasi Sumber Daya Ikan	80,000,000.00	
3.25.03.2.02.	Pemberdayaan Nelayan Kecil dalam Daerah Kabupaten/Kota	3,565,600,000.00	
3.25.03.2.02.0001.	Pengembangan Kapasitas Nelayan Kecil	602,720,000.00	
3.25.03.2.02.0003.	Pelaksanaan Fasilitas Bantuan Pendanaan, Bantuan Pembiayaan, Kemitraan Usaha	32,600,000.00	
3.25.03.2.02.0004.	Penyediaan Sarana dan Prasarana Pemberdayaan Usaha Nelayan Skala Kecil	2,930,280,000.00	
3.25.04.	PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN BUDIDAYA	3,490,000,000.00	
3.25.04.2.02.	Pemberdayaan Pembudi Daya Ikan Kecil	170,000,000.00	
3.25.04.2.02.0001.	Pengembangan Kapasitas Pembudi Daya Ikan Kecil	170,000,000.00	
3.25.04.2.04.	Pengelolaan Pembudidayaan Ikan	3,320,000,000.00	
3.25.04.2.04.0001.	Penyediaan Data dan Informasi Pembudidayaan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	60,000,000.00	
3.25.04.2.04.0002.	Penyediaan Prasarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	680,000,000.00	
3.25.04.2.04.0009.	Penjaminan Ketersediaan Sarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	2,580,000,000.00	
3.25.06.	PROGRAM PENGOLAHAN DAN PEMASARAN HASIL PERIKANAN	470,000,000.00	
3.25.06.2.01.	Penerbitan Tanda Daftar Usaha Pengolahan Hasil Perikanan bagi Usaha Skala Mikro dan Kecil	50,000,000.00	
3.25.06.2.01.0005.	Penyediaan Data dan Informasi Usaha Pemasaran dan Pengolahan Hasil Perikanan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota berdasarkan skala usaha dan risiko	50,000,000.00	
3.25.06.2.02.	Pembinaan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan bagi Usaha Pengolahan dan Pemasaran Skala Mikro dan Kecil	320,000,000.00	
3.25.06.2.02.0002.	Pembinaan terhadap Penerapan Persyaratan Perizinan Berusaha Pada Usaha Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan sesuai Skala Usaha dan Risiko	320,000,000.00	
3.25.06.2.03.	Penyediaan dan Penyaluran Bahan Baku Industri Pengolahan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/ Kota	100,000,000.00	

Kode	Urusan Pemerintahan Daerah, Perangkat Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara	Ket.
1	2	3	4
3.25.06.2.03.0002.	Pemberian Fasilitas bagi Pelaku Usaha Perikanan Skala Mikro dan Kecil dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	100,000,000.00	
4.01.0.00.5.06.01.0000.	Sekretariat Daerah	72,753,310,527.00	
4.01.0.00.5.06.01.0000.	Sekretariat Daerah	72,753,310,527.00	
4.	UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN	72,417,800,527.00	
4.01.	SEKRETARIAT DAERAH	72,417,800,527.00	
4.01.01.	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	36,569,207,345.00	
4.01.01.2.01.	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	221,904,000.00	
4.01.01.2.01.0001.	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	95,504,000.00	
4.01.01.2.01.0007.	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	126,400,000.00	
4.01.01.2.02.	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	17,198,503,384.00	
4.01.01.2.02.0001.	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	17,043,503,384.00	
4.01.01.2.02.0003.	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	65,000,000.00	
4.01.01.2.02.0007.	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	90,000,000.00	
4.01.01.2.03.	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	52,559,620.00	
4.01.01.2.03.0004.	Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD	20,000,000.00	
4.01.01.2.03.0006.	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	32,559,620.00	
4.01.01.2.05.	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	520,000,000.00	
4.01.01.2.05.0002.	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	350,000,000.00	
4.01.01.2.05.0009.	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	170,000,000.00	
4.01.01.2.06.	Administrasi Umum Perangkat Daerah	4,338,437,940.00	
4.01.01.2.06.0001.	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	80,000,000.00	
4.01.01.2.06.0002.	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	200,000,000.00	
4.01.01.2.06.0003.	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	196,984,000.00	
4.01.01.2.06.0004.	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	2,023,237,822.00	
4.01.01.2.06.0005.	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	200,000,000.00	
4.01.01.2.06.0009.	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1,638,216,118.00	
4.01.01.2.07.	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	412,621,872.00	
4.01.01.2.07.0005.	Pengadaan Mebel	57,061,022.00	
4.01.01.2.07.0006.	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	355,560,850.00	
4.01.01.2.08.	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	4,544,240,000.00	
4.01.01.2.08.0001.	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	20,000,000.00	
4.01.01.2.08.0002.	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	1,150,000,000.00	
4.01.01.2.08.0003.	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	275,600,000.00	
4.01.01.2.08.0004.	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	3,098,640,000.00	
4.01.01.2.09.	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	2,679,145,600.00	
4.01.01.2.09.0001.	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	244,160,000.00	
4.01.01.2.09.0002.	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	823,840,000.00	
4.01.01.2.09.0006.	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	511,145,600.00	
4.01.01.2.09.0009.	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	1,000,156,000.00	
4.01.01.2.09.0010.	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	99,844,000.00	

Kode	Urusan Pemerintahan Daerah, Perangkat Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara	Ket.
1	2	3	4
4.01.01.2.11.	Administrasi Keuangan dan Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	1,728,699,824.00	
4.01.01.2.11.0001.	Penyediaan Gaji dan Tunjangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	1,469,335,824.00	
4.01.01.2.11.0002.	Penyediaan Pakaian Dinas dan Atribut Kelengkapan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	230,000,000.00	
4.01.01.2.11.0003.	Pelaksanaan Medical Check Up Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	29,364,000.00	
4.01.01.2.12.	Fasilitasi Kerumahtanggaan Sekretariat Daerah	3,650,000,000.00	
4.01.01.2.12.0001.	Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Kepala Daerah	1,300,000,000.00	
4.01.01.2.12.0002.	Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Wakil Kepala Daerah	800,000,000.00	
4.01.01.2.12.0003.	Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Sekretariat Daerah	1,550,000,000.00	
4.01.01.2.13.	Penataan Organisasi	624,172,880.00	
4.01.01.2.13.0001.	Pengelolaan Kelembagaan dan Analisis Jabatan	288,076,000.00	
4.01.01.2.13.0002.	Fasilitasi Pelayanan Publik dan Tata Laksana	133,152,000.00	
4.01.01.2.13.0003.	Peningkatan Kinerja dan Reformasi Birokrasi	61,746,000.00	
4.01.01.2.13.0004.	Monitoring, Evaluasi dan Pengendalian Kualitas Pelayanan Publik dan Tata Laksana	63,152,000.00	
4.01.01.2.13.0005.	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Kinerja Pemerintah Daerah	78,046,880.00	
4.01.01.2.14.	Pelaksanaan Protokol dan Komunikasi Pimpinan	598,922,225.00	
4.01.01.2.14.0001.	Fasilitasi Keprotokolan	209,349,359.00	
4.01.01.2.14.0002.	Fasilitasi Komunikasi Pimpinan	209,349,358.00	
4.01.01.2.14.0003.	Pendokumentasian Tugas Pimpinan	180,223,508.00	
4.01.02.	PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT	34,639,881,498.00	
4.01.02.2.01.	Administrasi Tata Pemerintahan	6,700,765,831.00	
4.01.02.2.01.0001.	Penataan Administrasi Pemerintahan	187,905,000.00	
4.01.02.2.01.0002.	Pengelolaan Administrasi Kewilayahan	6,062,860,831.00	
4.01.02.2.01.0003.	Fasilitasi Pelaksanaan Otonomi Daerah	450,000,000.00	
4.01.02.2.02.	Pelaksanaan Kebijakan Kesejahteraan Rakyat	27,433,900,000.00	
4.01.02.2.02.0001.	Fasilitasi Pengelolaan Bina Mental Spiritual	15,878,975,420.00	
4.01.02.2.02.0002.	Pelaksanaan Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Terkait Kesejahteraan Sosial	8,614,924,580.00	
4.01.02.2.02.0003.	Pelaksanaan Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Terkait Kesejahteraan Masyarakat	2,940,000,000.00	
4.01.02.2.03.	Fasilitasi dan Koordinasi Hukum	435,215,667.00	
4.01.02.2.03.0001.	Fasilitasi Penyusunan Produk Hukum Daerah	150,087,667.00	
4.01.02.2.03.0002.	Fasilitasi Bantuan Hukum	215,591,080.00	
4.01.02.2.03.0003.	Pendokumentasian Produk Hukum dan Pengelolaan Informasi Hukum	69,536,920.00	
4.01.02.2.04.	Fasilitasi Kerja Sama Daerah	70,000,000.00	
4.01.02.2.04.0001.	Fasilitasi Kerja Sama Dalam Negeri	70,000,000.00	
4.01.03.	PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN	1,208,711,684.00	
4.01.03.2.01.	Pelaksanaan Kebijakan Perekonomian	272,055,000.00	
4.01.03.2.01.0001.	Koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan BUMD dan BLUD	100,000,000.00	
4.01.03.2.01.0002.	Pengendalian dan Distribusi Perekonomian	120,000,000.00	
4.01.03.2.01.0003.	Perencanaan dan Pengawasan Ekonomi Mikro Kecil	52,055,000.00	
4.01.03.2.02.	Pelaksanaan Administrasi Pembangunan	173,000,000.00	
4.01.03.2.02.0001.	Fasilitasi Penyusunan Program Pembangunan	75,000,000.00	
4.01.03.2.02.0002.	Pengendalian dan Evaluasi Program Pembangunan	48,000,000.00	
4.01.03.2.02.0003.	Pengelolaan Evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan	50,000,000.00	

Kode	Urusan Pemerintahan Daerah, Perangkat Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara	Ket.
1	2	3	4
4.01.03.2.03.	Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa	763,656,684.00	
4.01.03.2.03.0001.	Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa	72,502,400.00	
4.01.03.2.03.0002.	Pengelolaan Layanan Pengadaan Secara Elektronik	624,580,284.00	
4.01.03.2.03.0003.	Pembinaan dan Advokasi Pengadaan Barang dan Jasa	66,574,000.00	
5.	UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN	335,510,000.00	
5.06.	PENGELOLAAN PERBATASAN	335,510,000.00	
5.06.02.	PROGRAM PENGELOLAAN PERBATASAN	335,510,000.00	
5.06.02.2.01.	Perencanaan dan Fasilitasi Kerja Sama	115,510,000.00	
5.06.02.2.01.0001.	Koordinasi, Integrasi, dan Sinkronisasi Kebijakan Otonomi Daerah	30,000,000.00	
5.06.02.2.01.0002.	Penyusunan Rencana Aksi Pembangunan Kawasan Perbatasan	85,510,000.00	
5.06.02.2.02.	Pelaksanaan Kewilayahan Perbatasan	150,000,000.00	
5.06.02.2.02.0001.	Koordinasi, Integrasi, dan Sinkronisasi Pembangunan Kawasan Perbatasan	30,000,000.00	
5.06.02.2.02.0002.	Koordinasi, Integrasi, dan Sinkronisasi Pemanfaatan Kawasan Perbatasan	50,000,000.00	
5.06.02.2.02.0003.	Penjagaan dan Pemeliharaan Tanda Batas Wilayah Negara	70,000,000.00	
5.06.02.2.03.	Monitoring dan Evaluasi Kewilayahan Perbatasan	70,000,000.00	
5.06.02.2.03.0001.	Pengendalian dan Pengawasan serta Evaluasi Pelaksanaan Pembangunan Kawasan Perbatasan	50,000,000.00	
5.06.02.2.03.0002.	Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan Kawasan Perbatasan	20,000,000.00	
4.02.0.00.0.00.01.0000.	Sekretariat DPRD	38,921,574,576.00	
4.02.0.00.0.00.01.0000.	Sekretariat DPRD	38,921,574,576.00	
4.	UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN	38,921,574,576.00	
4.02.	SEKRETARIAT DPRD	38,921,574,576.00	
4.02.01.	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	22,734,480,846.00	
4.02.01.2.01.	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	140,000,000.00	
4.02.01.2.01.0001.	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	70,000,000.00	
4.02.01.2.01.0007.	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	70,000,000.00	
4.02.01.2.02.	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	5,015,382,669.00	
4.02.01.2.02.0001.	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	5,007,382,669.00	
4.02.01.2.02.0003.	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	8,000,000.00	
4.02.01.2.03.	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	10,000,000.00	
4.02.01.2.03.0006.	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	10,000,000.00	
4.02.01.2.05.	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	200,000,000.00	
4.02.01.2.05.0002.	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	100,000,000.00	
4.02.01.2.05.0009.	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	100,000,000.00	
4.02.01.2.06.	Administrasi Umum Perangkat Daerah	1,098,000,000.00	
4.02.01.2.06.0001.	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	20,000,000.00	
4.02.01.2.06.0002.	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	195,000,000.00	
4.02.01.2.06.0003.	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	80,000,000.00	
4.02.01.2.06.0004.	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	500,000,000.00	
4.02.01.2.06.0005.	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	150,000,000.00	
4.02.01.2.06.0009.	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	153,000,000.00	

Kode	Urusan Pemerintahan Daerah, Perangkat Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara	Ket.
1	2	3	4
4.02.01.2.07.	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	260,000,000.00	
4.02.01.2.07.0006.	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	160,000,000.00	
4.02.01.2.07.0010.	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	100,000,000.00	
4.02.01.2.08.	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	1,938,000,000.00	
4.02.01.2.08.0001.	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	60,000,000.00	
4.02.01.2.08.0002.	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	430,000,000.00	
4.02.01.2.08.0004.	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	1,448,000,000.00	
4.02.01.2.09.	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	935,821,920.00	
4.02.01.2.09.0001.	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	138,100,000.00	
4.02.01.2.09.0002.	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	91,900,000.00	
4.02.01.2.09.0006.	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	100,000,000.00	
4.02.01.2.09.0009.	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	555,821,920.00	
4.02.01.2.09.0011.	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	50,000,000.00	
4.02.01.2.14.	Pelaksanaan Protokol dan Komunikasi Pimpinan	925,000,000.00	
4.02.01.2.14.0001.	Fasilitasi Keprotokolan	900,000,000.00	
4.02.01.2.14.0003.	Pendokumentasian Tugas Pimpinan	25,000,000.00	
4.02.01.2.15.	Layanan Keuangan dan Kesejahteraan DPRD	11,462,276,257.00	
4.02.01.2.15.0001.	Penyelenggaraan Administrasi Keuangan DPRD	11,012,276,257.00	
4.02.01.2.15.0002.	Penyediaan Pakaian Dinas dan Atribut DPRD	350,000,000.00	
4.02.01.2.15.0003.	Pelaksanaan Medical Check Up DPRD	100,000,000.00	
4.02.01.2.16.	Layanan Administrasi DPRD	750,000,000.00	
4.02.01.2.16.0004.	Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga DPRD	750,000,000.00	
4.02.02.	PROGRAM DUKUNGAN PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI DPRD	16,187,093,730.00	
4.02.02.2.01.	Pembentukan Peraturan Daerah dan Peraturan DPRD	932,093,730.00	
4.02.02.2.01.0001.	Penyusunan dan Pembahasan Program Pembentukan Peraturan Daerah	148,541,890.00	
4.02.02.2.01.0002.	Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah	675,325,840.00	
4.02.02.2.01.0004.	Fasilitasi Penyusunan Penjelasan/Keterangan Naskah Akademik	58,226,000.00	
4.02.02.2.01.0006.	Sosialisasi Peraturan Daerah yang Dilakukan Bersama oleh DPRD dan Pemerintah Daerah	50,000,000.00	
4.02.02.2.02.	Pembahasan Kebijakan Anggaran	1,150,000,000.00	
4.02.02.2.02.0001.	Pembahasan KUA dan PPAS	230,000,000.00	
4.02.02.2.02.0002.	Pembahasan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS	230,000,000.00	
4.02.02.2.02.0003.	Pembahasan APBD	230,000,000.00	
4.02.02.2.02.0004.	Pembahasan APBD Perubahan	230,000,000.00	
4.02.02.2.02.0006.	Pembahasan Pertanggungjawaban APBD	230,000,000.00	
4.02.02.2.03.	Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan	6,774,000,000.00	
4.02.02.2.03.0001.	Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Pemerintahan dan Hukum	1,225,000,000.00	
4.02.02.2.03.0002.	Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Infrastruktur	1,375,000,000.00	
4.02.02.2.03.0003.	Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Kesejahteraan Rakyat	1,324,000,000.00	
4.02.02.2.03.0004.	Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Perekonomian	1,375,000,000.00	
4.02.02.2.03.0005.	Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Sumber Daya Alam	1,275,000,000.00	

Kode	Urusan Pemerintahan Daerah, Perangkat Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara	Ket.
1	2	3	4
4.02.02.2.03.0008.	Pembahasan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah	200,000,000.00	
4.02.02.2.04.	Peningkatan Kapasitas DPRD	1,420,000,000.00	
4.02.02.2.04.0001.	Orientasi DPRD	20,000,000.00	
4.02.02.2.04.0002.	Pendalaman Tugas DPRD	500,000,000.00	
4.02.02.2.04.0007.	Penyusunan Program Kerja DPRD	50,000,000.00	
4.02.02.2.04.0008.	Publikasi dan Dokumentasi DPRD	850,000,000.00	
4.02.02.2.05.	Penyerapan dan Penghimpunan Aspirasi Masyarakat	2,100,000,000.00	
4.02.02.2.05.0001.	Kunjungan Kerja dalam Daerah	50,000,000.00	
4.02.02.2.05.0002.	Penyusunan Pokok-Pokok Pikiran DPRD	150,000,000.00	
4.02.02.2.05.0003.	Pelaksanaan Reses	1,900,000,000.00	
4.02.02.2.08.	Fasilitasi Tugas DPRD	3,811,000,000.00	
4.02.02.2.08.0001.	Koordinasi dan Konsultasi Pelaksanaan Tugas DPRD	3,351,000,000.00	
4.02.02.2.08.0003.	Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Badan Musyawarah	230,000,000.00	
4.02.02.2.08.0005.	Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Panitia Khusus	230,000,000.00	
5.01.5.05.0.00.01.0000.	Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah	15,986,720,752.00	
5.01.5.05.0.00.01.0000.	Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah	15,986,720,752.00	
5.	UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN	15,986,720,752.00	
5.01.	PERENCANAAN	14,686,720,752.00	
5.01.01.	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	9,143,445,752.00	
5.01.01.2.01.	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	100,000,000.00	
5.01.01.2.01.0001.	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	70,000,000.00	
5.01.01.2.01.0007.	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	30,000,000.00	
5.01.01.2.02.	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	6,147,817,753.00	
5.01.01.2.02.0001.	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	6,097,817,753.00	
5.01.01.2.02.0003.	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	50,000,000.00	
5.01.01.2.03.	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	7,728,000.00	
5.01.01.2.03.0006.	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	7,728,000.00	
5.01.01.2.05.	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	127,692,280.00	
5.01.01.2.05.0002.	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	27,692,280.00	
5.01.01.2.05.0009.	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	100,000,000.00	
5.01.01.2.06.	Administrasi Umum Perangkat Daerah	1,055,000,000.00	
5.01.01.2.06.0001.	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	30,000,000.00	
5.01.01.2.06.0002.	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	200,000,000.00	
5.01.01.2.06.0003.	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	125,000,000.00	
5.01.01.2.06.0004.	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	300,000,000.00	
5.01.01.2.06.0005.	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	100,000,000.00	
5.01.01.2.06.0009.	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	300,000,000.00	
5.01.01.2.07.	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	100,000,000.00	
5.01.01.2.07.0006.	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	100,000,000.00	
5.01.01.2.08.	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	1,244,707,719.00	
5.01.01.2.08.0001.	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	10,000,000.00	
5.01.01.2.08.0002.	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	524,307,719.00	

Kode	Urusan Pemerintahan Daerah, Perangkat Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara	Ket.
1	2	3	4
5.01.01.2.08.0004.	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	710,400,000.00	
5.01.01.2.09.	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	360,500,000.00	
5.01.01.2.09.0001.	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	100,000,000.00	
5.01.01.2.09.0002.	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	25,000,000.00	
5.01.01.2.09.0006.	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	60,000,000.00	
5.01.01.2.09.0010.	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	75,500,000.00	
5.01.01.2.09.0011.	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	100,000,000.00	
5.01.02.	PROGRAM PERENCANAAN, PENGENDALIAN DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH	3,248,275,000.00	
5.01.02.2.01.	Penyusunan Perencanaan dan Pendanaan	2,618,275,000.00	
5.01.02.2.01.0001.	Analisis Kondisi Daerah, Permasalahan, dan Isu Strategis Pembangunan Daerah	400,000,000.00	
5.01.02.2.01.0002.	Koordinasi Penelaahan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Dokumen Kebijakan Lainnya	150,000,000.00	
5.01.02.2.01.0003.	Pelaksanaan Konsultasi Publik	250,000,000.00	
5.01.02.2.01.0004.	Koordinasi Pelaksanaan Forum Perangkat Daerah/Lintas Perangkat Daerah	300,000,000.00	
5.01.02.2.01.0005.	Pelaksanaan Musrenbang Kabupaten/Kota	550,000,000.00	
5.01.02.2.01.0006.	Penyiapan Bahan Koordinasi Musrenbang Kecamatan	130,000,000.00	
5.01.02.2.01.0007.	Koordinasi Penyusunan dan Penetapan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota	838,275,000.00	
5.01.02.2.02.	Analisis Data dan Informasi Pemerintahan Daerah Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah	115,000,000.00	
5.01.02.2.02.0003.	Penyusunan Profil Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota	115,000,000.00	
5.01.02.2.03.	Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah	400,000,000.00	
5.01.02.2.03.0001.	Koordinasi Pengendalian Perencanaan dan Pelaksanaan Pembangunan Daerah di Kabupaten/Kota	200,000,000.00	
5.01.02.2.03.0003.	Monitoring, Evaluasi dan Penyusunan Laporan Berkala Pelaksanaan Pembangunan Daerah	200,000,000.00	
5.01.02.2.04.	Implementasi Sistem Informasi Pemerintahan Daerah di Bidang Pembangunan Daerah	115,000,000.00	
5.01.02.2.04.0001.	Pengelolaan Data dalam Sistem Informasi Pemerintahan Daerah di Bidang Pembangunan Daerah	115,000,000.00	
5.01.03.	PROGRAM KOORDINASI DAN SINKRONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	2,295,000,000.00	
5.01.03.2.01.	Koordinasi Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia	1,140,000,000.00	
5.01.03.2.01.0001.	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	190,000,000.00	
5.01.03.2.01.0002.	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan	100,000,000.00	
5.01.03.2.01.0003.	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan	70,000,000.00	
5.01.03.2.01.0004.	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan	50,000,000.00	
5.01.03.2.01.0005.	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	200,000,000.00	
5.01.03.2.01.0006.	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia	50,000,000.00	
5.01.03.2.01.0007.	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia	300,000,000.00	
5.01.03.2.01.0008.	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia	180,000,000.00	
5.01.03.2.02.	Koordinasi Perencanaan Bidang Perekonomian dan SDA (Sumber Daya Alam)	740,000,000.00	
5.01.03.2.02.0001.	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	225,000,000.00	

Kode	Urusan Pemerintahan Daerah, Perangkat Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara	Ket.
1	2	3	4
5.01.03.2.02.0002.	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian	50,000,000.00	
5.01.03.2.02.0003.	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian	75,000,000.00	
5.01.03.2.02.0004.	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian	50,000,000.00	
5.01.03.2.02.0005.	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	180,000,000.00	
5.01.03.2.02.0006.	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang SDA	80,000,000.00	
5.01.03.2.02.0007.	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang SDA	40,000,000.00	
5.01.03.2.02.0008.	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA	40,000,000.00	
5.01.03.2.03.	Koordinasi Perencanaan Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan	415,000,000.00	
5.01.03.2.03.0001.	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	225,000,000.00	
5.01.03.2.03.0002.	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur	50,000,000.00	
5.01.03.2.03.0003.	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur	90,000,000.00	
5.01.03.2.03.0004.	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur	50,000,000.00	
5.05.	PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN	1,300,000,000.00	
5.05.02.	PROGRAM PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH	1,300,000,000.00	
5.05.02.2.01.	Penelitian dan Pengembangan Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pengkajian Peraturan	550,000,000.00	
5.05.02.2.01.0002.	Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Pemerintahan Umum	100,000,000.00	
5.05.02.2.01.0005.	Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Keuangan dan Aset Daerah, Reformasi Birokrasi	275,000,000.00	
5.05.02.2.01.0012.	Pengelolaan Data Kelitbangan dan Peraturan	175,000,000.00	
5.05.02.2.04.	Pengembangan Inovasi dan Teknologi	750,000,000.00	
5.05.02.2.04.0002.	Uji Coba dan Penerapan Rancang Bangun/Model Replikasi dan Inovasi di Bidang Difusi Inovasi dan Penerapan Teknologi	250,000,000.00	
5.05.02.2.04.0003.	Diseminasi Jenis, Prosedur dan Metode Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang Bersifat Inovatif	200,000,000.00	
5.05.02.2.04.0004.	Sosialisasi dan Diseminasi Hasil-Hasil Kelitbangan	300,000,000.00	
5.02.0.00.0.00.01.0000.	Badan Keuangan dan Aset Daerah	155,223,486,347.00	
5.02.0.00.0.00.01.0000.	Badan Keuangan dan Aset Daerah	155,223,486,347.00	
5.	UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN	155,223,486,347.00	
5.02.	KEUANGAN	155,223,486,347.00	
5.02.01.	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	21,283,169,125.00	
5.02.01.2.01.	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	123,000,000.00	
5.02.01.2.01.0001.	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	60,000,000.00	
5.02.01.2.01.0007.	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	63,000,000.00	
5.02.01.2.02.	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	9,009,427,915.00	
5.02.01.2.02.0001.	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	8,933,827,915.00	
5.02.01.2.02.0003.	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	75,600,000.00	
5.02.01.2.05.	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	200,000,000.00	
5.02.01.2.05.0009.	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	200,000,000.00	
5.02.01.2.06.	Administrasi Umum Perangkat Daerah	2,010,000,000.00	
5.02.01.2.06.0001.	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	50,000,000.00	

Kode	Urusan Pemerintahan Daerah, Perangkat Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara	Ket.
1	2	3	4
5.02.01.2.06.0002.	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	850,000,000.00	
5.02.01.2.06.0003.	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	60,000,000.00	
5.02.01.2.06.0004.	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	450,000,000.00	
5.02.01.2.06.0005.	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	300,000,000.00	
5.02.01.2.06.0009.	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	300,000,000.00	
5.02.01.2.07.	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	1,580,000,000.00	
5.02.01.2.07.0001.	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	1,280,000,000.00	
5.02.01.2.07.0005.	Pengadaan Mebel	100,000,000.00	
5.02.01.2.07.0006.	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	200,000,000.00	
5.02.01.2.08.	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	7,560,741,210.00	
5.02.01.2.08.0001.	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	47,400,000.00	
5.02.01.2.08.0002.	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	1,161,100,000.00	
5.02.01.2.08.0004.	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	6,352,241,210.00	
5.02.01.2.09.	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	800,000,000.00	
5.02.01.2.09.0001.	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	150,000,000.00	
5.02.01.2.09.0002.	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	250,000,000.00	
5.02.01.2.09.0006.	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	200,000,000.00	
5.02.01.2.09.0009.	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	55,500,000.00	
5.02.01.2.09.0011.	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	144,500,000.00	
5.02.02.	PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH	132,041,317,222.00	
5.02.02.2.01.	Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah	595,167,000.00	
5.02.02.2.01.0001.	Koordinasi dan Penyusunan KUA dan PPAS	58,662,000.00	
5.02.02.2.01.0002.	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS	50,000,000.00	
5.02.02.2.01.0007.	Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD	225,060,000.00	
5.02.02.2.01.0008.	Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD	261,445,000.00	
5.02.02.2.02.	Koordinasi dan Pengelolaan Perbendaharaan Daerah	450,000,000.00	
5.02.02.2.02.0001.	Koordinasi dan Pengelolaan Kas Daerah	50,000,000.00	
5.02.02.2.02.0003.	Penyiapan, Pelaksanaan Pengendalian dan Penerbitan Anggaran Kas dan SPD	50,000,000.00	
5.02.02.2.02.0005.	Koordinasi, Fasilitasi, Asistensi, Sinkronisasi, Supervisi, Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Dana Perimbangan dan Dana Transfer Lainnya	150,000,000.00	
5.02.02.2.02.0009.	Rekonsiliasi Data Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Pemungutan dan Pematangan atas SP2D dengan Instansi Terkait	100,000,000.00	
5.02.02.2.02.0011.	Pembinaan Penatausahaan Keuangan Pemerintah Kabupaten/Kota	100,000,000.00	
5.02.02.2.03.	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah	541,000,000.00	
5.02.02.2.03.0002.	Rekonsiliasi dan Verifikasi Aset, Kewajiban, Ekuitas, Pendapatan, Belanja, Pembiayaan, Pendapatan-LO dan Beban	105,000,000.00	
5.02.02.2.03.0003.	Koordinasi Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Bulanan, Triwulanan dan Semesteran	191,000,000.00	
5.02.02.2.03.0005.	Koordinasi dan Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota	100,000,000.00	
5.02.02.2.03.0011.	Pembinaan Akuntansi, Pelaporan dan Pertanggungjawaban Pemerintah Kabupaten/Kota	145,000,000.00	
5.02.02.2.04.	Penunjang Urusan Kewenangan Pengelolaan Keuangan Daerah	130,135,150,222.00	
5.02.02.2.04.0002.	Analisis Investasi Pemerintah Daerah	70,000,000.00	
5.02.02.2.04.0008.	Analisis Perencanaan dan Penyaluran Bantuan Keuangan	127,328,489,469.00	

Kode	Urusan Pemerintahan Daerah, Perangkat Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara	Ket.
1	2	3	4
5.02.02.2.04.0009.	Pengelolaan Dana Darurat dan Mendesak	2,736,660,753.00	
5.02.02.2.05.	Pengelolaan Data dan Implementasi Sistem Informasi Pemerintah Daerah Lingkup Keuangan Daerah	320,000,000.00	
5.02.02.2.05.0003.	Pembinaan Sistem Informasi Pemerintah Daerah Bidang Keuangan Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota	320,000,000.00	
5.02.03.	PROGRAM PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH	1,899,000,000.00	
5.02.03.2.01.	Pengelolaan Barang Milik Daerah	1,899,000,000.00	
5.02.03.2.01.0001.	Penyusunan Standar Harga	450,000,000.00	
5.02.03.2.01.0003.	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah	100,000,000.00	
5.02.03.2.01.0005.	Penatausahaan Barang Milik Daerah	135,000,000.00	
5.02.03.2.01.0006.	Inventarisasi Barang Milik Daerah	115,000,000.00	
5.02.03.2.01.0007.	Pengamanan Barang Milik Daerah	180,000,000.00	
5.02.03.2.01.0009.	Pengawasan dan Pengendalian Pengelolaan Barang Milik Daerah	185,000,000.00	
5.02.03.2.01.0010.	Optimalisasi Penggunaan, Pemanfaatan, Pemindahtanganan, Pemusnahan, dan Penghapusan Barang Milik Daerah	349,000,000.00	
5.02.03.2.01.0011.	Rekonsiliasi dalam rangka Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah	80,000,000.00	
5.02.03.2.01.0012.	Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah	140,000,000.00	
5.02.03.2.01.0013.	Pembinaan Pengelolaan Barang Milik Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota	165,000,000.00	
5.02.0.00.0.00.02.0000.	Badan Pendapatan Daerah	22,176,776,248.00	
5.02.0.00.0.00.02.0000.	Badan Pendapatan Daerah	22,176,776,248.00	
5.	UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN	22,176,776,248.00	
5.02.	KEUANGAN	22,176,776,248.00	
5.02.01.	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	18,279,946,248.00	
5.02.01.2.01.	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	90,000,000.00	
5.02.01.2.01.0001.	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	50,000,000.00	
5.02.01.2.01.0007.	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	40,000,000.00	
5.02.01.2.02.	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	14,945,962,248.00	
5.02.01.2.02.0001.	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	14,805,962,248.00	
5.02.01.2.02.0003.	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	140,000,000.00	
5.02.01.2.03.	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	5,000,000.00	
5.02.01.2.03.0006.	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	5,000,000.00	
5.02.01.2.05.	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	80,000,000.00	
5.02.01.2.05.0009.	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	80,000,000.00	
5.02.01.2.06.	Administrasi Umum Perangkat Daerah	850,000,000.00	
5.02.01.2.06.0001.	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	30,000,000.00	
5.02.01.2.06.0002.	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	190,000,000.00	
5.02.01.2.06.0003.	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	50,000,000.00	
5.02.01.2.06.0004.	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	160,000,000.00	
5.02.01.2.06.0005.	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	150,000,000.00	
5.02.01.2.06.0009.	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	270,000,000.00	
5.02.01.2.07.	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	587,466,000.00	
5.02.01.2.07.0002.	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	83,722,000.00	
5.02.01.2.07.0005.	Pengadaan Mebel	150,000,000.00	
5.02.01.2.07.0006.	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	353,744,000.00	
5.02.01.2.08.	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	1,261,518,000.00	

Kode	Urusan Pemerintahan Daerah, Perangkat Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara	Ket.
1	2	3	4
5.02.01.2.08.0001.	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	5,000,000.00	
5.02.01.2.08.0002.	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	436,278,000.00	
5.02.01.2.08.0004.	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	820,240,000.00	
5.02.01.2.09.	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	460,000,000.00	
5.02.01.2.09.0001.	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	50,000,000.00	
5.02.01.2.09.0002.	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	60,000,000.00	
5.02.01.2.09.0006.	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	140,000,000.00	
5.02.01.2.09.0010.	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	210,000,000.00	
5.02.04.	PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH	3,896,830,000.00	
5.02.04.2.01.	Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah	3,896,830,000.00	
5.02.04.2.01.0001.	Perencanaan Pengelolaan Pajak Daerah	115,000,000.00	
5.02.04.2.01.0002.	Analisa dan Pengembangan Pajak Daerah, serta Penyusunan Kebijakan Pajak Daerah	100,000,000.00	
5.02.04.2.01.0003.	Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah	960,430,000.00	
5.02.04.2.01.0005.	Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah	650,000,000.00	
5.02.04.2.01.0006.	Pengolahan, Pemeliharaan, dan Pelaporan Basis Data Pajak Daerah	100,000,000.00	
5.02.04.2.01.0007.	Penilaian Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBBP2) serta Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB)	100,000,000.00	
5.02.04.2.01.0010.	Penelitian dan Verifikasi Data Pelaporan Pajak Daerah	175,000,000.00	
5.02.04.2.01.0011.	Penagihan Pajak Daerah	1,300,000,000.00	
5.02.04.2.01.0012.	Penyelesaian Keberatan Pajak Daerah	100,000,000.00	
5.02.04.2.01.0013.	Pengendalian, Pemeriksaan dan Pengawasan Pajak Daerah	170,000,000.00	
5.02.04.2.01.0014.	Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah	76,400,000.00	
5.02.04.2.01.0015.	Elektronifikasi Transaksi Pemerintah Daerah	50,000,000.00	
5.03.5.04.0.00.01.0000.	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	57,615,702,941.00	
5.03.5.04.0.00.01.0000.	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	57,615,702,941.00	
5.	UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN	57,615,702,941.00	
5.03.	KEPEGAWAIAN	57,465,702,941.00	
5.03.01.	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	56,080,702,941.00	
5.03.01.2.01.	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	81,385,786.00	
5.03.01.2.01.0001.	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	56,385,786.00	
5.03.01.2.01.0007.	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	25,000,000.00	
5.03.01.2.02.	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	55,069,862,155.00	
5.03.01.2.02.0001.	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	55,059,862,155.00	
5.03.01.2.02.0003.	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	10,000,000.00	
5.03.01.2.03.	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	10,000,000.00	
5.03.01.2.03.0006.	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	10,000,000.00	
5.03.01.2.05.	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	81,955,000.00	
5.03.01.2.05.0002.	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	51,955,000.00	
5.03.01.2.05.0009.	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	30,000,000.00	
5.03.01.2.06.	Administrasi Umum Perangkat Daerah	375,000,000.00	
5.03.01.2.06.0001.	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	10,000,000.00	

Kode	Urusan Pemerintahan Daerah, Perangkat Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara	Ket.
1	2	3	4
5.03.01.2.06.0002.	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	90,000,000.00	
5.03.01.2.06.0003.	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	15,000,000.00	
5.03.01.2.06.0004.	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	120,000,000.00	
5.03.01.2.06.0005.	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	20,000,000.00	
5.03.01.2.06.0009.	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	120,000,000.00	
5.03.01.2.07.	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	120,000,000.00	
5.03.01.2.07.0005.	Pengadaan Mebel	35,000,000.00	
5.03.01.2.07.0006.	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	70,000,000.00	
5.03.01.2.07.0011.	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	15,000,000.00	
5.03.01.2.08.	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	217,500,000.00	
5.03.01.2.08.0001.	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	3,500,000.00	
5.03.01.2.08.0002.	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	16,000,000.00	
5.03.01.2.08.0004.	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	198,000,000.00	
5.03.01.2.09.	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	125,000,000.00	
5.03.01.2.09.0001.	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	80,000,000.00	
5.03.01.2.09.0006.	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	30,000,000.00	
5.03.01.2.09.0010.	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	15,000,000.00	
5.03.02.	PROGRAM KEPEGAWAIAN DAERAH	1,385,000,000.00	
5.03.02.2.01.	Pengadaan, Pemberhentian dan Informasi Kepegawaian ASN	478,000,000.00	
5.03.02.2.01.0002.	Penyusunan Rencana Kebutuhan, Jenis dan Jumlah Jabatan untuk Pelaksanaan Pengadaan ASN	165,000,000.00	
5.03.02.2.01.0003.	Koordinasi dan Fasilitasi Pengadaan PNS dan PPPK	150,000,000.00	
5.03.02.2.01.0006.	Koordinasi Pelaksanaan Administrasi Pemberhentian	68,000,000.00	
5.03.02.2.01.0008.	Fasilitasi Lembaga Profesi ASN	35,000,000.00	
5.03.02.2.01.0010.	Pengelolaan Sistem Informasi Kepegawaian	35,000,000.00	
5.03.02.2.01.0011.	Pengelolaan Data Kepegawaian	25,000,000.00	
5.03.02.2.02.	Mutasi dan Promosi ASN	272,000,000.00	
5.03.02.2.02.0001.	Pengelolaan Mutasi ASN	92,000,000.00	
5.03.02.2.02.0002.	Pengelolaan Kenaikan Pangkat ASN	85,000,000.00	
5.03.02.2.02.0003.	Pengelolaan Promosi ASN	95,000,000.00	
5.03.02.2.03.	Pengembangan Kompetensi ASN	430,000,000.00	
5.03.02.2.03.0002.	Pengelolaan Assessment Center	350,000,000.00	
5.03.02.2.03.0004.	Pengelolaan Pendidikan Lanjutan ASN	30,000,000.00	
5.03.02.2.03.0014.	Fasilitasi Pengembangan Karir dalam Jabatan Fungsional	50,000,000.00	
5.03.02.2.04.	Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	205,000,000.00	
5.03.02.2.04.0003.	Evaluasi Hasil Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	50,000,000.00	
5.03.02.2.04.0004.	Pengelolaan Pemberian Penghargaan bagi Pegawai	65,000,000.00	
5.03.02.2.04.0007.	Pembinaan Disiplin ASN	30,000,000.00	
5.03.02.2.04.0008.	Pengelolaan Penyelesaian Pelanggaran Disiplin ASN	40,000,000.00	
5.03.02.2.04.0009.	Pelayanan Proses Izin Perceraian Pegawai	20,000,000.00	
5.04.	PENDIDIKAN DAN PELATIHAN	150,000,000.00	
5.04.02.	PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA	150,000,000.00	
5.04.02.2.01.	Pengembangan Kompetensi Teknis	150,000,000.00	

Kode	Urusan Pemerintahan Daerah, Perangkat Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara	Ket.
1	2	3	4
5.04.02.2.01.0003.	Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi Teknis Umum, Inti, dan Pilihan bagi Jabatan Administrasi Penyelenggara Urusan Pemerintahan Konkuren, Perangkat Daerah Penunjang, dan Urusan Pemerintahan Umum	150,000,000.00	
6.01.0.00.0.00.01.0000.	Inspektorat Daerah	10,043,467,459.00	
6.01.0.00.0.00.01.0000.	Inspektorat Daerah	10,043,467,459.00	
6.	UNSUR PENGAWASAN URUSAN PEMERINTAHAN	10,043,467,459.00	
6.01.	INSPEKTORAT DAERAH	10,043,467,459.00	
6.01.01.	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	8,272,467,459.00	
6.01.01.2.01.	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	70,000,000.00	
6.01.01.2.01.0001.	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	42,500,000.00	
6.01.01.2.01.0007.	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	27,500,000.00	
6.01.01.2.02.	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	6,959,339,287.00	
6.01.01.2.02.0001.	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	6,951,611,287.00	
6.01.01.2.02.0003.	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	7,728,000.00	
6.01.01.2.05.	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	275,000,000.00	
6.01.01.2.05.0002.	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	45,000,000.00	
6.01.01.2.05.0009.	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	230,000,000.00	
6.01.01.2.06.	Administrasi Umum Perangkat Daerah	488,328,172.00	
6.01.01.2.06.0001.	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	20,000,000.00	
6.01.01.2.06.0002.	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	55,840,982.00	
6.01.01.2.06.0003.	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	9,000,000.00	
6.01.01.2.06.0004.	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	165,000,000.00	
6.01.01.2.06.0005.	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	38,487,190.00	
6.01.01.2.06.0009.	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	200,000,000.00	
6.01.01.2.07.	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	177,000,000.00	
6.01.01.2.07.0002.	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	27,000,000.00	
6.01.01.2.07.0005.	Pengadaan Mebel	54,000,000.00	
6.01.01.2.07.0006.	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	96,000,000.00	
6.01.01.2.08.	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	177,800,000.00	
6.01.01.2.08.0001.	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	6,000,000.00	
6.01.01.2.08.0002.	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	35,000,000.00	
6.01.01.2.08.0004.	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	136,800,000.00	
6.01.01.2.09.	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	125,000,000.00	
6.01.01.2.09.0001.	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	45,000,000.00	
6.01.01.2.09.0006.	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	40,000,000.00	
6.01.01.2.09.0009.	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	40,000,000.00	
6.01.02.	PROGRAM PENYELENGGARAAN PENGAWASAN	1,173,000,000.00	
6.01.02.2.01.	Penyelenggaraan Pengawasan Internal	605,000,000.00	
6.01.02.2.01.0001.	Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah	80,000,000.00	
6.01.02.2.01.0002.	Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah	75,000,000.00	
6.01.02.2.01.0003.	Reviu Laporan Kinerja	50,000,000.00	
6.01.02.2.01.0004.	Reviu Laporan Keuangan	60,000,000.00	
6.01.02.2.01.0005.	Pengawasan Desa	100,000,000.00	

Kode	Urusan Pemerintahan Daerah, Perangkat Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara	Ket.
1	2	3	4
6.01.02.2.01.0006.	Kerja Sama Pengawasan Internal	100,000,000.00	
6.01.02.2.01.0007.	Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP	140,000,000.00	
6.01.02.2.02.	Penyelenggaraan Pengawasan dengan Tujuan Tertentu	568,000,000.00	
6.01.02.2.02.0001.	Penanganan Penyelesaian Kerugian Negara/Daerah	75,000,000.00	
6.01.02.2.02.0002.	Pengawasan dengan Tujuan Tertentu	493,000,000.00	
6.01.03.	PROGRAM PERUMUSAN KEBIJAKAN, PENDAMPINGAN DAN ASISTENSI	598,000,000.00	
6.01.03.2.02.	Pendampingan dan Asistensi	598,000,000.00	
6.01.03.2.02.0001.	Pendampingan dan Asistensi Urusan Pemerintahan Daerah	358,000,000.00	
6.01.03.2.02.0003.	Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi serta Verifikasi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi	90,000,000.00	
6.01.03.2.02.0004.	Pendampingan, Asistensi dan Verifikasi Penegakan Integritas	150,000,000.00	
7.01.0.00.0.00.01.0000.	Kecamatan Bintan Utara	9,392,317,426.00	
7.01.0.00.0.00.01.0000.	Kecamatan Bintan Utara	7,588,650,526.00	
7.	UNSUR KEWILAYAHAN	7,588,650,526.00	
7.01.	KECAMATAN	7,588,650,526.00	
7.01.01.	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	6,982,500,176.00	
7.01.01.2.01.	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	35,000,000.00	
7.01.01.2.01.0001.	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	20,000,000.00	
7.01.01.2.01.0007.	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	15,000,000.00	
7.01.01.2.02.	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	5,131,298,484.00	
7.01.01.2.02.0001.	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	5,131,298,484.00	
7.01.01.2.03.	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	2,000,000.00	
7.01.01.2.03.0006.	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	2,000,000.00	
7.01.01.2.05.	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	40,864,000.00	
7.01.01.2.05.0009.	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	40,864,000.00	
7.01.01.2.06.	Administrasi Umum Perangkat Daerah	617,481,242.00	
7.01.01.2.06.0001.	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	30,950,000.00	
7.01.01.2.06.0002.	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	110,043,000.00	
7.01.01.2.06.0003.	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	27,200,000.00	
7.01.01.2.06.0004.	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	340,840,742.00	
7.01.01.2.06.0005.	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	34,975,000.00	
7.01.01.2.06.0009.	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	73,472,500.00	
7.01.01.2.07.	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	205,860,600.00	
7.01.01.2.07.0005.	Pengadaan Mebel	58,000,000.00	
7.01.01.2.07.0006.	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	147,860,600.00	
7.01.01.2.08.	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	798,940,000.00	
7.01.01.2.08.0001.	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	2,000,000.00	
7.01.01.2.08.0002.	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	230,540,000.00	
7.01.01.2.08.0004.	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	566,400,000.00	
7.01.01.2.09.	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	151,055,850.00	
7.01.01.2.09.0001.	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	25,000,000.00	
7.01.01.2.09.0002.	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	55,000,000.00	

Kode	Urusan Pemerintahan Daerah, Perangkat Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara	Ket.
1	2	3	4
7.01.01.2.09.0005.	Pemeliharaan Mebel	5,000,000.00	
7.01.01.2.09.0006.	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	31,000,000.00	
7.01.01.2.09.0009.	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	35,055,850.00	
7.01.02.	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	100,000,000.00	
7.01.02.2.01.	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	80,000,000.00	
7.01.02.2.01.0001.	Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	70,000,000.00	
7.01.02.2.01.0002.	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	10,000,000.00	
7.01.02.2.02.	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan	20,000,000.00	
7.01.02.2.02.0003.	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	20,000,000.00	
7.01.03.	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	476,150,350.00	
7.01.03.2.01.	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	59,990,350.00	
7.01.03.2.01.0001.	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	1,000,000.00	
7.01.03.2.01.0003.	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	58,990,350.00	
7.01.03.2.03.	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	331,160,000.00	
7.01.03.2.03.0002.	Peningkatan Kapasitas Lembaga Kemasyarakatan	281,160,000.00	
7.01.03.2.03.0003.	Penyediaan Sarana dan Prasarana Lembaga Kemasyarakatan	50,000,000.00	
7.01.03.2.06.	Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan	85,000,000.00	
7.01.03.2.06.0002.	Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Membangun Kerja Sama antar-Keluarga, Warga, dan Kelompok Masyarakat	85,000,000.00	
7.01.04.	PROGRAM KOORDINASI KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	10,000,000.00	
7.01.04.2.01.	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	5,000,000.00	
7.01.04.2.01.0002.	Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	5,000,000.00	
7.01.04.2.02.	Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	5,000,000.00	
7.01.04.2.02.0001.	Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia	5,000,000.00	
7.01.05.	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	10,000,000.00	
7.01.05.2.01.	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	10,000,000.00	
7.01.05.2.01.0008.	Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	10,000,000.00	
7.01.06.	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	10,000,000.00	
7.01.06.2.01.	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	10,000,000.00	
7.01.06.2.01.0003.	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	10,000,000.00	
7.01.0.00.0.00.01.0001.	KELURAHAN TANJUNG UBAN UTARA	529,827,000.00	
7.	UNSUR KEWILAYAHAN	529,827,000.00	
7.01.	KECAMATAN	529,827,000.00	
7.01.03.	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	529,827,000.00	
7.01.03.2.02.	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	529,827,000.00	
7.01.03.2.02.0001.	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	23,000,000.00	
7.01.03.2.02.0002.	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	48,000,000.00	
7.01.03.2.02.0003.	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	438,827,000.00	
7.01.03.2.02.0004.	Evaluasi Kelurahan	20,000,000.00	

Kode	Urusan Pemerintahan Daerah, Perangkat Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara	Ket.
1	2	3	4
7.01.0.00.0.00.01.0002.	KELURAHAN TANJUNG UBAN TIMUR	278,699,500.00	
7.	UNSUR KEWILAYAHAN	278,699,500.00	
7.01.	KECAMATAN	278,699,500.00	
7.01.03.	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	278,699,500.00	
7.01.03.2.02.	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	278,699,500.00	
7.01.03.2.02.0001.	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	23,800,000.00	
7.01.03.2.02.0002.	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	170,000,000.00	
7.01.03.2.02.0003.	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	84,899,500.00	
7.01.0.00.0.00.01.0003.	KELURAHAN TANJUNG UBAN KOTA	616,684,500.00	
7.	UNSUR KEWILAYAHAN	616,684,500.00	
7.01.	KECAMATAN	616,684,500.00	
7.01.03.	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	616,684,500.00	
7.01.03.2.02.	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	616,684,500.00	
7.01.03.2.02.0001.	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	29,014,000.00	
7.01.03.2.02.0002.	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	206,906,694.00	
7.01.03.2.02.0003.	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	380,763,806.00	
7.01.0.00.0.00.01.0004.	KELURAHAN TANJUNG UBAN SELATAN	378,455,900.00	
7.	UNSUR KEWILAYAHAN	378,455,900.00	
7.01.	KECAMATAN	378,455,900.00	
7.01.03.	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	378,455,900.00	
7.01.03.2.02.	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	378,455,900.00	
7.01.03.2.02.0001.	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	26,528,400.00	
7.01.03.2.02.0002.	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	160,000,000.00	
7.01.03.2.02.0003.	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	191,927,500.00	
7.01.0.00.0.00.02.0000.	Kecamatan Bintan Pesisir	3,582,033,088.00	
7.01.0.00.0.00.02.0000.	Kecamatan Bintan Pesisir	3,582,033,088.00	
7.	UNSUR KEWILAYAHAN	3,582,033,088.00	
7.01.	KECAMATAN	3,582,033,088.00	
7.01.01.	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	3,207,033,088.00	
7.01.01.2.01.	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	55,000,000.00	
7.01.01.2.01.0001.	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	30,000,000.00	
7.01.01.2.01.0007.	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	25,000,000.00	
7.01.01.2.02.	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	2,162,704,647.00	
7.01.01.2.02.0001.	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	2,154,976,647.00	
7.01.01.2.02.0003.	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	7,728,000.00	
7.01.01.2.05.	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	20,000,000.00	
7.01.01.2.05.0009.	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	20,000,000.00	
7.01.01.2.06.	Administrasi Umum Perangkat Daerah	362,000,000.00	
7.01.01.2.06.0001.	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	10,000,000.00	
7.01.01.2.06.0002.	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	20,000,000.00	
7.01.01.2.06.0003.	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	10,000,000.00	
7.01.01.2.06.0004.	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	234,000,000.00	

Kode	Urusan Pemerintahan Daerah, Perangkat Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara	Ket.
1	2	3	4
7.01.01.2.06.0005.	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	8,000,000.00	
7.01.01.2.06.0009.	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	80,000,000.00	
7.01.01.2.07.	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	121,828,441.00	
7.01.01.2.07.0005.	Pengadaan Mebel	55,000,000.00	
7.01.01.2.07.0006.	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	66,828,441.00	
7.01.01.2.08.	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	365,500,000.00	
7.01.01.2.08.0001.	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	4,000,000.00	
7.01.01.2.08.0002.	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	106,300,000.00	
7.01.01.2.08.0004.	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	255,200,000.00	
7.01.01.2.09.	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	120,000,000.00	
7.01.01.2.09.0001.	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	30,000,000.00	
7.01.01.2.09.0002.	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	30,000,000.00	
7.01.01.2.09.0006.	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	10,000,000.00	
7.01.01.2.09.0009.	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	50,000,000.00	
7.01.02.	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	85,000,000.00	
7.01.02.2.01.	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	62,000,000.00	
7.01.02.2.01.0001.	Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	40,000,000.00	
7.01.02.2.01.0002.	Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	22,000,000.00	
7.01.02.2.02.	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan	23,000,000.00	
7.01.02.2.02.0003.	Peningkatan Efektivitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	23,000,000.00	
7.01.03.	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	225,000,000.00	
7.01.03.2.01.	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	30,000,000.00	
7.01.03.2.01.0003.	Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	30,000,000.00	
7.01.03.2.03.	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	155,000,000.00	
7.01.03.2.03.0002.	Peningkatan Kapasitas Lembaga Kemasyarakatan	155,000,000.00	
7.01.03.2.06.	Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan	40,000,000.00	
7.01.03.2.06.0002.	Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Membangun Kerja Sama antar-Keluarga, Warga, dan Kelompok Masyarakat	40,000,000.00	
7.01.04.	PROGRAM KOORDINASI KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	45,000,000.00	
7.01.04.2.01.	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	20,000,000.00	
7.01.04.2.01.0002.	Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	20,000,000.00	
7.01.04.2.02.	Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	25,000,000.00	
7.01.04.2.02.0001.	Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia	25,000,000.00	
7.01.06.	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	20,000,000.00	
7.01.06.2.01.	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	20,000,000.00	
7.01.06.2.01.0003.	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	20,000,000.00	
7.01.0.00.0.00.03.0000.	Kecamatan Tambelan	4,637,534,357.00	
7.01.0.00.0.00.03.0000.	Kecamatan Tambelan	4,335,254,357.00	
7.	UNSUR KEWILAYAHAN	4,335,254,357.00	

Kode	Urusan Pemerintahan Daerah, Perangkat Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara	Ket.
1	2	3	4
7.01.	KECAMATAN	4,335,254,357.00	
7.01.01.	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	3,980,254,357.00	
7.01.01.2.01.	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	39,000,000.00	
7.01.01.2.01.0001.	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	25,500,000.00	
7.01.01.2.01.0007.	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	13,500,000.00	
7.01.01.2.02.	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	3,022,745,979.00	
7.01.01.2.02.0001.	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	3,007,745,979.00	
7.01.01.2.02.0003.	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	15,000,000.00	
7.01.01.2.03.	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	10,000,000.00	
7.01.01.2.03.0006.	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	10,000,000.00	
7.01.01.2.05.	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	20,000,000.00	
7.01.01.2.05.0009.	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	20,000,000.00	
7.01.01.2.06.	Administrasi Umum Perangkat Daerah	398,508,378.00	
7.01.01.2.06.0001.	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	16,000,000.00	
7.01.01.2.06.0002.	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	42,508,378.00	
7.01.01.2.06.0003.	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	28,000,000.00	
7.01.01.2.06.0004.	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	190,000,000.00	
7.01.01.2.06.0005.	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	14,000,000.00	
7.01.01.2.06.0009.	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	108,000,000.00	
7.01.01.2.07.	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	58,900,000.00	
7.01.01.2.07.0005.	Pengadaan Mebel	18,900,000.00	
7.01.01.2.07.0006.	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	40,000,000.00	
7.01.01.2.08.	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	409,000,000.00	
7.01.01.2.08.0001.	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	5,000,000.00	
7.01.01.2.08.0002.	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	36,000,000.00	
7.01.01.2.08.0004.	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	368,000,000.00	
7.01.01.2.09.	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	22,100,000.00	
7.01.01.2.09.0001.	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	9,000,000.00	
7.01.01.2.09.0002.	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	8,100,000.00	
7.01.01.2.09.0006.	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	5,000,000.00	
7.01.02.	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	74,000,000.00	
7.01.02.2.01.	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	49,000,000.00	
7.01.02.2.01.0001.	Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	36,000,000.00	
7.01.02.2.01.0002.	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	13,000,000.00	
7.01.02.2.02.	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan	25,000,000.00	
7.01.02.2.02.0003.	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	25,000,000.00	
7.01.03.	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	240,000,000.00	
7.01.03.2.01.	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	30,000,000.00	
7.01.03.2.01.0001.	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	5,000,000.00	

Kode	Urusan Pemerintahan Daerah, Perangkat Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara	Ket.
1	2	3	4
7.01.03.2.01.0003.	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	25,000,000.00	
7.01.03.2.03.	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	170,000,000.00	
7.01.03.2.03.0002.	Peningkatan Kapasitas Lembaga Kemasyarakatan	170,000,000.00	
7.01.03.2.06.	Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan	40,000,000.00	
7.01.03.2.06.0002.	Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Membangun Kerja Sama antar-Keluarga, Warga, dan Kelompok Masyarakat	40,000,000.00	
7.01.04.	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	21,000,000.00	
7.01.04.2.01.	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	5,000,000.00	
7.01.04.2.01.0002.	Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	5,000,000.00	
7.01.04.2.02.	Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	16,000,000.00	
7.01.04.2.02.0001.	Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia	16,000,000.00	
7.01.05.	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	7,000,000.00	
7.01.05.2.01.	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	7,000,000.00	
7.01.05.2.01.0008.	Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	7,000,000.00	
7.01.06.	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	13,000,000.00	
7.01.06.2.01.	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	13,000,000.00	
7.01.06.2.01.0003.	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	13,000,000.00	
7.01.0.00.0.00.03.0001.	KELURAHAN TELUK SEKUNI	302,280,000.00	
7.	UNSUR KEWILAYAHAN	302,280,000.00	
7.01.	KECAMATAN	302,280,000.00	
7.01.03.	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	302,280,000.00	
7.01.03.2.02.	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	302,280,000.00	
7.01.03.2.02.0001.	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	13,280,000.00	
7.01.03.2.02.0002.	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	166,290,760.00	
7.01.03.2.02.0003.	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	122,709,240.00	
7.01.0.00.0.00.04.0000.	Kecamatan Mantang	3,521,624,738.00	
7.01.0.00.0.00.04.0000.	Kecamatan Mantang	3,521,624,738.00	
7.	UNSUR KEWILAYAHAN	3,521,624,738.00	
7.01.	KECAMATAN	3,521,624,738.00	
7.01.01.	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	3,171,624,738.00	
7.01.01.2.01.	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	40,000,000.00	
7.01.01.2.01.0001.	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	25,000,000.00	
7.01.01.2.01.0007.	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	15,000,000.00	
7.01.01.2.02.	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	2,004,448,845.00	
7.01.01.2.02.0001.	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	1,989,448,845.00	
7.01.01.2.02.0003.	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	15,000,000.00	
7.01.01.2.03.	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	10,000,000.00	
7.01.01.2.03.0006.	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	10,000,000.00	
7.01.01.2.05.	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	59,000,000.00	
7.01.01.2.05.0002.	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	27,000,000.00	
7.01.01.2.05.0009.	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	32,000,000.00	

Kode	Urusan Pemerintahan Daerah, Perangkat Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara	Ket.
1	2	3	4
7.01.01.2.06.	Administrasi Umum Perangkat Daerah	283,275,893.00	
7.01.01.2.06.0001.	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	30,000,000.00	
7.01.01.2.06.0002.	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	35,000,000.00	
7.01.01.2.06.0003.	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	10,000,000.00	
7.01.01.2.06.0004.	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	133,275,893.00	
7.01.01.2.06.0005.	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	10,000,000.00	
7.01.01.2.06.0009.	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	65,000,000.00	
7.01.01.2.07.	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	247,000,000.00	
7.01.01.2.07.0005.	Pengadaan Mebel	17,000,000.00	
7.01.01.2.07.0006.	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	30,000,000.00	
7.01.01.2.07.0011.	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	200,000,000.00	
7.01.01.2.08.	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	377,900,000.00	
7.01.01.2.08.0001.	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	2,500,000.00	
7.01.01.2.08.0002.	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	125,000,000.00	
7.01.01.2.08.0004.	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	250,400,000.00	
7.01.01.2.09.	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	150,000,000.00	
7.01.01.2.09.0001.	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	10,000,000.00	
7.01.01.2.09.0002.	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	90,000,000.00	
7.01.01.2.09.0006.	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	30,000,000.00	
7.01.01.2.09.0009.	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	20,000,000.00	
7.01.02.	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	75,000,000.00	
7.01.02.2.01.	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	60,000,000.00	
7.01.02.2.01.0001.	Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	45,000,000.00	
7.01.02.2.01.0002.	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	15,000,000.00	
7.01.02.2.02.	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan	15,000,000.00	
7.01.02.2.02.0003.	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	15,000,000.00	
7.01.03.	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	245,000,000.00	
7.01.03.2.01.	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	25,000,000.00	
7.01.03.2.01.0001.	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	5,000,000.00	
7.01.03.2.01.0003.	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	20,000,000.00	
7.01.03.2.03.	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	170,000,000.00	
7.01.03.2.03.0002.	Peningkatan Kapasitas Lembaga Kemasyarakatan	170,000,000.00	
7.01.03.2.06.	Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan	50,000,000.00	
7.01.03.2.06.0002.	Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Membangun Kerja Sama antar-Keluarga, Warga, dan Kelompok Masyarakat	50,000,000.00	
7.01.04.	PROGRAM KOORDINASI KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	10,000,000.00	
7.01.04.2.01.	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	5,000,000.00	
7.01.04.2.01.0002.	Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	5,000,000.00	
7.01.04.2.02.	Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	5,000,000.00	

Kode	Urusan Pemerintahan Daerah, Perangkat Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara	Ket.
1	2	3	4
7.01.04.2.02.0001.	Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia	5,000,000.00	
7.01.05.	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	5,000,000.00	
7.01.05.2.01.	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	5,000,000.00	
7.01.05.2.01.0008.	Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	5,000,000.00	
7.01.06.	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	15,000,000.00	
7.01.06.2.01.	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	15,000,000.00	
7.01.06.2.01.0003.	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	15,000,000.00	
7.01.0.00.0.00.05.0000.	Kecamatan Toapaya	4,988,974,013.00	
7.01.0.00.0.00.05.0000.	Kecamatan Toapaya	4,536,079,013.00	
7.	UNSUR KEWILAYAHAN	4,536,079,013.00	
7.01.	KECAMATAN	4,536,079,013.00	
7.01.01.	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	3,933,193,123.00	
7.01.01.2.01.	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	33,100,000.00	
7.01.01.2.01.0001.	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	21,275,000.00	
7.01.01.2.01.0007.	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	11,825,000.00	
7.01.01.2.02.	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	2,808,431,027.00	
7.01.01.2.02.0001.	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	2,797,103,027.00	
7.01.01.2.02.0003.	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	11,328,000.00	
7.01.01.2.03.	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	3,864,000.00	
7.01.01.2.03.0006.	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	3,864,000.00	
7.01.01.2.05.	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	60,000,000.00	
7.01.01.2.05.0002.	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	40,000,000.00	
7.01.01.2.05.0009.	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	20,000,000.00	
7.01.01.2.06.	Administrasi Umum Perangkat Daerah	303,198,096.00	
7.01.01.2.06.0001.	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	14,000,000.00	
7.01.01.2.06.0002.	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	60,000,000.00	
7.01.01.2.06.0003.	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	12,000,000.00	
7.01.01.2.06.0004.	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	115,198,096.00	
7.01.01.2.06.0005.	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	22,000,000.00	
7.01.01.2.06.0009.	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	80,000,000.00	
7.01.01.2.07.	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	74,000,000.00	
7.01.01.2.07.0005.	Pengadaan Mebel	10,000,000.00	
7.01.01.2.07.0006.	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	64,000,000.00	
7.01.01.2.08.	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	521,600,000.00	
7.01.01.2.08.0001.	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	3,000,000.00	
7.01.01.2.08.0002.	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	108,200,000.00	
7.01.01.2.08.0004.	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	410,400,000.00	
7.01.01.2.09.	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	129,000,000.00	
7.01.01.2.09.0001.	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	10,000,000.00	

Kode	Urusan Pemerintahan Daerah, Perangkat Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara	Ket.
1	2	3	4
7.01.01.2.09.0002.	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	42,000,000.00	
7.01.01.2.09.0006.	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	18,000,000.00	
7.01.01.2.09.0009.	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	59,000,000.00	
7.01.02.	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	140,000,000.00	
7.01.02.2.01.	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	115,000,000.00	
7.01.02.2.01.0001.	Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	55,000,000.00	
7.01.02.2.01.0002.	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	60,000,000.00	
7.01.02.2.02.	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan	25,000,000.00	
7.01.02.2.02.0003.	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	25,000,000.00	
7.01.03.	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	388,885,890.00	
7.01.03.2.01.	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	50,000,000.00	
7.01.03.2.01.0003.	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	50,000,000.00	
7.01.03.2.03.	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	288,885,890.00	
7.01.03.2.03.0002.	Peningkatan Kapasitas Lembaga Kemasyarakatan	288,885,890.00	
7.01.03.2.06.	Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan	50,000,000.00	
7.01.03.2.06.0002.	Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Membangun Kerja Sama antar-Keluarga, Warga, dan Kelompok Masyarakat	50,000,000.00	
7.01.04.	PROGRAM KOORDINASI KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	35,000,000.00	
7.01.04.2.01.	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	20,000,000.00	
7.01.04.2.01.0002.	Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	20,000,000.00	
7.01.04.2.02.	Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	15,000,000.00	
7.01.04.2.02.0001.	Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia	15,000,000.00	
7.01.05.	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	10,000,000.00	
7.01.05.2.01.	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	10,000,000.00	
7.01.05.2.01.0008.	Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	10,000,000.00	
7.01.06.	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	29,000,000.00	
7.01.06.2.01.	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	29,000,000.00	
7.01.06.2.01.0002.	Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa	20,000,000.00	
7.01.06.2.01.0003.	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendaayagunaan Aset Desa	9,000,000.00	
7.01.0.00.0.00.05.0001.	KELURAHAN TOAPAYA ASRI	452,895,000.00	
7.	UNSUR KEWILAYAHAN	452,895,000.00	
7.01.	KECAMATAN	452,895,000.00	
7.01.03.	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	452,895,000.00	
7.01.03.2.02.	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	452,895,000.00	
7.01.03.2.02.0001.	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	20,000,000.00	
7.01.03.2.02.0002.	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	370,000,000.00	
7.01.03.2.02.0003.	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	62,895,000.00	
7.01.0.00.0.00.06.0000.	Kecamatan Teluk Sebong	4,555,860,171.00	
7.01.0.00.0.00.06.0000.	Kecamatan Teluk Sebong	4,205,217,571.00	

Kode	Urusan Pemerintahan Daerah, Perangkat Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara	Ket.
1	2	3	4
7.	UNSUR KEWILAYAHAN	4,205,217,571.00	
7.01.	KECAMATAN	4,205,217,571.00	
7.01.01.	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	3,848,253,171.00	
7.01.01.2.01.	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	35,000,000.00	
7.01.01.2.01.0001.	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	25,000,000.00	
7.01.01.2.01.0007.	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	10,000,000.00	
7.01.01.2.02.	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	2,950,940,393.00	
7.01.01.2.02.0001.	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	2,930,940,393.00	
7.01.01.2.02.0003.	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	20,000,000.00	
7.01.01.2.03.	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	7,000,000.00	
7.01.01.2.03.0006.	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	7,000,000.00	
7.01.01.2.05.	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	25,000,000.00	
7.01.01.2.05.0009.	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	25,000,000.00	
7.01.01.2.06.	Administrasi Umum Perangkat Daerah	386,962,778.00	
7.01.01.2.06.0001.	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	8,000,000.00	
7.01.01.2.06.0002.	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	54,000,000.00	
7.01.01.2.06.0003.	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	17,000,000.00	
7.01.01.2.06.0004.	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	201,004,000.00	
7.01.01.2.06.0005.	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	17,000,000.00	
7.01.01.2.06.0009.	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	89,958,778.00	
7.01.01.2.08.	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	361,440,000.00	
7.01.01.2.08.0001.	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	2,000,000.00	
7.01.01.2.08.0002.	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	109,440,000.00	
7.01.01.2.08.0004.	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	250,000,000.00	
7.01.01.2.09.	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	81,910,000.00	
7.01.01.2.09.0001.	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	10,000,000.00	
7.01.01.2.09.0002.	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	51,000,000.00	
7.01.01.2.09.0006.	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	20,910,000.00	
7.01.02.	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	70,000,000.00	
7.01.02.2.01.	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	50,000,000.00	
7.01.02.2.01.0001.	Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	40,000,000.00	
7.01.02.2.01.0002.	Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	10,000,000.00	
7.01.02.2.02.	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan	20,000,000.00	
7.01.02.2.02.0003.	Peningkatan Efektivitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	20,000,000.00	
7.01.03.	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	233,000,000.00	
7.01.03.2.01.	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	28,000,000.00	
7.01.03.2.01.0001.	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	3,000,000.00	
7.01.03.2.01.0003.	Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	25,000,000.00	

Kode	Urusan Pemerintahan Daerah, Perangkat Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara	Ket.
1	2	3	4
7.01.03.2.03.	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	170,000,000.00	
7.01.03.2.03.0002.	Peningkatan Kapasitas Lembaga Kemasyarakatan	170,000,000.00	
7.01.03.2.06.	Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan	35,000,000.00	
7.01.03.2.06.0002.	Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Membangun Kerja Sama antar-Keluarga, Warga, dan Kelompok Masyarakat	35,000,000.00	
7.01.04.	PROGRAM KOORDINASI KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	28,964,400.00	
7.01.04.2.01.	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	20,000,000.00	
7.01.04.2.01.0002.	Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	20,000,000.00	
7.01.04.2.02.	Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	8,964,400.00	
7.01.04.2.02.0001.	Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia	8,964,400.00	
7.01.05.	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	10,000,000.00	
7.01.05.2.01.	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	10,000,000.00	
7.01.05.2.01.0008.	Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	10,000,000.00	
7.01.06.	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	15,000,000.00	
7.01.06.2.01.	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	15,000,000.00	
7.01.06.2.01.0003.	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	15,000,000.00	
7.01.0.00.0.00.06.0001.	KELURAHAN KOTA BARU	350,642,600.00	
7.	UNSUR KEWILAYAHAN	350,642,600.00	
7.01.	KECAMATAN	350,642,600.00	
7.01.03.	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	350,642,600.00	
7.01.03.2.02.	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	350,642,600.00	
7.01.03.2.02.0001.	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	20,000,000.00	
7.01.03.2.02.0002.	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	300,000,000.00	
7.01.03.2.02.0003.	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	30,642,600.00	
7.01.0.00.0.00.07.0000.	Kecamatan Teluk Bintan	4,640,509,757.00	
7.01.0.00.0.00.07.0000.	Kecamatan Teluk Bintan	4,220,509,757.00	
7.	UNSUR KEWILAYAHAN	4,220,509,757.00	
7.01.	KECAMATAN	4,220,509,757.00	
7.01.01.	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	3,802,359,757.00	
7.01.01.2.01.	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	60,000,000.00	
7.01.01.2.01.0001.	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	30,000,000.00	
7.01.01.2.01.0007.	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	30,000,000.00	
7.01.01.2.02.	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	2,809,131,757.00	
7.01.01.2.02.0001.	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	2,797,539,757.00	
7.01.01.2.02.0003.	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	11,592,000.00	
7.01.01.2.03.	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	7,728,000.00	
7.01.01.2.03.0006.	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	7,728,000.00	
7.01.01.2.05.	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	25,000,000.00	
7.01.01.2.05.0009.	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	25,000,000.00	
7.01.01.2.06.	Administrasi Umum Perangkat Daerah	399,500,000.00	

Kode	Urusan Pemerintahan Daerah, Perangkat Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara	Ket.
1	2	3	4
7.01.01.2.06.0001.	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	30,000,000.00	
7.01.01.2.06.0002.	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	70,000,000.00	
7.01.01.2.06.0003.	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	15,000,000.00	
7.01.01.2.06.0004.	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	190,000,000.00	
7.01.01.2.06.0005.	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	10,500,000.00	
7.01.01.2.06.0009.	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	84,000,000.00	
7.01.01.2.07.	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	35,000,000.00	
7.01.01.2.07.0005.	Pengadaan Mebel	10,000,000.00	
7.01.01.2.07.0006.	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	25,000,000.00	
7.01.01.2.08.	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	376,000,000.00	
7.01.01.2.08.0001.	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1,200,000.00	
7.01.01.2.08.0002.	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	80,200,000.00	
7.01.01.2.08.0004.	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	294,600,000.00	
7.01.01.2.09.	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	90,000,000.00	
7.01.01.2.09.0001.	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	20,000,000.00	
7.01.01.2.09.0002.	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	60,000,000.00	
7.01.01.2.09.0006.	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	10,000,000.00	
7.01.02.	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	95,000,000.00	
7.01.02.2.01.	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	70,000,000.00	
7.01.02.2.01.0001.	Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	50,000,000.00	
7.01.02.2.01.0002.	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	20,000,000.00	
7.01.02.2.02.	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan	25,000,000.00	
7.01.02.2.02.0003.	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	25,000,000.00	
7.01.03.	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	260,550,000.00	
7.01.03.2.01.	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	23,000,000.00	
7.01.03.2.01.0001.	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	3,000,000.00	
7.01.03.2.01.0003.	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	20,000,000.00	
7.01.03.2.02.	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	22,550,000.00	
7.01.03.2.02.0001.	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	22,550,000.00	
7.01.03.2.03.	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	165,000,000.00	
7.01.03.2.03.0002.	Peningkatan Kapasitas Lembaga Kemasyarakatan	165,000,000.00	
7.01.03.2.06.	Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan	50,000,000.00	
7.01.03.2.06.0002.	Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Membangun Kerja Sama antar-Keluarga, Warga, dan Kelompok Masyarakat	50,000,000.00	
7.01.04.	PROGRAM KOORDINASI KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	15,000,000.00	
7.01.04.2.01.	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	10,000,000.00	
7.01.04.2.01.0002.	Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	10,000,000.00	
7.01.04.2.02.	Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	5,000,000.00	

Kode	Urusan Pemerintahan Daerah, Perangkat Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara	Ket.
1	2	3	4
7.01.04.2.02.0001.	Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia	5,000,000.00	
7.01.05.	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	13,000,000.00	
7.01.05.2.01.	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	13,000,000.00	
7.01.05.2.01.0008.	Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	13,000,000.00	
7.01.06.	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	34,600,000.00	
7.01.06.2.01.	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	34,600,000.00	
7.01.06.2.01.0003.	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	20,000,000.00	
7.01.06.2.01.0006.	Fasilitasi Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa	14,600,000.00	
7.01.0.00.0.00.07.0001.	KELURAHAN TEMBELING TANJUNG	420,000,000.00	
7.	UNSUR KEWILAYAHAN	420,000,000.00	
7.01.	KECAMATAN	420,000,000.00	
7.01.03.	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	420,000,000.00	
7.01.03.2.02.	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	420,000,000.00	
7.01.03.2.02.0002.	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	400,000,000.00	
7.01.03.2.02.0003.	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	20,000,000.00	
7.01.0.00.0.00.08.0000.	Kecamatan Gunung Kijang	5,638,483,577.00	
7.01.0.00.0.00.08.0000.	Kecamatan Gunung Kijang	5,218,483,577.00	
7.	UNSUR KEWILAYAHAN	5,218,483,577.00	
7.01.	KECAMATAN	5,218,483,577.00	
7.01.01.	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	4,496,623,366.00	
7.01.01.2.01.	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	60,000,000.00	
7.01.01.2.01.0001.	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	43,443,000.00	
7.01.01.2.01.0007.	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	16,557,000.00	
7.01.01.2.02.	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	3,395,513,685.00	
7.01.01.2.02.0001.	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	3,388,313,685.00	
7.01.01.2.02.0003.	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	7,200,000.00	
7.01.01.2.03.	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	1,500,000.00	
7.01.01.2.03.0006.	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	1,500,000.00	
7.01.01.2.05.	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	31,500,000.00	
7.01.01.2.05.0009.	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	31,500,000.00	
7.01.01.2.06.	Administrasi Umum Perangkat Daerah	397,598,185.00	
7.01.01.2.06.0001.	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	10,843,766.00	
7.01.01.2.06.0002.	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	68,001,815.00	
7.01.01.2.06.0003.	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	15,128,046.00	
7.01.01.2.06.0004.	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	172,882,000.00	
7.01.01.2.06.0005.	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	16,377,704.00	
7.01.01.2.06.0009.	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	114,364,854.00	
7.01.01.2.07.	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	59,713,149.00	
7.01.01.2.07.0006.	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	59,713,149.00	
7.01.01.2.08.	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	497,919,198.00	

Kode	Urusan Pemerintahan Daerah, Perangkat Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara	Ket.
1	2	3	4
7.01.01.2.08.0001.	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	2,000,000.00	
7.01.01.2.08.0002.	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	100,259,198.00	
7.01.01.2.08.0004.	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	395,660,000.00	
7.01.01.2.09.	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	52,879,149.00	
7.01.01.2.09.0001.	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	16,617,955.00	
7.01.01.2.09.0002.	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	27,219,737.00	
7.01.01.2.09.0006.	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	9,041,457.00	
7.01.02.	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	97,137,049.00	
7.01.02.2.01.	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	75,396,192.00	
7.01.02.2.01.0001.	Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	55,735,392.00	
7.01.02.2.01.0002.	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	19,660,800.00	
7.01.02.2.02.	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan	21,740,857.00	
7.01.02.2.02.0003.	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	21,740,857.00	
7.01.03.	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	587,033,452.00	
7.01.03.2.01.	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	86,476,832.00	
7.01.03.2.01.0001.	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	1,500,000.00	
7.01.03.2.01.0003.	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	84,976,832.00	
7.01.03.2.02.	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	10,349,650.00	
7.01.03.2.02.0001.	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	10,349,650.00	
7.01.03.2.03.	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	464,854,448.00	
7.01.03.2.03.0002.	Peningkatan Kapasitas Lembaga Kemasyarakatan	314,854,448.00	
7.01.03.2.03.0003.	Penyediaan Sarana dan Prasarana Lembaga Kemasyarakatan	150,000,000.00	
7.01.03.2.06.	Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan	25,352,522.00	
7.01.03.2.06.0002.	Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Membangun Kerja Sama antar-Keluarga, Warga, dan Kelompok Masyarakat	25,352,522.00	
7.01.04.	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	8,199,800.00	
7.01.04.2.02.	Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	8,199,800.00	
7.01.04.2.02.0001.	Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia	8,199,800.00	
7.01.05.	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	5,223,110.00	
7.01.05.2.01.	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	5,223,110.00	
7.01.05.2.01.0008.	Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	5,223,110.00	
7.01.06.	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	24,266,800.00	
7.01.06.2.01.	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	24,266,800.00	
7.01.06.2.01.0003.	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	14,671,400.00	
7.01.06.2.01.0006.	Fasilitasi Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa	9,595,400.00	
7.01.0.00.0.00.08.0001.	KELURAHAN KAWAL	420,000,000.00	
7.	UNSUR KEWILAYAHAN	420,000,000.00	
7.01.	KECAMATAN	420,000,000.00	

Kode	Urusan Pemerintahan Daerah, Perangkat Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara	Ket.
1	2	3	4
7.01.03.	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	420,000,000.00	
7.01.03.2.02.	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	420,000,000.00	
7.01.03.2.02.0002.	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	250,000,000.00	
7.01.03.2.02.0003.	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	170,000,000.00	
7.01.0.00.0.00.09.0000.	Kecamatan Bintan Timur	11,539,879,452.00	
7.01.0.00.0.00.09.0000.	Kecamatan Bintan Timur	8,872,599,452.00	
7.	UNSUR KEWILAYAHAN	8,872,599,452.00	
7.01.	KECAMATAN	8,872,599,452.00	
7.01.01.	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	8,067,599,452.00	
7.01.01.2.01.	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	55,000,000.00	
7.01.01.2.01.0001.	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	30,000,000.00	
7.01.01.2.01.0007.	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	25,000,000.00	
7.01.01.2.02.	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	5,408,425,921.00	
7.01.01.2.02.0001.	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	5,396,833,921.00	
7.01.01.2.02.0003.	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	11,592,000.00	
7.01.01.2.05.	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	12,000,000.00	
7.01.01.2.05.0002.	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	12,000,000.00	
7.01.01.2.06.	Administrasi Umum Perangkat Daerah	745,286,754.00	
7.01.01.2.06.0001.	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	65,000,000.00	
7.01.01.2.06.0002.	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	150,000,000.00	
7.01.01.2.06.0003.	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	85,000,000.00	
7.01.01.2.06.0004.	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	209,952,230.00	
7.01.01.2.06.0005.	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	90,532,524.00	
7.01.01.2.06.0009.	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	144,802,000.00	
7.01.01.2.07.	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	400,910,000.00	
7.01.01.2.07.0002.	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	60,000,000.00	
7.01.01.2.07.0005.	Pengadaan Mebel	105,285,000.00	
7.01.01.2.07.0006.	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	215,625,000.00	
7.01.01.2.07.0011.	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	20,000,000.00	
7.01.01.2.08.	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	1,263,040,000.00	
7.01.01.2.08.0001.	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	8,000,000.00	
7.01.01.2.08.0002.	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	235,200,000.00	
7.01.01.2.08.0004.	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	1,019,840,000.00	
7.01.01.2.09.	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	182,936,777.00	
7.01.01.2.09.0001.	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	14,936,777.00	
7.01.01.2.09.0002.	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	60,000,000.00	
7.01.01.2.09.0006.	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	56,000,000.00	
7.01.01.2.09.0009.	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	52,000,000.00	
7.01.02.	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	100,000,000.00	
7.01.02.2.01.	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	70,000,000.00	

Kode	Urusan Pemerintahan Daerah, Perangkat Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara	Ket.
1	2	3	4
7.01.02.2.01.0001.	Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	50,000,000.00	
7.01.02.2.01.0002.	Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	20,000,000.00	
7.01.02.2.02.	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan	30,000,000.00	
7.01.02.2.02.0003.	Peningkatan Efektivitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	30,000,000.00	
7.01.03.	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	635,000,000.00	
7.01.03.2.03.	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	560,000,000.00	
7.01.03.2.03.0002.	Peningkatan Kapasitas Lembaga Kemasyarakatan	200,000,000.00	
7.01.03.2.03.0003.	Penyediaan Sarana dan Prasarana Lembaga Kemasyarakatan	360,000,000.00	
7.01.03.2.06.	Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan	75,000,000.00	
7.01.03.2.06.0002.	Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Membangun Kerja Sama antar-Keluarga, Warga, dan Kelompok Masyarakat	75,000,000.00	
7.01.04.	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	50,000,000.00	
7.01.04.2.01.	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	25,000,000.00	
7.01.04.2.01.0002.	Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	25,000,000.00	
7.01.04.2.02.	Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	25,000,000.00	
7.01.04.2.02.0001.	Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia	25,000,000.00	
7.01.05.	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	20,000,000.00	
7.01.05.2.01.	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	20,000,000.00	
7.01.05.2.01.0008.	Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	20,000,000.00	
7.01.0.00.0.00.09.0001.	KELURAHAN SUNGAI ENAM	384,642,500.00	
7.	UNSUR KEWILAYAHAN	384,642,500.00	
7.01.	KECAMATAN	384,642,500.00	
7.01.03.	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	384,642,500.00	
7.01.03.2.02.	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	384,642,500.00	
7.01.03.2.02.0001.	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	14,000,000.00	
7.01.03.2.02.0002.	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	265,000,000.00	
7.01.03.2.02.0003.	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	105,642,500.00	
7.01.0.00.0.00.09.0002.	KELURAHAN SUNGAI LEKOP	605,927,500.00	
7.	UNSUR KEWILAYAHAN	605,927,500.00	
7.01.	KECAMATAN	605,927,500.00	
7.01.03.	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	605,927,500.00	
7.01.03.2.02.	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	605,927,500.00	
7.01.03.2.02.0001.	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	14,000,000.00	
7.01.03.2.02.0002.	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	280,000,000.00	
7.01.03.2.02.0003.	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	311,927,500.00	
7.01.0.00.0.00.09.0003.	KELURAHAN KIJANG KOTA	1,238,212,500.00	
7.	UNSUR KEWILAYAHAN	1,238,212,500.00	
7.01.	KECAMATAN	1,238,212,500.00	
7.01.03.	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	1,238,212,500.00	
7.01.03.2.02.	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	1,238,212,500.00	
7.01.03.2.02.0001.	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	25,000,000.00	
7.01.03.2.02.0002.	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	960,000,000.00	

Kode	Urusan Pemerintahan Daerah, Perangkat Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara	Ket.
1	2	3	4
7.01.03.2.02.0003.	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	253,212,500.00	
7.01.0.00.0.00.09.0004.	KELURAHAN GUNUNG LENGKUAS	438,497,500.00	
7.	UNSUR KEWILAYAHAN	438,497,500.00	
7.01.	KECAMATAN	438,497,500.00	
7.01.03.	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	438,497,500.00	
7.01.03.2.02.	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	438,497,500.00	
7.01.03.2.02.0001.	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	14,529,000.00	
7.01.03.2.02.0002.	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	300,000,000.00	
7.01.03.2.02.0003.	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	123,968,500.00	
7.01.0.00.0.00.10.0000.	Kecamatan Seri Kuala Lobam	6,504,338,905.00	
7.01.0.00.0.00.10.0000.	Kecamatan Seri Kuala Lobam	5,686,226,905.00	
7.	UNSUR KEWILAYAHAN	5,686,226,905.00	
7.01.	KECAMATAN	5,686,226,905.00	
7.01.01.	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	5,032,226,905.00	
7.01.01.2.01.	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	45,000,000.00	
7.01.01.2.01.0001.	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	30,000,000.00	
7.01.01.2.01.0007.	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	15,000,000.00	
7.01.01.2.02.	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	3,775,939,479.00	
7.01.01.2.02.0001.	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	3,760,939,479.00	
7.01.01.2.02.0003.	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	15,000,000.00	
7.01.01.2.03.	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	10,000,000.00	
7.01.01.2.03.0006.	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	10,000,000.00	
7.01.01.2.05.	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	36,500,000.00	
7.01.01.2.05.0009.	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	36,500,000.00	
7.01.01.2.06.	Administrasi Umum Perangkat Daerah	394,387,426.00	
7.01.01.2.06.0001.	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	20,000,000.00	
7.01.01.2.06.0002.	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	90,000,000.00	
7.01.01.2.06.0003.	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	25,000,000.00	
7.01.01.2.06.0004.	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	174,387,426.00	
7.01.01.2.06.0005.	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	25,000,000.00	
7.01.01.2.06.0009.	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	60,000,000.00	
7.01.01.2.07.	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	115,000,000.00	
7.01.01.2.07.0005.	Pengadaan Mebel	10,000,000.00	
7.01.01.2.07.0006.	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	105,000,000.00	
7.01.01.2.08.	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	535,400,000.00	
7.01.01.2.08.0001.	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	11,000,000.00	
7.01.01.2.08.0002.	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	114,000,000.00	
7.01.01.2.08.0004.	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	410,400,000.00	
7.01.01.2.09.	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	120,000,000.00	
7.01.01.2.09.0002.	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	35,000,000.00	
7.01.01.2.09.0006.	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	15,000,000.00	
7.01.01.2.09.0009.	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	70,000,000.00	

Kode	Urusan Pemerintahan Daerah, Perangkat Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara	Ket.
1	2	3	4
7.01.02.	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	90,000,000.00	
7.01.02.2.01.	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	70,000,000.00	
7.01.02.2.01.0001.	Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	50,000,000.00	
7.01.02.2.01.0002.	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	20,000,000.00	
7.01.02.2.02.	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan	20,000,000.00	
7.01.02.2.02.0003.	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	20,000,000.00	
7.01.03.	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	509,000,000.00	
7.01.03.2.01.	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	31,500,000.00	
7.01.03.2.01.0001.	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	1,500,000.00	
7.01.03.2.01.0003.	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	30,000,000.00	
7.01.03.2.03.	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	432,500,000.00	
7.01.03.2.03.0002.	Peningkatan Kapasitas Lembaga Kemasyarakatan	242,500,000.00	
7.01.03.2.03.0003.	Penyediaan Sarana dan Prasarana Lembaga Kemasyarakatan	190,000,000.00	
7.01.03.2.06.	Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan	45,000,000.00	
7.01.03.2.06.0002.	Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Membangun Kerja Sama antar-Keluarga, Warga, dan Kelompok Masyarakat	45,000,000.00	
7.01.04.	PROGRAM KOORDINASI KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	35,000,000.00	
7.01.04.2.01.	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	25,000,000.00	
7.01.04.2.01.0002.	Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	25,000,000.00	
7.01.04.2.02.	Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	10,000,000.00	
7.01.04.2.02.0001.	Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia	10,000,000.00	
7.01.05.	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	10,000,000.00	
7.01.05.2.01.	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	10,000,000.00	
7.01.05.2.01.0008.	Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	10,000,000.00	
7.01.06.	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	10,000,000.00	
7.01.06.2.01.	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	10,000,000.00	
7.01.06.2.01.0003.	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	10,000,000.00	
7.01.0.00.0.00.10.0001.	KELURAHAN TANJUNG PERMAI	421,827,000.00	
7.	UNSUR KEWILAYAHAN	421,827,000.00	
7.01.	KECAMATAN	421,827,000.00	
7.01.03.	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	421,827,000.00	
7.01.03.2.02.	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	421,827,000.00	
7.01.03.2.02.0001.	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	15,000,000.00	
7.01.03.2.02.0002.	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	180,000,000.00	
7.01.03.2.02.0003.	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	226,827,000.00	
7.01.0.00.0.00.10.0002.	KELURAHAN TELUK LOBAM	396,285,000.00	
7.	UNSUR KEWILAYAHAN	396,285,000.00	
7.01.	KECAMATAN	396,285,000.00	
7.01.03.	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	396,285,000.00	

Kode	Urusan Pemerintahan Daerah, Perangkat Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara	Ket.
1	2	3	4
7.01.03.2.02.	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	396,285,000.00	
7.01.03.2.02.0001.	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	15,000,000.00	
7.01.03.2.02.0002.	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	260,000,000.00	
7.01.03.2.02.0003.	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	121,285,000.00	
8.01.1.05.0.00.01.0000.	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	8,742,032,151.00	
8.01.1.05.0.00.01.0000.	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	8,742,032,151.00	
8.	UNSUR PEMERINTAHAN UMUM	8,742,032,151.00	
8.01.	KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	8,742,032,151.00	
8.01.01.	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	4,750,697,533.00	
8.01.01.2.01.	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	75,000,000.00	
8.01.01.2.01.0001.	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	50,000,000.00	
8.01.01.2.01.0007.	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	25,000,000.00	
8.01.01.2.02.	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	3,900,773,735.00	
8.01.01.2.02.0001.	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	3,885,773,735.00	
8.01.01.2.02.0003.	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	15,000,000.00	
8.01.01.2.03.	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	15,000,000.00	
8.01.01.2.03.0005.	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	15,000,000.00	
8.01.01.2.05.	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	55,700,000.00	
8.01.01.2.05.0002.	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	35,700,000.00	
8.01.01.2.05.0009.	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	20,000,000.00	
8.01.01.2.06.	Administrasi Umum Perangkat Daerah	292,367,993.00	
8.01.01.2.06.0001.	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	5,000,000.00	
8.01.01.2.06.0002.	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	40,184,195.00	
8.01.01.2.06.0003.	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	10,000,000.00	
8.01.01.2.06.0004.	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	140,000,000.00	
8.01.01.2.06.0005.	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	10,000,000.00	
8.01.01.2.06.0009.	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	87,183,798.00	
8.01.01.2.07.	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	50,000,000.00	
8.01.01.2.07.0006.	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	50,000,000.00	
8.01.01.2.08.	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	311,740,000.00	
8.01.01.2.08.0001.	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	3,500,000.00	
8.01.01.2.08.0002.	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	74,400,000.00	
8.01.01.2.08.0004.	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	233,840,000.00	
8.01.01.2.09.	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	50,115,805.00	
8.01.01.2.09.0001.	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	40,000,000.00	
8.01.01.2.09.0005.	Pemeliharaan Mebel	5,115,805.00	
8.01.01.2.09.0006.	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	5,000,000.00	
8.01.02.	PROGRAM PENGUATAN IDEOLOGI PANCASILA DAN KARAKTER KEBANGSAAN	1,300,000,000.00	
8.01.02.2.01.	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan	1,300,000,000.00	
8.01.02.2.01.0004.	Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	200,000,000.00	

Kode	Urusan Pemerintahan Daerah, Perangkat Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara	Ket.
1	2	3	4
8.01.02.2.01.0008.	Pembentukan Paskibraka	1,100,000,000.00	
8.01.03.	PROGRAM PENINGKATAN PERAN PARTAI POLITIK DAN LEMBAGA PENDIDIKAN MELALUI PENDIDIKAN POLITIK DAN PENGEMBANGAN ETIKA SERTA BUDAYA POLITIK	971,334,618.00	
8.01.03.2.01.	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitas Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik	971,334,618.00	
8.01.03.2.01.0001.	Penyusunan Program Kerja di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitas Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	871,334,618.00	
8.01.03.2.01.0005.	Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitas Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	100,000,000.00	
8.01.04.	PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENGAWASAN ORGANISASI KEMASYARAKATAN	50,000,000.00	
8.01.04.2.01.	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan	50,000,000.00	
8.01.04.2.01.0004.	Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah	50,000,000.00	
8.01.05.	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN KETAHANAN EKONOMI, SOSIAL, DAN BUDAYA	60,000,000.00	
8.01.05.2.01.	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya	60,000,000.00	
8.01.05.2.01.0004.	Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitas Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitas Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	60,000,000.00	
8.01.06.	PROGRAM PENINGKATAN KEWASPADAAN NASIONAL DAN PENINGKATAN KUALITAS DAN FASILITASI PENANGANAN KONFLIK SOSIAL	1,610,000,000.00	
8.01.06.2.01.	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pelaksanaan Pemantapan Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik Sosial	1,610,000,000.00	
8.01.06.2.01.0002.	Penyusunan Bahan Perumusan Kebijakan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitas Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	1,010,000,000.00	
8.01.06.2.01.0003.	Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitas Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	50,000,000.00	
8.01.06.2.01.0005.	Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitas Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	150,000,000.00	
8.01.06.2.01.0006.	Pelaksanaan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Kabupaten/Kota	400,000,000.00	
Total		1,266,632,139,531.00	

4.3 Plafon Anggaran Sementara untuk Belanja Hibah, Bantuan Sosial, Belanja Tidak Terduga dan Belanja Transfer

1) Belanja Hibah.

Berdasarkan ketentuan Pasal 62 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah disebutkan bahwa

Belanja hibah diberikan kepada Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah lainnya, badan usaha milik negara, BUMD, dan/atau badan dan lembaga, serta organisasi kemasyarakatan yang berbadan hukum Indonesia, yang secara spesifik telah ditetapkan peruntukannya, bersifat tidak wajib dan tidak mengikat, serta tidak secara terus menerus setiap tahun anggaran, kecuali ditentukan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Pemberian hibah ditujukan untuk menunjang pencapaian Sasaran Program dan Kegiatan Pemerintah Daerah sesuai kepentingan Daerah dalam mendukung terselenggaranya fungsi pemerintahan, pembangunan, dan kemasyarakatan dengan memperhatikan asas keadilan, kepatutan, rasionalitas, dan manfaat untuk masyarakat. Belanja hibah sebagaimana dimaksud diatas dianggarkan dalam APBD sesuai dengan kemampuan Keuangan Daerah setelah memprioritaskan pemenuhan belanja Urusan Pemerintahan Wajib dan Urusan Pemerintahan Pilihan, kecuali ditentukan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Selanjutnya, penganggaran belanja hibah juga berupa pemberian bantuan keuangan kepada partai politik yang mendapatkan kursi di DPRD provinsi dan DPRD kabupaten/kota sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan sebagaimana maksud Penjelasan Pasal 62 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah. Besaran penganggaran bantuan keuangan kepada partai politik dimaksud berpedoman kepada Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2014 tentang Pedoman Tata Cara Penghitungan, Penganggaran Dalam Anggaran dan Pendapatan Belanja Daerah dan Tertib Administrasi Pengajuan, Penyaluran dan Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Bantuan Keuangan Partai Politik sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri

Nomor 6 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2014 tentang Pedoman Tata Cara Penghitungan, Penganggaran Dalam Anggaran dan Pendapatan Belanja Daerah dan Tertib Administrasi Pengajuan, Penyaluran dan Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Bantuan Keuangan Partai Politik.

2) Belanja Bantuan Sosial

Berdasarkan ketentuan Pasal 63 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah disebutkan bahwa Belanja bantuan digunakan untuk menganggarkan pemberian bantuan berupa uang dan/atau barang kepada individu, keluarga, kelompok dan/atau masyarakat yang sifatnya tidak secara terus menerus dan selektif yang bertujuan untuk melindungi dari kemungkinan terjadinya resiko sosial, kecuali dalam keadaan tertentu dapat berkelanjutan. Keadaan tertentu dapat diartikan bahwa bantuan sosial dapat diberikan setiap tahun arlggaran sampai penerima bantuan telah lepas dari resiko sosial. Belanja bantuan sosial dianggarkan dalam APBD sesuai dengan kemampuan Keuangan Daerah setelah memprioritaskan pemenuhan belanja Urusan Pemerintahan Wajib dan Urusan Pemerintahan Pilihan, kecuali ditentukan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perulndang-undangan.

3) Belanja Tidak Terduga

Berdasarkan ketentuan Pasal 63 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah disebutkan bahwa Belanja tidak terduga merupakan pengeluaran anggaran atas Beban APBD untuk keadaan darurat termasuk keperluan mendesak serta pengembalian atas kelebihan pembayaran atas Penerimaan Daerah tahun-tahun sebelumnya. Dalam hal belanja tidak terduga sebagaimana dimaksud tidak mencukupi, menggunakan: a. dana dari hasil penjadwalan ulang capaian Program dan Kegiatan lainnya serta pengeluaran Pembiayaan dalam tahun anggaran berjalan; dan/atau b. memanfaatkan kas yang tersedia. Penjadwalan ulang capaian Program

dan Kegiatan sebagaimana dimaksud diformulasikan terlebih dahulu dalam Perubahan DPA SKPD.

Keadaan darurat sebagaimana dimaksud diatas meliputi:

1. Bencana alam, bencana non-alam, bencana sosial dan/atau kejadian luar biasa;
2. Pelaksanaan operasi pencarian dan pertolongan; dan/atau
3. Kerusakan sarana/prasarana yang dapat mengganggu kegiatan pelayanan publik.

Keperluan mendesak sebagaimana dimaksud diatas meliputi:

1. Kebutuhan daerah dalam rangka Pelayanan Dasar masyarakat yang anggarannya belum tersedia dalam tahun anggaran berjalan;
2. Belanja Daerah yang bersifat mengikat dan belanja yang bersifat wajib;
3. Pengeluaran Daerah yang berada diluar kendali Pemerintah Daerah dan tidak dapat diprediksikan sebelumnya, serta amanat peraturan perundangundangan; dan/atau
4. Pengeluaran Daerah lainnya yang apabila ditunda akan menimbulkan kerugian yang lebih besar bagi Pemerintah Daerah danl atau masyarakat.

Kriteria keadaan darurat dan keperluan mendesak tersebut ditetapkan dalam Perda tentang APBD tahun berkenaan.

4) Belanja Transfer

Berdasarkan ketentuan Pasal 55 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah disebutkan bahwa Belanja transfer merupakan pengeluaran uang dari Pemerintah Daerah kepada Pemerintah Daerah lainnya dan/atau dari Pemerintah Daerah kepada pemerintah desa. Belanja transfer dirinci atas jenis: belanja bagi hasil; dan belanja bantuan keuangan.

- a. Belanja bagi hasil

Berdasarkan ketentuan Pasal 66 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah disebutkan bahwa Belanja bagi hasil dianggarkan dalam APBD sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Pemerintah kabupaten/kota mengalokasikan belanja bagi hasil pajak daerah dan retribusi daerah kepada pemerintah desa paling sedikit 10% (sepuluh persen) dari rencana pendapatan pajak daerah dan retribusi daerah kabupaten/kota pada Tahun Anggaran 2020 dengan mempedomani Pasal 72 ayat (1) huruf c dan ayat (3) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa dan Pasal 97 Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa. Dalam hal terdapat pelampauan realisasi penerimaan target pajak daerah dan retribusi daerah kabupaten/kota Tahun Anggaran 2020 pada akhir tahun anggaran yang belum direalisasikan kepada pemerintah desa, dibayarkan pada tahun anggaran berikutnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Dari aspek teknis penganggaran, untuk belanja bagi hasil pajak daerah dan retribusi daerah dari pemerintah kabupaten/kota kepada pemerintah desa harus diuraikan ke dalam daftar pemerintah desa selaku penerima sebagai rincian obyek penerima bagi hasil pajak daerah dan retribusi daerah sesuai dengan kode rekening berkenaan.

b. Belanja bantuan keuangan

Berdasarkan ketentuan Pasal 67 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah disebutkan bahwa Belanja bantuan diberikan kepada Daerah lain dalam rangka kerja sama daerah, pemerataan peningkatan kemampuan keuangan, dan f atau tujuan tertentu lainnya. Bantuan keuangan dapat dianggarkan sesuai kemampuan Keuangan Daerah setelah memprioritaskan pemenuhan belanja Urusan Pemerintahan Wajib dan Urusan Pemerintahan Pilihan serta alokasi belanja yang diwajibkan oleh peraturan perundang-

undangan, kecuali ditentukan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Bantuan keuangan terdiri atas:

- a. Bantuan keuangan antar-Daerah provinsi;
- b. Bantuan keuangan antar-Daerah kabupaten/kota;
- c. Bantuan Keuangan Daerah provinsi ke Daerah kabupaten/kota di wilayahnya dan/atau Daerah kabupaten/ kota di luar wilayahnya;
- d. Bantuan Keuangan Daerah kabupaten/kota ke Daerah provinsinya dan/atau Daerah provinsi lainnya; dan/atau
- e. bantuan Keuangan Daerah provinsi atau kabupaten/ kota kepada desa.

Bantuan keuangan bersifat umum atau khusus. Peruntukan dan pengelolaan bantuan keuangan yang bersifat umum diserahkan kepada Pemerintah Daerah penerima bantuan. Peruntukan bantuan keuangan yang bersifat khusus ditetapkan oleh Pemerintah Daerah pemberi bantuan dan pengelolaannya diserahkan kepada penerima bantuan. Pemberi bantuan keuangan bersifat khusus dapat mensyaratkan penyediaan dana pendamping dalam APBD atau anggaran pendapatan dan belanja desa penerima bantuan.

Bantuan keuangan yang bersifat umum digunakan untuk mengatasi kesenjangan fiskal dengan menggunakan formula antara lain variabel: pendapatan daerah, jumlah penduduk, jumlah penduduk miskin dan luas wilayah yang ditetapkan dengan peraturan Kepala Daerah. Bantuan keuangan yang bersifat khusus digunakan untuk membantu capaian kinerja program prioritas Pemerintah Daerah penerima bantuan keuangan sesuai dengan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan penerima bantuan. Pemanfaatan bantuan keuangan yang bersifat khusus ditetapkan terlebih dahulu oleh pemberi bantuan.

Dari aspek teknis penganggaran, dalam APBD pemberi bantuan keuangan harus diuraikan daftar nama Pemerintah Daerah selaku penerima bantuan keuangan sebagai rincian obyek penerima bantuan keuangan sesuai dengan kode rekening berkenaan.

Pemerintah kabupaten/kota harus mengalokasikan alokasi dana untuk desa yang diterima dari APBN dalam jenis belanja bantuan keuangan kepada pemerintah desa dalam APBD kabupaten/kota Tahun Anggaran 2021 untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat dengan mempedomani Pasal 72 ayat (1) huruf b dan ayat (2) Undang- Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa dan Pasal 95 Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa.

Selain itu, pemerintah kabupaten/kota harus mengalokasikan Alokasi Dana Desa (ADD) untuk pemerintah desa dalam jenis belanja bantuan keuangan kepada pemerintah desa paling sedikit 10% (sepuluh persen) dari dana perimbangan yang diterima oleh kabupaten/kota dalam APBD Tahun Anggaran 2020 setelah dikurangi DAK sebagaimana diatur dalam Pasal 72 ayat (4) dan ayat (6) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa dan Pasal 96 Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa. Selanjutnya, pemerintah provinsi dan kabupaten/kota dapat memberikan bantuan keuangan lainnya kepada pemerintah desa, sebagaimana diatur dalam Pasal 72 ayat (1) huruf e Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa dan Pasal 98 Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6

Tahun 2014 tentang Desa dan Pasal 67 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah.

Dari aspek teknis penganggaran, dalam APBD kabupaten/kota pemberi bantuan keuangan, belanja bantuan keuangan tersebut harus diuraikan ke dalam obyek belanja bantuan keuangan alokasi dana untuk desa yang bersumber dari APBN dan belanja bantuan keuangan ADD yang bersumber dari APBD serta diuraikan ke dalam daftar nama pemerintah desa selaku penerima bantuan keuangan sebagai rincian obyek penerima bantuan keuangan sesuai dengan kode rekening berkenaan. Selanjutnya, dalam APBD pemerintah provinsi/kabupaten/kota pemberi bantuan keuangan, belanja bantuan keuangan tersebut harus diuraikan daftar nama pemerintah desa selaku penerima bantuan keuangan sebagai rincian obyek penerima bantuan keuangan sesuai dengan kode rekening berkenaan.

Plafon Anggaran Sementara Untuk Belanja Pegawai, Belanja Barang dan Jasa, Bunga, Subsidi, Hibah, Bantuan Sosial, Modal, Bagi Hasil, Bantuan Keuangan, Belanja Tidak Terduga Tahun Anggaran 2025

KODE	URAIAN	JUMLAH (Rp)
1	2	3
5	BELANJA DAERAH	
5.1	BELANJA OPERASI	1.001.644.859.772,00
5.1.01	Belanja Pegawai	570.606.991.045,00
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	390.587.493.422,00
5.1.04	Belanja Subsidi	1.147.190.000,00
5.1.05	Belanja Hibah	27.808.185.305,00
5.1.06	Belanja Bantuan Sosial	11.495.000.000,00
5.2	BELANJA MODAL	134.942.129.537,00
5.2.01	Belanja Modal Tanah	500.000.000,00
5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	25.987.010.416,00
5.2.03	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	51.453.234.093,00
5.2.04	Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi	54.437.858.364,00
5.2.05	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	2.564.026.664,00
5.3	BELANJA TIDAK TERDUGA	2.726.660.753,00
5.3.01	Belanja Tidak Terduga	2.726.660.753,00
5.4	BELANJA TRANSFER	127.318.489.469,00
5.4.01	Belanja Bagi Hasil	30.305.157.830,00
5.4.02	Belanja Bantuan Keuangan	97.013.331.639,00
Jumlah Belanja		1.266.632.139.531,00

BAB V

RENCANA PEMBIAYAAN DAERAH

Dalam konteks Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), pembiayaan daerah menempati posisi yang sangat strategis sebagai transaksi untuk mencapai keseimbangan anggaran dengan tetap memperhatikan misi untuk menciptakan kemakmuran masyarakat. Pembiayaan daerah meliputi penerimaan pembiayaan dan pengeluaran pembiayaan daerah. Kebijakan pembiayaan daerah timbul karena jumlah belanja daerah lebih besar dari pendapatan daerah, sehingga menimbulkan defisit.

APBD pada Tahun 2025 diproyeksikan mengalami defisit sebesar Rp.52.426.447.000,-. Upaya untuk menutup defisit anggaran tersebut, diutamakan berasal dari penerimaan Pembiayaan Daerah yang tidak akan menjadi beban bagi daerah di masa mendatang yang bersumber dari Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun sebelumnya. Dalam hal penerimaan pembiayaan untuk tahun 2025 Kebijakan pemerintah daerah adalah memanfaatkan penerimaan SiLPA tahun anggaran 2024, SiLPA dimaksud diprediksi dari hasil efisiensi pelaksanaan belanja dan kelebihan target pendapatan, yang selanjutnya diharapkan dapat menutup defisit tahun anggaran berjalan.

Sisa Lebih Perhitungan Anggaran tahun sebelumnya yaitu tahun 2024, diproyeksikan sebesar Rp.52.426.447.000,-. Di samping penerimaan pembiayaan, untuk tahun 2025 dari sisi pengeluaran Pembiayaan Daerah, tidak direncanakan/tidak ada. Target penerimaan pembiayaan daerah dan pengeluaran pembiayaan daerah terdapat pada tabel sebagai berikut :

Tabel V.I
PLAFON ANGGARAN SEMENTARA UNTUK PEMBIAYAAN

NO	URAIAN	PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp.)
	PEMBIAYAAN DAERAH	

NO	URAIAN	PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp.)
6.1.	Penerimaan Pembiayaan	52.426.447.000
6.1.01.	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Anggaran	52.426.447.000
6.1.02.	Pencairan Dana Cadangan	0
6.1.03.	Hasil Penjualan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	0
6.1.04.	Penerimaan Pinjaman Daerah	0
6.1.05.	Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman Daerah	0
6.1.06.	Penerimaan Pembiayaan Lainnya Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan	0
	Jumlah Penerimaan Pembiayaan	52.426.447.000
6.2.	Pengeluaran Pembiayaan	0
6.2.01.	Pembentukan Dana Cadangan	0
6.2.02.	Penyertaan Modal Daerah	0
6.2.03.	Pembayaran Cicilan Pokok Utang yang Jatuh Tempo	0
6.2.04.	Pemberian Pinjaman Daerah	0
6.2.05.	Pengeluaran Pembiayaan Lainnya Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan	0
	Jumlah Pengeluaran pembiayaan	0
	Pembiayaan Neto	52.426.447.000

BAB VI

PENUTUP

Demikian Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Kabupaten Bintan Tahun Anggaran 2025 disusun yang selanjutnya untuk dibahas dan disepakati bersama antara Pemerintah Kabupaten Bintan dengan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten. Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Tahun 2025 merupakan program prioritas dan patokan batas maksimal anggaran yang diberikan kepada Perangkat Daerah sebagai acuan dalam penyusunan RKA Perangkat Daerah yang memuat petunjuk dan ketentuan-ketentuan umum yang disepakati oleh Pemerintah Kabupaten Bintan dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Bintan sebagai pedoman dalam penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) Tahun Anggaran 2025.

Dalam hal terjadi perubahan pendapatan setelah KUA dan PPAS disepakati, maka :

1. Apabila perubahan tersebut terjadi karena kenaikan pendapatan, dapat digunakan untuk mendanai penambahan volume program/kegiatan prioritas Kabupaten Bintan dengan tidak merubah target kinerja program/kegiatan:
2. Apabila perubahan tersebut terjadi karena penurunan pendapatan, harus dilakukan rasionalisasi program/kegiatan yang bukan merupakan prioritas Kabupaten Bintan.

Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Tahun 2025 yang telah disepakati antara Bupati Bintan dengan DPRD Kabupaten Bintan menjadi pedoman penyusunan RAPBD Tahun Anggaran 2025, dengan tetap

mempertimbangkan kemungkinan penambahan atau pengurangan pendapatan/belanja/ pembiayaan ataupun program/kegiatan dari pagu anggaran sementara yang dilaksanakan ketika proses pembahasan RAPBD tanpa melakukan perubahan Nota Kesepakatan PPAS.

Bandar Seri Bentan, 15 Agustus 2024



ROBY KURNIAWAN, S.P.W.K